



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TAHUN 2022**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**



**Nomor : 11.A/LHP/XIX.MND/05/2023  
Tanggal : 8 Mei 2023**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara  
Jalan 17 Agustus No. 04 Manado 95113  
Telepon 0431-8880205 / Faksimile 0431-8880204**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TAHUN 2022**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**

**Nomor : 11.A/LHP/XIX.MND/05/2023  
Tanggal : 8 Mei 2023**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara  
Jalan 17 Agustus No. 04 Manado 95113  
Telepon 0431-8880205 / Faksimile 0431-8880204**

## DAFTAR ISI

	hlm.
DAFTAR ISI .....	i
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2022.....	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	iii
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN .....	v
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2022	

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TAHUN 2022**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 terdiri dari dua laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
  - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
  - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan;
  - c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah; dan
  - d. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Laporan ini memuat:
  - a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Sebelumnya.





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas

efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

### **Opini**

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **Laporan atas SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 11.B/LHP/XIX.MND/05/2023 tanggal 8 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

**Manado, 8 Mei 2023**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara  
Pengendali Teknis Pemeriksaan,**



*Coreman* **Coreman Maruli Tua S.E., M.Si., Ak., CA, ACPA**  
Register Negara Akuntan No. 492

## GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

### 1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

### 2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

### 3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

### 4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang memiliki 36 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

### 5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca per 31 Desember 2022;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2022;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

## 6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa



memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

#### **7. Jangka Waktu Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilakukan selama 30 hari mulai tanggal 12 Maret 2023 s.d. 10 April 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor 62/ST/VIII/03/2023 tanggal 8 Maret 2023.

#### **8. Batasan Pemeriksaan**

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/simpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

# LAPORAN KEUANGAN



## BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang Terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tutuyan, 08 Mei 2023

 **BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si.**



## Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan lahir dan batin sehingga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 ini, telah diselesaikan dengan sebaik-baiknya pada waktu yang telah ditentukan (*Timelines*) untuk memenuhi kebutuhan akan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh Program Kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

Pada prinsipnya bahwa sebagaimana Regulasi dalam hal penyajian Laporan Keuangan Daerah secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, ekonomis, efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan kepada aturan baik pemerintahan maupun kemasyarakatan yang berkelanjutan sejak dari awal tahun secara periodik baik itu laporan bulanan, triwulan semesteran maupun tahunan telah di susun sesuai realisasi anggaran dari SKPD sebagai Entitas Akuntansi selaku pelaksana program/kegiatan serta sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Entitas Pelaporan dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Sebagai dasar acuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022, disusun sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran; (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi anggaran SKPD/Pemerintah Daerah secara tersanding sehingga dapat menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai perturan perundang-undangan.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (LPSAL) memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- 3) Neraca; menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu .
- 4) Laporan Operasional; (LO), menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- 5) Laporan Arus Kas; (LAK), menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal tertentu.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas; (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Penyusunan Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan informasi Akuntansi mengenai Perencanaan, penganggaran, pendanaan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam periode tertentu yang disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan disajikan berdasarkan dengan maksud memenuhi serta menaikkan tingkat pemeriksaan secara rinci dalam pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak mengenai kondisi keuangan, aset, maupun kewajiban daerah sebagai bentuk wujud Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sangat dibutuhkan.

Adapun maksud disusunnya LKPD ini adalah sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran 2022 dan sebagai tolak ukur publik dimana LKPD ini dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan pembangunan didaerah ini maupun sebagai pembanding dari

daerah lain dengan tujuan utama terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*Clean*) yang sistematis dan terstruktur dalam suatu periode pelaporan akuntansi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penyusun telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan Laporan ini namun manusia hanyalah sebatas makhluk yang punya keterbatasan sehingga untuk menyempurnakan diharapkan bantuan semua pihak kiranya dapat memberikan masukan/koreksi guna kesempurnaan dan kelayakan dalam pemanfaatan laporan keuangan ini.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 ini kami susun, besar harapan kiranya Laporan ini dapat ditopang sepenuhnya oleh seluruh komponen anak bangsa di daerah ini sehingga akan terjalin sinergitas positif untuk mengubah wajah daerah kearah yang semakin baik dan berdaya saing menggambarkan identitas daerah Bolaang Mongondow Timur dimasa kini dan yang akan datang di segala bidang.

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**  
**SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si.**



## Daftar isi

Kata Pengantar .....	i
Pernyataan Tanggung Jawab .....	ii
Daftar isi .....	iv
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar .....	xxii
Daftar Grafik .....	xxiii
Daftar Lampiran .....	xxiv
Face OFF .....	
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	2
1.2.Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
1.3.Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	7
BAB II Gambaran Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 .....	9
2.1.Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.....	9
2.2.Letak Geografis.....	9
2.3.Visi dan Misi.....	10
2.4.Organisasi dan Personalia .....	11
2.4.1.Urusan, Bidang, Unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sub Unit .....	11
2.4.2.Pejabat Pemerintah Daerah .....	13
BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD .....	15
3.1.Ekonomi Makro .....	15
3.1.1.Tingkat Kemiskinan.....	15
3.1.2.Tingkat Pengangguran Terbuka .....	17
3.1.3.Indeks Gini (Gini Ratio) .....	18
3.1.4.Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	19
3.1.5.Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	21
3.1.6.Inflasi .....	22
3.1.7.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	23
3.2.Kebijakan Keuangan .....	26
3.2.1.Kebijakan Pendapatan.....	26

3.2.2.Kebijakan Belanja.....	27
3.2.3.Kebijakan Transfer.....	28
3.2.4.Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	28
3.2.5.Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	29
3.2.6.Pencapaian Target Kinerja APBD .....	29
3.3.Mandatory Spending .....	42
3.4.Program Prioritas Nasional .....	45
3.5.Stunting .....	46
<b>BAB IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....</b>	<b>48</b>
4.1.Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	48
4.2.Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan .....	50
<b>BAB V Kebijakan Akuntansi.....</b>	<b>51</b>
5.1.Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan .....	52
5.2.Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	53
5.3.Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	53
5.3.1.Pengukuran Pendapatan .....	53
5.3.2.Pengukuran Beban dan Belanja .....	54
5.3.3.Pengukuran Transfer .....	61
5.3.4.Pengukuran Pembiayaan .....	62
5.3.5.Pengukuran Kas dan Setara Kas .....	62
5.3.6.Pengukuran Piutang .....	63
5.3.7.Pengakuan Persediaan.....	68
5.3.8.Pengakuan Investasi.....	69
5.3.9.Pengukuran Aset Tetap .....	71
5.3.10.Pengukuran Kewajiban .....	74
5.3.11.Pengukuran Ekuitas .....	75
5.4.Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP .....	75
5.4.1.Koreksi Kesalahan .....	75
<b>BAB VI Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan .....</b>	<b>77</b>
6.1.Laporan Realisasi Anggaran .....	77
6.1.1.Pendapatan Daerah.....	77

6.1.2. Belanja Daerah.....	106
6.1.3. Transfer .....	138
6.1.4. SURPLUS/(DEFISIT) .....	140
6.1.5. Pembiayaan Daerah .....	140
6.1.6. Pembiayaan Netto .....	142
6.1.7. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).....	142
6.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) .....	143
6.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal.....	143
6.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.....	144
6.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA).....	147
6.2.4. Lain - Lain.....	148
6.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir .....	150
6.3. Neraca .....	151
6.3.1. Aset .....	151
6.3.2. Kewajiban .....	197
6.3.3. Ekuitas.....	203
6.4. Laporan Operasional .....	205
6.4.1. Kegiatan Operasional .....	205
6.4.2. Surplus/Defisit dari Operasi.....	262
6.4.3. Kegiatan Non Operasional .....	262
6.4.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	263
6.4.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa .....	264
6.4.6. Surplus/Defisit – LO .....	264
6.5. Laporan Arus Kas .....	266
6.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi .....	266
6.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi .....	268
6.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Investasi.....	269
6.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi .....	270
6.5.5. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris .....	270
6.5.6. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris .....	273
6.5.7. Kenaikan/ (Penurunan) Kas .....	274



6.5.8.Saldo Akhir Kas .....	274
6.6.Laporan Perubahan Ekuitas.....	280
6.6.1.Ekuitas Awal.....	280
6.6.2.Surplus/Defisit – LO .....	280
6.6.3.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar .....	281
6.6.4.Ekuitas Akhir .....	284
<b>BAB VII Informasi Tambahan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022.....</b>	<b>285</b>
7.1.Penjelasan Atas Dana – Dana Non APBD .....	285
7.1.1.Dana Tugas Pembantuan.....	285
7.1.2.Dana Dekonsentrasi .....	286
7.1.3.Dana Bantuan Sosial PKH.....	287
7.1.4.Bantuan Operasional Sekolah .....	287
7.1.5.Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD).....	288
7.1.6.Dana Kedaruratan Kesehatan Masyarakat .....	289
7.1.7.Penyertaan Modal Pada PT. Bank SulutGo .....	289
<b>BAB VIII Penutup.....</b>	<b>290</b>
Lampiran	

## Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Letak Geografis.....	9
Tabel 2. 2 Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kab. Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022.....	10
Tabel 2. 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022.....	11
Tabel 2. 4 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .....	13
Tabel.3. 1 Persentase Penduduk Miskin.....	16
Tabel.3. 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan .....	16
Tabel.3. 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan.....	17
Tabel.3. 4 Data Kemiskinan.....	17
Tabel.3. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka .....	18
Tabel.3. 6 Gini Ratio.....	19
Tabel.3. 7 Indeks Pembangunan Manusia.....	20
Tabel.3. 8 Rincian Indikator Indeks Pembangunan Manusia.....	20
Tabel.3. 9 Data Indeks Pembangunan Manusia .....	21
Tabel.3. 10 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	22
Tabel.3. 11 Tingkat Inflasi .....	23
Tabel.3. 12 PDRB Atas Dasar Harga Konstan.....	23
Tabel.3. 13 Program Prioritas Nasional .....	46
Tabel.3. 14 Stunting .....	47
Tabel 4. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	49
Tabel 4. 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022.....	49
Tabel 4. 3 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022.....	49
Tabel.5. 1 Tabel Jenis Piutang .....	66
Tabel 6.1. 1 Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	77
Tabel 6.1. 2 Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	78

Tabel 6.1. 3 Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	79
Tabel 6.1. 4 Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	79
Tabel 6.1. 5 Pajak Hotel Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	81
Tabel 6.1. 6 Pajak Restoran Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	81
Tabel 6.1. 7 Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	82
Tabel 6.1. 8 Pajak Reklame Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	82
Tabel 6.1. 9 Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	83
Tabel 6.1. 10 Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	83
Tabel 6.1. 11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	84
Tabel 6.1. 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	85
Tabel 6.1. 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	85
Tabel 6.1. 14 Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	87
Tabel 6.1. 15 Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	88
Tabel 6.1. 16 Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	88
Tabel 6.1. 17 Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	89
Tabel 6.1. 18 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	90
Tabel 6.1. 19 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	91
Tabel 6.1. 20 Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	91
Tabel 6.1. 21 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	92
Tabel 6.1. 22 Jasa Giro Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	93
Tabel 6.1. 23 Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2021 .....	93
Tabel 6.1. 24 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	94

Tabel 6.1. 25 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	95
Tabel 6.1. 26 Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	96
Tabel 6.1. 27 Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	96
Tabel 6.1. 28 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	97
Tabel 6.1. 29 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	98
Tabel 6.1. 30 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	98
Tabel 6.1. 31 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022 dan 2021...99	
Tabel 6.1. 32 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	99
Tabel 6.1. 33 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	101
Tabel 6.1. 34 Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	102
Tabel 6.1. 35 Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	102
Tabel 6.1. 36 Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	103
Tabel 6.1. 37 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	104
Tabel 6.1. 38 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	104
Tabel 6.1. 39 Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	105
Tabel 6.1. 40 Lain-lain Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	106
Tabel 6.1. 41 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	106
Tabel 6.1. 42 Rincian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	107
Tabel 6.1. 43 Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	107
Tabel 6.1. 44 Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	108
Tabel 6.1. 45 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	109
Tabel 6.1. 46 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	110

Tabel 6.1. 47 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	110
Tabel 6.1. 48 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	111
Tabel 6.1. 49 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	112
Tabel 6.1. 50 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	113
Tabel 6.1. 51 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	114
Tabel 6.1. 52 Belanja Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	114
Tabel 6.1. 53 Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	115
Tabel 6.1. 54 Belanja Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	116
Tabel 6.1. 55 Belanja Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	118
Tabel 6.1. 56 Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	119
Tabel 6.1. 57 Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	120
Tabel 6.1. 58 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	120
Tabel 6.1. 59 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	121
Tabel 6.1. 60 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	122
Tabel 6.1. 61 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	122
Tabel 6.1. 62 Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	123
Tabel 6.1. 63 Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	123
Tabel 6.1. 64 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, .....	124
Tabel 6.1. 65 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	129
Tabel 6.1. 66 Partai Politik Penerima Bantuan Kuangan Tahun Anggaran 2022 .....	129
Tabel 6.1. 67 Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	130



Tabel 6.1. 68 Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	130
Tabel 6.1. 69 Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	131
Tabel 6.1. 70 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	132
Tabel 6.1. 71 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	134
Tabel 6.1. 72 Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	135
Tabel 6.1. 73 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	136
Tabel 6.1. 74 Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	137
Tabel 6.1. 75 Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	138
Tabel 6.1. 76 Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	138
Tabel 6.1. 77 Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	138
Tabel 6.1. 78 Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	139
Tabel 6.1. 79 Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	140
Tabel 6.1. 80 Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	140
Tabel 6.1. 81 Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	141
Tabel 6.1. 82 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	141
Tabel 6.1. 83 Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	142
Tabel 6.1. 84 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	142
Tabel 6.2. 1 Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	143
Tabel 6.2. 2 Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal.....	143
Tabel 6.2. 3 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan .....	144
Tabel 6.2. 4 Rincian Saldo Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.....	144
Tabel 6.2. 5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	147
Tabel 6.2. 6 Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA).....	148
Tabel 6.2. 7 Koreksi SILPA Kas Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	148

Tabel 6.2. 8 Rincian Koreksi SILPA Kas .....	148
Tabel 6.2. 9 Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 dan 2021 .....	150
Tabel 6.2. 10 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir .....	150
Tabel 6.3. 1 Neraca Tahun 2022 – 2021 .....	151
Tabel 6.3. 2 Aset Tahun 2022 – 2021 .....	151
Tabel 6.3. 3 Aset Lancar Tahun 2022 - 2021 .....	152
Tabel 6.3. 4 Kas Di Kas Daerah Tahun 2022 - 2021 .....	153
Tabel 6.3. 5 Rincian Selisih Buku Pembantu Kas Daerah (BKU) dan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).....	154
Tabel 6.3. 6 Kas Di Bendahara Penerimaan Tahun 2022 - 2021 .....	155
Tabel 6.3. 7 Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2022 – 2021.....	155
Tabel 6.3. 8 Kas Dana BOS Tahun 2022 - 2021 .....	156
Tabel 6.3. 9 Rincian Kas Dana BOS Tahun 2022 - 2021 .....	157
Tabel 6.3. 10 Rincian Kas Dana Kapitasi Pada FKTP Tahun 2022 - 2021 .....	159
Tabel 6.3. 11 Rincian Kas Lainnya Tahun 2022 – 2021 .....	160
Tabel 6.3. 12 Rincian Piutang Pajak Daerah Tahun 2022 – 2021.....	162
Tabel 6.3. 13 Mutasi Penambahan (Pengurangan) Piutang Pajak Daerah .....	163
Tabel 6.3. 14 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 – 2021 ....	165
Tabel 6.3. 15 Piutang Lain – Lain PAD yang Sah Tahun 2022 – 2021 .....	165
Tabel 6.3. 16 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2022 – 2021 .....	166
Tabel 6.3. 17 Piutang Lainnya Tahun 2022 – 2021 .....	167
Tabel 6.3. 18 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022 – 2021 .....	167
Tabel 6.3. 19 Penyisihan Piutang Tahun 2022 – 2021 .....	168
Tabel 6.3. 20 Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2022 – 2021.....	169
Tabel 6.3. 21 Klasifikasi Umur Piutang Pajak Daerah.....	169
Tabel 6.3. 22 Piutang Pajak Daerah Neto Tahun 2022 .....	170

Tabel 6.3. 23 Klasifikasi Umur Piutang Transfer Antar Daerah.....	170
Tabel 6.3. 24 Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2022 – 2021 .....	171
Tabel 6.3. 25 Piutang Piutang Transfer Antar Daerah Neto Tahun 2022 .....	171
Tabel 6.3. 26 Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 – 2021.....	171
Tabel 6.3. 27 Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 – 2021 .....	172
Tabel 6.3. 28 Persediaan Tahun 2022 – 2021 .....	173
Tabel 6.3. 29 Rincian Barang Pakai Habis Tahun 2022 – 2021.....	173
Tabel 6.3. 30 Bahan Tahun 2022 – 2021 .....	173
Tabel 6.3. 31 Rincian Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Tahun 2022 – 2021.....	174
Tabel 6.3. 32 Obat-Obatan Tahun 2022 – 2021 .....	174
Tabel 6.3. 33 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Tahun 2022 – 2021 .....	175
Tabel 6.3. 34 Investasi Jangka Panjang Permanen Tahun 2022 – 2021.....	176
Tabel 6.3. 35 Aset Tetap Tahun 2022 – 2021 .....	177
Tabel 6.3. 36 Rincian Aset Tetap Tahun 2022 – 2021.....	177
Tabel 6.3. 37 Tanah Tahun 2022 – 2021.....	178
Tabel 6.3. 38 Mutasi Tanah.....	178
Tabel 6.3. 39 Peralatan dan Mesin Tahun 2022 – 2021 .....	180
Tabel 6.3. 40 Mutasi Peralatan dan Mesin .....	180
Tabel 6.3. 41 Gedung dan Bangunan Tahun 2022 – 2021 .....	183
Tabel 6.3. 42 Mutasi Gedung Dan Bangunan .....	184
Tabel 6.3. 43 Jalan, Jaringan, Dan Irigasi Tahun 2022 - 2021 .....	187
Tabel 6.3. 44 Mutasi Jalan dan Jaringan .....	187
Tabel 6.3. 45 Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 – 2021 .....	188
Tabel 6.3. 46 Mutasi Aset Tetap Lainnya .....	189
Tabel 6.3. 47 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 – 2021.....	191
Tabel 6.3. 48 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	191

Tabel 6.3. 49 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 – 2021 .....	192
Tabel 6.3. 50 Akumulasi Penyusutan 2022 – 2021 .....	193
Tabel 6.3. 51 Mutasi Akumulasi Penyusutan.....	193
Tabel 6.3. 52 Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 – 2021 .....	194
Tabel 6.3. 53 Aset Lainnya Tahun 2022 – 2021 .....	194
Tabel 6.3. 54 Tagihan Jangka Panjang Tahun 2022 – 2021.....	195
Tabel 6.3. 55 Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 – 2021 .....	196
Tabel 6.3. 56 Aset Lain – Lain Tahun 2022 – 2021.....	196
Tabel 6.3. 57 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 – 2021 .....	197
Tabel 6.3. 58 Kewajiban Tahun 2022 – 2021 .....	198
Tabel 6.3. 59 Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2022 – 2021.....	198
Tabel 6.3. 60 Rincian Utang Perhitungan Pihak ketiga (PFK) Tahun 2022 – 2021 .....	199
Tabel 6.3. 61 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah .....	199
Tabel 6.3. 62 Mutasi Utang Pihak Ketiga (PFK) .....	202
Tabel 6.3. 63 Utang Belanja Tahun 2022 – 2021.....	202
Tabel 6.3. 64 Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022 – 2021 .....	203
Tabel 6.3. 65 Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya .....	203
Tabel 6.3. 66 Ekuitas Tahun 2022 – 2021.....	204
Tabel 6.4. 1 Pendapatan – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	205
Tabel 6.4. 2 Rincian Pendapatan – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	205
Tabel 6.4. 3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	206
Tabel 6.4. 4 Pajak Daerah-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	207
Tabel 6.4. 5 Pajak Hotel-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	208
Tabel 6.4. 6 Mutasi Tambah (Kurang) Pajak Hotel Tahun 2022 .....	208
Tabel 6.4. 7 Pajak Restoran-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	208

Tabel 6.4. 8 Mutasi Tambah (Kurang) Pajak Restoran Tahun 2022.....	209
Tabel 6.4. 9 Pajak Hiburan-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	209
Tabel 6.4. 10 Mutasi Tambah (Kurang) Pajak Hiburan Tahun 2022.....	209
Tabel 6.4. 11 Pajak Reklame-LO Tahun 2022 – Tahun 2021.....	210
Tabel 6.4. 12 Mutasi Tambah (Kurang) Pajak Reklame Tahun 2022.....	210
Tabel 6.4. 13 Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	211
Tabel 6.4. 14 Mutasi Tambah (Kurang) Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022 .....	211
Tabel 6.4. 15 Pajak Sarang Burung Walet-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	212
Tabel 6.4. 16 Mutasi Tambah (Kurang) Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2022 .....	212
Tabel 6.4. 17 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	213
Tabel 6.4. 18 Mutasi Tambah (Kurang) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022.....	213
Tabel 6.4. 19 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	214
Tabel 6.4. 20 Mutasi Tambah (Kurang) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2022.....	214
Tabel 6.4. 21 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	215
Tabel 6.4. 22 Mutasi Tambah (Kurang) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2022.....	215
Tabel 6.4. 23 Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	216
Tabel 6.4. 24 Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	216
Tabel 6.4. 25 Mutasi Tambah (Kurang) Retribusi Jasa Umum Tahun 2022 .....	217
Tabel 6.4. 26 Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	217
Tabel 6.4. 27 Mutasi Tambah (Kurang) Retribusi Jasa Usaha Tahun 2022.....	218
Tabel 6.4. 28 Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	218
Tabel 6.4. 29 Mutasi Tambah (Kurang) Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2022.....	218
Tabel 6.4. 30 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.....	219



Tabel 6.4. 31 Mutasi Tambah (Kurang) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022.....	219
Tabel 6.4. 32 Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	220
Tabel 6.4. 33 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021....	221
Tabel 6.4. 34 Mutasi Tambah (Kurang) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2022.....	221
Tabel 6.4. 35 Jasa Giro-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	222
Tabel 6.4. 36 Mutasi Tambah (Kurang) Jasa Giro Tahun 2022.....	222
Tabel 6.4. 37 Pendapatan Bunga-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	223
Tabel 6.4. 38 Mutasi Tambah (Kurang) Pendapatan Bunga Tahun 2022 .....	223
Tabel 6.4. 39 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	224
Tabel 6.4. 40 Mutasi Tambah (Kurang) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2022.....	224
Tabel 6.4. 41 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	225
Tabel 6.4. 42 Mutasi Tambah (Kurang) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2022.....	225
Tabel 6.4. 43 Pendapatan dari Pengembalian-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	226
Tabel 6.4. 44 Mutasi Tambah (Kurang) Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2022.....	226
Tabel 6.4. 45 Lain – Lain PAD Yang Sah Lainnya – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	227
Tabel 6.4. 46 Mutasi Tambah (Kurang) Lain – Lain PAD Yang Sah Lainnya Tahun 2022.....	227
Tabel 6.4. 47 Pendapatan Transfer-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	228
Tabel 6.4. 48 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	229
Tabel 6.4. 49 Dana Perimbangan-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	229
Tabel 6.4. 50 Mutasi Tambah (Kurang) Dana Perimbangan Tahun 2022 .....	230
Tabel 6.4. 51 Dana Insentif Daerah (DID)-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	231
Tabel 6.4. 52 Mutasi Tambah (Kurang) Dana Perimbangan Tahun 2022 .....	232

Tabel 6.4. 53 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	232
Tabel 6.4. 54 Pendapatan Bagi Hasil-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	233
Tabel 6.4. 55 Mutasi Tambah (Kurang) Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2022 .....	233
Tabel 6.4. 56 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	235
Tabel 6.4. 57 Pendapatan Hibah-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	235
Tabel 6.4. 58 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	238
Tabel 6.4. 59 Beban Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	240
Tabel 6.4. 60 Rincian Beban Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	240
Tabel 6.4. 61 Beban Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	241
Tabel 6.4. 62 Beban Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	242
Tabel 6.4. 63 Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	242
Tabel 6.4. 64 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	243
Tabel 6.4. 65 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	244
Tabel 6.4. 66 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	244
Tabel 6.4. 67 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	245
Tabel 6.4. 68 Beban Persediaan Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	246
Tabel 6.4. 69 Beban Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	246
Tabel 6.4. 70 Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	248
Tabel 6.4. 71 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	248
Tabel 6.4. 72 Beban Hibah Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	249
Tabel 6.4. 73 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	250
Tabel 6.4. 74 Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	253
Tabel 6.4. 75 Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tahun 2022 .....	254

Tabel 6.4. 76 Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	255
Tabel 6.4. 77 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	255
Tabel 6.4. 78 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	255
Tabel 6.4. 79 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	256
Tabel 6.4. 80 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	257
Tabel 6.4. 81 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	257
Tabel 6.4. 82 Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	257
Tabel 6.4. 83 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	258
Tabel 6.4. 84 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	259
Tabel 6.4. 85 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	260
Tabel 6.4. 86 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	260
Tabel 6.4. 87 Beban Transfer Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	261
Tabel 6.4. 88 Beban Lain - Lain Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	262
Tabel 6.4. 89 Surplus/Defisit Dari Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	262
Tabel 6.4. 90 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	264
Tabel 6.4. 91 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	264
Tabel 6.4. 92 Surplus/Defisit - LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	265
Tabel 6.5. 1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	266
Tabel 6.5. 2 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	267
Tabel 6.5. 3 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	267
Tabel 6.5. 4 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	268
Tabel 6.5. 5 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	268
Tabel 6.5. 6 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	269
Tabel 6.5. 7 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	269
Tabel 6.5. 8 Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	270

Tabel 6.5. 9 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	270
Tabel 6.5. 10 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	271
Tabel 6.5. 11 Rincian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2022 dan Tahun 2021....	271
Tabel 6.5. 12 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	272
Tabel 6.5. 13 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	272
Tabel 6.5. 14 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	272
Tabel 6.5. 15 Koreksi SiLPA Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	273
Tabel 6.5. 16 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	273
Tabel 6.5. 17 Kenaikan / (Penurunan) Kas Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	274
Tabel 6.5. 18 Saldo Akhir Kas Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	274
Tabel 6.5. 19 Kas di Kas Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	275
Tabel 6.5. 20 Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	275
Tabel 6.5. 21 Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	275
Tabel 6.5. 22 Kas Dana BOS Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	276
Tabel 6.5. 23 Kas Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	279
Tabel 6.5. 24 Kas Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	279
Tabel 6.6. 1 Ekuitas Awal Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	280
Tabel 6.6. 2 Surplus/Defisit – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	280
Tabel 6.6. 3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	281
Tabel 6.6. 4 Ekuitas Akhir Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	284
Tabel 7. 1 Dana Tugas Pembantuan Tahun 2022.....	285
Tabel 7. 2 Rincian Dana Tugas Pembantuan Tahun 2022 .....	286
Tabel 7. 3 Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022.....	286
Tabel 7. 4 Rincian Dekonsentrasi Tahun 2022 pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.....	287

Tabel 7. 5 Bantuan Sosial PKH.....	287
Tabel 7. 6 Rincian Bantuan Sosial PKH .....	287
Tabel 7. 7 Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah .....	288
Tabel 7. 8 Bantuan Operasional Penyelenggaraan BOP Paud .....	288
Tabel 7. 9 Dana Kedaruratan Kesehatan Masyarakat .....	289



**Daftar Gambar**

Gambar 2. 1 Peta Kabupaen Bolaang Mongondow Timur ..... 10

**Daftar Grafik**

Grafik 3. 1 PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Timur .....	24
Grafik 3. 2 Indeks Implisit PDRB Tahun Dasar 2020 - 2022 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.....	24
Grafik 3. 3 PDRB Bruto per kapita Kabupaten Bolaang Mongondow Timur .....	25
Grafik 3. 4 Kontribusi Lapangan Usaha Kab. Bolaang Mongondow Timur .....	26

## Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Program Prioritas Nasional
- Lampiran 2 Data Stunting
- Lampiran 3 Belanja Modal Per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- Lampiran 4 Rincian Bagi Hasil
- Lampiran 5 Rincian Alokasi Dana Desa (ADD)
- Lampiran 6 Rincian Dana Desa (DD)
- Lampiran 7 Piutang Pajak Daerah – Pajak Reklame
- Lampiran 8 Piutang Pajak Daerah – Pajak Penerangan Jalan Umum
- Lampiran 9 Piutang Pajak Daerah – Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- Lampiran 10 Piutang Pajak Daerah – Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
- Lampiran 11 Rincian Persediaan
- Lampiran 12 Aset Tetap
- Lampiran 13 Aset Tetap Tanah Tahun 2022
- Lampiran 14 Aset Tetap Peralatan Mesin Tahun 2022
- Lampiran 15 Rincian Penghapusan Aset Tetap
- Lampiran 16 Aset Tetap Gedung Bangunan Tahun 2022
- Lampiran 17 Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun 2022
- Lampiran 18 Aset Tetap Lainnya Tahun 2022
- Lampiran 19 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022
- Lampiran 20 Akumulasi Penyusutan Tahun 2022
- Lampiran 21 Utang Belanja Pegawai - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja/TPP
- Lampiran 22 Utang Belanja Pegawai – Selisih Gaji
- Lampiran 23 Utang Belanja Barang Dan Jasa - Insentif/Upah Pungut Pajak Daerah
- Lampiran 24 Utang Belanja Barang Dan Jasa - Tenaga Harian Lepas / Honorer
- Lampiran 25 Utang Belanja Barang Dan Jasa - Tagihan Belanja

Lampiran 26 Utang Jangka Pendek Lainnya

Lampiran 27 Utang Jangka Pendek Lainnya Atas Saldo Kas Lainnya

Lampiran 28 Beban Penyusutan Dan Amortisasi Per SKPD

## Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR</b> <b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b> <b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021</b>					
(Dalam Rupiah)					
U R A I A N	REF.	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
<b>PENDAPATAN</b>	<b>6.1.1</b>	<b>528.232.849.620,00</b>	<b>531.651.652.684,00</b>	<b>100,65</b>	<b>556.390.481.151,99</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>6.1.1.1</b>	<b>12.602.957.279,00</b>	<b>12.890.096.650,00</b>	<b>102,28</b>	<b>13.365.205.966,99</b>
Pendapatan Pajak Daerah	6.1.1.1.1	7.608.173.350,00	7.804.348.931,00	102,58	5.999.345.024,00
Pendapatan Retribusi Daerah	6.1.1.1.2	740.000.000,00	397.832.320,00	53,76	280.887.019,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.1.1.1.3	948.010.307,00	948.010.307,00	100,00	1.098.472.126,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.1.1.1.4	3.306.773.622,00	3.739.905.092,00	113,10	5.986.501.797,99
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>6.1.1.2</b>	<b>500.829.677.460,00</b>	<b>505.854.623.787,00</b>	<b>101,00</b>	<b>533.319.557.185,00</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>6.1.1.2.1</b>	<b>482.545.155.409,00</b>	<b>484.731.282.023,00</b>	<b>100,45</b>	<b>519.209.667.899,00</b>
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>6.1.1.2.1</b>	<b>418.363.117.409,00</b>	<b>420.549.244.023,00</b>	<b>100,52</b>	<b>424.545.952.899,00</b>
Bagi Hasil Pajak		8.678.438.531,00	9.147.792.836,00	105,41	10.135.720.264,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		16.995.885.797,00	25.609.303.235,00	150,68	17.790.259.831,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		324.405.495.000,00	324.032.723.653,00	99,89	324.042.794.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		37.845.471.081,00	37.682.369.087,00	99,57	44.856.481.650,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik		30.437.827.000,00	24.077.055.212,00	79,10	27.720.697.154,00
<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>6.1.1.2.2</b>	<b>6.220.649.000,00</b>	<b>6.220.649.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25.721.357.000,00</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>6.1.1.2.3</b>	<b>57.961.389.000,00</b>	<b>57.961.389.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68.942.358.000,00</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>6.1.1.2.4</b>	<b>18.284.522.051,00</b>	<b>21.123.341.764,00</b>	<b>115,53</b>	<b>14.109.889.286,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		18.284.522.051,00	21.123.341.764,00	115,53	14.109.889.286,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>6.1.1.3</b>	<b>14.800.214.881,00</b>	<b>12.906.932.247,00</b>	<b>87,21</b>	<b>9.705.718.000,00</b>
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.1.1.3.1	14.800.214.881,00	12.906.932.247,00	87,21	9.705.718.000,00
<b>BELANJA</b>	<b>6.1.2</b>	<b>477.036.337.393,00</b>	<b>437.028.473.268,92</b>	<b>91,61</b>	<b>423.113.625.781,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.1.2.1</b>	<b>392.300.886.251,00</b>	<b>366.844.266.189,92</b>	<b>93,51</b>	<b>358.110.880.017,00</b>
Belanja Pegawai	6.1.2.1.1	222.661.489.866,00	213.765.733.155,00	96,00	204.936.447.375,00
Belanja Barang dan Jasa	6.1.2.1.2	155.727.330.435,00	140.769.569.584,92	90,39	144.611.926.961,00
Belanja Hibah	6.1.2.1.3	4.645.816.020,00	3.096.894.020,00	66,66	6.775.705.681,00
Belanja Bantuan Sosial	6.1.2.1.4	9.266.249.930,00	9.212.069.430,00	99,42	1.786.800.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6.1.2.2</b>	<b>83.477.364.212,00</b>	<b>70.184.207.079,00</b>	<b>84,08</b>	<b>64.769.501.202,00</b>
Belanja Modal Tanah	6.1.2.2.1	237.260.000,00	78.875.000,00	33,24	39.175.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.1.2.2.2	16.674.366.934,00	10.743.662.655,00	64,43	22.681.592.476,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.1.2.2.3	18.317.658.062,00	16.259.270.341,00	88,76	21.959.213.802,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.1.2.2.4	46.716.913.310,00	42.003.471.945,00	89,91	19.319.812.253,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.1.2.2.5	1.512.295.906,00	1.080.077.138,00	71,42	769.707.671,00
Belanja Modal Aset Lainnya	6.1.2.2.6	18.870.000,00	18.850.000,00	99,89	0,00

*Handwritten signature/initials*


U R A I A N	REF.	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>6.1.2.3</b>	<b>1.258.086.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.244.562,00</b>
Belanja Tidak Terduga		1.258.086.930,00	0,00	0,00	233.244.562,00
<b>TRANSFER</b>	<b>6.1.3</b>	<b>92.998.070.735,00</b>	<b>92.919.336.584,00</b>	<b>99,92</b>	<b>104.343.665.731,00</b>
<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>6.1.3.1</b>	<b>834.817.335,00</b>	<b>753.406.250,00</b>	<b>90,25</b>	<b>472.166.033,00</b>
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		834.817.335,00	753.406.250,00	90,25	472.166.033,00
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>6.1.3.2</b>	<b>92.163.253.400,00</b>	<b>92.165.930.334,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103.871.499.698,00</b>
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		92.163.253.400,00	92.165.930.334,00	100,00	103.871.499.698,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>6.1.4</b>	<b>(41.801.558.508,00)</b>	<b>1.703.842.831,08</b>	<b>(4,08)</b>	<b>28.933.189.639,99</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>6.1.5</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>6.1.5.1</b>	<b>41.801.558.508,00</b>	<b>41.826.670.522,95</b>	<b>100,06</b>	<b>12.868.368.868,12</b>
Penggunaan SiLPA	6.1.5.1.1	41.801.558.508,00	41.826.670.522,95	100,06	12.868.368.868,12
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>6.1.6</b>	<b>41.801.558.508,00</b>	<b>41.826.670.522,95</b>	<b>100,06</b>	<b>12.868.368.868,12</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)</b>	<b>6.1.7</b>	<b>0,00</b>	<b>43.530.513.354,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41.801.558.508,11</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.


**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**  
**SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si.**



## Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)


 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR</b> <b>LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH</b> Per 31 Desember 2022 dan 2021			
(Dalam Rupiah)			
URAIAN	REF.	2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	6.2.1	41.801.558.508,11	12.881.941.474,12
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	6.2.2	41.826.670.522,95	12.868.368.868,12
<b>Sub Total</b>		<b>(25.112.014,84)</b>	<b>13.572.606,00</b>
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	6.2.3	43.530.513.354,03	41.801.558.508,11
<b>Sub Total</b>		<b>43.505.401.339,19</b>	<b>41.815.131.114,11</b>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Lain-lain	6.2.4	25.112.014,84	(13.572.606,00)
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>6.2.5</b>	<b>43.530.513.354,03</b>	<b>41.801.558.508,11</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.


**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**


**SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si.**

## Neraca

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR</b> <b>NERACA</b> Per 31 Desember 2022 dan 2021			
(Dalam Rupiah)			
URAIAN	REF.	2022	2021
<b>ASET</b>	<b>6.3.1</b>		
<b>ASET LANCAR</b>	<b>6.3.1.1</b>		
Kas di Kas Daerah	6.3.1.1.1	43.442.169.605,11	41.944.359.871,11
Kas di Bendahara Penerimaan	6.3.1.1.2	38.019.915,00	15.330.119,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.3.1.1.3	4.342.806,00	0,00
Kas Dana BOS	6.3.1.1.4	10.360.201,00	187.221.725,40
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	6.3.1.1.5	35.620.826,92	31.436.961,00
Kas Lainnya	6.3.1.1.6	508.837.118,11	1.526.992,70
Piutang Pajak Daerah	6.3.1.1.7	611.636.288,00	337.011.194,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.3.1.1.8	1.409.788.093,00	948.010.307,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	6.3.1.1.9	23.684.092,26	28.410.959,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	6.3.1.1.10	9.992.403.561,00	11.295.402.056,00
Piutang Lainnya	6.3.1.1.11	174.111.111,11	1.787.727,00
Penyisihan Piutang	6.3.1.1.12	(150.315.753,20)	(155.457.210,20)
Beban Dibayar Dimuka	6.3.1.1.13	167.408.219,17	3.599.521.970,90
Persediaan	6.3.1.1.14	5.792.664.823,25	7.818.770.961,44
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>62.060.730.906,73</b>	<b>66.053.333.634,35</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>6.3.1.2</b>		
<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>6.3.1.2.1</b>		
Penyertaan Modal		8.001.400.000,00	8.001.400.000,00
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen</b>		<b>8.001.400.000,00</b>	<b>8.001.400.000,00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		<b>8.001.400.000,00</b>	<b>8.001.400.000,00</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>6.3.1.3</b>		
Tanah	6.3.1.3.1	220.599.056.138,00	219.329.303.138,00
Peralatan dan Mesin	6.3.1.3.2	309.256.778.883,70	299.886.306.314,70
Gedung dan Bangunan	6.3.1.3.3	448.316.354.484,89	432.072.325.853,89
Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.3.1.3.4	933.563.567.808,00	905.040.132.596,00
Aset Tetap Lainnya	6.3.1.3.5	20.065.971.269,00	20.039.279.621,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.3.1.3.6	23.114.812.773,27	6.247.814.038,00
Akumulasi Penyusutan	6.3.1.3.7	(1.127.600.632.946,70)	(1.019.695.558.902,70)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>827.315.908.410,16</b>	<b>862.919.602.658,89</b>

URAIAN	REF.	2022	2021
<b>DANA CADANGAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>6.3.1.4</b>		
Tagihan Jangka Panjang	6.3.1.4.1	79.650.054,00	94.400.000,00
Aset Tidak Berwujud	6.3.1.4.2	3.973.515.000,00	3.954.665.000,00
Aset Lain-lain	6.3.1.4.3	3.655.944.747,00	903.261.497,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	6.3.1.4.4	(3.020.329.016,00)	(3.020.329.016,00)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>4.688.780.785,00</b>	<b>1.931.997.481,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>902.066.820.101,89</b>	<b>938.906.333.774,24</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>6.3.2</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>6.3.2.1</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.3.2.1.1	252.068.325,00	376.790.168,40
Utang Belanja	6.3.2.1.2	5.800.402.975,00	6.805.530.153,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.3.2.1.3	1.963.564.983,38	465.477.748,70
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>8.016.036.283,38</b>	<b>7.647.798.070,10</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>8.016.036.283,38</b>	<b>7.647.798.070,10</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>6.3.3</b>		
<b>EKUITAS</b>		894.050.783.818,51	931.258.535.704,14
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>902.066.820.101,89</b>	<b>938.906.333.774,24</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.


  
**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si.**

## Laporan Operasional (LO)

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR</b> <b>LAPORAN OPERASIONAL</b> UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021					
(Dalam Rupiah)					
URAIAN	REF.	2022	2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>6.4.1</b>				
<b>PENDAPATAN</b>	<b>6.4.1.1</b>	<b>477.611.811.647,26</b>	<b>493.098.775.773,99</b>	<b>(15.486.964.126,73)</b>	<b>(3,14)</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>6.4.1.1.1</b>	<b>13.605.316.936,26</b>	<b>14.375.713.435,99</b>	<b>(770.396.499,73)</b>	<b>(5,36)</b>
Pendapatan Pajak Daerah		8.079.056.025,00	6.033.431.227,00	2.045.624.798,00	33,90
Pendapatan Retribusi Daerah		397.832.320,00	280.887.019,00	116.945.301,00	41,63
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1.409.788.093,00	2.046.482.433,00	(636.694.340,00)	(31,11)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		3.718.640.498,26	6.014.912.756,99	(2.296.272.258,73)	(38,18)
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>6.4.1.1.2</b>	<b>448.722.292.358,00</b>	<b>467.847.381.106,00</b>	<b>(19.125.088.748,00)</b>	<b>(4,09)</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		423.313.409.773,00	424.545.952.899,00	(1.232.543.126,00)	(0,29)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		6.220.649.000,00	25.721.357.000,00	(19.500.708.000,00)	(75,82)
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		19.188.233.585,00	17.580.071.207,00	1.608.162.378,00	9,15
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>6.4.1.1.3</b>	<b>15.284.202.353,00</b>	<b>10.875.681.232,00</b>	<b>4.408.521.121,00</b>	<b>40,54</b>
Pendapatan Hibah		2.377.270.106,00	1.169.963.232,00	1.207.306.874,00	103,19
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		12.906.932.247,00	9.705.718.000,00	3.201.214.247,00	32,98
<b>BEBAN</b>	<b>6.4.1.2</b>	<b>515.344.043.129,41</b>	<b>527.630.305.926,60</b>	<b>(12.286.262.797,19)</b>	<b>(2,33)</b>
Beban Pegawai	6.4.1.2.1	213.743.799.668,00	205.528.620.362,00	8.215.179.306,00	4,00
Beban Persediaan	6.4.1.2.2	21.706.676.511,19	39.805.628.665,40	(18.098.952.154,21)	(45,47)
Beban Jasa	6.4.1.2.3	65.322.385.424,81	50.404.713.074,12	14.917.672.350,69	29,60
Beban Pemeliharaan	6.4.1.2.4	10.199.357.327,84	9.982.598.328,00	216.758.999,84	2,17
Beban Perjalanan Dinas	6.4.1.2.5	46.900.437.697,00	44.833.089.839,00	2.067.347.858,00	4,61
Beban Hibah	6.4.1.2.6	3.096.894.020,00	6.847.112.321,00	(3.750.218.301,00)	(54,77)
Beban Bantuan Sosial	6.4.1.2.7	9.037.958.318,89	2.189.694.700,00	6.848.263.618,89	312,75
Beban Penyisihan Piutang	6.4.1.2.8	52.199.219,68	69.408.512,08	(17.209.292,40)	(24,79)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.4.1.2.9	30.759.816.319,00	32.199.977.133,00	(1.440.160.814,00)	(4,47)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.4.1.2.9	21.351.242.738,00	20.069.092.557,00	1.282.150.181,00	6,39
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.4.1.2.9	57.488.783.655,00	79.030.327.261,00	(21.541.543.606,00)	(27,26)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	6.4.1.2.9	0,00	90.176.000,00	(90.176.000,00)	(100,00)
Beban Bagi Hasil	6.4.1.2.10	753.406.250,00	472.166.033,00	281.240.217,00	59,56
Beban Bantuan Keuangan	6.4.1.2.10	34.204.541.334,00	34.929.141.698,00	(724.600.364,00)	(2,07)
Beban Lain-Lain	6.4.1.2.11	726.544.646,00	1.178.559.443,00	(452.014.797,00)	(38,35)
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>6.4.2</b>	<b>(37.732.231.482,15)</b>	<b>(34.531.530.152,61)</b>	<b>(3.200.701.329,54)</b>	<b>9,27</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>6.4.3</b>				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		57.340.676,68	44.006.456,13	13.334.220,55	30,30
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		205.710.833,00	346.515.289,00	(140.804.456,00)	(40,63)
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>6.4.4</b>	<b>(148.370.156,32)</b>	<b>(302.508.832,88)</b>	<b>154.138.676,55</b>	<b>(50,95)</b>

*Handwritten signature/initials*

URAIAN	REF.	2022	2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>6.4.5</b>	<b>(37.880.601.638,47)</b>	<b>(34.834.038.985,48)</b>	<b>(3.046.562.652,99)</b>	<b>8,75</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>					
Beban Tak Terduga		0,00	233.244.562,00	(233.244.562,00)	(100,00)
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>		<b>0,00</b>	<b>(233.244.562,00)</b>	<b>233.244.562,00</b>	<b>(100,00)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>6.4.6</b>	<b>(37.880.601.638,47)</b>	<b>(35.067.283.547,48)</b>	<b>(2.813.318.090,99)</b>	<b>8,02</b>


Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**



**SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si.**

## Laporan Arus Kas (LAK)

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR</b> <b>LAPORAN ARUS KAS</b> Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah)			
URAIAN	REF.	2022	2021
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>6.5.1</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>6.5.1.1</b>		
Pajak Daerah		7.804.348.931,00	5.999.345.024,00
Retribusi Daerah		397.832.320,00	280.887.019,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		948.010.307,00	1.098.472.126,00
Lain-lain PAD yang Sah		3.739.905.092,00	5.986.501.797,99
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		484.731.282.023,00	519.209.667.899,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		21.123.341.764,00	14.109.889.286,00
Pendapatan Hibah		0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		12.906.932.247,00	9.705.718.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>531.651.652.684,00</b>	<b>556.390.481.151,99</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>6.5.1.2</b>		
Belanja Pegawai		213.765.733.155,00	204.936.447.375,00
Belanja Barang dan Jasa		140.769.569.584,92	144.611.926.961,00
Belanja Hibah		3.096.894.020,00	6.775.705.681,00
Belanja Bantuan Sosial		9.212.069.430,00	1.786.800.000,00
Belanja Tidak Terduga		0,00	233.244.562,00
Belanja Bagi Hasil		753.406.250,00	472.166.033,00
Belanja Bantuan Keuangan		92.165.930.334,00	103.871.499.698,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>459.763.602.773,92</b>	<b>462.687.790.310,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>6.5.2</b>	<b>71.888.049.910,08</b>	<b>93.702.690.841,99</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>6.5.3</b>		
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>6.5.3.1</b>		
Belanja Modal Tanah		78.875.000,00	39.175.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		10.743.662.655,00	22.681.592.476,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		16.259.270.341,00	21.959.213.802,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		42.003.471.945,00	19.319.812.253,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		1.098.927.138,00	769.707.671,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>70.184.207.079,00</b>	<b>64.769.501.202,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>6.5.4</b>	<b>(70.184.207.079,00)</b>	<b>(64.769.501.202,00)</b>




URAIAN	REF.	2022	2021
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>6.5.5</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>6.5.5.1</b>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		34.069.340.068,00	26.182.988.683,40
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>34.069.340.068,00</b>	<b>26.182.988.683,40</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>6.5.5.2</b>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		34.194.061.911,40	25.807.891.844,00
Koreksi SiLPA		(25.112.014,84)	13.572.606,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>34.168.949.896,56</b>	<b>25.821.464.450,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>6.5.6</b>	<b>(99.609.828,56)</b>	<b>361.524.233,40</b>
<b>Kenaikan / (Penurunan) Kas</b>	<b>6.5.7</b>	<b>1.604.233.002,52</b>	<b>29.294.713.873,39</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>		<b>42.178.348.676,51</b>	<b>12.883.634.803,12</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>6.5.8</b>	<b>43.782.581.679,03</b>	<b>42.178.348.676,51</b>
<b>Rincian Saldo Akhir Kas</b>			
Kas di Kas Daerah	6.5.8.1	43.442.169.605,11	41.944.359.871,11
Kas di Bendahara Penerimaan	6.5.8.2	38.019.915,00	15.330.119,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.5.8.3	4.342.806,00	0,00
Kas Dana BOS	6.5.8.4	10.360.201,00	187.221.725,40
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	6.5.8.5	35.620.826,92	31.436.961,00
Kas Lainnya Terkait Utang PFK	6.5.8.6	252.068.325,00	0,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.


**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**  
**SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si.**

## Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR</b> <b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b> UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021			
(Dalam Rupiah)			
URAIAN	REF.	2022	2021
EKUITAS AWAL	6.6.1	931.258.535.704,14	965.829.618.440,73
SURPLUS/DEFISIT-LO	6.6.2	(37.880.601.638,47)	(35.067.283.547,48)
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :</b>	<b>6.6.3</b>		
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya		672.849.752,84	496.200.810,89
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>6.6.4</b>	<b>894.050.783.818,51</b>	<b>931.258.535.704,14</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

  
**SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si.**

## BAB I

### Pendahuluan

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggung jawaban sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Olehnya segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 telah diupayakan semaksimal mungkin. Proses dan implementasi penerapan basis akrual dengan segala implikasinya diuraikan pada informasi tambahan terutama terkait dengan penyajian beberapa pos dalam laporan keuangan dan pelaksanaan perubahan basis akrual berlanjut hingga pada laporan keuangan Tahun Anggaran 2022.

Setelah melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan terutama terkait dengan penerapan laporan keuangan berbasis akrual pada sub sistem pelaporan keuangan (LKPD). Menyikapi keharusan pelaksanaan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menyusun dan menyajikan. Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan Kebijakan Akuntansi baru untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akrual. SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, sedangkan Kebijakan Akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan.

Secara umum bila dilihat dari perkembangan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur saat ini dapat dikatakan sudah berkembang pesat. Sejalan dengan dinamika perkembangan pembangunan daerah yang semakin pesat, secara struktur tidak luput dari berbagai perubahan dari 5 wilayah kecamatan dimekarkan menjadi 7 kecamatan sehingga dengan adanya pemekaran wilayah ini

maka otomatis telah terjadi perluasan perpanjangan tangan pemerintahan diwilayah pelosok desa terpencil dengan jarak tempuh dalam waktu yang relatif mudah dijangkau.

Perubahan yang terjadi tentu tidak lepas dari siklus maupun rotasi pengelolaan keuangan daerah dimana dalam pengelolaan keuangan basis akrual serta membuka lebar secara tidak langsung merubah pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas hanya pada satu wilayah tertentu namun begitu terjadi pemekaran wilayah maka untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan kebijakan dengan penerapan laporan keuangan dengan sistem basis akrual pada Tahun Anggaran 2022.

Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tetapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas. Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan adalah merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan.

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan

pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (user) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara :

1. Menyediakan informasi mengenai penerimaan periode berjalan membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan Perundang-Undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Lembaran Negara RI Nomor 102 tahun 2008);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576;



15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun Anggaran 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun Anggaran 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
30. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903 / 1043 / Sj Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 05 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022.
35. Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 36 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022

37. Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 37 Tahun 2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 disusun dalam 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB. I Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **BAB. II Gambaran Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022**

- 2.1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 2.2. Letak Geografis
- 2.3. Visi dan Misi
- 2.4. Organisasi dan Personalia

#### **BAB. III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Daerah**

- 3.1. Ekonomi Makro
- 3.2. Kebijakan Keuangan
- 3.3. Mandatory Spending
- 3.4. Program Prioritas Nasional Dan Stunting
- 3.5. Stunting

#### **BAB. IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 4.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 4.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **BAB.V Kebijakan Akuntansi**

- 5.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 5.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- 5.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkait dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

#### BAB.VI Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

- 6.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 6.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 6.3. Neraca
- 6.4. Laporan Operasi (LO)
- 6.5. Laporan Arus Kas (LAK)
- 6.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

#### BAB.VII Informasi Tambahan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022

- 7.1. Dana Tugas Pembantu
- 7.2. Dan Dekonsentrasi
- 7.3. Dana Bantuan Sosia PHK
- 7.4. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- 7.5. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
- 7.6. Bantuan Kementrian Kesehatan
- 7.7. Penyertaan Modal Pada PT Bank SulutGo

#### BAB. VIII Penutup

Lampiran

## BAB II

### Gambaran Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022

#### 2.1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dibentuk berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008; tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2008; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terbentuk sejak tanggal 21 Juli 2008 yang terdiri dari 81 (delapan puluh satu) Desa yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan.

#### 2.2. Letak Geografis

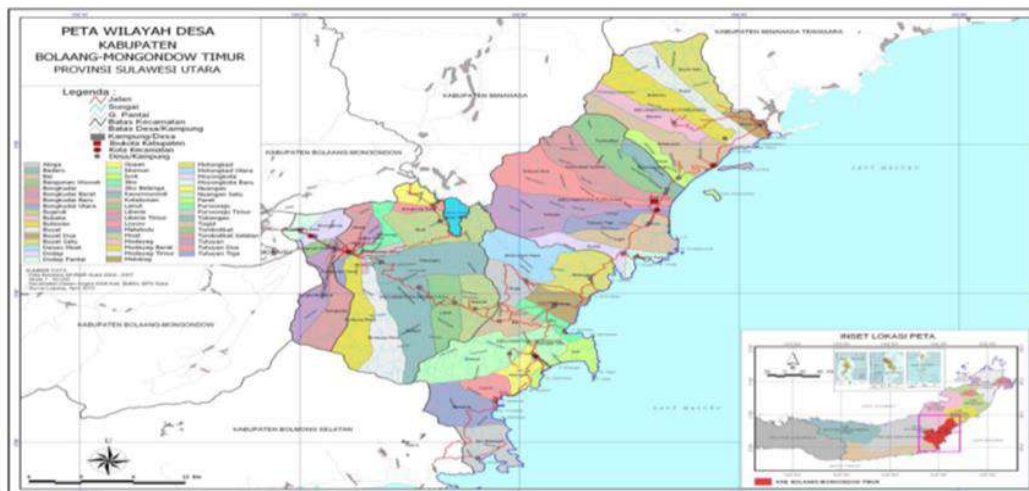
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terletak dibagian Selatan Provinsi Sulawesi Utara atau di antara 0: 23' 25'' LU - 124: 19' 39'' BT dan 0: 57' 33'' LU - 124: 45' 38'' BT Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terletak dibagian Selatan Provinsi Sulawesi Utara atau di antara 0: 23' 25'' LU - 124: 19' 39'' BT dan 0: 57' 33'' LU - 124: 45' 38'' BT

Tabel 2. 1  
Letak Geografis

No	Wilayah	Berbatasan
1	Sebelah Utara	Kecamatan Toulaan, Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara
2	Sebelah Timur	Laut Maluku dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3	Sebelah Selatan	Laut Maluku dengan Kecamatan Pinolosian Timur
4	Sebelah Barat	Kecamatan Lolayan, Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu; dan Kecamatan Modoinding, Kecamatan Tompaso Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan.

Berikut disajikan Peta Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Gambar 2. 1  
Peta Kabupaten Bolaang Mongondow Timur



Tabel 2. 2  
Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Penduduk Per Kecamatan  
Kab. Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk (Ribu)	Luas Wilaya (m2)
1	Kecamatan Kotabunan	15	16.005	141,86
2	Kecamatan Tutuyan	10	15.484	86,28
3	Kecamatan Motongkad	11	7.935	209,73
4	Kecamatan Nuangan	11	10.269	159,15
5	Kecamatan Modayag	14	18.847	177,15
6	Kecamatan Modayag Barat	10	12.745	41,87
7	Kecamatan Mooat	10	6.956	94,13
	<b>Jumlah</b>	<b>81</b>	<b>88.241</b>	<b>910,17</b>

### 2.3. Visi dan Misi

#### 1. Visi

Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Yang Aman, Berbudaya Dan Sejahtera Melalui Sinergitas Pembangunan Perdesaan

#### 2. Misi

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
- 2) Meningkatkan Budaya Dan Pariwisata Yang Berkearifan Lokal
- 3) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan



## 2.4. Organisasi dan Personalia

Organisasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur meliputi 3 Urusan, 5 Unsur, 29 Bidang dan 36 SKPD berikut rinciannya.

### 2.4.1. Urusan, Bidang, Unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sub Unit

Tahun 2022 di Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat 4 Urusan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 3  
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022

NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI	KETERANGAN
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>	
<b>Pendidikan</b>	
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
<b>Kesehatan</b>	
Dinas Kesehatan	
<b>Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>	
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	
<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	
<b>Sosial</b>	
Dinas Sosial	
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>	
<b>Tenaga Kerja</b>	
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Energi Sumber Daya Mineral	
<b>Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</b>	
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
<b>Pangan</b>	
Dinas Ketahanan Pangan	
<b>Lingkungan Hidup</b>	
Dinas Lingkungan Hidup	
<b>Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</b>	
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	

NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI	KETERANGAN
<b>Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
<b>Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>	
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
<b>Perhubungan</b>	
Dinas Perhubungan	
<b>Komunikasi &amp; Informatika</b>	
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	
<b>Penanaman Modal</b>	
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
<b>Kepemudaan Dan Olahraga</b>	
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	
<b>Perpustakaan</b>	
Dinas Perpustakaan Daerah	
<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>	
<b>Kelautan Dan Perikanan</b>	
Dinas Perikanan	
<b>Pariwisata</b>	
Dinas Pariwisata	
<b>Pertanian</b>	
Dinas Pertanian	
<b>Perdagangan</b>	
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>	
<b>Sekretariat Daerah</b>	
Sekretariat Daerah	
<b>Sekretariat DPRD</b>	
Sekretariat DPRD	
<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	
<b>Perencanaan</b>	
Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
<b>Keuangan</b>	
Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
<b>Kepegawaian</b>	
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI	KETERANGAN
<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>	
<b>Inspektorat</b>	
Inspektorat Daerah	
<b>Unsur Kewilayahan</b>	
<b>Kecamatan</b>	
Kecamatan Kotabunan	
Kecamatan Tutuyan	
Kecamatan Nuangan	
Kecamatan Motongkad	
Kecamatan Mooat	
Kecamatan Modayag	
Kecamatan Modayag Barat	
<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>	
<b>Kesatuan Bangsa Dan Politik</b>	
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	

2.4.2. Pejabat Pemerintah Daerah

2.4.2.1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdiri dari 20 Anggota, yang berasal dari berbagai unsur Partai Politik (Parpol) pemenang Pemilu. Nama-nama pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai berikut:

Tabel 2. 4  
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

No.	Nama	Jabatan	Ket.
<b>Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan</b>			
1.	Medy Lensun,ST	Wakil Ketua DPRD	
2.	Wilken Rareho,SH	Ketua	
3.	Samsudin Dama, ST	Wakil Ketua	
4.	Dahlan Saniman,S.IP	Sekretaris	
5.	Seska E Budiman, S.Sos	Anggota	
6.	Hj Sutanto Ginoga	Anggota	

<b>Komisi II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan</b>			
1.	Muhammad Jabir	Wakil Ketua DPRD	
2.	Sofyan Alhabsyi	Ketua	
3.	Argo V Sumaiku	Wakil Ketua	
4.	Hi.Sunarto Kadengkang	Sekretaris	
5.	Richi Hadji Ali	Anggota	
6.	Rolia Mamonto	Anggota	
7.	Titiek S Mamonto, S.Pd	Anggota	
<b>Komisi III Bidang Kesejahteraan dan Sosial</b>			
1.	Fuad S Landjar, SH	Ketua DPRD	
2.	Hi.Soernardy Soemanta, S.Ip	Ketua	
3.	Kevin Sumedap	Wakil Ketua	
4.	Reey R Lengkong	Sekretaris	
5.	Anthonius S Muaya	Anggota	
6.	Dr Cerry Komaling	Anggota	
7.	Edsyuko Tendean	Anggota	

#### 2.4.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH)

Pada tanggal 9 Desember 2020 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) untuk periode 2021 - 2024. Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur terpilih untuk masa jabatan 2021-2024 dijabat oleh Sam Sachrul Mamonto, S.Sos., M.Si. sebagai Bupati Bolaang Mongondow Timur dan Oskar Manoppo, SE., MM sebagai Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur.

### BAB III

## Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD

### 3.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah Tahun 2022 atau Tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik, yaitu (minimal):

1. Presentase Penduduk Miskin;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka;
3. Gini Ratio;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);
6. Inflasi; dan
7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

#### 3.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Bolaang Mongondow Timur periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan

keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan, makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel.3. 1  
Persentase Penduduk Miskin

Persentase (%)

No	Persentase Penduduk Miskin	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
1	Kab Bolaang Mongondow Timur	5,88	6,10	5,85	(0,25)
2	Kab Bolaang Mongondow Timur (Ribu Orang)	4,30	4,47	4,32	(0,15)
3	Provinsi	7,78	7,36	7,34	(0,02)
4	Nasional	10,19	9,71	9,57	(0,14)
5	Peringkat Provinsi	10	11	10	(1,43)
6	Peringkat Nasional	5	5	370	365

Sumber Dokumen : BPS Kotamobagu, bgs.go.is Sulut bps.go.id

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kotamobagu (bps.go.id Sulut bps.go.id). Persentase Penduduk Miskin Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 adalah sebesar 5,85%, berhasil ditekan sebesar 0,25% di Tahun 2022. Melihat persentase Penduduk Miskin mencapai 5,85% diharapkan pada tahun selanjutnya nilai tersebut mengalami penurunan seiring dengan program pemerintah yang mampu menggerakkan ekonomi ke arah lebih baik lagi dan mampu menekan angka kemiskinan.

Tabel.3. 2  
Tingkat Kedalaman Kemiskinan

Persentase (%)

No	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
1	Tingkat Kabupaten	0,94	0,66	0,65	0,00
2	Tingkat Provinsi	1,14	1,04	1,11	0,07
3	Tingkat Nasional	1,75	1,67	1,56	(0,11)
4	Peringkat Provinsi	10	14	11	-3
5	Peringkat Nasional	30	24	491	467

Sumber Dokumen : BPS Kotamobagu, bgs.go.is Sulut bps.go.id

Tabel.3. 3  
Tingkat Keparahan Kemiskinan

*Persentase (%)*

No	Indeks Keparahan Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
1	Tingkat Kabupaten	0,20	0,12	0,10	(0,02)
2	Tingkat Provinsi	0,30	0,22	0,25	0,03
3	Tingkat Nasional	0,47	0,42	0,38	(0,04)
4	Peringkat Provinsi	9	15	13	-2
5	Peringkat Nasional	23	23	509	486

Sumber Dokumen : BPS Kotamobagu, bgs.go.is Sulut bps.go.id

Tabel.3. 4  
Data Kemiskinan

*Persentase (%)*

No	Jenis data yang diukur	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab.Boltim	0,25	0,13	0,20	0,12	0,10
2	Jumlah Penduduk Miskin Kab.Boltim(Ribu org)	4,29	4,41	4,30	4,47	4,32
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Kabupaten/Kota (%)	0,85	0,70	0,94	0,66	0,65

Sumber Dokumen : BPS Kotamobagu, bgs.go.is Sulut bps.go.id

### 3.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran Terbuka, terdiri dari: (i) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kotamobagu (bps.go.id Sulut bps.go.id). Tingkat Pengangguran Terbuka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 adalah sebesar 6,19%, mengalami kenaikan sebesar 0,20% di Tahun 2022. Melihat tingkat Pengangguran



Terbuka mencapai 6,19% diharapkan pada tahun selanjutnya nilai tersebut mengalami penurunan seiring dengan program pemerintah yang mampu menciptakan dan memicu lapangan kerja baru yang bertujuan mengurangi angka pengangguran.

Tabel.3. 5  
Tingkat Pengangguran Terbuka

*Persentase (%)*

No	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
1	Tingkat Kabupaten	6,13	5,99	6,19	0,20
2	Tingkat Provinsi	7,37	7,06	6,61	(0,45)
3	Tingkat Nasional	7,06	6,49	6,32	(0,17)
4	Peringkat Provinsi	5	6	6	0
5	Peringkat Nasional	6	5	n/a	0

Sumber Dokumen : BPS Kotamobagu, bps.go.is Sulut bps.go.id

### 3.1.3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

1. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
2. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kotamobagu, bps.go.id Sulut bps.go.id, Indeks Gini Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 adalah sebesar 0,37% berhasil ditekan sebesar 0,00% di Tahun 2022 Indeks Gini mencapai 0,37%.

Tabel.3. 6  
Gini Ratio

Persentase (%)

No	Gini Ratio	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
1	Tingkat Kabupaten	0,34	0,37	0,37	0,00
2	Tingkat Provinsi	0,37	0,36	0,36	0,00
3	Tingkat Nasional	0,39	0,381	0,38	0,00
4	Peringkat Provinsi	10	2	6	4,00
5	Peringkat Nasional	11	15	n/a	0,00

Sumber Dokumen : BPS Kotamobagu, bgs.go.is Sulut bps.go.id

### 3.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

1. Rendah (< 60)
2. Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ )
3. Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ )
4. Sangat Tinggi (>80).

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kotamobagu (bps.go.id Sulut bps.go.id). Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 adalah sebesar 67,21%, mengalami kenaikan sebesar 0,66% di Tahun 2022. Melihat Indeks Pembangunan Manusia mencapai 67,21% diharapkan pada tahun - tahun selajutnya angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga mencapai 80,00%.

Tabel.3. 7  
Indeks Pembangunan Manusia

Persentase (%)

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan) (%)
1	Tingkat Kabupaten	65,99	66,55	67,21	0,66
2	Tingkat Provinsi	72,93	73,30	73,81	0,51
3	Tingkat Nasional	71,94	72,29	72,91	0,00
4	Peringkat Provinsi	14	14	14	0
5	Peringkat Nasional	6	6	6	0

Sumber Dokumen : BPS Kotamobagu, bgs.go.is Sulut bps.go.id

Realisasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 adalah sebesar 67,21%, dibandingkan Tahun 2021 adalah sebesar 66,55% mengalami kenaikan sebesar 0,66%. Penurunan Indeks Pembangunan Manusia disebabkan menurunnya

Tabel.3. 8  
Rincian Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Persentase (%)

No	Rasion Indikator Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan) (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	65,99	66,55	67,21	0,66
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	67,89	67,94	68,24	0,30
3	Harapan Lama Sekolah (HSL)	11,59	11,86	11,88	0,02
4	Rata-rata Lama Sekolah (RSL)	7,83	7,93	8,09	0,16
5	Pengeluaran Perkapita disesuaikan	8.998,00	9.115,00	9.390,00	275,00

Sumber Dokumen : BPS Kotamobagu, bgs.go.is Sulut bps.go.id

Capaian IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 adalah sebesar 67,21%, dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 66,55%, mengalami kenaikan sebesar 0,66%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh indikator penunjang IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama

Sekolah (HSL), Rata-rata Lama Sekolah (RSL) dan Pengeluaran Perkapita. Jika disesuaikan dengan keempat indikator tersebut di Tahun 2022 capaian IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah sebagai berikut: Angka Harapan Hidup (AHH) pada Tahun 2022 adalah sebesar 68,24 % atau naik sebesar 0,30 %; Harapan Lama Sekolah (HSL) pada Tahun 2022 adalah sebesar 11,88 % atau naik sebesar 0,02%; Rata-rata Lama Sekolah (RSL) pada Tahun 2022 adalah sebesar 8,09 % atau naik sebesar 0,16%; Pengeluaran Perkapita disesuaikan pada Tahun 2022 adalah sebesar 9.390,00 juta atau naik sebesar 275,00 juta

Tabel.3. 9  
Data Indeks Pembangunan Manusia

*Persentase (%)*

No	Jenis data yang diukur	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia	65,21	68,08	65,99	66,55	67,21
2	Peringkat Provinsi	15	14	14	14	14
3	Peringkat Nasional	425	430	431	421	394

Sumber Dokumen : BPS Kotamobagu, bgs.go.is Sulut bps.go.id

### 3.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel.3. 10  
Laju Pertumbuhan Ekonomi

*Persentase (%)*

No	Laju Pertumbuhan PDRB	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
1	Tingkat Kabupaten	0,16	3,05	5,18	2,13
2	Tingkat Provinsi	(0,99)	4,16	5,45	1,29
3	Tingkat Nasional	15	9	n/a	0
4	Peringkat Provinsi	13	14	14	0

Sumber Dokumen : BPS Kotamobagu, bgs.go.is Sulut bps.go.id

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kotamobagu (bps.go.id Sulut bps.go.id). Laju Pertumbuhan PDRB Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 adalah sebesar 3,05%, mengalami kenaikan sebesar 5,18% di Tahun 2022. Melihat Laju Pertumbuhan PDRB mencapai 3,05% diharapkan pada tahun - tahun selanjutnya angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga mencapai 6,00%.

### 3.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) Inflasi Ringan (creeping inflation) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun; (ii) Inflasi Sedang (Galloping Inflation) inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun; (iii) Inflasi Berat (High Inflation) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan (iv) Hiperinflasi (Hyper Inflation) jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari

100% setahun. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 adalah sebesar 6,03 % termasuk kategori ringan atau creeping inflation sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.3. 11  
Tingkat Inflasi

Persentase (%)

No	Tingkat Inflasi	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
1	Tingkat Kabupaten	3,67	2,51	6,03	3,52
2	Tingkat Provinsi	0,99	4,16	n/a	0,00
3	Tingkat Nasional	1,68	n/a	5,51	0,00
4	Peringkat Provinsi	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Peringkat Nasional	5	n/a	n/a	0,00

Sumber Dokumen : BPS Kotamobagu, bgs.go.is Sulut bps.go.id

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kotamobagu (bps.go.id Sulut bps.go.id). Tingkat Inflasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 adalah sebesar 6,03%, mengalami kenaikan sebesar 3,52% di Tahun 2022. Melihat Tingkat Inflasi mencapai 2,51% diharapkan pada tahun - tahun selanjutnya angka tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai 1,00%.

### 3.1.7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.3. 12  
PDRB Atas Dasar Harga Konstan

No	PDRB Harga Konstan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Tingkat Kabupaten (Jutaan Rupiah)	1.792.386,90	1.878.469,77	1.881.482,35	1.938.798,97	2.039.190,00
2	Tingkat Provinsi (Milyaran Rupiah)	84.258,55	89.009.264,78	88.126.373,99	91.790.927,02	96.767.696,89
3	Tingkat Nasional (Milyaran Rupiah)	10.002.892,80	10.498.755,90	n/a	n/a	11.710.397,80
4	Peringkat Provinsi	11	11	11	0,00	11,00
5	Peringkat Nasional	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

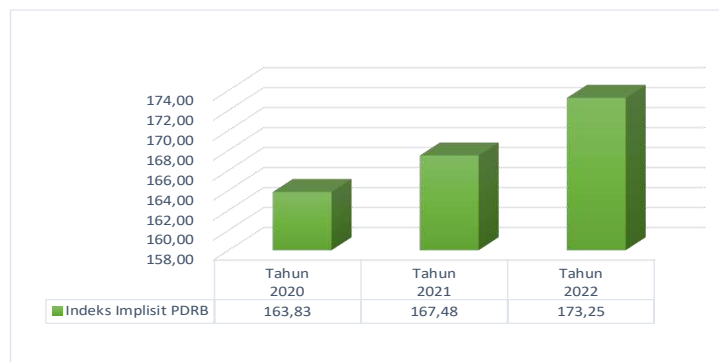
Sumber Dokumen : BPS Kotamobagu, bgs.go.is Sulut bps.go.id

Nilai PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Timur stabil seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Tahun 2021 Nilai PDRB atas dasar harga konstan atau PDRB ADHK 1,94 juta Rupiah terus meningkat hingga di Tahun 2022 menjadi 2,03 Juta rupiah. Disisi lain kenaikan Nilai PDRB atas dasar harga berlaku atau PDRB ADHB 3,25 juta rupiah mengalami peningkatan menjadi 3,53 juta rupiah. Hal ini menggambarkan adanya dinamika produksi seluruh aktivitas perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, seperti yang terlihat pada bagan PDRB ADHK dan PDRB ADHM berikut.

Grafik 3. 1  
PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Timur  
Tahun 2020-2022



Grafik 3. 2  
Indeks Implisit PDRB Tahun Dasar 2020 - 2022  
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur



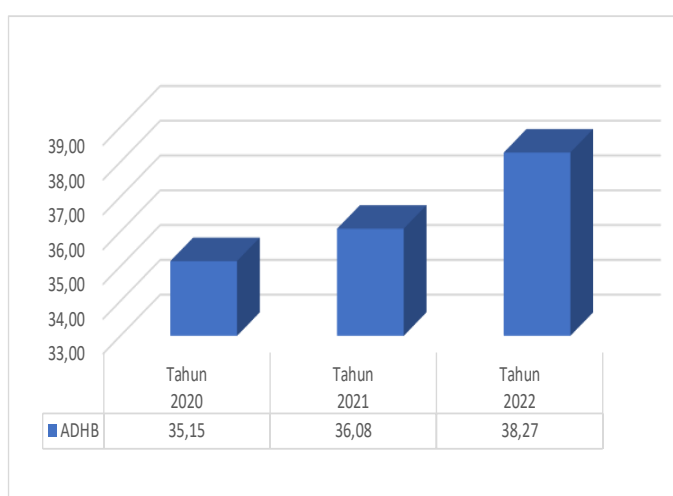


### 3.1.7.1. PDRB Per-Kapita

Salah satu indikator penting dalam perekonomian untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita. Artinya semakin tinggi pendapatan per kapita berarti tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. PDRB per Kapita Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi.

Grafik 3. 3

PDRB Bruto per kapita Kabupaten Bolaang Mongondow Timur



### 3.1.7.2. Struktur Ekonomi

Potensi Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh pada struktur ekonomi suatu wilayah. Guna melihat dominasi ada atau tidaknya struktur ekonomi kategori 17 (tujuh belas) Lapangan Usaha dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian :

#### 1. Lapangan Usaha Primer

Lapangan Usaha ini hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang terkandung didalamnya yang meliputi kategori; pertanian, kehutanan dan perikanan, serta kategori pertambangan dan penggalian.

#### 2. Lapangan Usaha Sekunder

Adalah lapangan usaha yang mengolah bahan baku dari lapangan usaha primer maupun lapangan usaha sekunder itu sendiri menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Lapangan

Usaha ini meliputi kategori industri pengolahan; kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air, pengolahan sampah, limbah daur ulang serta kategori konstruksi.

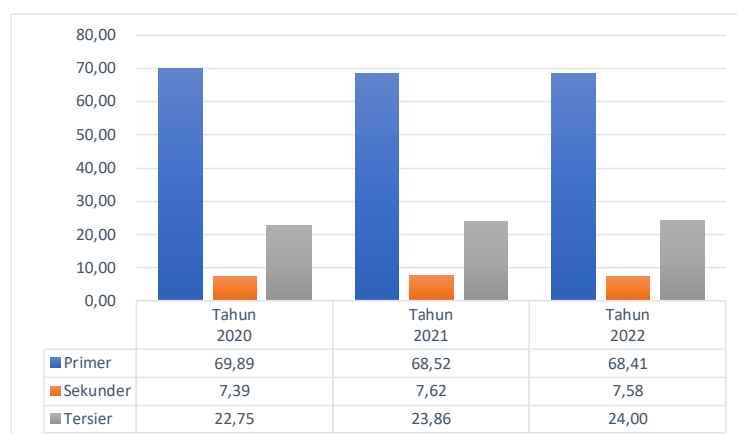
### 3. Lapangan Usaha Tersier

Lapangan usaha yang mengolah bahan baku baik dari lapangan usaha primer maupun lapangan usaha sekunder.

Berdasarkan pembagian lapangan usaha di atas berikut rincian kontribusinya ;

Grafik 3. 4

Kontribusi Lapangan Usaha Kab. Bolaang Mongondow Timur



## 3.2. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 merupakan salah satu dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur akan terus menggali potensi-potensi yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, lain-lain Pendapatan Asli Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

### 3.2.1. Kebijakan Pendapatan

Perencanaan pendapatan daerah mengacu pada realisasi penerimaan dan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Selain dari sumber-sumber pendapatan yang sudah

dikelola selama ini, masih terdapat sumber pendapatan daerah yang perlu dioptimalkan penerimaannya dengan tetap memperhitungkan keuangan ekonomi masyarakat. Hal ini sebagai wujud dari komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menjadikan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi lokal yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah secara bertahap Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menata infrastruktur dan suprastruktur daerah, satu dengan lainnya berinteraksi dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih. Dalam rangka pengembangan sumber pendapatan daerah maka diperlukan kebijakan yang bersifat umum dan khusus :

#### 1. Umum

Meningkatkan dan mengelola pendapatan daerah secara tertib dan bertanggung jawab dalam rangka mengisi penerimaan APBD.

#### 2. Khusus

Meningkatkan PAD sebagai andalan penerimaan APBD, kebijakan tersebut diarahkan pada:

- a. Penerimaan sistem dan prosedur pemungutan pendapatan daerah.
- b. Meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD.
- c. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
- d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan memperoleh informasi.
- e. Pemanfaatan sumber daya organisasi pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dan efisien.
- f. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas manusia pengelola pendapatan daerah.
- g. Peningkatan sosialisasi pendapatan daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.
- h. Peningkatan kualitas data dasar seluruh komponen pendapatan daerah.

### 3.2.2. Kebijakan Belanja

Arah kebijakan belanja daerah Tahun 2022 masih memprioritaskan pada program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan kelautan, kehutanan serta program/kegiatan pemberdayaan masyarakat.

### 1. Belanja Operasi

Belanja Operasi yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

### 2. Belanja Modal

Belanja Modal yang terdiri dari: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

### 3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

#### **3.2.3. Kebijakan Transfer**

Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Monondow Timur di Tahun 2022 merupakan salah satu arah kebijakan pemerintah daerah guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenagannya guna meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

#### **3.2.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Target Penerimaan Pembiayaan terdiri dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Kembali Pembayaran Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah.

### 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Adapun tujuan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2022 diwujudkan dari tujuan pembangunan tahunan yaitu :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- b. Menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran.
- c. Meningkatnya produksi pertanian perkebunan dan perikanan dan ketahanan pangan.
- d. Tersedianya infrastruktur dasar energi dan terbangunnya iklim investasi yang kondusif guna berkembangnya sektor ekonomi produktif, kuatnya lembaga perkenomian dan meningkatnya ekonomi masyarakat.
- e. Terbangunnya kawasan pariwisata dan terpeliharanya nilai-nilai budaya daerah.
- f. Terjaganya kelestarian hutan, lingkungan hidup dan tertanggulangnya kawasan bencana.
- g. Berkembangnya struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dan berbasis pedesaan.
- h. Tertatanya birokrasi dan sistem pemerintahan yang baik.

### 3.2.5. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Tahun 2022 masih memprioritaskan urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Pembangunan Infrastruktur, terutama pada sektor-sektor yang vital bagi masyarakat. Karena itu, komitmen pemerintah daerah agar setiap tahun anggaran terjadi peningkatan pembangunan yang dapat menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2022 pemerintah akan meningkatkan belanja daerah yang terkait langsung dengan program kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Prioritas Tahun 2022 sejalan dengan tema, maka ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur dasar dan penataan iklim investasi;
2. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
3. Pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan;
4. Pembangunan kawasan pariwisata dan pelestarian nilai-nilai budaya;
5. Revitalisasi pertanian, perkebunan dan perikanan untuk membangun ketahanan pangan;
6. Penanggulangan kemiskinan (pendidikan, kesehatan dan sosial); dan
7. Pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan /penanggulangan bencana.

### 3.2.6. Pencapaian Target Kinerja APBD

Capaian Target Kinerja APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

3.2.6.1. Capaian Target Kinerja Per Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022

1. Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Capaian target kinerja bidang Pendidikan adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak.

b. Kesehatan

Capaian target kinerja bidang Kesehatan adalah peningkatan akses dan kualitas kesehatan. Salah satu kondisi meningkatnya pelayanan dibidang kesehatan adalah menurunnya angka kematian ibu melahirkan.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian target kinerja bidang Pekerjaan Umum adalah pengembangan infrastruktur dan tata ruang, peningkatan akses transportasi dan informasi. Hal ini dapat dilihat dari data bahwa hampir seluruh Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dijangkau dengan kendaraan roda 4 (empat).

d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Capaian target kinerja bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, meningkatkan pemeliharaan dan pencegahan tindak kriminal, peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan rakyat, peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat), memberikan pendidikan politik pada masyarakat.

e. Sosial

Capaian target kinerja bidang Sosial adalah terselenggaranya jaminan kesejahteraan sosial termasuk terjaminnya kesetaraan hak anak dan anak perempuan serta kesetaraan gender dalam pembangunan.

2. Urusan Wajib Bukan Palayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Capaian target kinerja bidang Tenaga Kerja adalah peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta peningkatan kesempatan kerja.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian target kinerja bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah peningkatan kualitas anak dan perempuan, penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan anak, peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan, kelembagaan perempuan dan anak, pengembangan sistem informasi gender dan anak.

c. Pangan

Capaian target kinerja bidang Pangan adalah tercapainya ketersediaan pangan utama serta peningkatan ketahanan pangan pengembangan kemandirian pangan masyarakat miskin pedesaan, pengembangan lumbung pangan desa dan peningkatan mutu keamanan mutu pangan.

d. Lingkungan Hidup

Capaian target kinerja bidang Lingkungan Hidup adalah pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Meningkatnya pengawasan terhadap konservasi Sumber Daya Alam.

e. Administrasi Kependudukan dan Capil

Capaian target kinerja bidang Kependudukan dan Capil adalah terlaksananya pendaftaran dan pendataan penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terwujudnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, terwujudnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

f. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Capaian target kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah peningkatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan, pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa.



g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian target kinerja bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah mengutamakan pembangunan berwawasan kependudukan, menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, memfasilitasi pembangunan keluarga, mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

h. Perhubungan

Capaian target kinerja bidang Perhubungan adalah mewujudkan sarana transportasi yang berkeselamatan, aman dan nyaman, meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi serta pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

i. Komunikasi dan Informatika

Capaian target kinerja bidang Komunikasi dan Informatika adalah meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah kepada semua stakeholder, meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi, meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance.

j. Penanaman Modal

Capaian target kinerja bidang Penanaman Modal adalah meningkatkan daya saing investasi dalam dan luar negeri untuk kemajuan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

k. Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian target kinerja bidang Kepemudaan dan Olah Raga adalah menguatkan karakter kebangsaan pemuda dan peningkatan kapasitas daya saing pemuda, meningkatkan budaya olahraga melalui pengembangan akses dan partisipasi dalam olahraga, meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, meningkatkan mutu dan daya saing olah raga.

l. Perpustakaan

Capaian target kinerja bidang Perpustakaan adalah Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparat bidang perpustakaan dan kearsipan, pembinaan disiplin aparat bidang

perpustakaan dan kearsipan, Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan sumber daya aparat dibidang perpustakaan dan kearsipan.

3. Urusan Pemerintah Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Capaian target kinerja bidang Kelautan dan Perikanan adalah meningkatkan kualitas sdm aparat, masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan yang kreatif dan inovatif dalam pengembangan usaha melalui efektivitas tata kelola tujuan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatnya kualitas SDM aparat kelautan dan perikanan, meningkatnya peran serta penyuluh perikanan dalam pengembangan SDM nelayan, meningkatnya ketersediaan database statistik perikanan, meningkatnya pengawasan sumberdaya.

b. Pariwisata

Capaian target kinerja bidang Pariwisata adalah mempercepat pembangunan destinasi pariwisata secara terpadu mandiri dan berkelanjutan, melindungi dan melestarikan warisan budaya dan kekayaan tradisional daerah, meningkatkan kualitas kreasi seni pertunjukan dan pentas kesenian daerah, menciptakan lapangan pekerjaan serta memajukan taraf perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata.

c. Pertanian

Capaian target kinerja bidang Pertanian adalah meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan populasi ternak, meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan peternakan, memajukan sentral agri bisnis komoditas unggulan.

d. Perdagangan

Capaian target kinerja bidang Perdagangan adalah penetapan tatakelola pemerintahan dibidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah yang baik dan bersih, menciptakan peluang perdagangan, industri, koperasi dan usaha kecil menengah yang berbasis sumber daya lokal dan pedesaan, menciptakan iklim investasi, menumbuh kembangkan usaha perdagangan, industri, koperasi dan usaha kecil menengah.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Capaian target kinerja Sekretariat Daerah adalah mengkoordinasikan arah kebijakan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

b. Sekretariat DPRD

Capaian target kinerja Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Capaian target kinerja bidang Perencanaan adalah untuk meningkatkan kerja sama pembangunan baik bidang ekonomi, sosial budaya dan pengembangan wilayah tata ruang daerah, peningkatan promosi dan kerja sama investasi PMDN/PMA, peningkatan kualitas SDM untuk pelayanan investasi.

b. Keuangan

Capaian target kinerja bidang Keuangan adalah Memaksimalkan potensi sumber sumber penerimaan pendapatan daerah, mengendalikan pemanfaatan anggaran belanja melalui rekonsiliasi, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah berbasis data, tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk meraih opini WTP, meningkatnya kapasitas aparat yang profesional dan andal.

c. Kepegawaian

Capaian target kinerja bidang Kepegawaian adalah meningkatkan akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, meningkatkan kualitas perencanaan dan pengembangan karir pegawai.

## 6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah

### a. Inspektorat

Capaian target kinerja Inspektorat Daerah adalah meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah yang dapat mencegah tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and clean Government).

## 7. Unsur Kewilayahan

### a. Kecamatan

Capaian target kinerja Kecamatan adalah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.

Pencapaian kinerja APBD dicerminkan dengan persentase realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun output dari belanja daerah. Gambaran kinerja anggaran dan realisasi masing-masing pos, diukur berdasarkan nilai anggaran yang direncanakan.

### 3.2.6.2. Capaian dan Target Realisasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022

#### 1. Pendapatan

Capaian dari target realisasi pendapatan daerah Tahun 2022 tergolong efektif. Hal ini dapat dilihat dari persentase penerimaan pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp528.232.849.620,00 dan terealisasi sebesar Rp531.651.652.684,00 atau sebesar 100,65%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021 sebesar Rp556.390.481.151,99, maka realisasi pendapatan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp24.738.828.467,99 atau sama dengan 4,45% dari realisasi Tahun lalu. Adapun rincian pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah sebagai berikut:

#### a. Pendapatan Asli Daerah

Dari target anggaran sebesar Rp12.602.957.279,00 yang terealisasi sebesar Rp12.890.096.650,00 atau sebesar 102,28% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp475.109.316,99 atau sebesar 3,55%.

#### b. Pendapatan Transfer

Dari target anggaran sebesar Rp500.829.677.460,00 yang terealisasi sebesar Rp505.854.623.787,00 atau sebesar 101,00% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp27.464.933.398,00 atau sebesar 5,15%.

c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dari target anggaran sebesar Rp14.800.214.881,00 yang terealisasi sebesar Rp12.906.932.247,00 atau sebesar 87,21% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan Rp3.201.214.247,00 atau sebesar 32,98%.

2. Belanja

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp477.036.337.393,00 dan terealisasi sebesar Rp437.028.473.268,92 atau sebesar 91,61% Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021 sebesar Rp423.113.625.781,00 mengalami kenaikan atau sama dengan 3,29% dari realisasi Tahun lalu. Adapun rincian Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp392.300.886.251,00 dengan realisasi sebesar Rp366.844.266.189,92 atau sebesar 93,51%.

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi anggaran yang outputnya merupakan aset dari alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp83.477.364.212,00 dengan realisasi sebesar Rp70.184.207.079,00 atau sebesar 84,08%.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Transfer Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.258.086.930,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%.

d. Transfer

Transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Tahun Anggaran 2022 Transfer dianggarkan sebesar Rp92.998.070.735,00 dengan realisasi sebesar Rp92.919.336.584,00 atau sebesar 99,92%.

3.2.6.3. Alokasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama Tahun Anggaran 2022:

1. Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Pada Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp99.994.779.451,00 dengan realisasi sebesar Rp89.420.010.223,00 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp13.407.837.752,00 dengan realisasi sebesar Rp12.193.641.881,00.

b. Kesehatan

Pada Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp66.542.932.934,00 dengan realisasi sebesar Rp61.480.331.977,92 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp9.163.778.275,00 dengan realisasi sebesar Rp5.302.274.854,00.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp24.088.218.775,00 dengan realisasi sebesar Rp22.916.224.759,00 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp54.729.166.308,00 dengan realisasi sebesar Rp48.233.713.255,00.

d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp8.003.129.127,00 dengan realisasi sebesar Rp7.706.427.290,00 sedangkan

untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp62.337.378,00 dengan realisasi sebesar Rp62.337.378,00.

e. Sosial

Pada Bidang Sosial Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp3.798.027.210,00 dengan realisasi sebesar Rp3.683.370.406,00 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp9.115.774,00 dengan realisasi sebesar Rp9.115.774,00.

2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Pada Bidang Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp3.382.531.497,00 dengan realisasi sebesar Rp3.109.559.602,00

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp3.393.183.141,00 dengan realisasi sebesar Rp3.306.345.255,00 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp14.957.472,00 dengan realisasi sebesar Rp14.957.472,00.

c. Pangan

Pada Bidang Pangan Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp3.044.406.242,00 dengan realisasi sebesar Rp2.892.470.891,00

d. Lingkungan Hidup

Pada Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp3.968.531.910,00 dengan realisasi sebesar Rp3.557.628.464,00 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp113.292.056,00 dengan realisasi sebesar Rp110.161.064,00.

e. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar



Rp3.069.077.624,00 dengan realisasi sebesar Rp2.900.374.823,00 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp133.674.258,00 dengan realisasi sebesar Rp131.192.180,00.

f. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp4.520.541.931,00 dengan realisasi sebesar Rp4.296.455.554,00

g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp6.430.333.401,00 dengan realisasi sebesar Rp5.932.004.245,00 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp795.692.939,00 dengan realisasi sebesar Rp790.695.358,00.

h. Perhubungan

Pada Bidang Perhubungan Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp3.013.174.485,00 dengan realisasi sebesar Rp2.909.238.479,00 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00.

i. Komonikasi dan Informatika

Pada Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp9.918.788.905,00 dengan realisasi sebesar Rp9.336.547.895,00 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp2.081.840.037,00 dengan realisasi sebesar Rp630.138.650,00.

j. Penanaman Modal

Pada Bidang Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp3.386.384.340,00 dengan realisasi sebesar Rp3.316.428.212,00 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp98.424.336,00 dengan realisasi sebesar Rp86.234.736,00.

k. Kepemudaan dan Olahraga

Pada Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp4.673.136.662,00 dengan realisasi sebesar Rp4.588.055.437,00

1. Bidang Perpustakaan

Pada Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp2.113.233.253,00 dengan realisasi sebesar Rp1.931.486.074,00 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp217.583.602,00 dengan realisasi sebesar Rp215.953.467,00.

3. Urusan Pemerintah Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Pada Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp4.229.533.972,00 dengan realisasi sebesar Rp4.109.942.889,00 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00.

b. Pariwisata

Pada Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp3.534.508.010,00 dengan realisasi sebesar Rp3.320.440.787,00 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp148.900.858,00 dengan realisasi sebesar Rp107.381.400,00.

c. Pertanian

Pada Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp8.526.028.853,00 dengan realisasi sebesar Rp7.965.468.029,00 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp209.370.785,00 dengan realisasi sebesar Rp209.073.158,00.

d. Perdagangan

Pada Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp4.808.609.520,00 dengan

realisasi sebesar Rp4.394.379.706,00 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp2.709.252.118,00 dengan realisasi sebesar Rp2.603.898.063,00.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Pada Bidang Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp40.636.149.648,00 dengan realisasi sebesar Rp39.850.509.375,00 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp1.358.139.451,00 dengan realisasi sebesar Rp1.228.410.914,00.

b. Sekretariat DPRD

Pada Bidang Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp23.888.152.148,00 dengan realisasi sebesar Rp23.709.698.840,00 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp32.290.500,00 dengan realisasi sebesar Rp32.158.170,00.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

c. Perencanaan

Pada Bidang Perencanaan Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp5.258.196.121,00 dengan realisasi sebesar Rp5.010.559.384,00 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp112.516.773,00 dengan realisasi sebesar Rp93.866.105,00.

d. Keuangan

Pada Bidang Keuangan Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer untuk Belanja Operasi sebesar Rp17.948.963.994,00 dengan realisasi sebesar Rp16.607.532.000,00 Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp386.500.824,00 dengan realisasi sebesar Rp340.731.946,00, Belanja Tidak Terduga ditetapkan sebesar Rp1.258.086.930,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00, dan untuk Belanja Transfer ditetapkan sebesar Rp92.998.070.735,00 dengan realisasi sebesar Rp92.919.336.584,00.

e. Kepegawaian

Pada Bidang Kepegawaian Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp5.589.512.205,00 dengan realisasi sebesar Rp4.815.991.461,00 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp16.351.242,00 dengan realisasi sebesar Rp16.351.242,00.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Inspektorat

Pada Bidang Inspektorat Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp8.140.909.656,00 dengan realisasi sebesar Rp7.962.000.750,00 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp79.626.864,00 dengan realisasi sebesar Rp79.506.692,00.

7. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan

Pada Bidang Kecamatan Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp13.950.670.258,00 dengan realisasi sebesar Rp13.384.131.597,00 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp164.939.303,00 dengan realisasi sebesar Rp155.440.722,00.

8. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Operasi sebesar Rp3.422.715.821,00 dengan realisasi sebesar Rp3.366.093.638,00 sedangkan untuk Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp27.878.695,00 dengan realisasi sebesar Rp27.878.695,00.

### 3.3. Mandatory Spending

*Mandatory Spending* adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang – Undang yang tujuannya untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

- Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Untuk memenuhi ketentuan tersebut maka di dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 anggaran Pendidikan dianggarkan sebesar 20,59% atau sebesar Rp116.323.644.876,00 yang terdiri dari Belanja pada Dinas Pendidikan sebesar Rp113.215.395.478,00 dan Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan sebesar Rp3.108.249.398,00 dari APBD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar Rp565.083.576.739,00. Dari nilai anggaran bidang Pendidikan sebesar Rp116.323.644.876,00 terealisasi sebesar Rp94.587.008.339,00 atau 81,31%.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana besaran anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di luar gaji. Pada APBD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengalokasikan anggaran Kesehatan adalah sebesar 13,48% atau sebesar Rp58.464.975.733,00 dari APBD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar Rp433.674.811.311,00 nilai ini merupakan total APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar Rp565.083.576.739,00 dikurangi Belanja Gaji sebesar Rp131.408.765.428,00. Dari nilai anggaran bidang Kesehatan sebesar Rp58.464.975.733,00 terealisasi sebesar Rp55.399.777.147,00 atau 94,76%.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 40% (empat puluh persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar

daerah. Pada APBD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur daerah yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 25% atau sebesar Rp80.021.077.301,00 dari total komponen Dana Trsanfer Umum sebesar Rp313.979.515.200 yang terdiri dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp324.405.495.000,00, Dana Bagi Hasil sebesar Rp17.613.149.000,00 dikurangi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp34.201.864.400,00. Dari alokasi Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp80.021.077.301,00 terealisasi sebesar Rp67.912.289.644,00 atau 84,86%.

- Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pada APBD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengalokasikan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari total Dana Perimbangan yang telah diterima dikurangi Dana Alokasi Khusus adalah sebesar 10,00% atau sebesar Rp34.201.864.400,00 dari total Dana Perimbangan dikurangi Dana Aloksi Khusus sebesar Rp342.018.644.000,00 nilai ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp324.405.495.000,00 dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp17.613.149.000,00. Dari nilai anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp34.201.864.400,00 terealisasi sebesar Rp34.201.864.398 atau 100%.
- Kebijakan terkait kenaikan inflasi dan Bahan Bakar Minyak pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022 yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari total anggaran Dukungan Belanja Wajib Perlindungan Sosial dari Dana Transfer Umum (DTU) yaitu sebesar 2,00% atau sebesar Rp1.917.311.470,00 dari total komponen Dana Transfer Umum (DTU) di tambahan Dana Bagi Hasil (*Non-Earmarking*) Triwulan IV (empat) sebesar Rp95.833.875.250,00, tertuang dalam 4 (empat) point krusial;
  - 1) Bantuan Sosial Berupa Bantuan Langsung kepada Masyarakat kurang mampu dan bantuan barang kepada masyarakat kurang mampu yang di Kelola oleh Dinas Sosial

dengan capaian realisasi sebesar 99,92% atau sebesar Rp383.425.000,00 dari target anggaran sebesar Rp383.720.020,00.

- 2) Penciptaan Lapangan Kerja dalam bentuk barang diserahkan kepada tenaga kerja mandiri yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dengan capaian realisasi sebesar 57,06% atau sebesar Rp199.724.520,00 dari target anggaran sebesar Rp349.999.500,00, tidak maksimalnya capaian realisasi program ini disebabkan karena Pihak Ke 3 (tiga) selaku penyedia barang tidak mampu menyediakan barang – barang yang diperlukan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.
- 3) Subsidi Sektor Transportasi dalam bentuk pemberian subsidi transportasi angkutan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, program ini tidak telaksana dikarenakan keterbatasan anggaran
- 4) Perlindungan Sosial Lainnya
  - i. Bantuan sosial penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk nelayan kecil yang di kelola oleh dinas Perikanan dengan capaian realisasi sebesar 99,89% atau sebesar Rp378.541.080,00 dari target anggaran sebesar Rp378.965.100,00
  - ii. Bantuan kepada pelaku usaha mikro kecil yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan capaian realisasi sebesar 99,84% atau sebesar Rp614.000.000, dari target anggaran sebesar Rp615.000.000,00.
  - iii. Kegiatan Pasar Murah yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan capaian realisasi sebesar 70,14% atau sebesar Rp133.000.000,00 dari target anggaran sebesar Rp189.626.850,00 tidak maksimalnya capaian realisasi program ini dikarenakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tidak mencukupi karena pelaksanaan kegiatan ini berlangsung pada akhir Tahun Anggaran 2022.

#### 3.4. Program Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional untuk peningkatan produktivitas transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dijabarkan kedalam 7 (tujuh) program yang meliputi: memperkuat ketahanan

ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; meningkatkan sumber daya manusia dan berdaya saing; revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar; membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam mendukung 7 (tujuh) Program Prioritas Nasional melaksanakan 69 (enam puluh sembilan) program dengan anggaran sebesar Rp475.098.086.668,00 dengan realisasi mencapai Rp440.169.380.896,00 atau 92,65%, untuk rincian per masing-masing program dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel.3. 13  
Program Prioritas Nasional

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	45.358.306.745,00	37.439.152.194,00	82,54
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	0,00	0,00	0,00
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	209.364.889.056,00	195.376.352.523,00	93,32
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	91.005.466.550,00	81.257.571.750,00	89,29
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6.071.732.537,00	5.815.165.887,00	95,77
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	123.297.691.780,00	120.281.138.542,00	97,55
<b>Jumlah</b>		<b>475.098.086.668</b>	<b>440.169.380.896</b>	<b>92,65</b>

### 3.5. Stunting

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung percepatan pencegahan stunting sebesar Rp20.404.438.950,00 dengan realisasi mencapai Rp17.993.862.872,00 atau 92,69%, untuk rincian per masing-masing kegiatan serta status gizi balita per indikator (*Stunting, Wasting, Underweight*) di 8 (delapan) puskesmas dapat dilihat pada Lampiran 2.



Tabel.3. 14  
Stunting

No	Uraian	Jumlah	Presentase (%)	Keterangan
1	Stunting	385,00	6,99	Presentase dari total 5.511 bayi yang di ukur
2	Wasting	239,00	4,34	
3	Underweight	414,00	7,51	
<b>Jumlah</b>		<b>1.038,00</b>	<b>18,84</b>	

## BAB IV

### Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

#### 4.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Tahun Anggaran 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menargetkan capaian kinerja keuangan dari anggaran yang merupakan penentu pergerakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan. Yang paling mendasar adalah bagaimana rancangan pendapatan dan belanja daerah dapat menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat umumnya sebagai dasar keberhasilan pemerintahan daerah dalam satu periode tertentu.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) Nomor 02 tentang pengakuan pendapatan yang diterima pemerintah daerah telah menyelenggarakan aturan-aturan sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran.

Penyusunan laporan keuangan, baik pembiayaan belanja maupun realisasi pendapatan berpedoman pada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 52 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menganggarkan pendapatan sebesar Rp528.232.849.620,00 dan terealisasi sebesar Rp531.651.652.684,00 atau sebesar 100,65% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp556.390.481.151,99 realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp24.738.828.467,99 atau sebesar 4,45% dari realisasi pendapatan tahun lalu.

Sementara dari sisi belanja untuk Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menganggarkan sebesar Rp477.036.337.393,00 dan terealisasi sebesar Rp437.028.473.268,92 atau sebesar 91,61%; dari penjelasan diatas berikut disajikan tabel Anggaran dan

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Monggondow Timur Tahun Anggaran 2022.

Tabel 4. 1  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja  
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	PENDAPATAN DAERAH	528.232.849.620,00	531.651.652.684,00	100,65	556.390.481.151,99
2	BELANJA DAERAH	477.036.337.393,00	437.028.473.268,92	91,61	423.113.625.781,00

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Per Urusan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci pada tabel berikut;

Tabel 4. 2  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	80.000.000,00	195.634.889,00	244,54
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	530.000.000,00	143.397.050,00	27,06
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	130.000.000,00	74.130.500,00	57,02
4	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	527.492.849.620,00	531.238.490.245,00	100,71
<b>Jumlah</b>		<b>528.232.849.620,00</b>	<b>531.651.652.684,00</b>	<b>100,65</b>

Sedangkan untuk Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci pada table berikut;

Tabel 4. 3  
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	279.799.322.984,00	251.007.447.797,92	89,71
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	54.481.936.821,00	50.168.919.824,00	92,08
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	20.483.477.155,00	19.171.244.116,00	93,59
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	65.914.731.747,00	64.820.777.299,00	98,34
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	30.570.128.089,00	26.885.032.138,00	87,95
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	8.220.536.520,00	8.041.507.442,00	97,82
7	Unsur Kewilayahan	14.115.609.561,00	13.539.572.319,00	95,92
8	Unsur Pemerintahan Umum	3.450.594.516,00	3.393.972.333,00	98,36
<b>Jumlah</b>		<b>477.036.337.393,00</b>	<b>437.028.473.268,92</b>	<b>91,61</b>

#### 4.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

1. Permasalahan yang timbul dalam pencapaian target pendapatan daerah selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
  - Terkait pengelolaan pendapatan daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sepanjang Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Mongondow Timur tidak mendapati kendala yang berarti dimana di Tahun 2022 capaian realisasi Pendapatan Daerah mencapai 100,65% dari target anggaran yang ditetapkan.
2. Permasalahan yang timbul dalam pencapaian target belanja daerah selama Tahun Anggaran 2022 yang hanya mencapai 91,61% adalah sebagai berikut:
  - Rencana anggaran yang tidak realistis atau tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
  - Kendala administratif dalam proses pengadaan barang dan jasa, seperti regulasi yang kompleks dan prosedur pengadaan yang rumit.
  - Kurangnya kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, seperti tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang prosedur pengadaan dan manajemen keuangan.
  - Perubahan kebijakan yang tidak terduga atau tidak terencana, seperti perubahan prioritas atau anggaran yang dipotong.
  - Kurangnya koordinasi antara instansi dan program, sehingga anggaran tidak dialokasikan secara efektif dan efisien.
  - Kendala teknis dalam implementasi program, seperti masalah infrastruktur, logistik, atau sumber daya manusia yang tidak memadai.

## BAB V

### Kebijakan Akuntansi

Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan landasan dan pedoman penyusunan laporan keuangan daerah sudah mengalami beberapa kali perubahan dengan penerbitan Peraturan Bupati pertama Nomor 23a Tahun 2014 diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 23a Tahun 2014 selanjutnya pada tahun 2017 diubah lagi peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menggantikan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 dan terakhir pada Tahun 2019 diterbitkan lagi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai panduan dasar penyusunan laporan keuangan Tahun 2022.

Khusus untuk kebijakan akuntansi yang terkait dengan Akuntansi Persediaan, Akuntansi Aset Tetap dan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap telah dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang terhitung berlaku sejak tanggal 03 Januari 2019.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun.

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan SAP atas pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP, dan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari:

- 1) Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 2) Kebijakan Penyajian Laporan Keuangan;
- 3) Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA;
- 4) Kebijakan Akuntansi Belanja;
- 5) Kebijakan Akuntansi Transfer;
- 6) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
- 7) Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran;
- 8) Kebijakan Akuntansi Neraca;
- 9) Kebijakan Akuntansi Piutang;
- 10) Kebijakan Akuntansi Persediaan;
- 11) Kebijakan Akuntansi Investasi;
- 12) Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
- 13) Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
- 14) Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
- 15) Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
- 16) Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO;
- 17) Kebijakan Akuntansi Beban;
- 18) Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas;
- 19) Kebijakan Akuntansi LO dan LPE;
- 20) Kebijakan Akuntansi Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
- 21) Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.

### **5.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan**

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

## **5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 56 Tahun 2017, maka Kabupaten Bolaang Mongondow Timur resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak Tahun 2017. Agar dapat menyajikan keterbandingan laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten perlu menyajikan kembali Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) tahun sebelumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

## **5.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah sebagai berikut:

### **5.3.1. Pengukuran Pendapatan**

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni:

#### 5.3.1.1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

#### 5.3.1.2. Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

#### 5.3.2. Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah di mana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.



#### 5.3.2.1. Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

##### 5.3.2.1.1. Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Bantuan Keuangan, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban lain-lain

1. Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
2. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
3. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

4. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
5. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
6. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
8. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
9. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
10. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### 5.3.2.1.2. Beban Non Operasional

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

1. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
2. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

#### 5.3.2.1.3. Pengakuan Beban

Dalam penerapan transaksi keuangan pemerintah daerah beban diakui

1. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
2. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas
3. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas

mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal.

1. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
2. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

1. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada tanggal 31 Desember pelaporan belum dibayar.
2. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada tanggal 31 Desember pelaporan belum dibayar. Dalam hal pada tanggal pelaporan akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
3. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
4. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
5. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

6. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui Desa yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

#### 5.3.2.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto. Berikut beberapa definisi Belanja:

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

##### 5.3.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

##### 5.3.2.2.2. Belanja pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

#### 5.3.2.2.3. Belanja barang dan jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

#### 5.3.2.2.4. Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

#### 5.3.2.2.5. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

#### 5.3.2.2.6. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

#### 5.3.2.2.7. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

#### 5.3.2.2.8. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi jaringan (JIJ), aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

#### 5.3.2.2.9. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

#### 5.3.2.2.10. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja juga dapat diklasifikasi menjadi klasifikasi organisasi dan klasifikasi ekonomi, berikut rinciannya:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

Dalam penerapannya aktivitas belanja akan diakui jika terjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

### 5.3.3. Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah.

#### 5.3.2.3. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Dalam rangka penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Untuk kepentingan penyusunan penyajian Pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

#### 5.3.2.4. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Sedang untuk penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 5.3.4. Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai setara kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai setara kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing, dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

#### 5.3.5. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK. Kas dan setara kas yang diakui, terdiri dari:



#### 5.3.5.1. Kas di Kasda

Kas di Kasda merupakan kas yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) berasal dari saldo kas di Rekening Giro Daerah dan seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank Persepsi.

#### 5.3.5.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas.

#### 5.3.5.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke Kasda. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

#### 5.3.5.4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

#### 5.3.5.5. Kas Lainnya

Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

### 5.3.6. Pengukuran Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul

- e. Restrukturisasi, Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan utang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

### 5.3.7. Pengakuan Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 dilakukan reklasifikasi dan penyesuaian struktur Persediaan dan Beban Persediaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Untuk penerimaan dan pengeluaran fisik barang yang mempunyai kadaluarsa, diterapkan praktik bisnis yang sehat guna meminimalisirkan adanya barang yang rusak / usang, sedangkan pengeluarannya menggunakan metode penilaian FIFO.

Persediaan disajikan sebesar :

#### 5.3.7.1. Biaya Perolehan

Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

#### 5.3.7.2. Harga pokok produksi

Harga Pokok Produksi diperoleh dengan memproduksi sendiri harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

#### 5.3.7.3. Nilai Wajar

Nilai Wajar diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

#### 5.3.8. Pengakuan Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

##### 5.3.8.1. Pengukuran Investasi:

1. Dicatat sebesar nilai perolehan investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
  - a. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
  - b. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

2. Dicatat sebesar nilai wajar untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.
  - a. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

- b. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
3. Dicatat sebesar nilai nominal investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
4. Dicatat sebesar nilai tercatat atau nilai wajar lainnya investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
5. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga

#### 5.3.8.2. Penilaian Investasi Pemerintah daerah

##### 1. Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

##### 2. Metode Ekuitas,

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

##### 3. Metode Nilai Bersih

Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana

bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

### 5.3.9. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut :

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Kapitalisasi aset adalah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 dilakukan reklasifikasi dan penyesuaian struktur Aset Tetap, Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan awal aset tetap per unitnya sebagai berikut:

1. Peralatan dan mesin minimum sebesar Rp500.000,00, kecuali Rambu-Rambu minimum sebesar Rp.30.000.000,00 dan Peralatan Olah Raga minimum sebesar Rp.300.000,00.
2. Gedung dan bangunan minimum sebesar Rp30.000.000,00.

3. Jalan, jaringan, irigasi minimum sebesar Rp30.000.000,00, kecuali Jaringan Listrik dan Telepon minimum sebesar Rp3.000.000,00.
4. Aset tetap lainnya minimum sebesar Rp300.000,00, kecuali Hewan minimum sebesar Rp500.000 dan Aset Tetap Renovasi minimum Rp.30.000.000,00

#### 5.3.9.1. Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran + 1.

#### 5.3.9.2. Pengukuran Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi :

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

#### 5.3.9.5. Aset Lain-Lain

Aset Lain – Lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

#### 5.3.10. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilainya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah Kewajiban diklasifikasikan menjadi beberapa bagian :

##### 1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.

##### 2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

### 5.3.11. Pengukuran Ekuitas

Dalam pengelolaan keuangan daerah Ekuitas dapat di klasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah/dikurang oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA.

3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat (reciprocal account) untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

## 5.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

### 5.4.1. Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

5.4.1.1. Kesalahan tidak Berulang

1. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
2. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan



pembetulan pada akun yang bersangkutan. Akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut :

- a. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

#### 5.4.1.2. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

**BAB VI****Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan****6.1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat diuraikan sebagai berikut:

**6.1.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pada Tahun Anggaran 2022 Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ditetapkan sebesar Rp528.232.849.620,00 dan sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp531.651.652.684,00 atau sebesar 100,65% dari target anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 terjadi penurunan realisasi sebesar 4,45% atau sebesar Rp24.738.828.467,99. Berikut di sajikan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 1

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	528.232.849.620,00	531.651.652.684,00	100,65	556.390.481.151,99	(24.738.828.467,99)	(4,45)

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer
3. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dari ke tiga jenis pendapatan diatas pada Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar bagi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan realisasi sebesar Rp505.854.623.787,00 dengan total kontribusi sebesar 95,15% dari total Pendapatan Daerah selanjutnya di susul oleh Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp12.906.932.247,00 dengan total kontribusi sebesar 2,43% dan yang terakhir adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp12.890.096.650,00 dengan total kontribusi sebesar 2,42%.

Berdasarkan realisasi masing-masing pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021, terdapat kenaikan dan penurunan pendapatan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 2  
Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>528.232.849.620,00</b>	<b>531.651.652.684,00</b>	<b>100,65</b>	<b>556.390.481.151,99</b>	<b>(24.738.828.467,99)</b>	<b>(4,45)</b>
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.602.957.279,00	12.890.096.650,00	102,28	13.365.205.966,99	(475.109.316,99)	(3,55)
2	PENDAPATAN TRANSFER	500.829.677.460,00	505.854.623.787,00	101,00	533.319.557.185,00	(27.464.933.398,00)	(5,15)
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.800.214.881,00	12.906.932.247,00	87,21	9.705.718.000,00	3.201.214.247,00	32,98

#### 6.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp12.890.096.650,00, atau mencapai 102,28% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan sebesar Rp12.602.957.279,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar 3,55%. atau sebesar Rp475.109.316,99. Jika dilihat dari total Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyerap 2,42% dari total Pendapatan Daerah. Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 3  
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>12.602.957.279,00</b>	<b>12.890.096.650,00</b>	<b>102,28</b>	<b>13.365.205.966,99</b>	<b>(475.109.316,99)</b>	<b>(3,55)</b>
1	Pendapatan Pajak Daerah	7.608.173.350,00	7.804.348.931,00	102,58	5.999.345.024,00	1.805.003.907,00	30,09
2	Pendapatan Retribusi Daerah	740.000.000,00	397.832.320,00	53,76	280.887.019,00	116.945.301,00	41,63
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	948.010.307,00	948.010.307,00	100,00	1.098.472.126,00	(150.461.819,00)	(13,70)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.306.773.622,00	3.739.905.092,00	113,10	5.986.501.797,99	(2.246.596.705,99)	(37,53)

#### 6.1.1.1.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Pajak Daerah - LRA adalah pajak daerah yang telah dipungut Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pajak Daerah. Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp7.804.348.931,00, atau mencapai 102,58% dari anggaran Pajak Daerah yang ditetapkan sebesar Rp7.608.173.350,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 30,09%. Jika dilihat dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Pajak Daerah menyerap 60,37% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rincian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 4  
Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Pajak Daerah</b>	<b>7.608.173.350,00</b>	<b>7.804.348.931,00</b>	<b>102,58</b>	<b>5.999.345.024,00</b>	<b>1.805.003.907,00</b>	<b>30,09</b>
1	Pajak Hotel	35.000.000,00	35.106.250,00	100,30	36.875.000,00	(1.768.750,00)	(4,80)
2	Pajak Restoran	550.000.000,00	688.913.157,00	125,26	550.184.759,00	138.728.398,00	25,21

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
3	Pajak Hiburan	22.500.000,00	22.950.000,00	102,00	20.300.000,00	2.650.000,00	13,05
4	Pajak Reklame	202.500.000,00	211.332.875,00	104,36	224.603.125,00	(13.270.250,00)	(5,91)
5	Pajak Penerangan Jalan	1.869.978.500,00	2.078.981.260,00	111,18	1.749.893.719,00	329.087.541,00	18,81
6	Pajak Sarang Burung Walet	10.250.000,00	10.600.000,00	103,41	11.400.000,00	(800.000,00)	(7,02)
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	650.000.000,00	320.172.910,00	49,26	121.266.649,00	198.906.261,00	164,02
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.418.527.227,00	2.401.143.531,00	99,28	2.397.412.094,00	3.731.437,00	0,16
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.849.417.623,00	2.035.148.948,00	110,04	887.409.678,00	1.147.739.270,00	129,34

Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah hingga 102,58% dari target anggaran Pajak Daerah Tahun 2022 dipengaruhi meredanya Pandemi Covid-19, sehingga objek – objek Pendapatan Daerah yang menjadi sumber – sumber pendapatan Daerah mulai beroperasi sebagai mana mestinya, disisi lain dampak Pandemi Covid-19 ini juga berimbas pada objek pendapatan yang berhubungan dengan aktifitas masyarakat dimana sektor – sektor tersebut butuh sosialisasi masyarakat secara terus menerus tentang pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19 agar masyarakat bisa beraktivitas seperti sebelumnya dan hal tersebut tentu akan berdampak pada objek – objek pajak yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat.

Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022, secara keseluruhan bersumber dari prosedur pemungutan Pajak Daerah yang merupakan komponen Pajak Daerah yang bersumber dari Wajib Pajak.

#### 1. Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp35.106.250,00, atau mencapai 100,30% dari anggaran Pajak Hotel yang ditetapkan sebesar Rp35.000.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Pajak Hotel mengalami penurunan sebesar 4,80%. Jika dilihat dari total Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Pajak Hotel menyerap 0,45% dari total Pajak Daerah. Rincian Pajak Hotel Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 5  
Pajak Hotel Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Pajak Hotel</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.106.250,00</b>	<b>100,30</b>	<b>36.875.000,00</b>	<b>(1.768.750,00)</b>	<b>(4,80)</b>
1	Pajak Hotel	35.000.000,00	35.106.250,00	100,30	36.875.000,00	(1.768.750,00)	(4,80)

## 2. Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp688.913.157,00, atau mencapai 125,26% dari anggaran Pajak Restoran yang ditetapkan sebesar Rp550.000.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Pajak Restoran mengalami kenaikan sebesar 25,21%. Jika dilihat dari total Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Pajak Restoran menyerap 8,83% dari total Pajak Daerah. Rincian Pajak Restoran Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 6  
Pajak Restoran Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Pajak Restoran</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>688.913.157,00</b>	<b>125,26</b>	<b>550.184.759,00</b>	<b>138.728.398,00</b>	<b>25,21</b>
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	550.000.000,00	688.913.157,00	125,26	550.184.759,00	138.728.398,00	25,21

## 3. Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp22.950.000,00, atau mencapai 102,00% dari anggaran Pajak Hiburan yang ditetapkan sebesar Rp22.500.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Pajak Hiburan mengalami kenaikan sebesar 13,05%. Jika dilihat dari total Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Pajak Hiburan menyerap 0,29% dari total Pajak Daerah. Rincian Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 7

## Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>22.950.000,00</b>	<b>102,00</b>	<b>20.300.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>13,05</b>
1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	22.500.000,00	22.950.000,00	102,00	20.300.000,00	2.650.000,00	13,05

## 4. Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp211.332.875,00, atau mencapai 104,36% dari anggaran Pajak Reklame yang ditetapkan sebesar Rp202.500.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Pajak Reklame mengalami penurunan sebesar 5,91%. Jika dilihat dari total Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Pajak Reklame menyerap 2,71% dari total Pajak Daerah. Rincian Pajak Reklame Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 8

## Pajak Reklame Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Pajak Reklame</b>	<b>202.500.000,00</b>	<b>211.332.875,00</b>	<b>104,36</b>	<b>224.603.125,00</b>	<b>(13.270.250,00)</b>	<b>(5,91)</b>
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	202.500.000,00	211.332.875,00	104,36	224.603.125,00	(13.270.250,00)	(5,91)

## 5. Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.078.981.260,00, atau mencapai 111,18% dari anggaran Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan sebesar Rp1.869.978.500,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan sebesar 18,81%. Jika dilihat dari total Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Pajak Penerangan Jalan menyerap 26,64% dari total Pajak Daerah. Rincian Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 9

## Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Pajak Penerangan Jalan	1.869.978.500,00	2.078.981.260,00	111,18	1.749.893.719,00	329.087.541,00	18,81
1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.869.978.500,00	2.078.981.260,00	111,18	1.749.893.719,00	329.087.541,00	18,81

## 6. Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp10.600.000,00, atau mencapai 103,41% dari anggaran Pajak Sarang Burung Walet yang ditetapkan sebesar Rp10.250.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Pajak Sarang Burung Walet mengalami penurunan sebesar 7,02%. Jika dilihat dari total Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Pajak Sarang Burung Walet menyerap 0,14% dari total Pajak Daerah. Rincian Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 10

## Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Pajak Sarang Burung Walet	10.250.000,00	10.600.000,00	103,41	11.400.000,00	(800.000,00)	(7,02)
1	Pajak Sarang Burung Walet	10.250.000,00	10.600.000,00	103,41	11.400.000,00	(800.000,00)	(7,02)

## 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp320.172.910,00, atau mencapai 49,26% dari anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan sebesar Rp650.000.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami kenaikan sebesar 164,02%. Jika dilihat dari total Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menyerap 4,10% dari total Pajak Daerah. Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6.1. 11

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	650.000.000,00	320.172.910,00	49,26	121.266.649,00	198.906.261,00	164,02
1	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	650.000.000,00	320.172.910,00	49,26	121.266.649,00	198.906.261,00	164,02

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 yang hanya mencapai 49,26%, dikarenakan di Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam menentukan Harga Satuan masih menggunakan Harga Satuan lama sampai dengan tanggal 9 November 2022 sehingga dalam perhitungan Pajak yang diperoleh tidak maksimal. Disisi lain kenaikan yang signifikan jika di bandingkan dengan Tahun sebelumnya dimana kenaikanya mencapai 164,02%, berikut beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut :

- Meningkatnya Proyek Pekerjaan Fisik di Tahun 2022
- Menurunnya Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Tahun 2022 sehingga berpengaruh terhadap presentase realisasi di banding Tahun sebelumnya.
- Pemberlakuan SK Gubernur No. 377 Tahun 2022 Terkait Penetapan Harga Patokan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sejak Tanggal 9 November 2022.

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.401.143.531,00, atau mencapai 99,28% dari anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yang ditetapkan sebesar Rp2.418.527.227,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) mengalami kenaikan sebesar 0,16%. Jika dilihat dari total Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) menyerap 30,77% dari total Pajak Daerah. Rincian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 12

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)		2.418.527.227,00	2.401.143.531,00	99,28	2.397.412.094,00	3.731.437,00	0,16
1	PBBP2	2.418.527.227,00	2.401.143.531,00	99,28	2.397.412.094,00	3.731.437,00	0,16

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 yang hanya mencapai 99,28%, dikarenakan di Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur meningkatkan target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp100.000.000,00 dari tahun sebelumnya, disisi lain terdapat beberapa wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran.

9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.035.148.948,00, atau mencapai 110,04% dari anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang ditetapkan sebesar Rp1.849.417.623,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami kenaikan sebesar 129,34%. Jika dilihat dari total Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menyerap 26,08% dari total Pajak Daerah. Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 13

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		1.849.417.623,00	2.035.148.948,00	110,04	887.409.678,00	1.147.739.270,00	129,34
1	BPHTB-Pemindahan Hak	1.849.417.623,00	2.035.148.948,00	110,04	887.409.678,00	1.147.739.270,00	129,34

Kenaikan Signifikan Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 atas Tahun sebelumnya yaitu

sebesar 129,34% hal ini dikarenakan di Tahun 2022 terdapat Pembebasan lahan oleh PT. Arafura Surya Alam (ASA).

Upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur guna memaksimalkan serta meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Tahun Anggaran 2022;

- 1) Melakukan sosialisasi agar setiap transaksi jual beli tanah berupa peralihan hak atas tanah dan bangunan dilakukan secara legal;
- 2) Memberlakukan dan menetapkan camat sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT);
- 3) Membahas bersama PPAT (camat), pemerintah desa (kepala desa dan aparat desa) dan pemerintah daerah mengenai mekanisme pemungutan biaya yang dibebankan pada pembeli atas transaksi jual beli tanah dan bangunan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- 4) Melakukan Pembahasan Bersama pihak – pihak yang terkait dengan proses pemungutan biaya yang disebabkan atas transaksi jual beli tanah dan bangunan dalam hal ini PPAT (camat) Pemerintah Desa (kepala Desa dan aparat desa) yang bertujuan merumuskan besaran biaya atas transaksi jual beli tanah dan bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **6.1.1.1.2. Retribusi Daerah**

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pendapatan Retribusi Daerah adalah retribusi daerah yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 2 Tahun 2012 tentang pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran, dan Retribusi PKB-Mobil Penumpang-Minibus;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan, Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum; dan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 4 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Parkir - Di Tepi Jalan Umum.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp397.832.320,00, atau mencapai 53,76% dari anggaran Pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebesar Rp740.000.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 41,63%. Jika dilihat dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Pendapatan Retribusi Daerah menyerap 3,09% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 14  
Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>740.000.000,00</b>	<b>397.832.320,00</b>	<b>53,76</b>	<b>280.887.019,00</b>	<b>116.945.301,00</b>	<b>41,63</b>
1	Retribusi Jasa Umum	185.000.000,00	224.635.270,00	121,42	84.205.119,00	140.430.151,00	166,77
2	Retribusi Jasa Usaha	55.000.000,00	45.561.000,00	82,84	18.590.000,00	26.971.000,00	145,08
3	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00	127.636.050,00	25,53	178.091.900,00	(50.455.850,00)	(28,33)

Realisasi Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022, secara keseluruhan bersumber dari prosedur pemungutan Retribusi Daerah yang merupakan komponen Retribusi Daerah yang bersumber dari Wajib Pajak.

1. Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp224.635.270,00, atau mencapai 121,42% dari anggaran Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan sebesar Rp185.000.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Retribusi Jasa Umum mengalami kenaikan sebesar 166,77%. Jika dilihat dari total Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Retribusi Jasa Umum menyerap 56,46% dari total Pendapatan Retribusi Daerah. Rincian Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 15  
Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>224.635.270,00</b>	<b>121,42</b>	<b>84.205.119,00</b>	<b>140.430.151,00</b>	<b>166,77</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	55.000.000,00	157.704.770,00	286,74	47.577.619,00	110.127.151,00	231,47
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	30.000.000,00	15.761.000,00	52,54	4.901.000,00	10.860.000,00	221,59
3	Retribusi Pelayanan Pasar	100.000.000,00	51.169.500,00	51,17	31.726.500,00	19.443.000,00	61,28

Kenaikan realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi pada kelompok Retribusi Jasa Umum di sumbangkan oleh pendapatan retribusi pada kategori Retribusi Pelayanan Kesehatan yang mencapai 286,74% dari target APBD T.A 2022. Kenaikan yang signifikan ini terjadi karena adanya penerimaan CPNS dan P3K tahun 2022 yang diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan dan memperoleh surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp45.561.000,00, atau mencapai 82,84% dari anggaran Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan sebesar Rp55.000.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Retribusi Jasa Usaha mengalami kenaikan sebesar 145,08%. Jika dilihat dari total Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Retribusi Jasa Usaha menyerap 11,45% dari total Pendapatan Retribusi Daerah. Rincian Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 16  
Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>45.561.000,00</b>	<b>82,84</b>	<b>18.590.000,00</b>	<b>26.971.000,00</b>	<b>145,08</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	25.000.000,00	22.600.000,00	90,40	17.590.000,00	5.010.000,00	28,48
2	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00	22.961.000,00	76,54	1.000.000,00	21.961.000,00	2.196,10

Kenaikan Pendapatan Kelompok Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2022, sangat dipengaruhi oleh:

- a. Belanja Modal pada kegiatan infrastruktur Daerah berupa pengaspalan Jalan sudah mulai di anggarkan pada APBD yang pada tahun sebelumnya hampir tidak ada akibat pemotongan anggaran untuk menghadapi wabah Covid-19. Pada proyek pengaspalan ini berimplikasi pada penyewaan alat laboratorium aspal dan Alat Angkutan yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
  - b. Membaiknya sektor pariwisata setelah di longgarkannya status Daerah kabupaten Bolaang mongondow Timur pada kategori PPKM Level I dan II (Tidak seketat Level 3-4) wabah Covid-19, mendorong tempat-tempat pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mulai beroperasi dan mulai melakukan penyeteroran Retribusi tempat rekreasi.
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp127.636.050,00, atau mencapai 25,53% dari anggaran Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Retribusi Perizinan Tertentu mengalami penurunan sebesar 28,33%. Jika dilihat dari total Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Retribusi Perizinan Tertentu menyerap 32,08% dari total Pendapatan Retribusi Daerah. Rincian Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 17  
Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00	127.636.050,00	25,53	178.091.900,00	(50.455.850,00)	(28,33)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000,00	127.636.050,00	25,53	178.091.900,00	(50.455.850,00)	(28,33)

Penurunan Pendapatan dari sektor Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dipengaruhi oleh :

- a. Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang masih stagnan akibat Covid-19, menyebabkan tingkat kemampuan masyarakat dan pengusaha melakukan pembangunan rumah maupun gedung usaha sangat rendah.
- b. Kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB pada rumah-rumah permanen yang sudah dibangun yang menurut Peraturan harus memiliki izin IMB ( Izin Mendirikan Bangunan ) sangat rendah.

#### 6.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dikelola secara terpisah dari kekayaan daerah lainnya. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan yang dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dan tidak termasuk dalam kekayaan daerah yang menjadi milik bersama dengan pemerintah pusat atau kekayaan daerah yang dimiliki oleh masyarakat.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp948.010.307,00, atau mencapai 100,00% dari anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditetapkan sebesar Rp948.010.307,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami penurunan sebesar 13,70%. Jika dilihat dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan menyerap 7,35% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 18

#### Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	948.010.307,00	948.010.307,00	100,00	1.098.472.126,00	(150.461.819,00)	(13,70)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	948.010.307,00	948.010.307,00	100,00	1.098.472.126,00	(150.461.819,00)	(13,70)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal pada BUMD PT Bank SulutGo. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah berupa dividen atas penyertaan modal pada BUMD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1. 19

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	948.010.307,00	948.010.307,00	100,00	1.098.472.126,00	(150.461.819,00)	(13,70)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	948.010.307,00	948.010.307,00	100,00	1.098.472.126,00	(150.461.819,00)	(13,70)

6.1.1.1.4. Lain-Lain PAD Yang Sah

Penerimaan keuangan dari sumber-sumber lain yang sah, seperti hasil penjualan aset daerah, bunga bank, dan lain-lain.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.739.905.092,00, atau mencapai 113,10% dari anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan sebesar Rp3.306.773.622,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan sebesar 37,53%. Jika dilihat dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Lain-lain PAD yang Sah menyerap 29,01% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 20

Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Lain-lain PAD yang Sah	3.306.773.622,00	3.739.905.092,00	113,10	5.986.501.797,99	(2.246.596.705,99)	(37,53)
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	87.554.400,00	0,00	125.000.000,00	(37.445.600,00)	(29,96)
2	Jasa Giro	1.269.600.518,00	1.274.340.366,00	100,37	1.269.600.517,84	4.739.848,16	0,37
3	Pendapatan Bunga	670.616.438,00	767.383.611,00	114,43	113.643.880,00	653.739.731,00	575,25



menjadi kewenangan daerah atau lembaga tersebut. Transfer ini dilakukan dalam rangka memperkuat otonomi daerah dan memberikan dukungan keuangan kepada daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahannya. Transfer pemerintah pusat dapat berupa dana bagi hasil, dana perimbangan, dana alokasi khusus, dan dana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah atau lembaga penerima.

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp420.549.244.023,00, atau mencapai 100,52% dari anggaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang ditetapkan sebesar Rp418.363.117.409,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar 0,94%. Jika dilihat dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan menyerap 83,14% dari total Pendapatan Transfer. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 28

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>	<b>418.363.117.409,00</b>	<b>420.549.244.023,00</b>	<b>100,52</b>	<b>424.545.952.899,00</b>	<b>(3.996.708.876,00)</b>	<b>(0,94)</b>
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	8.678.438.531,00	9.147.792.836,00	105,41	10.135.720.264,00	(987.927.428,00)	(9,75)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	16.995.885.797,00	25.609.303.235,00	150,68	17.790.259.831,00	7.819.043.404,00	43,95
3	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	324.405.495.000,00	324.032.723.653,00	99,89	324.042.794.000,00	(10.070.347,00)	(0,00)
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	37.845.471.081,00	37.682.369.087,00	99,57	44.856.481.650,00	(7.174.112.563,00)	(15,99)
5	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	30.437.827.000,00	24.077.055.212,00	79,10	27.720.697.154,00	(3.643.641.942,00)	(13,14)

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp9.147.792.836,00, atau mencapai 105,41% dari anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditetapkan sebesar Rp8.678.438.531,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan sebesar 9,75%. Jika dilihat dari total Dana Perimbangan Pemerintah

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) menyerap 2,18% dari total Dana Perimbangan.

Tabel 6.1. 29

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
<b>Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)</b>		<b>8.678.438.531,00</b>	<b>9.147.792.836,00</b>	<b>105,41</b>	<b>10.135.720.264,00</b>	<b>(987.927.428,00)</b>	<b>(9,75)</b>
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.995.555.885,00	6.464.910.190,00	107,83	7.068.189.064,00	(603.278.874,00)	(8,54)
2	DBH PPh Pasal 21	2.506.767.000,00	2.506.767.000,00	100,00	3.067.531.200,00	(560.764.200,00)	(18,28)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	176.115.646,00	176.115.646,00	100,00	0,00	176.115.646,00	0,00

2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp25.609.303.235,00, atau mencapai 150,68% dari anggaran Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang ditetapkan sebesar Rp16.995.885.797,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam mengalami kenaikan sebesar 43,95%. Jika dilihat dari total Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam menyerap 6,09% dari total Dana Perimbangan.

Tabel 6.1. 30

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>		<b>16.995.885.797,00</b>	<b>25.609.303.235,00</b>	<b>150,68</b>	<b>17.790.259.831,00</b>	<b>7.819.043.404,00</b>	<b>43,95</b>
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.386.274.000,00	2.492.989.534,00	179,83	1.288.847.042,00	1.204.142.492,00	93,43
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.727.472.000,00	2.691.398.393,00	155,80	15.068.996.206,00	(12.377.597.813,00)	(82,14)
3	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	11.922.922.797,00	18.465.698.308,00	154,88	0,00	18.465.698.308,00	0,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	906.000,00	906.000,00	100,00	17.986.276,00	(17.080.276,00)	(94,96)
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.414.430.307,00	543.880.693,00	38,45

### 3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp324.032.723.653,00, atau mencapai 99,89% dari anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditetapkan sebesar Rp324.405.495.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan sebesar 0,00%. Jika dilihat dari total Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) menyerap 77,05% dari total Dana Perimbangan.

Tabel 6.1. 31

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	324.405.495.000,00	324.032.723.653,00	99,89	324.042.794.000,00	(10.070.347,00)	(0,00)
1	DAU	324.405.495.000,00	324.032.723.653,00	99,89	324.042.794.000,00	(10.070.347,00)	(0,00)

### 4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp37.682.369.087,00, atau mencapai 99,57% dari anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang ditetapkan sebesar Rp37.845.471.081,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami penurunan sebesar 15,99%. Jika dilihat dari total Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menyerap 8,96% dari total Dana Perimbangan.

Tabel 6.1. 32

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	37.845.471.081,00	37.682.369.087,00	99,57	44.856.481.650,00	(7.174.112.563,00)	(15,99)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	293.500.243,00	293.500.243,00	100,00	268.506.514,00	24.993.729,00	9,31
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.460.198.734,00	3.460.198.734,00	100,00	17.352.982.264,00	(13.892.783.530,00)	(80,06)

*Handwritten signature/initials*

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.716.597.786,00	4.716.597.786,00	100,00	1.361.747.168,00	3.354.850.618,00	246,36
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	203.437.866,00	203.437.866,00	100,00	0,00	203.437.866,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2.130.650.765,00	2.130.650.765,00	100,00	3.158.415.228,00	(1.027.764.463,00)	(32,54)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.912.305.391,00	2.749.203.397,00	94,40	1.903.769.374,00	845.434.023,00	44,41
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	191.972.200,00	191.972.200,00	100,00	0,00	191.972.200,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	1.812.764.331,00	1.812.764.331,00	100,00	1.158.958.034,00	653.806.297,00	56,41
9	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	1.036.674.398,00	(1.036.674.398,00)	(100,00)
10	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	3.085.214.801,00	(3.085.214.801,00)	(100,00)
11	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.466.557.800,00	(1.466.557.800,00)	(100,00)
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	9.798.702.115,00	9.798.702.115,00	100,00	9.599.128.979,00	199.573.136,00	2,08
13	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	6.853.447.650,00	6.853.447.650,00	100,00	0,00	6.853.447.650,00	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.790.478.991,00	(1.790.478.991,00)	(100,00)
15	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.471.894.000,00	5.471.894.000,00	100,00	0,00	5.471.894.000,00	0,00
16	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.768.461.099,00	(1.768.461.099,00)	(100,00)
17	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	905.587.000,00	(905.587.000,00)	(100,00)

#### 5. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp24.077.055.212,00, atau mencapai 79,10% dari anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang ditetapkan sebesar Rp30.437.827.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik mengalami penurunan sebesar 13,14%. Jika dilihat dari total Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik menyerap 5,73% dari total Dana Perimbangan.

*Handwritten signature*

Tabel 6.1. 33

## Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>	<b>30.437.827.000,00</b>	<b>24.077.055.212,00</b>	<b>79,10</b>	<b>27.720.697.154,00</b>	<b>(3.643.641.942,00)</b>	<b>(13,14)</b>
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	16.709.726.000,00	14.642.916.980,00	87,63	16.903.979.000,00	(2.261.062.020,00)	(13,38)
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	534.000.000,00	625.000.000,00	117,04	135.000.000,00	490.000.000,00	362,96
3	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.789.020.000,00	579.618.000,00	32,40	1.401.300.000,00	(821.682.000,00)	(58,64)
4	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	272.920.000,00	0,00	0,00	737.700.000,00	(737.700.000,00)	(100,00)
5	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.976.405.000,00	5.386.810.342,00	67,53	5.691.520.001,00	(304.709.659,00)	(5,35)
6	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	41.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.778.923.000,00	1.572.722.270,00	88,41	1.675.683.751,00	(102.961.481,00)	(6,14)
8	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	852.941.402,00	(852.941.402,00)	(100,00)
9	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0,00	0,00	0,00	322.573.000,00	(322.573.000,00)	(100,00)
10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	383.914.000,00	318.487.620,00	82,96	0,00	318.487.620,00	0,00
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	601.800.000,00	601.800.000,00	100,00	0,00	601.800.000,00	0,00
12	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	349.700.000,00	349.700.000,00	100,00	0,00	349.700.000,00	0,00

**6.1.1.2.2. Dana Insentif Daerah (DID)**

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp6.220.649.000,00, atau mencapai 100,00% dari anggaran Dana Insentif Daerah (DID) yang ditetapkan sebesar Rp6.220.649.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Dana Insentif Daerah (DID) mengalami penurunan sebesar 75,82%. Jika dilihat dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Dana Insentif Daerah (DID) menyerap 1,23% dari total Pendapatan Transfer. Rincian Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 34

Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Dana Insentif Daerah (DID)		6.220.649.000,00	6.220.649.000,00	100,00	25.721.357.000,00	(19.500.708.000,00)	(75,82)
1	DID	6.220.649.000,00	6.220.649.000,00	100,00	25.721.357.000,00	(19.500.708.000,00)	(75,82)

Penjelasan terkait realisasi penyerapan dana insentif daerah (DID) di Tahun sebelumnya dijabarkan sebagai rincian dari dana penyesuaian yang masih merupakan komponen dana transfer Pemerintah Pusat namun merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 90 Tahun 2019 tentang kasifikasi dan nomenklatur bagan akun standar (BAS) dana insentif daerah (DID) merupakan komponen Transfer Pemerintah Pusat sehingga di Tahun 2022 penjelasan terkait realiasi penyerapan dana insentif daerah (DID) dijabarkan sebagai rincian dari Transfer Pemerintah Pusat.

**6.1.1.2.3. Dana Desa**

Realisasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 dari anggarannya ditetapkan sebesar Rp57.961.389.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Dana Desa mengalami penurunan sebesar 15,93%. Jika dilihat dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Dana Desa menyerap 11,46% dari total Pendapatan Transfer. Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 35

Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Dana Desa		57.961.389.000,00	57.961.389.000,00	100,00	68.942.358.000,00	(10.980.969.000,00)	(15,93)
1	Dana Desa	57.961.389.000,00	57.961.389.000,00	100,00	68.942.358.000,00	(10.980.969.000,00)	(15,93)

Penjelasan terkait realisasi penyerapan dana desa di Tahun sebelumnya dijabarkan sebagai rincian dari dana penyesuaian yang masih merupakan komponen dana transfer Pemerintah Pusat namun merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 90 Tahun 2019 tentang kasifikasi dan

nomenklatur bagan akun standar (BAS) dana desa merupakan komponen Transfer Pemerintah Pusat sehingga di Tahun 2022 penjelasan terkait realiasi penyerapan dana desa dijabarkan sebagai rincian dari Transfer Pemerintah Pusat.

#### 6.1.1.2.4. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Bagi hasil pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten adalah pembagian sumber daya keuangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Pemerintah provinsi biasanya memperoleh sumber daya keuangan dari pajak dan retribusi yang dikumpulkan dari masyarakat di wilayah provinsi tersebut. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota memperoleh sumber daya keuangan dari pajak dan retribusi yang dikumpulkan dari masyarakat di wilayah kabupaten/kota tersebut.

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp21.123.341.764,00, atau mencapai 115,53% dari anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah yang ditetapkan sebesar Rp18.284.522.051,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan sebesar 49,71%. Jika dilihat dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Pendapatan Transfer Antar Daerah menyerap 4,18% dari total Pendapatan Transfer. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 36

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	18.284.522.051,00	21.123.341.764,00	115,53	14.109.889.286,00	7.013.452.478,00	49,71
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	18.284.522.051,00	21.123.341.764,00	115,53	14.109.889.286,00	7.013.452.478,00	49,71

#### Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan bagi hasil pajak oleh pemerintah provinsi sulawesi utara kepada pemerintah daerah. Rincian pendapatan bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 37

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>18.284.522.051,00</b>	<b>21.123.341.764,00</b>	<b>115,53</b>	<b>14.109.889.286,00</b>	<b>7.013.452.478,00</b>	<b>49,71</b>
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.443.148.887,00	3.757.158.681,00	109,12	2.560.327.724,00	1.196.830.957,00	46,75
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.915.326.178,00	3.145.133.795,00	107,88	1.635.626.147,00	1.509.507.648,00	92,29
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.502.728.686,00	9.198.997.828,00	122,61	5.561.248.599,00	3.637.749.229,00	65,41
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	84.160.909,00	115.861.309,00	137,67	61.378.814,00	54.482.495,00	88,76
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.339.157.391,00	4.906.190.151,00	113,07	4.291.308.002,00	614.882.149,00	14,33

**6.1.1.3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah penghasilan yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan yang telah ditetapkan secara khusus oleh peraturan perundang – undangan.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp12.906.932.247,00, atau mencapai 87,21% dari anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang ditetapkan sebesar Rp14.800.214.881,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan sebesar 32,98%. Jika dilihat dari total Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah menyerap 2,43% dari total Pendapatan Daerah. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 38

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>14.800.214.881,00</b>	<b>12.906.932.247,00</b>	<b>87,21</b>	<b>9.705.718.000,00</b>	<b>3.201.214.247,00</b>	<b>32,98</b>
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.800.214.881,00	12.906.932.247,00	87,21	9.705.718.000,00	3.201.214.247,00	32,98



6.1.1.3.1. Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp12.906.932.247,00, atau mencapai 87,21% dari anggaran Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan sebesar Rp14.800.214.881,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengalami kenaikan sebesar 32,98%. Jika dilihat dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan menyerap 100,00% dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 39

Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.800.214.881,00	12.906.932.247,00	87,21	9.705.718.000,00	3.201.214.247,00	32,98
1	Lain-lain Pendapatan	14.800.214.881,00	12.906.932.247,00	87,21	9.705.718.000,00	3.201.214.247,00	32,98

Lain-lain Pendapatan

Realisasi Lain - Lain Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp12.906.932.247,00, atau mencapai 87,21% dari anggaran Lain - Lain Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp14.800.214.881,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Lain - Lain Pendapatan mengalami kenaikan sebesar 32,98%. Jika dilihat dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Lain - Lain Pendapatan menyerap 100,00% dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian Lain - Lain Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 40  
Lain-lain Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Lain - Lain Pendapatan	14.800.214.881,00	12.906.932.247,00	87,21	9.705.718.000,00	3.201.214.247,00	32,98
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	10.759.621.725,00	9.492.117.624,00	88,22	9.705.718.000,00	(213.600.376,00)	(2,20)
2	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	4.040.593.156,00	3.414.814.623,00	84,51	0,00	3.414.814.623,00	0,00

1. Pendapatan Hibah Dana BOS

Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp9.492.117.624,00, atau mencapai 88,22% dari anggaran Pendapatan Hibah Dana BOS yang ditetapkan sebesar Rp10.759.621.725,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Hibah Dana BOS mengalami penurunan sebesar 2,20%.

2. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan, Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.414.814.623,00, atau mencapai 84,51% dari anggaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang ditetapkan sebesar Rp4.040.593.156,00.

**6.1.2. Belanja Daerah**

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp437.028.473.268,92 atau mencapai 91,61% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp477.036.337.393,00. Dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021, terjadi kenaikan sebesar Rp13.914.847.487,92, atau 3,29%. Belanja Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 41  
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
BELANJA DAERAH	477.036.337.393,00	437.028.473.268,92	91,61	423.113.625.781,00	13.914.847.487,92	3,29

Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terbagi menjadi tiga kelompok yaitu; Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, dengan masing-masing besaran realisasi sebagai berikut:

Tabel 6.1. 42  
Rincian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
<b>BELANJA</b>		<b>477.036.337.393,00</b>	<b>437.028.473.268,92</b>	<b>91,61</b>	<b>423.113.625.781,00</b>	<b>13.914.847.487,92</b>	<b>3,29</b>
1	BELANJA OPERASI	392.300.886.251,00	366.844.266.189,92	93,51	358.110.880.017,00	8.733.386.172,92	2,44
2	BELANJA MODAL	83.477.364.212,00	70.184.207.079,00	84,08	64.769.501.202,00	5.414.705.877,00	8,36
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.258.086.930,00	0,00	0,00	233.244.562,00	(233.244.562,00)	(100,00)

#### 6.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp366.844.266.189,92, atau mencapai 93,51% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp392.300.886.251,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar 2,44%. Jika dilihat dari total Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Operasi menyerap 83,94% dari total Belanja. Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 43  
Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>392.300.886.251,00</b>	<b>366.844.266.189,92</b>	<b>93,51</b>	<b>358.110.880.017,00</b>	<b>8.733.386.172,92</b>	<b>2,44</b>
1	Belanja Pegawai	222.661.489.866,00	213.765.733.155,00	96,00	204.936.447.375,00	8.829.285.780,00	4,31
2	Belanja Barang dan Jasa	155.727.330.435,00	140.769.569.584,92	90,39	144.611.926.961,00	(3.842.357.376,08)	(2,66)
3	Belanja Hibah	4.645.816.020,00	3.096.894.020,00	66,66	6.775.705.681,00	(3.678.811.661,00)	(54,29)
4	Belanja Bantuan Sosial	9.266.249.930,00	9.212.069.430,00	99,42	1.786.800.000,00	7.425.269.430,00	415,56

**6.1.2.1.1. Belanja Pegawai**

Merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp213.765.733.155,00, atau mencapai 96,00% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp222.661.489.866,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar 4,31%. Jika dilihat dari total Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Pegawai menyerap 58,27% dari total Belanja Operasi. Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 44

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
<b>Belanja Pegawai</b>		<b>222.661.489.866,00</b>	<b>213.765.733.155,00</b>	<b>96,00</b>	<b>204.936.447.375,00</b>	<b>8.829.285.780,00</b>	<b>4,31</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	131.367.661.736,00	127.097.573.886,00	96,75	122.492.699.579,00	4.604.874.307,00	3,76
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	63.452.819.682,00	61.193.325.748,00	96,44	55.423.495.558,00	5.769.830.190,00	10,41
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	19.423.987.050,00	17.087.456.886,00	87,97	18.788.195.370,00	(1.700.738.484,00)	(9,05)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.916.941.034,00	7.915.632.006,00	99,98	7.755.179.992,00	160.452.014,00	2,07
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	189.200.364,00	167.344.629,00	88,45	172.475.832,00	(5.131.203,00)	(2,98)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	310.880.000,00	304.400.000,00	97,92	304.401.044,00	(1.044,00)	(0,00)

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022, secara keseluruhan merupakan seluruh aktivitas transaksi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022 atas pembayaran yang dilakukan melalui prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang timbul dari Tagihan Belanja yang merupakan komponen Belanja Pegawai.

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp127.097.573.886,00, atau mencapai 96,75% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp131.367.661.736,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mengalami kenaikan sebesar 3,76%. Jika dilihat dari total Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Gaji dan Tunjangan ASN menyerap 59,46% dari total Belanja Pegawai. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 45  
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>131.367.661.736,00</b>	<b>127.097.573.886,00</b>	<b>96,75</b>	<b>122.492.699.579,00</b>	<b>4.604.874.307,00</b>	<b>3,76</b>
1	Belanja Gaji Pokok ASN	95.431.496.071,00	93.240.893.312,00	97,70	90.213.212.927,88	3.027.680.384,12	3,36
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	8.932.183.682,00	8.644.007.080,00	96,77	8.463.074.403,00	180.932.677,00	2,14
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.307.155.929,00	5.039.794.810,00	94,96	4.899.028.750,00	140.766.060,00	2,87
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.280.897.455,00	5.185.316.000,00	98,19	5.454.423.986,00	(269.107.986,00)	(4,93)
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.647.744.412,00	1.555.701.000,00	94,41	1.098.621.675,00	457.079.325,00	41,60
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	6.031.588.725,00	5.853.638.901,00	97,05	5.648.781.439,00	204.857.462,00	3,63
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	317.533.837,00	282.313.693,00	88,91	113.511.694,12	168.801.998,88	148,71
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.816.761,00	1.430.893,00	78,76	1.420.519,00	10.374,00	0,73
9	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	7.580.396.024,00	6.502.525.204,00	85,78	5.847.904.153,00	654.621.051,00	11,19
10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	234.192.018,00	216.245.390,00	92,34	192.720.288,00	23.525.102,00	12,21
11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	598.456.822,00	575.707.603,00	96,20	559.999.744,00	15.707.859,00	2,80
12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature/initials*

2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp61.193.325.748,00, atau mencapai 96,44% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp63.452.819.682,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Tambahan Penghasilan ASN mengalami kenaikan sebesar 10,41%. Jika dilihat dari total Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Tambahan Penghasilan ASN menyerap 28,63% dari total Belanja Pegawai. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 46

Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>63.452.819.682,00</b>	<b>61.193.325.748,00</b>	<b>96,44</b>	<b>55.423.495.558,00</b>	<b>5.769.830.190,00</b>	<b>10,41</b>
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	63.452.819.682,00	61.193.325.748,00	96,44	55.423.495.558,00	5.769.830.190,00	10,41

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN merupakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN. Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN yang dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 6.1. 47

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>	<b>63.452.819.682,00</b>	<b>61.193.325.748,00</b>	<b>96,44</b>	<b>55.423.495.558,00</b>	<b>5.769.830.190,00</b>	<b>10,41</b>
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	63.302.536.453,00	61.124.894.368,00	96,56	55.392.580.558,00	5.732.313.810,00	10,35
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	150.283.229,00	68.431.380,00	45,53	30.915.000,00	37.516.380,00	121,35

3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp17.087.456.886,00, atau mencapai 87,97% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp19.423.987.050,00. Jika

dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN mengalami penurunan sebesar 9,05%. Jika dilihat dari total Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN menyerap 7,99% dari total Belanja Pegawai. Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 48  
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN  
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>		<b>19.423.987.050,00</b>	<b>17.087.456.886,00</b>	<b>87,97</b>	<b>18.788.195.370,00</b>	<b>(1.700.738.484,00)</b>	<b>(9,05)</b>
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	222.311.290,00	222.172.806,00	99,94	174.046.530,00	48.126.276,00	27,65
2	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	17.447.796.320,00	15.215.826.080,00	87,21	16.314.644.460,00	(1.098.818.380,00)	(6,74)
3	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	95.551.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	538.000.000,00	529.750.000,00	98,47	242.500.000,00	287.250.000,00	118,45
4	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	1.521.214.380,00	(771.214.380,00)	(50,70)
5	Belanja Honorarium	370.328.000,00	369.708.000,00	99,83	364.430.000,00	5.278.000,00	1,45
6	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	171.360.000,00	(171.360.000,00)	(100,00)

#### 4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp7.915.632.006,00, atau mencapai 99,98% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp7.916.941.034,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD mengalami kenaikan sebesar 2,07%. Jika dilihat dari total Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD menyerap 3,70% dari total Belanja Pegawai. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 49  
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD</b>		<b>7.916.941.034,00</b>	<b>7.915.632.006,00</b>	<b>99,98</b>	<b>7.755.179.992,00</b>	<b>160.452.014,00</b>	<b>2,07</b>
1	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00	451.290.000,00	100,00	449.688.225,00	1.601.775,00	0,36
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	49.110.600,00	49.110.600,00	100,00	53.930.100,00	(4.819.500,00)	(8,94)
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	51.563.040,00	51.563.040,00	100,00	50.621.580,00	941.460,00	1,86
4	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000,00	38.682.000,00	100,00	38.367.000,00	315.000,00	0,82
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	654.370.500,00	100,00	647.519.250,00	6.851.250,00	1,06
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	69.974.100,00	69.974.100,00	100,00	62.437.725,00	7.536.375,00	12,07
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	36.540.000,00	36.540.000,00	100,00	25.033.575,00	11.506.425,00	45,96
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000,00	1.512.000.000,00	100,00	1.499.400.000,00	12.600.000,00	0,84
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00	378.000.000,00	100,00	371.700.000,00	6.300.000,00	1,69
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	136.817.742,00	136.817.742,00	100,00	58.811.761,00	78.005.981,00	132,64
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.498.593.052,00	2.497.284.024,00	99,95	2.477.670.776,00	19.613.248,00	0,79
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.040.000.000,00	2.040.000.000,00	100,00	2.020.000.000,00	20.000.000,00	0,99

#### 5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp167.344.629,00, atau mencapai 88,45% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp189.200.364,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH mengalami penurunan sebesar 2,98%. Jika dilihat dari total Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH menyerap 0,08% dari total Belanja Pegawai. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6.1. 50

## Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>	<b>189.200.364,00</b>	<b>167.344.629,00</b>	<b>88,45</b>	<b>172.475.832,00</b>	<b>(5.131.203,00)</b>	<b>(2,98)</b>
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.612.470,00	54.600.000,00	99,98	54.600.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	3.528.000,00	46,15	4.410.000,00	(882.000,00)	(20,00)
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.281.120,00	98.280.000,00	100,00	98.280.000,00	0,00	0,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.686.560,00	3.476.160,00	45,22	4.860.720,00	(1.384.560,00)	(28,48)
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	13.902.714,00	1.647.429,00	11,85	4.477.892,00	(2.830.463,00)	(63,21)
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	42.000,00	1.200,00	2,86	100,00	1.100,00	1.100,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.457.500,00	5.362.560,00	83,04	5.397.840,00	(35.280,00)	(0,65)
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	143.500,00	112.320,00	78,27	112.320,00	0,00	0,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	430.500,00	336.960,00	78,27	336.960,00	0,00	0,00

## 6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp304.400.000,00, atau mencapai 97,92% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp310.880.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH mengalami penurunan sebesar 0,00%. Jika dilihat dari total Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH menyerap 0,14% dari total Belanja Pegawai. Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 51

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	310.880.000,00	304.400.000,00	97,92	304.401.044,00	(1.044,00)	(0,00)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	104.400.000,00	94,16	104.400.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.001.044,00	(1.044,00)	(0,00)

#### 6.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp140.769.569.584,92, atau mencapai 90,39% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp155.727.330.435,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Barang Dan Jasa mengalami penurunan sebesar 2,66%. Jika dilihat dari total Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Barang Dan Jasa menyerap 38,37% dari total Belanja Operasi. Rincian Belanja Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 52

Belanja Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Belanja Barang dan Jasa	155.727.330.435,00	140.769.569.584,92	90,39	144.611.926.961,00	(3.842.357.376,08)	(2,66)
1	Belanja Barang	20.361.367.345,00	18.901.140.313,00	92,83	34.342.154.139,00	(15.441.013.826,00)	(44,96)
2	Belanja Jasa	61.384.624.502,00	56.556.998.809,08	92,14	54.741.917.618,00	1.815.081.191,08	3,32
3	Belanja Pemeliharaan	13.437.765.439,00	10.520.478.330,84	78,29	10.647.315.365,00	(126.837.034,16)	(1,19)
4	Belanja Perjalanan Dinas	52.185.913.121,00	46.900.437.697,00	89,87	44.833.089.839,00	2.067.347.858,00	4,61
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	389.849.000,00	358.200.000,00	91,88	47.450.000,00	310.750.000,00	654,90
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	7.967.811.028,00	7.532.314.435,00	94,53	0,00	7.532.314.435,00	0,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022 merupakan aktivitas transaksi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 yang terdiri atas pembayaran yang dilakukan melalui prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang timbul dari Tagihan Belanja Barang dan Jasa yang merupakan komponen belanja barang dan jasa dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp144.062.376.469,00 dan terealisasi sebesar Rp130.023.336.341,00, yang terealisasi dari Surat Pengesahan Belanja (SPB) atas transaksi belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.967.811.028,00 dan terealisasi sebesar Rp7.532.314.435,00, dan yang terealisasi dari Surat Pengesahan Belanja (SPB) atas transaksi belanja Kapitasi JKN pada FKTP dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.697.142.938,00 dan terealisasi sebesar Rp3.213.918.808,92.

1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp18.901.140.313,00, atau mencapai 92,83% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp20.361.367.345,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Barang mengalami penurunan sebesar 44,96%. Jika dilihat dari total Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Barang menyerap 13,43% dari total Belanja Barang Dan Jasa. Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 53

Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Belanja Barang	20.361.367.345,00	18.901.140.313,00	92,83	34.342.154.139,00	(15.441.013.826,00)	(44,96)
1	Belanja Barang Pakai Habis	20.361.367.345,00	18.901.140.313,00	92,83	34.342.154.139,00	(15.441.013.826,00)	(44,96)

Belanja Barang Pakai Habis

Belanja Barang merupakan Belanja Barang Pakai Habis Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang realisasinya di Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar

Rp18.901.140.313,00, atau mencapai 92,83% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp20.361.367.345,00. Rincian Belanja Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 54  
Belanja Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>20.361.367.345,00</b>	<b>18.901.140.313,00</b>	<b>92,83</b>	<b>34.342.154.139,00</b>	<b>(15.441.013.826,00)</b>	<b>(44,96)</b>
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	273.861.961,00	239.571.279,00	87,48	2.240.283.217,00	(2.000.711.938,00)	(89,31)
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	19.277.668,00	19.179.110,00	99,49	62.469.207,00	(43.290.097,00)	(69,30)
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.639.546.835,00	1.568.721.279,00	95,68	965.008.227,00	603.713.052,00	62,56
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	25.759.180,00	25.713.300,00	99,82	23.147.455,00	2.565.845,00	11,08
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	23.051.942,00	22.979.600,00	99,69	134.400.000,00	(111.420.400,00)	(82,90)
6	Belanja Bahan-Hsi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	222.860.550,00	(222.860.550,00)	(100,00)
7	Belanja Bahan-Hsi Tabung Gas	112.642.000,00	109.053.234,00	96,81	84.904.000,00	24.149.234,00	28,44
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	276.919.600,00	(276.919.600,00)	(100,00)
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	891.770.588,00	859.372.900,00	96,37	3.427.944.146,00	(2.568.571.246,00)	(74,93)
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	254.531.029,00	(243.531.029,00)	(95,68)
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	21.780.000,00	(21.780.000,00)	(100,00)
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.861.860,00	0,00	0,00	50.103.200,00	(50.103.200,00)	(100,00)
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2.497.500,00	870.000,00	34,83	0,00	870.000,00	0,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	746.075.093,00	713.279.652,00	95,60	1.530.529.954,00	(817.250.302,00)	(53,40)
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.029.912.247,00	982.677.946,00	95,41	1.285.822.983,00	(303.145.037,00)	(23,58)
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.661.870.718,00	1.434.054.946,00	86,29	2.304.074.992,00	(870.020.046,00)	(37,76)
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	258.634.422,00	247.546.888,00	95,71	400.388.428,00	(152.841.540,00)	(38,17)
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	2.452.450,00	(2.452.450,00)	(100,00)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	687.394.182,00	654.299.451,00	95,19	985.853.982,00	(331.554.531,00)	(33,63)
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	11.515.606,00	10.740.990,00	93,27	36.866.109,00	(26.125.119,00)	(70,86)
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	340.711.647,00	326.938.816,00	95,96	473.704.955,00	(146.766.139,00)	(30,98)
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	340.212.400,00	(340.212.400,00)	(100,00)
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	29.109.785,00	(29.109.785,00)	(100,00)
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	11.544.000,00	11.544.000,00	100,00	0,00	11.544.000,00	0,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	781.800.492,00	767.418.616,00	98,16	3.568.764.794,00	(2.801.346.178,00)	(78,50)
26	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.409.780.177,00	2.216.699.840,00	91,99	4.034.664.127,00	(1.817.964.287,00)	(45,06)
27	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	108.225,00	0,00	0,00	158.709.753,00	(158.709.753,00)	(100,00)
28	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.298.009.329,00	2.032.523.291,00	88,45	6.171.298.090,00	(4.138.774.799,00)	(67,06)
29	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	2.057.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.459.810,00	2.193.976.873,00	87,05	2.159.229.376,00	34.747.497,00	1,61
31	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.103.410.006,00	3.054.003.537,00	98,41	847.926.020,00	2.206.077.517,00	260,17
32	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00	560.306.890,00	(560.306.890,00)	(100,00)
33	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	493.348.500,00	470.843.890,00	95,44	15.156.350,00	455.687.540,00	3.006,58
34	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	9.990.000,00	9.906.500,00	99,16	0,00	9.906.500,00	0,00
35	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00	202.400.000,00	(202.400.000,00)	(100,00)
36	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	52.675.000,00	52.670.000,00	99,99	12.051.470,00	40.618.530,00	337,04
37	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	362.500.000,00	288.526.000,00	79,59	74.700.000,00	213.826.000,00	286,25
38	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	181.300.000,00	(181.300.000,00)	(100,00)
39	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	3.531.818,00	3.500.000,00	99,10	39.050.000,00	(35.550.000,00)	(91,04)
40	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	3.531.818,00	3.530.000,00	99,95	16.650.000,00	(13.120.000,00)	(78,80)
41	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	36.960.000,00	36.408.000,00	98,51	259.864.600,00	(223.456.600,00)	(85,99)
42	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	214.812.000,00	(214.812.000,00)	(100,00)

*Handwritten signature*

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
43	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	15.963.818,00	15.932.000,00	99,80	40.400.000,00	(24.468.000,00)	(60,56)
44	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	22.400.000,00	(22.400.000,00)	(100,00)
45	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	35.200.000,00	(35.200.000,00)	(100,00)
46	Belanja Pakaian KORPRI	3.531.818,00	3.500.000,00	99,10	0,00	3.500.000,00	0,00
47	Belanja Pakaian Adat Daerah	13.820.000,00	13.820.000,00	100,00	33.612.500,00	(19.792.500,00)	(58,88)
48	Belanja Pakaian Batik Tradisional	41.980.000,00	41.980.000,00	100,00	136.450.000,00	(94.470.000,00)	(69,23)
49	Belanja Pakaian Olahraga	260.602.500,00	260.235.585,00	99,86	250.831.500,00	9.404.085,00	3,75
50	Belanja Pakaian Paskibraka	185.059.200,00	184.802.790,00	99,86	153.010.000,00	31.792.790,00	20,78
51	Belanja Pakaian Jas/Safari	13.320.000,00	13.320.000,00	100,00	0,00	13.320.000,00	0,00

## 2. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp56.556.998.809,08, atau mencapai 92,14% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp61.384.624.502,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Jasa mengalami kenaikan sebesar 3,32%. Jika dilihat dari total Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Jasa menyerap 40,18% dari total Belanja Barang Dan Jasa. Rincian Belanja Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 55

Belanja Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
<b>Belanja Jasa</b>		<b>61.384.624.502,00</b>	<b>56.556.998.809,08</b>	<b>92,14</b>	<b>54.741.917.618,00</b>	<b>1.815.081.191,08</b>	<b>3,32</b>
1	Belanja Jasa Kantor	55.879.871.040,00	52.242.652.052,08	93,49	36.445.685.634,00	15.796.966.418,08	43,34
2	Belanja Juran Jaminan/Asuransi	840.907.506,00	529.606.067,00	62,98	13.024.243.400,00	(12.494.637.333,00)	(95,93)
3	Belanja Sewa Tanah	30.618.996,00	30.000.000,00	97,98	22.213.000,00	7.787.000,00	35,06
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.284.880.960,00	935.371.766,00	72,80	1.180.930.780,00	(245.559.014,00)	(20,79)
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.400.512.500,00	1.172.870.000,00	83,75	1.323.722.272,00	(150.852.272,00)	(11,40)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)	(100,00)
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.019.456.000,00	889.136.354,00	87,22	1.964.390.780,00	(1.075.254.426,00)	(54,74)
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	149.665.450,00	(149.665.450,00)	(100,00)
9	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	144.980.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	783.397.500,00	757.362.570,00	96,68	624.566.302,00	132.796.268,00	21,26

### 3. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp10.520.478.330,84, atau mencapai 78,29% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp13.437.765.439,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Pemeliharaan mengalami penurunan sebesar 1,19%. Jika dilihat dari total Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Pemeliharaan menyerap 7,47% dari total Belanja Barang Dan Jasa. Rincian Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 56

Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
<b>Belanja Pemeliharaan</b>		<b>13.437.765.439,00</b>	<b>10.520.478.330,84</b>	<b>78,29</b>	<b>10.647.315.365,00</b>	<b>(126.837.034,16)</b>	<b>(1,19)</b>
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	11.555.720,00	(11.555.720,00)	(100,00)
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.630.788.864,00	4.800.464.107,84	62,91	5.807.309.700,00	(1.006.845.592,16)	(17,34)
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.478.909.666,00	1.392.389.872,00	94,15	2.057.357.769,00	(664.967.897,00)	(32,32)
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.328.066.909,00	4.327.624.351,00	99,99	2.768.056.176,00	1.559.568.175,00	56,34
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.036.000,00	(3.036.000,00)	(100,00)

### 4. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp46.900.437.697,00, atau mencapai 89,87% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp52.185.913.121,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Perjalanan

*Handwritten signature*

Dinas mengalami kenaikan sebesar 4,61%. Jika dilihat dari total Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Perjalanan Dinas menyerap 33,32% dari total Belanja Barang Dan Jasa. Rincian Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 57

Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>52.185.913.121,00</b>	<b>46.900.437.697,00</b>	<b>89,87</b>	<b>44.833.089.839,00</b>	<b>2.067.347.858,00</b>	<b>4,61</b>
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.956.729.621,00	46.900.437.697,00	90,27	44.833.089.839,00	2.067.347.858,00	4,61
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	229.183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp46.900.437.697,00, atau mencapai 90,27% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp51.956.729.621,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri mengalami kenaikan sebesar 4,61%. Jika dilihat dari total Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri menyerap 100,00% dari total Belanja Perjalanan Dinas. Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 dan 2021 direalisasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 58

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>51.956.729.621,00</b>	<b>46.900.437.697,00</b>	<b>90,27</b>	<b>44.833.089.839,00</b>	<b>2.067.347.858,00</b>	<b>4,61</b>
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.004.034.316,00	28.720.237.468,00	99,02	23.565.534.355,00	5.154.703.113,00	21,87
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.329.762.801,00	1.184.816.563,00	89,10	1.567.091.830,00	(382.275.267,00)	(24,39)



No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.373.044.504,00	16.745.507.666,00	78,35	19.565.827.054,00	(2.820.319.388,00)	(14,41)
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	249.888.000,00	249.876.000,00	100,00	134.636.600,00	115.239.400,00	85,59

5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp358.200.000,00, atau mencapai 91,88% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp389.849.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami kenaikan sebesar 654,90%. Jika dilihat dari total Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat menyerap 0,25% dari total Belanja Barang Dan Jasa. Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 59

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat  
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>		<b>389.849.000,00</b>	<b>358.200.000,00</b>	<b>91,88</b>	<b>47.450.000,00</b>	<b>310.750.000,00</b>	<b>654,90</b>
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	388.850.000,00	357.850.000,00	92,03	47.450.000,00	310.400.000,00	654,16
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	999.000,00	350.000,00	35,04	0,00	350.000,00	0,00

a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp357.850.000,00, atau mencapai 92,03% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp388.850.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Uang yang Diberikan

kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami kenaikan sebesar 654,16%. Rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 60

Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat  
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>388.850.000,00</b>	<b>357.850.000,00</b>	<b>92,03</b>	<b>47.450.000,00</b>	<b>310.400.000,00</b>	<b>654,16</b>
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	121.850.000,00	120.850.000,00	99,18	43.250.000,00	77.600.000,00	179,42
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	4.200.000,00	22.800.000,00	542,86
3	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	240.000.000,00	210.000.000,00	87,50	0,00	210.000.000,00	0,00

b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp350.000,00, atau mencapai 35,04% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp999.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tidak dianggarkan. Rincian Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 61

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat  
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>999.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>35,04</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	999.000,00	350.000,00	35,04	0,00	350.000,00	0,00

6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp7.532.314.435,00, atau mencapai 94,53% dari anggaran belanja

yang ditetapkan sebesar Rp7.967.811.028,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Barang dan Jasa BOS tidak dianggarkan. Jika dilihat dari total Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Barang dan Jasa BOS menyerap 5,35% dari total Belanja Barang Dan Jasa. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 62

## Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Belanja Barang dan Jasa BOS	7.967.811.028,00	7.532.314.435,00	94,53	0,00	7.532.314.435,00	0,00
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	7.967.811.028,00	7.532.314.435,00	94,53	0,00	7.532.314.435,00	0,00

**6.1.2.1.3. Belanja Hibah**

Merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.096.894.020,00, atau mencapai 66,66% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp4.645.816.020,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Hibah mengalami penurunan sebesar 54,29%. Jika dilihat dari total Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Hibah menyerap 0,84% dari total Belanja Operasi. Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 63

## Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Belanja Hibah	4.645.816.020,00	3.096.894.020,00	66,66	6.775.705.681,00	(3.678.811.661,00)	(54,29)
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.178.540.000,00	2.629.618.000,00	62,93	6.308.429.661,00	(3.678.811.661,00)	(58,32)
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	467.276.020,00	467.276.020,00	100,00	467.276.020,00	0,00	0,00

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022, merupakan aktifitas transaksi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 yang terdiri atas pembayaran yang dilakukan melalui prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang timbul dari Tagihan Belanja Hibah yang merupakan komponen belanja Hibah dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.050.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.050.000.000,00, yang terealisasi dari Surat Pengesahan Belanja (SPB) atas transaksi belanja Bantuan Opeasioanal Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) dari pagu anggaran yang di tetapkan sebesar Rp2.128.540.000,00 dan terealisasi sebesar Rp579.618.000,00, realisasi BOP PAUD yang tercatat pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan realisasi PAUD negeri.

1. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.629.618.000,00, atau mencapai 62,93% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp4.178.540.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia mengalami penurunan sebesar 58,32%. Jika dilihat dari total Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia menyerap 84,91% dari total Belanja Hibah. Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 64

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga,

Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.178.540.000,00	2.629.618.000,00	62,93	6.308.429.661,00	(3.678.811.661,00)	(58,32)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.178.540.000,00	1.629.618.000,00	51,27	4.983.429.661,00	(3.353.811.661,00)	(67,30)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	375.000.000,00	(75.000.000,00)	(20,00)
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	950.000.000,00	(250.000.000,00)	(26,32)

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.629.618.000,00, atau mencapai 51,27% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp3.178.540.000,00. Adapun rinciannya sebagai berikut
- Hibah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 175 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp300.000.000,00.
  - Hibah Kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 176 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp550.000.000,00.
  - Hibah Kepada Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp579.618.000,00. Nilai Hibah tersebut merupakan hibah kepada PAUD Negeri yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Hibah Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 50 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp50.000.000,00.
- Hibah Kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 188 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp150.000.000,00.
- b. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp300.000.000,00, atau mencapai 100,00% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00.
  - Hibah Kepada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 190 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp25.000.000,00.
  - Hibah Kepada Badan Kontak Majelis TA'LIM Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 189 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Badan Kontak Majelis TA'LIM Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp25.000.000,00.
  - Hibah Kepada Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 189 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp250.000.000,00.

- c. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp700.000.000,00, atau mencapai 100,00% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp700.000.000,00.
- Hibah Kepada Kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 196 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia Tahun Anggaran 2022 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp300.000.000,00.
  - Hibah Kepada Gereja Advent Hari Ketujuh Bongkudai Utara, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 246 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp30.000.000,00.
  - Hibah Kepada Masjid Nurjannah Tutuyan, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 246 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp50.000.000,00.
  - Hibah Kepada Gereja GMIBM Solagratia Modayag III, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 246 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp30.000.000,00.
  - Hibah Kepada Gereja Pantekosta Jemaat Elohim Kokapoi, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 246 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp30.000.000,00.
  - Hibah Kepada Masjid Miftahul Jannah Buyat, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 246 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp50.000.000,00.

- Hibah Kepada Masjid Baitul Makmur Matabulu, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 246 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp50.000.000,00.
- Hibah Kepada Masjid Al Muhajirin Bai Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 246 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp50.000.000,00.
- Hibah Kepada Gereja Bukit Sion Dodap, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 246 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp30.000.000,00.
- Hibah Kepada Masjid Al Muhajirin Bulawan II, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 246 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp50.000.000,00.
- Hibah Kepada Masjid Al Hirjarah Atoga Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 246 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp15.000.000,00.
- Hibah Kepada Masjid Al Fallah Paret Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 246 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp15.000.000,00.

## 2. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp467.276.020,00, atau mencapai 100,00% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp467.276.020,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tidak dianggarkan, sehingga jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021, Belanja Hibah Keuangan kepada Partai Politik tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Dilihat dari total Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai



Politik menyerap 15,09% dari total Belanja Hibah. Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 65

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	467.276.020,00	467.276.020,00	100,00	467.276.020,00	0,00	0,00
1	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	467.276.020,00	467.276.020,00	100,00	467.276.020,00	0,00	0,00

Berdasarkan data Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diatas dapat dirinci Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur No:233 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1. 66

Partai Politik Penerima Bantuan Kuangan Tahun Anggaran 2022

No	Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara Sah	Harga Per Suara	Jumlah Alokasi Bantuan
1	Partai Amanat Nasional	4	11.070,00	10.354,00	114.618.780,00
2	Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan	3	6.781,00	10.354,00	70.210.474,00
3	Partai Nasional Demokrat	3	6.779,00	10.354,00	70.189.766,00
4	Partai Golongan Karya	3	6.097,00	10.354,00	63.128.338,00
5	Partai Demokrat	2	5.375,00	10.354,00	55.652.750,00
6	Partai Persatuan Indonesia	1	2.275,00	10.354,00	23.555.350,00
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	2.124,00	10.354,00	21.991.896,00
8	Partai Keadilan Sejahtera	1	1.939,00	10.354,00	20.076.406,00
9	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1.686,00	10.354,00	17.456.844,00
10	Partai Bulan Bintang	1	1.004,00	10.354,00	10.395.416,00
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>45.130,00</b>		<b>467.276.020,00</b>

**6.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial**

Merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp9.212.069.430,00, atau mencapai 99,42% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp9.266.249.930,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan sebesar 415,56%. Jika dilihat dari total Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Bantuan Sosial menyerap 2,51% dari total Belanja Operasi. Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 67  
Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Bantuan Sosial		9.266.249.930,00	9.212.069.430,00	99,42	1.786.800.000,00	7.425.269.430,00	415,56
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.276.000.000,00	1.238.800.000,00	97,08	1.686.800.000,00	(448.000.000,00)	(26,56)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	815.000.000,00	815.000.000,00	100,00	0,00	815.000.000,00	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	7.175.249.930,00	7.158.269.430,00	99,76	100.000.000,00	7.058.269.430,00	7.058,27

#### 6.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp70.184.207.079,00, atau mencapai 84,08% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp83.477.364.212,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 8,36%. Jika dilihat dari total Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Modal menyerap 16,06% dari total Belanja. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 68  
Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
BELANJA MODAL		83.477.364.212,00	70.184.207.079,00	84,08	64.769.501.202,00	5.414.705.877,00	8,36
1	Belanja Modal Tanah	237.260.000,00	78.875.000,00	33,24	39.175.000,00	39.700.000,00	101,34
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.674.366.934,00	10.743.662.655,00	64,43	22.681.592.476,00	(11.937.929.821,00)	(52,63)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.317.658.062,00	16.259.270.341,00	88,76	21.959.213.802,00	(5.699.943.461,00)	(25,96)
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.716.913.310,00	42.003.471.945,00	89,91	19.319.812.253,00	22.683.659.692,00	117,41
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.512.295.906,00	1.080.077.138,00	71,42	769.707.671,00	310.369.467,00	40,32
6	Belanja Aset Lainnya	18.870.000,00	18.850.000,00	99,89	0,00	18.850.000,00	0,00

Rincia realisasi belanja modal per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dilihat pada Lampiran 3.

#### 6.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap Tanah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, Belanja modal tanah dapat mencakup pembelian tanah, pembangunan fasilitas di atas tanah, pembayaran biaya-biaya terkait pengalihan kepemilikan, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengembangan aset tanah.

Realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp78.875.000,00, atau mencapai 33,24% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp237.260.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Modal Tanah mengalami kenaikan sebesar 101,34%. Rincian Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 69  
Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Belanja Modal Tanah	237.260.000,00	78.875.000,00	33,24	39.175.000,00	39.700.000,00	101,34
1	Belanja Modal Lapangan	237.260.000,00	78.875.000,00	33,24	39.175.000,00	39.700.000,00	101,34

Realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022, Secara keseluruhan merupakan seluruh aktifitas transaksi Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022 atas pembayaran yang dilakukan melalui prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang timbul dari Tagihan Belanja yang merupakan komponen Belanja Modal Tanah.

**6.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap Peralatan dan Mesin yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap ini termasuk mesin produksi, peralatan kantor, kendaraan, peralatan medis, dan peralatan teknologi informasi, yang umumnya memiliki umur pemakaian yang cukup lama dan diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional dan produksi yang efektif. Belanja modal peralatan dan mesin dianggap sebagai investasi jangka panjang yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam bentuk peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional.

Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp10.743.662.655,00, atau mencapai 64,43% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp16.674.366.934,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin mengalami penurunan sebesar 52,63%. Jika dilihat dari total Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Modal Peralatan Dan Mesin menyerap 15,31% dari total Belanja Modal. Rincian Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 70

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>		<b>16.674.366.934,00</b>	<b>10.743.662.655,00</b>	<b>64,43</b>	<b>22.681.592.476,00</b>	<b>(11.937.929.821,00)</b>	<b>(52,63)</b>
1	Belanja Modal Alat Besar	1.664.688.400,00	1.529.940.000,00	91,91	700.119.530,00	829.820.470,00	118,53
2	Belanja Modal Alat Angkutan	283.945.000,00	278.950.000,00	98,24	2.204.950.000,00	(1.926.000.000,00)	(87,35)
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	8.093.310,00	(8.093.310,00)	(100,00)
4	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	6.204.000,00	(6.204.000,00)	(100,00)
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.239.163.880,00	1.046.293.600,00	84,44	5.600.096.432,00	(4.553.802.832,00)	(81,32)
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.413.325.055,00	1.300.512.513,00	92,02	1.379.881.593,00	(79.369.080,00)	(5,75)
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.078.082.324,00	1.435.389.438,00	28,27	4.514.858.087,00	(3.079.468.649,00)	(68,21)
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	304.280.000,00	302.178.200,00	99,31	172.278.400,00	129.899.800,00	75,40

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
9	Belanja Modal Komputer	4.616.794.865,00	3.144.215.789,00	68,10	7.890.563.774,00	(4.746.347.985,00)	(60,15)
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	10.000.000,00	0,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	99.385.000,00	(99.385.000,00)	(100,00)
12	Belanja Modal Alat Peraga	125.761.989,00	100.503.489,00	79,92	105.162.350,00	(4.658.861,00)	(4,43)
13	BeBelanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.938.325.421,00	1.595.679.626,00	82,32	0,00	1.595.679.626,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022, merupakan aktivitas transaksi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 yang terdiri atas pembayaran yang dilakukan melalui prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang timbul dari Tagihan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang merupakan komponen Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.493.533.666,00 dan terealisasi sebesar Rp8.951.173.086,00, yang terealisasi dari Surat Pengesahan Belanja (SPB) atas transaksi belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.938.325.421,00 dan terealisasi sebesar Rp1.595.679.626,00, dan yang terealisasi dari Surat Pengesahan Belanja (SPB) atas transaksi belanja Kapitasi JKN pada FKTP dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp242.507.847,00 dan terealisasi sebesar Rp196.809.943,00.

#### 6.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap Gedung dan Bangunan yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, Belanja modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran untuk memperoleh, membangun, mengembangkan, atau memperbaiki gedung dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah atau instansi publik lainnya. Belanja modal ini biasanya termasuk dalam anggaran tahunan pemerintah untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik.

Gedung dan bangunan yang dimaksud dalam belanja modal ini dapat berupa bangunan pemerintah seperti kantor, sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur lain atau fasilitas publik lainnya. Tujuan dari belanja modal Gedung dan Bangunan adalah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur publik dan fasilitas pelayanan kepada masyarakat.

Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp16.259.270.341,00, atau mencapai 88,76% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp18.317.658.062,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan mengalami penurunan sebesar 25,96%. Jika dilihat dari total Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Modal Gedung Dan Bangunan menyerap 23,17% dari total Belanja Modal. Rincian Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 71

## Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.317.658.062,00	16.259.270.341,00	88,76	21.959.213.802,00	(5.699.943.461,00)	(25,96)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	16.352.635.462,00	15.324.883.210,00	93,72	21.489.690.405,00	(6.164.807.195,00)	(28,69)
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.965.022.600,00	934.387.131,00	47,55	469.523.397,00	464.863.734,00	99,01

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022, Secara keseluruhan merupakan seluruh aktifitas transaksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022 atas pembayaran yang dilakukan melalui prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang timbul dari Tagihan Belanja yang merupakan komponen Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

**6.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

Adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, Belanja jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan, perawatan, dan pengembangan jalan, Jaringan, dan Irigasi. Belanja jalan, Jaringan, dan Irigasi meliputi biaya pengadaan material, biaya tenaga kerja, biaya peralatan, biaya pemeliharaan, biaya pembebasan lahan, dan biaya lain-lain yang terkait dengan pembangunan, perawatan, dan pengembangan jalan, jaringan, irigasi.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp42.003.471.945,00, atau mencapai 89,91% dari

anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp46.716.913.310,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi mengalami kenaikan sebesar 117,41%. Jika dilihat dari total Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi menyerap 59,85% dari total Belanja Modal. Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 72

Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>46.716.913.310,00</b>	<b>42.003.471.945,00</b>	<b>89,91</b>	<b>19.319.812.253,00</b>	<b>22.683.659.692,00</b>	<b>117,41</b>
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	34.784.554.494,00	31.066.863.811,00	89,31	15.572.223.069,00	15.494.640.742,00	99,50
2	Belanja Modal Bangunan Air	11.932.358.816,00	10.936.608.134,00	91,66	3.421.109.184,00	7.515.498.950,00	219,68
3	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	326.480.000,00	(326.480.000,00)	(100,00)

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022, Secara keseluruhan merupakan seluruh aktivitas transaksi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022 atas pembayaran yang dilakukan melalui prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang timbul dari Tagihan Belanja yang merupakan komponen Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

**6.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, Aset tetap lainnya adalah jenis aset tetap yang tidak termasuk dalam kategori bangunan, mesin, atau kendaraan. Aset tetap lainnya biasanya berkaitan dengan peralatan atau benda-benda yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan atau pemerintah.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.080.077.138,00, atau mencapai 71,42% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.512.295.906,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami kenaikan sebesar 40,32%. Jika dilihat dari total Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menyerap 1,54% dari total Belanja Modal. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 73

## Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		1.512.295.906,00	1.080.077.138,00	71,42	769.707.671,00	310.369.467,00	40,32
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	551.139.000,00	548.503.565,00	99,52	745.367.311,00	(196.863.746,00)	(26,41)
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	107.671.630,00	107.381.400,00	99,73	24.340.360,00	83.041.040,00	341,17
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	853.485.276,00	424.192.173,00	49,70	0,00	424.192.173,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022, merupakan aktivitas transaksi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 yang terdiri atas pembayaran yang dilakukan melalui prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang timbul dari Tagihan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang merupakan komponen Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp658.810.630,00 dan terealisasi sebesar Rp655.884.965,00, yang terealisasi dari Surat Pengesahan Belanja (SPB) atas transaksi belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp853.485.276,00 dan terealisasi sebesar Rp424.192.173,00.

#### 6.1.2.2.6. Belanja Aset Lainnya

Belanja Aset Lainnya adalah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu entitas untuk memperoleh aset yang tidak memiliki bentuk fisik atau tidak dapat disentuh, seperti hak paten, merek dagang, lisensi perangkat lunak, hak cipta, atau goodwill (nilai reputasi).

Realisasi Belanja Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp18.850.000,00, atau mencapai 99,89% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp18.870.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Aset Lainnya tidak dianggarkan. Jika dilihat dari total Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow



Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Aset Lainnya menyerap 1,54% dari total Belanja Modal.

Rincian Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 74

Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	Belanja Aset Lainnya	18.870.000,00	18.850.000,00	99,89	0,00	18.850.000,00	0,00
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	18.870.000,00	18.850.000,00	99,89	0,00	18.850.000,00	0,00

Realisasi Belanja Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022, Secara keseluruhan merupakan seluruh aktivitas transaksi Belanja Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022 atas pembayaran yang dilakukan melalui prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang timbul dari Tagihan Belanja yang merupakan komponen Belanja Aset Lainnya.

#### 6.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00, atau mencapai 0,00% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.258.086.930,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar 100,00%. Jika dilihat dari total Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Tidak Terduga menyerap 0,00% dari total Belanja. Rincian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 75

## Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
BELANJA TIDAK TERDUGA		1.258.086.930,00	0,00	0,00	233.244.562,00	(233.244.562,00)	(100,00)
1	Belanja Tidak Terduga	1.258.086.930,00	0,00	0,00	233.244.562,00	(233.244.562,00)	(100,00)

**6.1.3. Transfer**

Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp92.919.336.584,00, atau mencapai 99,92% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp92.998.070.735,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Transfer mengalami penurunan sebesar 10,95%. Rincian Transfer Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 76

## Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
TRANSFER		92.998.070.735,00	92.919.336.584,00	99,92	104.343.665.731,00	(11.424.329.147,00)	(10,95)

**6.1.3.1. Belanja Bagi Hasil**

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp753.406.250,00, atau mencapai 90,25% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp834.817.335,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Bagi Hasil mengalami kenaikan sebesar 59,56%. Jika dilihat dari total Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Bagi Hasil menyerap 0,81% dari total Transfer. Rincian Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 77

## Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
Belanja Bagi Hasil		834.817.335,00	753.406.250,00	90,25	472.166.033,00	281.240.217,00	59,56
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	834.817.335,00	753.406.250,00	90,25	472.166.033,00	281.240.217,00	59,56

Dalam mengelola belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merujuk ke Surat Keputusan Bupati No.41 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022 tertanggal 29 Desember 2022. Bagi hasil pajak daerah direalisasikan kepada 77 (tujuh puluh tujuh) desa dari total 81 (delapan puluh satu) desa dengan nominal sebesar Rp753.406.250,00. Terdapat 4 (empat) desa yang tidak mencairkan Belanja Bagi Hasil di Tahun Anggaran 2022, yaitu:

1. Desa Bangunan Wuwuk Timur Kecamatan Modayag Barat Batal Cair Karena tidak menyelesaikan prosedur pencairan SP2D.
2. Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Tidak Melakukan pengurusan dokumen kelengkapan pencairan SP2D dana Bagi Hasil sampai dengan tgl 31 Desember 2022.
3. Desa Mototompian Kecamatan Mooat Tidak Melakukan pengurusan dokumen kelengkapan pencairan SP2D dana Bagi Hasil sampai dengan tgl 31 Desember 2022.
4. Desa Mokotompian Kecamatan Mooat Tidak Melakukan pengurusan dokumen kelengkapan pencairan SP2D dana Bagi Hasil sampai dengan tgl 31 Desember 2022.

Rincian realisasi Belanja Bagi Hasil (DBH) dapat dilihat pada Lampiran 4.

#### 6.1.3.2. Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp92.165.930.334,00, atau mencapai 100,00% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp92.163.253.400,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Bantuan Keuangan mengalami penurunan sebesar 11,27%. Jika dilihat dari total Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Belanja Bantuan Keuangan menyerap 99,19% dari total Transfer. Rincian Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 78

#### Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>92.163.253.400,00</b>	<b>92.165.930.334,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103.871.499.698,00</b>	<b>(11.705.569.364,00)</b>	<b>(11,27)</b>
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	92.163.253.400,00	92.165.930.334,00	100,00	103.871.499.698,00	(11.705.569.364,00)	(11,27)

Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten /kota kepada desa terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp34.201.864.406,00 kepada 81 (delapan puluh satu) desa, Dana Desa (DD) senilai Rp57.961.389.012,00 kepada 81 (delapan puluh satu) desa, sesuai dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur No : 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Besar Alokasi Dana Desa (DD) untuk setiap desa Tahun anggaran 2022 . Untuk rincian realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat pada Lampiran 5, sedangkan rincian realisasi Dana Desa (DD) dapat dilihat pada Lampiran 6.

#### 6.1.4. SURPLUS/(DEFISIT)

Surplus/Defisit merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Surplus/Defisit Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp1.703.842.831,08.

Tabel 6.1. 79

Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(41.801.558.508,00)</b>	<b>1.703.842.831,08</b>	<b>(4,08)</b>	<b>28.933.189.639,99</b>	<b>27.229.346.808,91</b>	<b>94,11</b>
1	Pendapatan	528.232.849.620,00	531.651.652.684,00	100,65	556.390.481.151,99	(24.738.828.467,99)	(4,45)
2	Belanja	477.036.337.393,00	437.028.473.268,92	91,61	423.113.625.781,00	13.914.847.487,92	3,29
3	Transfer	92.998.070.735,00	92.919.336.584,00	99,92	104.343.665.731,00	(11.424.329.147,00)	(10,95)

#### 6.1.5. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp41.826.670.522,95 atau mencapai 100,06% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp41.801.558.508,00. Dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar 225,03%. Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 80

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>41.801.558.508,00</b>	<b>41.826.670.522,95</b>	<b>100,06</b>	<b>12.868.368.868,12</b>	<b>28.958.301.654,83</b>	<b>225,03</b>
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	41.801.558.508,00	41.826.670.522,95	100,06	12.868.368.868,12	28.958.301.654,83	225,03

### 6.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp41.826.670.522,95, atau mencapai 100,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp41.801.558.508,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 225,03%. Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 81

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>41.801.558.508,00</b>	<b>41.826.670.522,95</b>	<b>100,06</b>	<b>12.868.368.868,12</b>	<b>28.958.301.654,83</b>	<b>225,03</b>
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.801.558.508,00	41.826.670.522,95	100,06	12.868.368.868,12	28.958.301.654,83	225,03

#### 6.1.5.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp41.826.670.522,95, atau mencapai 100,06% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp41.801.558.508,00. Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. 82

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>		<b>41.801.558.508,00</b>	<b>41.826.670.522,95</b>	<b>100,06</b>	<b>12.868.368.868,12</b>	<b>28.958.301.654,83</b>	<b>225,03</b>
1	Pelampauan Penerimaan PAD	6.597.364.814,00	6.597.364.814,00	100,00	0,00	6.597.364.814,00	0,00
2	Penghematan Belanja	35.153.215.177,00	35.153.215.177,11	100,00	12.055.972.867,12	23.097.242.309,99	191,58
3	Koreksi SILPA	50.978.517,00	50.978.517,00	100,00	825.968.607,00	(774.990.090,00)	(93,83)
4	Lain - Lain	0,00	25.112.014,84	0,00	(13.572.606,00)	38.684.620,84	(285,02)

### 6.1.6. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp41.826.670.522,95.

Tabel 6.1. 83  
Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>41.801.558.508,00</b>	<b>41.826.670.522,95</b>	<b>100,06</b>	<b>12.868.368.868,12</b>	<b>28.958.301.654,83</b>	<b>225,03</b>
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	41.801.558.508,00	41.826.670.522,95	100,06	12.868.368.868,12	28.958.301.654,83	225,03
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 6.1.7. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

SILPA merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp43.530.513.354,03. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 terjadi kenaikan sebesar 4,14%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.1. 84  
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	(%)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.530.513.354,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41.801.558.508,11</b>	<b>1.728.954.845,92</b>	<b>4,14</b>
1	PENDAPATAN DAERAH	528.232.849.620,00	531.651.652.684,00	100,65	556.390.481.151,99	(24.738.828.467,99)	(4,45)
2	BELANJA DAERAH	477.036.337.393,00	437.028.473.268,92	91,61	423.113.625.781,00	13.914.847.487,92	3,29
3	TRANSFER	92.998.070.735,00	92.919.336.584,00	99,92	104.343.665.731,00	(11.424.329.147,00)	(10,95)
4	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.801.558.508,00)	1.703.842.831,08	(4,08)	28.933.189.639,99	(27.229.346.808,91)	(94,11)
5	PEMBIAYAAN NETTO	41.801.558.508,00	41.826.670.522,95	100,06	12.868.368.868,12	28.958.301.654,83	225,03

## 6.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SILPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA). Adapun rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut.

### 6.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp41.801.558.508,11 nilai ini merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2021. Saldo tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan tahun berjalan yang digunakan untuk menutupi anggaran defisit Tahun Anggaran 2021 Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2. 1

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	41.801.558.508,11	12.881.941.474,12

Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 adalah sebesar Rp41.801.558.508,11 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.2. 2

Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal

No	Uraian	Pengurangan (Rp)	Penambahan (Rp)
<b>Saldo Anggaran Lebih Awal</b>		<b>41.801.558.508,11</b>	
1	Pendapatan Daerah	556.390.481.151,99	0,00
2	Belanja Daerah	0,00	423.113.625.781,00
3	Transfer	0,00	104.343.665.731,00
3	Pembiayaan Daerah	12.868.368.868,12	0,00
		569.258.850.020,11	527.457.291.512,00

**6.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

Saldo Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp41.826.670.522,95 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2. 3

**Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

Tahun 2021 dan 2021

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	41.826.670.522,95	12.868.368.868,12

Nilai Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2022 adalah sebesar Rp41.826.670.522,95 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.2. 4

**Rincian Saldo Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

No	Uraian	Pengurangan (Rp)	Penambahan (Rp)
<b>Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan</b>		<b>41.826.670.522,95</b>	
1	Pelampauan Penerimaan PAD	6.597.364.814,00	0,00
2	Penghematan Belanja	35.153.215.177,11	0,00
3	Sisa Belanja Lainnya	50.978.517,00	0,00
4	Koreksi SiLPA	25.112.014,84	0,00

1. Pelampauan Penerimaan PAD
  - a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian Sebesar Rp6.597.364.814,00
2. Penghematan Belanja
  - a. Penghematan Belanja Operasi
    - i. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN Sebesar Rp1.508.951.248,00
    - ii. Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN Sebesar Rp1.244.132.540,00



- iii. Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Sebesar Rp4.647.405.968,00
  - iv. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD Sebesar Rp179.077.641,00
  - v. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Sebesar Rp16.904.648,00
  - vi. Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Sebesar Rp22.077.456,00
  - vii. Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang Sebesar Rp7.668.188.681,11
  - viii. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa Sebesar Rp7.084.040.041,00
  - ix. Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Pemeliharaan Sebesar Rp443.247.397,00
  - x. Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Perjalanan Dinas Sebesar Rp4.169.105.096,00
  - xi. Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Sebesar Rp97.270.339,00
  - xii. Penghematan Belanja Bantuan Sosial- Bantuan Sosial kepada Individu Sebesar Rp57.000.000,00
- b. Penghematan Belanja Modal
- i. Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah Sebesar Rp10.825.000,00
  - ii. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar Sebesar Rp376.914.995,00
  - iii. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan Sebesar Rp689.987.000,00
  - iv. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur Sebesar Rp180,00
  - v. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian Sebesar Rp25.080,00
  - vi. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp267.057.393,00
  - vii. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Sebesar Rp144.408.010,00

- viii. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan Sebesar Rp179.492.094,00
- ix. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium Sebesar Rp1.016.760.080,00
- x. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer Sebesar Rp180.056.275,00
- xi. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja Sebesar Rp368.825.814,00
- xii. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga Sebesar Rp34.604.548,00
- xiii. Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Sebesar Rp2.488.199.119,00
- xiv. Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti Sebesar Rp18.083.166,00
- xv. Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan Sebesar Rp666.038.565,00
- xvi. Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air Sebesar Rp477.082.780,00
- xvii. Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan Sebesar Rp3.520.000,00
- xviii. Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan Sebesar Rp6.468.027,00
- c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga
  - i. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp793.788.177,00
- d. Sisa Belanja Transfer
  - a. Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Sebesar Rp293.623.817,00

- b. Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Sebesar Rp54.002,00
3. Sisa Belanja Lainnya
- a. Sisa Lebih BLUD
    - i. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Sebesar Rp30.096.000,00

Pada tahun 2021 Puskesmas Modayag menganggarkan belanja kegiatan JKN Kapitasi pada rekening Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp30.096.000 yang seharusnya dianggarkan pada rekening belanja kapitasi. Sampai dengan berakhirnya Tahun anggaran 2021 belanja kegiatan tersebut tidak terealisasi sehingga masuk menjadi salah satu komponen SILPA.
  - b. Sisa Dana BOS
    - i. Sisa Dana BOS Sebesar Rp20.882.517,00
4. Koreksi SiLPA
- a. Lain - Lain
    - i. Lain-lain Sebesar Rp25.112.014,84

**6.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)**

Saldo Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp43.530.513.354,03 nilai ini merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi Pendapatan – LRA dan Penerimaan Pembiayaan dengan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2. 5

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	43.530.513.354,03	41.801.558.508,11

Nilai Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2022 adalah sebesar Rp43.530.513.354,03 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.2. 6

Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

No	Uraian	Pengurangan (Rp)	Penambahan (Rp)
<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)</b>			<b>43.530.513.354,03</b>
1	Pendapatan Daerah	531.651.652.684,00	0,00
2	Belanja Daerah	0,00	529.947.809.852,92
3	Pembiayaan Daerah	41.826.670.522,95	0,00
		573.478.323.206,95	529.947.809.852,92

**6.2.4. Lain - Lain**

Saldo Lain - Lain Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp25.112.014,84. Lain - Lain Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2. 7

Koreksi SILPA Kas Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Lain - Lain	25.112.014,84	(13.572.606,00)

Nilai Lain - Lain Tahun 2022 adalah sebesar Rp25.112.014,84 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.2. 8

Rincian Koreksi SILPA Kas

No	Uraian	Pengurangan (Rp)	Penambahan (Rp)
<b>Lain-Lain</b>			<b>25.112.014,84</b>
1	Kas di Kas Daerah	54,00	0,00
2	Kas di Bendahara BOS	0,00	24.864.868,00
3	Kas di Bendahara FKTP	0,00	247.200,84
		54,00	25.112.068,84

1. Kas di Kas Daerah

- a. Kelebihan Penyetoran PPH 22 Sebesar Rp54,00

Terjadi Kelebihan Penyetoran PPh 22 akibat kesalahan operator Sekretariat Daerah (Bagian Umum) dalam menginput nominal pajak SP2D No. 17.14/04.0/000569/LS/4.01.0.00.0.00.01.00/P.07/8/2022.

2. Kas di Bendahara BOS

a. Penyesuaian Kas di Bendahara BOS SDN 1 Purworejo Sebesar Rp2.000.000,00

Penyesuaian Kas di Bendahara BOS SDN 1 Purworejo dikarenakan adanya pengembalian/penyetoran di Tahun 2022 ke Rekening Kas BOS atas hasil temuan BPK RI pada pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2021.

b. Penyesuaian Kas di Bendahara BOS SMP Negeri 2 Modayag Sebesar Rp13.364.868,00

Penyesuaian Kas di Bendahara BOS SMP Negeri 2 Modayag dikarenakan adanya pengembalian/penyetoran di Tahun 2022 ke Rekening Kas BOS atas hasil temuan BPK RI pada pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2021.

c. Penyesuaian Kas di Bendahara BOS SDN 1 Mooat Sebesar Rp3.000.000,00

Penyesuaian Kas di Bendahara BOS SDN 1 Mooat dikarenakan adanya pengembalian/penyetoran di Tahun 2022 ke Rekening Kas BOS atas hasil temuan BPK RI pada pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2021.

d. Penyesuaian Kas di Bendahara BOS SDN 1 Purworejo Timur dikarenakan adanya pengembalian/penyetoran di Tahun 2022 ke Rekening Kas BOS atas hasil temuan BPK RI pada pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2021. ian Kas di Bendahara BOS SDN 1 Purworejo timur Sebesar Rp6.500.000,00

3. Kas di Bendahara FKTP

a. Penyesuaian Kas di Bendahara FKTP UPTD Puskesmas Nuangan Sebesar Rp0,84

Penyesuaian Kas di Bendahara FKTP UPTD Puskesmas Nuangan dikarenakan adanya selisih lebih pengembalian/penyetoran oleh Bendahara Kapitasi atas nilai yang seharusnya dikembalikan atau disetorkan ke Rekening Kas Kapitasi.

b. Penyesuaian Kas di Bendahara FKTP UPTD Puskesmas Mooat Sebesar Rp247.200,00

Penyesuaian Kas di Bendahara FKTP UPTD Puskesmas Mooat dikarenakan adanya reklas nilai Kas lainnya ke Kas Kapitasi FKTP Puskesmas Moaat, dimana sebelumnya di Tahun 2021

Puskesmas Mooat masih melekat pada Puskesmas Modayag dalam pelaksanaan kegiatan untuk Kapitasi FKTP sehingga saldo Kas Kapitasi masih dicatat sebagai Kas Lainnya.

#### 6.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp43.530.513.354,03. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2. 9

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	43.530.513.354,03	41.801.558.508,11

Nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp43.530.513.354,03 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.2. 10

Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir

No	Uraian	Pengurangan (Rp)	Penambahan (Rp)
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>			<b>43.530.513.354,03</b>
1	Pendapatan Daerah	531.651.652.684,00	0,00
2	Belanja Daerah	0,00	437.028.473.268,92
3	Transfer		92.919.336.584,00
4	Pembiayaan Daerah	41.826.670.522,95	0,00

### 6.3. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu. Neraca terdiri dari dua bagian, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva adalah sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh entitas tersebut, seperti kas, piutang, inventaris, investasi, dan aset tetap. Sedangkan pasiva adalah kewajiban dan modal yang dimiliki oleh entitas tersebut, seperti hutang usaha, hutang pajak, modal saham, dan laba ditahan.

Tabel 6.3. 1  
Neraca Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Neraca</b>			
1	Aset	902.066.820.101,89	938.906.333.774,24
2	Kewajiban	8.016.036.283,38	7.647.798.070,10
3	Ekuitas	894.050.783.818,51	931.258.535.704,14

#### 6.3.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah, serta dapat diukur dalam satuan uang. Berikut diuraikan Aset milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp902.066.820.101,89, Nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Aset di Tahun 2021 sebesar Rp938.906.333.774,24, terjadi penurunan sebesar 3,92% atau sebesar Rp36.839.513.672,35.

Tabel 6.3. 2  
Aset Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Aset</b>		<b>902.066.820.101,89</b>	<b>938.906.333.774,24</b>
1	Aset Lancar	62.060.730.906,73	66.053.333.634,35

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
2	Investasi	8.001.400.000,00	8.001.400.000,00
3	Aset Tetap	827.315.908.410,16	862.919.602.658,89
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	4.688.780.785,00	1.931.997.481,00

### 6.3.1.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, Nilai Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp62.060.730.906,73 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Aset Lancar di Tahun 2021 sebesar Rp66.053.333.634,35, terjadi penurunan sebesar 6,04% atau sebesar Rp3.992.602.727,62.

Tabel 6.3. 3  
Aset Lancar Tahun 2022 - 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
ASET LANCAR	62.060.730.906,73	66.053.333.634,35

Dari tabel diatas Aset Lancar pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dikelompokkan menjadi berapa bagian, berikut rinciannya:

#### 6.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil, dan sumber pendapatan lainnya. Kas daerah digunakan untuk membiayai segala kegiatan pemerintah daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain.

Nilai Kas Di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp43.442.169.605,11, dana ini terdapat pada Rekening Umum Daerah, Dibandingkan dengan nilai Kas Di Kas Daerah di Tahun 2021 sebesar Rp41.944.359.871,11, terjadi peningkatan sebesar 3,57% atau sebesar Rp1.497.809.734,00.



**6.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan adalah dana yang diterima dan disimpan oleh bendahara penerimaan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola keuangan.

Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.019.915,00 nilai ini merupakan Dana Non Kapitasi yang per 31 Desember 2022 belum di setorkan ke RKUD;

Tabel 6.3. 6

Kas Di Bendahara Penerimaan Tahun 2022 - 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
1	Kas di Bendahara Penerimaan	38.019.915,00	15.330.119,00

**6.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan dana yang dimiliki oleh bendahara pengeluaran yang dipergunakan untuk keperluan operasional instansi. Kas tersebut digunakan untuk membayar berbagai macam pengeluaran yang diperlukan.

Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.342.806,00

Tabel 6.3. 7

Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		<b>4.342.806,00</b>	<b>0,00</b>
1	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	4.342.806,00	0,00

– Kas di Bendahara Pengeluaran – Tunai

1. Kurang Setor Sisa TU Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sebesar Rp1.865.000,00

2. Kurang Setor Sisa TU Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.477.806,00

Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran yang per 31 Desember 2022 masih berada pada bendahara pengeluaran di Tahun 2023 telah di setorkan ke Rekening Kas Umum Daerah berikut rinciannya;

- Kas di Bendahara Pengeluaran – tunai
  - o No sts: 0084/STS/5.02.0.00.0.00.01.0000/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp1.865.000,00 yang disetor oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
  - o No sts: 0082/STS/5.02.0.00.0.00.01.0000/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 sebesar Rp2.477.806,00 yang disetor oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

#### 6.3.1.1.4. Kas Dana BOS

Kas Dana BOS adalah seluruh dana kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara BOS yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran operasional BOS.

Nilai Kas Dana BOS Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp10.360.201,00 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai di Tahun 2021 sebesar Rp187.221.725,40, terjadi penurunan sebesar 94,47% atau sebesar Rp176.861.524,40.

Rincian nilai Kas Dana BOS Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 8

Kas Dana BOS Tahun 2022 - 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Kas Dana BOS</b>		<b>10.360.201,00</b>	<b>187.221.725,40</b>
1	Kas Dana BOS	10.360.201,00	187.221.725,40

Dari tabel diatas Kas Dana BOS pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.3. 9  
Rincian Kas Dana BOS Tahun 2022 - 2021

No	Sekolah	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Kas Dana BOS</b>		<b>10.360.201,00</b>	<b>187.221.725,40</b>
1	SD Negeri 1 Moyongkota	0,00	5.969.841,00
2	SD Negeri 1 Moyongkota Baru	0,00	303.261,00
3	SD Negeri 2 Moyongkota Baru	156.492,00	204.178,00
4	SD Negeri 1 Bangunan Wuwuk	0,00	5.554.134,80
5	SD Negeri 1 Bongkudai Barat	0,00	4.812.617,00
6	SD Negeri 2 Bongkudai	0,00	4.062.440,00
7	SD Negeri 1 Modayag	177.397,00	3.256.172,00
8	SD Negeri 1 Modayag Barat	451,00	1.785.064,00
9	SD Negeri 1 Modayag Timur	0,00	1.454.952,10
10	SD Negeri 1 Purworejo	0,00	395.190,00
11	SD Negeri 1 Purworejo Timur	4.312,00	478.004,00
12	SD Negeri 1 Liberia	0,00	5.047.872,00
13	SD Negeri 1 Liberia Timur	0,00	473.692,00
14	SD Negeri 1 Tobongon	0,00	3.158.230,00
15	SD Negeri 1 Mooat	0,00	1.116.460,00
16	SD Negeri 1 Bongkudai Baru Utara	0,00	1.676.390,00
17	SD Negeri 1 Bongkudai Baru Barat	0,00	1.781.599,00
18	SD Negeri 1 Guaan	0,00	2.750.000,00
19	SD Negeri 1 Badaro	0,00	1.609.200,00
20	SD Negeri 1 Lanut	0,00	2.864.003,60
21	SD Negeri 1 Kokapoy	0,00	913.053,00
22	SD Negeri 1 Buyandi	0,00	6.556.735,00
23	SD Negeri 1 Buyat	0,00	0,00
24	SD Negeri 1 Buyat 2	112.154,00	500.254,00
25	SD Negeri 2 Buyat 2	0,00	773.205,00
26	SD Negeri 1 Kotabunan	0,00	0,00
27	SD Negeri 2 Kotabunan	0,00	2.923.624,00
28	SD Negeri 1 Bulawan	0,00	8.584.772,00
29	SD Negeri 1 Bulawan 2	672.241,00	6.681.320,00
30	SD Negeri 1 Bukaka	0,00	786.390,00
31	SD Negeri 1 Paret	0,00	30.000,00
32	SD Negeri 1 Kayumoyondi	0,00	2.333.475,10

No	Sekolah	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
33	SD Negeri 1 Tombolikat	0,00	993.046,00
34	SD Negeri 1 Tombolikat Selatan	0,00	152.721,00
35	SD Negeri 1 Tutuyan 3	0,00	3.719.008,00
36	SD Negeri 1 Tutuyan 2	0,00	220.034,00
37	SD Negeri 1 Togid	0,00	50.581,00
38	SD Negeri 2 Togid	0,00	145.600,00
39	SD Negeri 1 Dodap	0,00	0,00
40	SD Negeri 1 Dodap Pantai	4.800.000,00	3.409.215,00
41	SD Negeri 1 Motongkad	0,00	2.105.100,00
42	SD Negeri 1 Atoga	0,00	1.948.909,00
43	SD Negeri 1 Molobog	0,00	3.381.972,00
44	SD Negeri 1 Jiko	0,00	1.491.177,00
45	SD Negeri 1 Nuangan 1	0,00	699.774,00
46	SD Negeri 1 Bai	0,00	0,00
47	SD Negeri 1 Nuangan	0,00	1.153.009,00
48	SD Negeri 1 Loyow	60.744,00	1.125.911,00
49	SD Negeri 1 Idumun	50,00	1.369.524,00
50	SD Negeri 1 Matabulu	0,00	15.887.128,00
51	SD Negeri 1 Jiko Belanga	0,00	1.713.391,00
52	SD Negeri 1 Iyok	0,00	1.119.448,00
53	SD Negeri 2 Motongkat	0,00	3.001.657,00
54	SDN 1 Pinonobatan	0,00	564.510,00
55	SDN 1 Dodap Mikasa	0,00	1.096.110,00
56	SMP Negeri 1 Modayag	0,00	12.348.493,00
57	SMP Negeri 2 Modayag	0,00	13.070.978,00
58	SMP Negeri 1 Kotabunan	0,00	0,00
59	SMP Negeri 1 Tutuyan	1.940.175,00	77,00
60	SMP Negeri 2 Tutuyan	2.277.445,00	155.235,00
61	SMP Negeri 1 Nuangan	0,00	8.342.444,00
62	SMP Negeri 2 Nuangan	0,00	3.906.170,00
63	SMP Negeri Satap Lanud	0,00	1.529.061,00
64	SMP Negeri Satap Jiko Belanga	0,00	2.246.770,00
65	SMP Negeri Satap Matabulu	65.477,00	3.832.693,00
66	SMP Negeri Satap Atoga	44.205,00	41.605,00
67	SMP Satap Jiko	0,00	315,00

No	Sekolah	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
68	SMP Negeri Satap Buyandi	0,00	0,00
69	SMP Satap Bai	48.909,00	48.909,00
70	SMP Satap Bukaka	0,00	8.814.030,80
71	SMP Satap Kokapoy	0,00	604.852,00
72	SMP Negeri 1 Modayag Barat	0,00	3.220.111,00
73	SMP Satap Tobongon	0,00	759.044,00
74	SMP Satap Badaro	149,00	832.414,00
75	SMP Satap Molobog	0,00	606.527,00
76	SMPN 3 Tutuyan	0,00	2.506.103,00
77	SMP Daerah Kotabunan	0,00	171.940,00

#### 6.3.1.1.5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP adalah seluruh dana kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Puskesmas yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran operasional Puskesmas atas Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Nilai Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp35.620.826,92 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Kas Dana Kapitasi Pada FKTP di Tahun 2021 sebesar Rp31.436.961,00, terjadi peningkatan sebesar 13,31% atau sebesar Rp4.183.865,92.

Rincian nilai Kas Dana Kapitasi Pada FKTP Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 10

Rincian Kas Dana Kapitasi Pada FKTP Tahun 2022 - 2021

No	UPTD PUSKESMAS	Nomor Rekening	Tahun 2022	Tahun 2021
			Rp	Rp
<b>Kas Dana Kapitasi pada FKTP</b>			<b>35.620.826,92</b>	<b>31.436.961,00</b>
1	UPTD Puskesmas Kotabunan (JKN)	BRI (003601001786307)	333.678,37	2.166.036,00
2	UPTD Puskesmas Tutuyan (JKN)	BRI (003601001785301)	574.348,00	400.134,00
3	UPTD Puskesmas Nuangan (JKN)	BRI (003601001783309)	1.546.671,84	4.861.230,00
4	UPTD Puskesmas Modayag (JKN)	BRI (003601001790306)	212.092,03	23.656.953,00

No	UPTD PUSKESMAS	Nomor Rekening	Tahun 2022	Tahun 2021
			Rp	Rp
5	UPTD Puskesmas Modayag Barat (JKN)	BRI (003601001788309)	7.233.085,00	320.275,00
6	UPTD Puskesmas Buyat Kecamatan Kotabunan (JKN)	BRI (003601001787303)	92.580,68	32.333,00
7	UPTD Puskesmas Mooat (JKN)	BRI (003601001789305)	25.628.371,00	0,00

#### 6.3.1.1.6. Kas Lainnya

Nilai Kas Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp508.837.118,11

Rincian Kas Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.3. 11

Rincian Kas Lainnya Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Kas Lainnya</b>		<b>508.837.118,11</b>	<b>1.526.992,70</b>
1	UPTD Puskesmas Nuangan (JKN)	0,00	1.179.792,70
2	UPTD Puskesmas Mooat Kecamatan Modayag (JKN)	0,00	247.200,00
3	UPTD Puskesmas Motongkad (JKN)	99.801,11	100.000,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.905.084,00	0,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.670.722,00	0,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.463.115,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.230.071,00	0,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	234.400.000,00	0,00
9	Kas Lainnya di BUD	252.068.325,00	0,00

Berdasarkan Tabel di atas dapat di uraikan tentang nilai Kas Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebagai berikut;

- 1) UPTD Puskesmas Motongkad (JKN) terdapat sisa kas di Bendahara FKTP Motongkad per 31 Desember 2022 Pada Rekening BRI No Rek 36-01-001784-30-5 sebesar Rp99.801,11 nilai tersebut merupakan saldo pembukaan rekening yang merupakan dana pribadi kepala UPTD Puskesmas Motongkad Tahun 2021 a.n Helmy Lasama.
- 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp10.905.084,00 merupakan kas tunai dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMP N 1 Modayag, dana ini merupakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) kinerja untuk kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang kegiatannya baru akan dilaksanakan pada Tahun 2023 namun di Tahun 2022 telah terbit Surat Pengesahan Belanja (SPB).
- 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.670.722,00 merupakan saldo kas yang terdapat pada rekening SDN 1 Buyat pada bank BRI dengan nomor rekening 513901001368536 namun dana tersebut bukan merupakan dana bantuan operasional sekolah, yang hingga 31 Desember 2022, SDN 1 Buyat sebagai pemilik rekening tidak bisa menjelaskan asal usul dana tersebut.
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.463.115,00 merupakan saldo kas yang terdapat pada rekening SMP Negeri 1 Kotabunan pada bank BRI dengan nomor rekening 513901004125539 namun dana tersebut bukan merupakan dana bantuan operasional sekolah, yang hingga 31 Desember 2022, SMP Negeri 1 Kotabunan sebagai pemilik rekening tidak bisa menjelaskan asal usul dana tersebut.
- 5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.230.071,00 merupakan saldo kas yang terdapat pada rekening SMP Negeri Satap Matabulu pada bank BRI dengan nomor rekening 513901004132536 namun dana tersebut bukan merupakan dana bantuan operasional sekolah, yang hingga 31 Desember 2022, SMP Negeri Satap Matabulu sebagai pemilik rekening tidak bisa menjelaskan asal usul dana tersebut.
- 6) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp234.400.000,00 merupakan saldo kas yang terdapat pada rekening pribadi bendahara pengeluaran, nilai tersebut merupakan sisa transaksi keuangan Tahun 2022, yang merupakan uang pengganti pulsa atau operasional

lainnya pendamping keluarga, yang hingga 31 Desember 2022 belum selesai disalurkan, namun di Tahun 2023 dana tersebut telah tersalur ke masing – masing penerima.

- 7) Reklasifikasi dari Kas di Kas Daerah ke Kas Lainnya sebesar Rp252.068.307,00 nilai merupakan pencatatan atas utang perhitungan pihak ketiga (PFK) di BUD sebesar Rp251.433.794,00 dan di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp634.531,00.

#### 6.3.1.1.7. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah adalah pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang hingga akhir periode pelaporan belum dilunasi oleh wajib bayar.

Nilai Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp611.636.288,00 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Piutang Pajak Daerah di Tahun 2021 sebesar Rp337.011.194,00, terjadi peningkatan sebesar 81,49% atau sebesar Rp274.625.094,00.

Rincian nilai Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 12

Rincian Piutang Pajak Daerah Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Piutang Pajak Daerah</b>		<b>611.636.288,00</b>	<b>337.011.194,00</b>
1	Piutang Pajak Reklame	18.489.250,00	18.489.250,00
2	Piutang Pajak Penerangan Jalan	411.026.360,00	169.818.579,00
3	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.259.500,00	30.259.500,00
4	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	151.861.178,00	118.443.865,00



Tabel 6.3. 13

## Mutasi Penambahan (Pengurangan) Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	Tahun 2021	Mutasi Penambahan (Pengurangan)	Tahun 2022
		Rp	Rp	Rp
<b>Piutang Pajak Daerah</b>		<b>337.011.194,00</b>	<b>274.625.094,00</b>	<b>611.636.288,00</b>
1	Piutang Pajak Reklame	18.489.250,00	0,00	18.489.250,00
2	Piutang Pajak Penerangan Jalan	169.818.579,00	241.207.781,00	411.026.360,00
3	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.259.500,00	0,00	30.259.500,00
4	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	118.443.865,00	33.417.313,00	151.861.178,00

Dari tabel diatas dapat dijabarkan mutasi penambahan (pengurangan) piutang pajak daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut ;

## 1) Piutang Pajak Penerangan Jalan

- a. Pengakuan Piutang Tahun 2022 Pajak Penerangan Jalan Sebesar Rp411.026.360,00 atas pendapatan bulan November dan Desember 2022 yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022 dikurangi;
- b. Penerimaan Piutang Pajak Penerangan Jalan Bulan Desember Tahun 2021 Sebesar Rp169.818.579,00.

## 2) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

- a. Pengakuan Piutang 2022 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) Sebesar Rp36.414.013,00 dikurangi;
- b. Penerimaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2021 Sebesar Rp2.914.700,00.
- c. Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) akibat dobel setor sebesar Rp82.000,00.

Dari data rincian piutang pajak daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Piutang pajak reklame sebesar Rp18.489.250, merupakan piutang pajak reklame Tahun 2016 atas 141 (seratus empat puluh satu) wajib pajak yang hingga Tahun 2022 belum melunasi kewajibannya rincian piutang pajak reklame dapat dilihat pada Lampiran 7.
- Piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp411.026.360,00 merupakan piutang pajak Tahun 2022 rincian piutang pajak penerangan jalan dapat dilihat pada Lampiran 8.
- Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp30.259.500,00 terdiri atas piutang pajak Tahun 2014 sebesar Rp10.860.000,00 atas 4 (empat) wajib pajak, piutang Tahun 2015 sebesar Rp16.240.000,00 atas 1 (satu) wajib pajak, dan piutang Tahun 2018 sebesar Rp3.159.500,00 atas 1 (satu) wajib pajak, yang keseluruhan wajib pajak tersebut hingga Tahun 2022 belum melunasi kewajibannya rincian piutang pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dilihat pada Lampiran 9.
- Piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp151.861.178,00 terdiri atas piutang Tahun 2014 sebesar Rp3.994.138,00, piutang pajak Tahun 2017 sebesar Rp1.206.820,00 atas 6 (enam) wajib pajak, piutang pajak Tahun 2018 sebesar Rp86.879.887,00 atas 49 (empat puluh Sembilan) wajib pajak, piutang pajak tahun 2020 sebesar Rp23.366.320,00 atas 210 (dua ratus sepuluh) wajib pajak dan piutang pajak Tahun 2022 sebesar Rp36.414.013,00 atas 19 (Sembilan belas) wajib pajak, yang keseluruhan wajib pajak tersebut hingga Tahun 2022 belum melunasi kewajibannya rincian piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) dapat dilihat pada Lampiran 10.

#### **6.3.1.1.8. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Saldo Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang tidak tertagih setelah adanya penetapan Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Nilai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar

Rp1.409.788.093,00 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di Tahun 2021 sebesar Rp948.010.307,00, terjadi peningkatan sebesar 48,71% atau sebesar Rp461.777.786,00.

Dasar pencatatan besaran Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di Tahun 2022 berdasarkan surat posisi modal disetor setelah RUPS tanggal 09 Februari 2023 no:094/A/AKT/DIR/II/2023 tertanggal 27 Februari 2023.

Tabel 6.3. 14

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Tahun 2022 – 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.409.788.093,00	948.010.307,00

#### 6.3.1.1.9. Piutang Lain – Lain PAD yang Sah

Nilai Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp23.684.092,26 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah di Tahun 2021 sebesar Rp28.410.959,00, terjadi penurunan sebesar 16,64% atau sebesar Rp4.726.866,74.

Tabel 6.3. 15

Piutang Lain – Lain PAD yang Sah Tahun 2022 – 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	23.684.092,26	28.410.959,00

Dari tabel diatas dapat dirinci Piutang Lain – Lain PAD yang sah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Tahun 2022:

- Remunerasi Bulan Desember 2022 atas DBH Non Tunai yang dibayarkan melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dengan skema transfer ke rekening kas umum negara (RKUN) yang belum ditarik dan ditransfer ke rekening kas umum daerah (RKUD) sebesar Rp670.394,26.

Dasar pencatatan nilai *Treasury Deposit Facility* (TDF) berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia no: 900.1.14.1/7481/Keuda, Jakarta tanggal 15 Maret 2023.

- Pengakuan piutang pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah karena kurang bayar bunga deposito oleh pihak PT Bank BRI dengan rekening nomor 0036-01-002076-40-4 dan 0036-01-002077-40-0 sebesar Rp23.013.698,00, dasar pencatatan nilai piutang pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah berdasarkan surat konfirmasi kurang bayar bunga deposito oleh PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kotamobagu no : B498/KC-XII/RTL/03/2023 Kotamobagu, tanggal 28 Maret 2023.

#### 6.3.1.1.10. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah Adalah piutang atas Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang belum diterima Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan 31 Desember 2022, Nilai Piutang Transfer Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp9.992.403.561,00 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Piutang Transfer Antar Daerah di Tahun 2021 sebesar Rp11.295.402.056,00, terjadi penurunan sebesar 11,54% atau sebesar Rp1.302.998.495,00.

Rincian nilai Piutang Transfer Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 16

#### Rincian Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Piutang Bagi Hasil Pajak</b>		<b>9.992.403.561,00</b>	<b>11.295.402.056,00</b>
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.467.003.651,00	2.641.755.966,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.703.259.159,00	2.238.336.808,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.745.599.532,00	6.333.336.780,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	76.541.219,00	81.972.502,00

**6.3.1.1.11. Piutang Lainnya**

Piutang lainnya adalah piutang yang tidak terkait dengan penjualan barang atau jasa. Piutang ini bisa terbentuk dari berbagai sumber, seperti pinjaman yang diberikan kepada pihak lain, deposito jangka pendek, dan pembayaran yang belum diterima dari pihak lain terkait dengan transaksi lainnya. Di Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki piutang lainnya berupa uang muka pengadaan barang/jasa.

Rincian nilai Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 17  
Piutang Lainnya Tahun 2022 – 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
PIUTANG LAINNYA	174.111.111,11	1.787.727,00

Nilai piutang lainnya di Tahun 2022 merupakan Nilai Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 rincian nilai Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 18  
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
	<b>Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>174.111.111,11</b>	<b>0,00</b>
1	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	174.111.111,11	0,00

Nilai uang muka pengadaan barang/jasa pada tabel diatas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian;

1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan sebesar Rp11.111.111,11 merupakan belanja bantuan sosial berupa belanja pembangunan tangki septik skala individual perdesaan untuk 45 (empat puluh lima) kepala

keluarga di Desa iyok yang per 31 Desember 2022 hanya terselesaikan sebanyak 44 (empat puluh empat) kepala keluarga.

2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan sebesar Rp120.000.000,00 merupakan belanja bantuan sosial berupa belanja Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Modayag III sebanyak 7 (tujuh) unit yang per 31 Desember 2022 hanya terselesaikan sebanyak 5 (lima) unit, aktifitas ini menyebabkan timbulnya uang muka pengadaan barang /jasa.
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan sebesar Rp43.000.000,00 merupakan belanja bantuan sosial berupa bantuan perbaikan rumah tinggal layak huni (RTLH) yang per 31 Desember 2022 secara keseluruhan progress pekerjaanya hanya mencapai 76,11% dari total bantuan sebesar Rp180.000.000,00.

#### 6.3.1.1.12. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa datang. Dasar perhitungan penyisihan piutang adalah Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nilai Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp150.315.753,20 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Penyisihan Piutang di Tahun 2021 sebesar Rp155.457.210,20, terjadi penurunan sebesar 3,31% atau sebesar Rp5.141.457,00.

Berikut rincian nilai Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 19  
Penyisihan Piutang Tahun 2022 – 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
PENYISIHAN PIUTANG	(150.315.753,20)	(155.457.210,20)

Dari tabel diatas Penyisihan Piutang pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dikelompokkan menjadi berapa bagian, berikut rinciannya:

Tabel 6.3. 20

Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Penyisihan Piutang Pendapatan</b>		<b>(150.315.753,20)</b>	<b>(155.457.210,20)</b>
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(100.353.735,37)	(98.980.199,90)
2	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(49.962.017,83)	(56.477.010,30)

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 adalah sebesar Rp100.353.735,37.

Tabel 6.3. 21

Klasifikasi Umur Piutang Pajak Daerah

Uraian	Tahun Pengakuan Piutang	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Penyisihan Piutang 31 Des 2022
<b>Piutang Pajak Daerah</b>				
<b>1 Piutang Pajak Reklame</b>				<b>18.489.250,00</b>
18.489.250,00	2016	6 tahun	Macet	18.489.250,00
<b>2 Piutang Pajak Penerangan Jalan</b>				<b>2.055.131,80</b>
411.026.360,00	2022	0 tahun	Kualitas Lancar	2.055.131,80
<b>3 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>				<b>28.679.750,00</b>
10.860.000,00	2014	8 tahun	Macet	10.860.000,00
16.240.000,00	2015	7 tahun	Macet	16.240.000,00
3.159.500,00	2018	4 tahun	Diragukan	1.579.750,00
<b>4 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)</b>				<b>51.129.603,57</b>
3.994.138,00	2014	8 tahun	Macet	3.994.138,00
1.206.820,00	2017	5 tahun	Macet	1.206.820,00
86.879.887,00	2018	4 tahun	Diragukan	43.409.943,50
23.366.320,00	2020	2 tahun	Kurang Lancar	2.336.632,00
36.414.013,00	2022	0 tahun	Kualitas Lancar	182.070,07

Setelah proses penyisihan pada piutang pajak daerah yang tak tertagih dan koreksi tahun berjalan maka didapat nilai piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang pajak daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.3. 22  
Piutang Pajak Daerah Neto Tahun 2022

Piutang Pajak Daerah	Penyisihan	Piutang Neto
611.636.288,00	(100.353.735,37)	511.282.552,63

## 2. Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah

Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 adalah sebesar Rp49.962.017,83 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6.3. 23  
Klasifikasi Umur Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun Pengakuan Piutang	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Penyisihan Piutang 31 Des 2022
<b>Piutang Transfer Antar Daerah</b>				<b>49.962.017,81</b>
1 Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor				
2.467.003.651,00	2022	0 tahun	Kualitas Lancar	12.335.018,26
2 Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				
1.703.259.159,00	2022	0 tahun	Kualitas Lancar	8.516.295,80
3 Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
5.745.599.532,00	2022	0 tahun	Kualitas Lancar	28.727.997,66
4 Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan				
76.541.219,00	2022	0 tahun	Kualitas Lancar	382.706,10



Tabel 6.3. 24

## Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah</b>		<b>(49.962.017,83)</b>	<b>(56.477.010,30)</b>
1	Penyisihan Piutang Bagi Hasil	(49.962.017,83)	(56.477.010,30)

Setelah proses penyisihan pada piutang transfer antar daerah yang tak tertagih dan koreksi tahun berjalan maka didapat nilai piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang pajak daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.3. 25

## Piutang Piutang Transfer Antar Daerah Neto Tahun 2022

Piutang Transfer Antara Daerah	Penyisihan	Piutang Neto
9.992.403.561,00	(49.962.017,83)	9.942.441.543,17

**6.3.1.1.13. Beban Dibayar Dimuka**

Beban Dibayar Dimuka adalah biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang akan digunakan. Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diantaranya adalah sewa dibayar dimuka Gedung Perkantoran, Gedung Asrama dan sewa rumah dinas jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Nilai Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp167.408.219,17 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Beban Dibayar Dimuka di Tahun 2021 sebesar Rp3.599.521.970,90, terjadi penurunan sebesar 95,35% atau sebesar Rp3.432.113.751,73.

Tabel 6.3. 26

## Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 – 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
BEBAN DIBAYAR DIMUKA	167.408.219,17	3.599.521.970,90

Rincian nilai Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 27  
Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Beban Dibayar Dimuka</b>		<b>167.408.219,17</b>	<b>3.599.521.970,90</b>
1	Dinas Kesehatan	0,00	3.457.965.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	295.890,41	657.534,25
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.410.958,90	2.408.759,12
4	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	876.712,33
5	Dinas Perikanan	0,00	10.410.958,90
6	Bagian Umum	161.928.767,12	0,00
7	Inspektorat	2.772.602,74	2.529.033,69
8	Sekretariat Daerah	0,00	124.673.972,60

#### 6.3.1.1.14. Persediaan

Persediaan adalah persediaan yang dikuasai oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022. Persediaan bersifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Nilai Persediaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.792.664.823,25 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Persediaan di Tahun 2021 sebesar Rp7.818.770.961,44, terjadi penurunan sebesar 25,91% atau sebesar Rp2.026.106.138,19.

Rincian nilai Persediaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 28  
Persediaan Tahun 2022 – 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
PERSEDIAAN	5.792.664.823,25	7.818.770.961,44

Rincian nilai persediaan masing – masing SKPD per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 11. Persediaan Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan barang habis pakai yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.3. 29  
Rincian Barang Pakai Habis Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Barang Pakai Habis</b>		<b>5.792.664.823,25</b>	<b>7.818.770.961,44</b>
1	Bahan	82.708.419,50	79.382.559,50
2	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	151.405.050,79	268.674.440,00
3	Obat-obatan	5.441.950.712,96	5.937.776.256,94
4	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	116.600.640,00	1.532.937.705,00

1. Bahan

Saldo Persediaan Bahan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp82.708.419,50, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6.3. 30  
Bahan Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Bahan</b>		<b>82.708.419,50</b>	<b>79.382.559,50</b>
1	Bahan Kimia	59.728.819,50	55.138.559,50
2	Bahan/Bibit Tanaman	22.979.600,00	24.200.000,00
3	Isi Tabung Gas	0,00	44.000,00

*Handwritten signature/initials*

## 2. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Saldo Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp151.405.050,79, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6.3. 31

## Rincian Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor</b>		<b>151.405.050,79</b>	<b>268.674.440,00</b>
1	Alat Tulis Kantor	27.032.728,79	33.615.480,00
2	Kertas dan Cover	15.031.745,00	10.748.250,00
3	Bahan Cetak	10.947.990,00	89.551.200,00
4	Benda Pos	4.191.888,00	5.052.000,00
5	Bahan Komputer	83.884.109,00	125.996.530,00
6	Perabot Kantor	10.316.590,00	1.161.780,00
7	Alat Listrik	0,00	2.549.200,00

## 3. Obat-obatan

Saldo Persediaan Obat-Obatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.441.950.712,96, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6.3. 32

## Obat-Obatan Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Obat-obatan</b>		<b>5.441.950.712,96</b>	<b>5.937.776.256,94</b>
1	Obat	3.230.728.122,61	4.409.766.235,67
2	Obat-obatan Lainnya	2.211.222.590,35	1.528.010.021,27

Dari nilai Persediaan Obat – obatan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 didalamnya sudah termasuk sisa Persediaan Dropping Bantuan dari

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berupa Persediaan Obat senilai Rp64.899.139,88 dan Persediaan Obat-obatan lainnya yang merupakan Barang Medis Habis Pakai (Logistik Covid-19) senilai Rp74.002.065,00.

#### 4. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp116.600.640,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6.3. 33  
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
	<b>Persediaan untuk Dijual/Diserahkan</b>	<b>116.600.640,00</b>	<b>1.532.937.705,00</b>
1	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	116.600.640,00	1.532.937.705,00

Nilai persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat merupakan bantuan berupa bahan makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.

#### 6.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka Panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi jangka Panjang sendiri adalah investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bunga, deviden dan royalty yang jangka waktunya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

##### 6.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan, Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp8.001.400.000,00,

Penilaian investasi jangka Panjang permanen pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengacu pada kebijakan akuntansi dimana investasi jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengacu pada Surat Keputusan Bupati nomor : 132 Tahun 2016 tentang penetapan nomor rekening dana setoran modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada PT Bank SulutGo sebesar Rp1.000.000.000,00, dan Surat Keputusan Bupati nomor : 58 Tahun 2017 tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada PT Bank SulutGo Tahun anggaran 2017 sebesar Rp7.000.000.000,00. Jumlah penyertaan modal tersebut terdiri dari jumlah penyertaan modal Rp1.000.000,00 pada tahun 2013; saham bonus sebesar Rp100.000,00 di tahun 2014 dan 2015; penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 dan kapt. deviden sebesar Rp100.000,00 pada tahun 2016; penyertaan modal sebesar Rp7.000.000.000,00 pada tahun 2017; serta saham bonus sebesar Rp100.000,00 pada tahun 2019.

Berikut rincian nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 34

## Investasi Jangka Panjang Permanen Tahun 2022 – 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	8.001.400.000,00	8.001.400.000,00

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki investasi jangka Panjang permanen berupa penyertaan modal di PT. Bank Sulut-Go dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp8.001.400.000,00 sesuai dengan Akta Notaris No 72 tanggal 22 Mei 2015 mengenai perubahan nama Perseroan dan Akta Notaris No 16 tanggal 12 Oktober 2015 mengenai perubahan modal dasar Perseroan PT. Bank Sulut-Go.

**6.3.1.3. Aset Tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp827.315.908.410,16, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6.3. 35  
Aset Tetap Tahun 2022 – 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
ASET TETAP	827.315.908.410,16	862.919.602.658,89

Dari Tabel di atas Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 6.3. 36  
Rincian Aset Tetap Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>ASET TETAP</b>		<b>827.315.908.410,16</b>	<b>862.919.602.658,89</b>
1	Tanah	220.599.056.138,00	219.329.303.138,00
2	Peralatan dan Mesin	309.256.778.883,70	299.886.306.314,70
3	Gedung dan Bangunan	448.316.354.484,89	432.072.325.853,89
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	933.563.567.808,00	905.040.132.596,00
5	Aset Tetap Lainnya	20.065.971.269,00	20.039.279.621,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	23.114.812.773,27	6.247.814.038,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.127.600.632.946,70)	(1.019.695.558.902,70)

Rincian Aset Tetap masing-masing SKPD per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 12.

**6.3.1.3.1. Tanah**

Aset tetap tanah adalah properti tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan fasilitas umum, infrastruktur, atau pengembangan kawasan perkotaan. Tanah pemerintah daerah dapat berupa lahan kosong, lahan terbangun, atau tanah yang sedang dalam tahap pengembangan.

Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp220.599.056.138,00 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Tanah di Tahun 2021 sebesar Rp219.329.303.138,00, terjadi peningkatan sebesar 0,58% atau sebesar Rp1.269.753.000,00. Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 37  
Tanah Tahun 2022 – 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
TANAH	220.599.056.138,00	219.329.303.138,00

Rincian aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat pada Lampiran 13 Daftar Aset Tanah.

Tabel 6.3. 38  
Mutasi Tanah

No	Uraian	Nilai
		Rp
	<b>Saldo Awal Tahun 2022</b>	<b>219.329.303.138,00</b>
	<b>Bertambah</b>	<b>1.818.775.000,00</b>
-	Belanja Modal	78.875.000,00
-	Hibah	1.739.900.000,00
	<b>Berkurang</b>	<b>(549.022.000,00)</b>
	<b>Saldo Akhir Tahun 2022</b>	<b>220.599.056.138,00</b>

Penambahan aset tetap tanah sebesar Rp1.818.775.000,00 berasal dari:

1. Realisasi belanja modal tanah dari mekanisme SP2D sebesar Rp78.875.000,00



2. Hibah 5 (lima) bidang tanah senilai Rp1.739.900.000,00 dari Pemerintah Pusat karena berakhirnya Hak Guna Usaha PT. Ranomut sebagaimana tertuang Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 10 Maret 2021 Nomor: HR.01.03/308/III/2021 tentang Izin Pelepasan Hak.

Pengurangan aset tetap pada Dinas Pariwisata tanah sebesar Rp549.022.000,00 akibat dari reklasifikasi aset tetap tanah ke aset tetap gedung bangunan berupa bangunan parkir lainnya (tempat parkir *diving center* Kotabunan).

#### Penjelasan Tambahan Terkait Pengelolaan Aset Tetap Tanah

- a. Atas penatausahaan dan pengelolaan aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan 31 Desember 2022 jumlah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebanyak 325 bidang tanah senilai Rp220.599.056.138,00.
- b. Di Tahun 2022 sebagai tidak lanjut temuan BPK-RI, sebanyak 10 bidang tanah telah dilakukan kapitalisasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
- c. Hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki 146 bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat kepemilikan dan secara berkala berkesinambungan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait progres atas proses penerbitan sertifikat kepemilikan bidang tanah lainnya.

#### 6.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Aset tetap peralatan dan mesin adalah mesin – mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai dan digunakan untuk menunjang aktivitas operasional pemerintah daerah.

Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp309.256.778.883,70 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Peralatan Dan

Mesin di Tahun 2021 sebesar Rp299.886.306.314,70, terjadi peningkatan sebesar 3,12% atau sebesar Rp9.370.472.569,00. Nilai aset tetap peralatan mesin Tahun 2022 dan 2021 dapat dirici pada tabel berikut;

Tabel 6.3. 39  
Peralatan dan Mesin Tahun 2022 – 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
PERALATAN DAN MESIN	309.256.778.883,70	299.886.306.314,70

Rincian aset tetap peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat pada Lampiran 14.

Tabel 6.3. 40  
Mutasi Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai
		Rp
<b>Saldo Awal Tahun 2022</b>		<b>299.886.306.314,70</b>
<b>Bertambah :</b>		<b>11.791.187.692,00</b>
-	Belanja Modal	8.951.173.086,00
-	Belanja BOS	1.595.679.626,00
-	Belanja Kapitasi (JKN)	196.809.943,00
-	Hibah	284.140.300,00
-	Reklas dari Barjas	70.024.481,00
-	Reklas dari KIB Lain	693.360.256,00
<b>Berkurang :</b>		<b>(2.420.715.123,00)</b>
-	Hapus	(1.674.752.001,00)
-	Reklas Ke Barjas	(402.959.850,00)
-	Reklas Ke KIB Lain	(5.765.989,00)
-	Realisasi Belanja	(46.498.000,00)
-	Ekstrakom	(290.739.283,00)
<b>Saldo Akhir Tahun 2022</b>		<b>309.256.778.883,70</b>

Penambahan aset tetap peralatan mesin sebesar Rp11.791.187.692,00 berasal dari:

- 1) Realisasi belanja modal peralatan mesin dari mekanisme SP2D sebesar Rp8.951.173.086,00
- 2) Realisasi belanja modal peralatan mesin dari mekanisme SP2B dari belanja BOS sebesar Rp1.595.679.626,00 dan belanja kapitasi (JKN) sebesar Rp196.809.943,00. Nilai ini sudah termasuk dalam nilai realisasi belanja modal pada laporan realisasi anggaran (LRA).
- 3) Hibah sebesar Rp.284.140.300,00 berasal dari:
  - a) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp15.370.300,00 dalam rangka Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko di Daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 21/D.18/DPMPTSP/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021 berupa Peralatan Komputer;
  - b) Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Peralatan TIK SD dengan total nilai Rp268.770.000,00 yang langsung didistribusikan pada 3 (tiga) Sekolah Dasar antara lain SD Negeri 2 Kotabunan (BAST Nomor 31/Prov.Sulawesi Utara-5318/BAST/SMF/2022 Tanggal 21 November 2022), SD Negeri 1 Liberia (BAST Nomor 31/Prov.Sulawesi Utara-5319/BAST/SMF/2022 Tanggal 21 November 2022), SD Negeri Jikobelanga (BAST Nomor 31/Prov.Sulawesi Utara-5322/BAST/SMF/2022 Tanggal 21 November 2022).
- 4) Reklasifikasi dari beban barang dan jasa (BOS) sebesar Rp70.024.481,00
- 5) Reklasifikasi dari KIB lain sebesar Rp693.360.256,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp286.266.379,00 yang dianggarkan pada belanja ruang kelas, belanja ruang perpustakaan, belanja ruang laboratorium, dan belanja ruang guru.
  - Reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan gedung kantor permanen pada Dinas Pariwisata sebesar Rp197.890.000,00..

- Reklasifikasi dari belanja BOS aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp101.822.477,00.
- Reklasifikasi dari aset tetap lainnya berupa alat musik pada Dinas Pariwisata sebesar Rp107.381.400,00.

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp2.420.715.123,00 akibat dari:

- 1) Penghapusan sebesar Rp1.674.752.001,00 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Tahun 2022. Rincian penghapusan aset dapat dilihat pada Lampiran 15.
- 2) Reklasifikasi ke barang dan jasa sebesar Rp. 402.959.850,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Belanja alat kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp191.972.200,00
  - Belanja BOS pada SMP Satap Badaro sebesar Rp75.000,00
  - Belanja bahan kimia pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.760.000,00
  - Belanja *service* CCTV pada BPKPD sebesar Rp8.452.650,00
  - Reklasifikasi *cartridge* pada BPKPD sebesar Rp30.000.000,00
  - Reklasifikasi alat peraga praktik sekolah bidang studi PKN pada Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp169.700.000,00
- 3) Reklasifikasi ke aset tetap lainnya berupa permainan dan olahraga pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp5.765.989,00
- 4) Realisasi Belanja peralatan komputer dan meubel pada Kantor Camat Motongkad sebesar Rp46.498.000,00
- 5) Belanja peralatan mesin dengan nilai satuan dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp290.739.283,00

### Penjelasan Tambahan Terkait Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

- a. Penghapusan 1 Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat dengan nilai perolehan Rp512.818.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dapat dilihat pada Lampiran 15. Hal ini dilakukan karena terjadi penjualan kendaraan perorangan dinas kepada mantan Pejabat Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah.

#### 6.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Aset tetap gedung dan bangunan adalah properti yang dimiliki pemerintah daerah yang mencakup seluruh Gedung dan bangunan yang digunakan untuk tujuan pelayanan publik. Properti tersebut dapat berupa Gedung – Gedung pemerintah seperti Gedung kantor bupati, kantor dinas – dinas pemerintah daerah, atau bangunan lainnya seperti sekolah, rumah sakit, atau stasiun pengolahan air.

Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp448.316.354.484,89 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Gedung Dan Bangunan di Tahun 2021 sebesar Rp432.072.325.853,89, terjadi peningkatan sebesar 3,76% atau sebesar Rp16.244.028.631,00. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 41  
Gedung dan Bangunan Tahun 2022 – 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
GEDUNG DAN BANGUNAN	448.316.354.484,89	432.072.325.853,89

Rincian aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat pada Lampiran 16.

Tabel 6.3. 42  
Mutasi Gedung Dan Bangunan

No	Uraian	Nilai
		Rp
	<b>Saldo Awal Tahun 2022</b>	<b>432.072.325.853,89</b>
	<b>Bertambah :</b>	<b>23.207.710.503,00</b>
	- Belanja Modal	16.259.270.341,00
	- Reklas dari KIB Lain	5.498.924.907,00
	- Reklas Dari Barang dan Jasa	1.398.968.418,00
	- Utang Retensi	20.043.483,00
	- Utang Belanja	30.503.354,00
	<b>Berkurang :</b>	<b>(6.963.681.872,00)</b>
	- Hapus	(179.290.000,00)
	- Reklas Ke Barjas	(22.416.142,00)
	- Reklas ke KIB Lain	(6.761.975.730,00)
	<b>Saldo Akhir Tahun 2022</b>	<b>448.316.354.484,89</b>

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp23.207.710.503,00 berasal dari:

- 1) Realisasi belanja modal gedung dan bangunan dari mekanisme SP2D sebesar Rp16.259.270.341,00
- 2) Reklasifikasi dari KIB lain sebesar Rp5.498.924.907,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Reklasifikasi dari aset tetap tanah berupa tanah lapangan parkir konstruksi beton pada Dinas Pariwisata sebesar Rp549.022.000,00
  - Reklasifikasi dari aset tetap lainnya berupa aset renovasi pada Bagian Umum sebesar Rp898.850.000,00
  - Reklasifikasi dari ekstrakomtabel berupa pagar pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp14.960.000,00
  - Reklasifikasi dari KDP pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.036.092.907,00

- 3) Reklasifikasi dari barang dan jasa sebesar Rp1.398.968.418,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Belanja Jasa Tenaga Ahli pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp598.016.801,00
  - Belanja Jasa Tenaga Ahli pada Dinas PUPRPRKPP sebesar Rp346.678.530,00
  - Belanja Jasa Tenaga Ahli pada Dinas Kesehatan sebesar Rp49.950.000,00
  - Belanja Jasa Tenaga Ahli pada DPPKB sebesar Rp52.333.292,00
  - Belanja Jasa Pemeliharaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp351.989.795,00
- 4) Utang retensi yang akan dibayarkan di Tahun 2023 sebesar Rp20.043.483,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Rehabilitasi Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan Kotabunan pada DPPKB sebesar Rp4.986.581,00
  - Pembangunan Pagar SD Negeri 1 Moyongkota Baru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp15.056.902,00
- 5) Utang belanja yang akan dibayarkan pada Tahun 2023 berupa pembangunan gedung pendidikan SD Negeri 1 Atoga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp30.503.354,00

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp6.963.681.872,00 akibat dari:

- 1) Penghapusan sebesar Rp179.290.000,00 pada Dinas Kesehatan akibat pemusnahan Bangunan Klinik/Puskesmas yang terletak di area Puskesmas Kotabunan karena sudah tidak sesuai spesifikasi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Tahun 2022. Rincian penghapusan aset dapat dilihat pada Lampiran 15.
- 2) Reklasifikasi ke barang dan jasa sebesar Rp22.416.142,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja pemeliharaan gedung pada BPKPD sebesar Rp16.436.236,00
  - Belanja pemeliharaan gedung tempat kerja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.979.906,00
- 3) Reklasifikasi ke KIB lainnya sebesar Rp6.761.975.730,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Reklasifikasi ke aset tetap JIJ berupa belanja pavingblock pada Sekretariat DPRD sebesar Rp32.158.170,00
  - Reklasifikasi ke KDP pada Dinas PUPRPRKPP sebesar Rp6.020.661.181,00
  - Reklasifikasi ke aset tetap peralatan mesin berupa belanja perabot pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp286.266.379,00 yang dianggarkan pada belanja ruang kelas, belanja ruang perpustakaan, belanja ruang laboratorium, dan belanja ruang guru.
  - Reklasifikasi ke aset tetap peralatan mesin berupa lampu penerangan pada Dinas Pariwisata sebesar Rp197.890.000,00
  - Reklasifikasi ke aset tetap JIJ berupa jalan khusus pada Dinas Pariwisata sebesar Rp225.000.000,00

#### **6.3.1.3.4. Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Aset tetap jalan, jaringan dan irigasi adalah jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai,

Aset Tetap Jalan, Jaringan, Dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp933.563.567.808,00 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Jalan, Jaringan, Dan Irigasi di Tahun 2021 sebesar Rp905.040.132.596,00, terjadi peningkatan sebesar 3,15% atau sebesar Rp28.523.435.212,00. Nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6.3. 43

## Jalan, Jaringan, Dan Irigasi Tahun 2022 - 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	933.563.567.808,00	905.040.132.596,00

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat pada Lampiran 17.

Tabel 6.3. 44

## Mutasi Jalan dan Jaringan

No	Uraian	Nilai
		Rp
<b>Saldo Awal Tahun 2022</b>		<b>905.040.132.596,00</b>
<b>Bertambah :</b>		<b>43.466.521.674,00</b>
-	Belanja Modal	42.003.471.945,00
-	Reklas dari KIB Lain	1.148.763.424,00
-	Reklas dari Barjas	308.232.015,00
-	Utang Retensi	6.054.290,00
<b>Berkurang :</b>		<b>(14.943.086.462,00)</b>
-	Reklas ke KIB Lain	(14.852.903.407,00)
-	Realisasi Retensi	(90.183.055,00)
<b>Saldo Akhir Tahun 2022</b>		<b>933.563.567.808,00</b>

Penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp43.466.521.674,00 berasal dari:

- 1) Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dari mekanisme SP2D sebesar Rp42.003.471.945,00
- 2) Reklasifikasi dari KIB lain sebesar Rp1.148.763.424,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Reklasifikasi dari aset tetap gedung bangunan berupa jalan khusus lain lain pada Dinas Pariwisata sebesar Rp225.000.000,00
  - Reklasifikasi dari KDP pada Dinas PUPRPRKPP sebesar Rp891.605.254,00

- Reklasifikasi dari aset tetap gedung bangunan berupa pavingblock taman pada Sekretariat DPRD sebesar Rp32.158.170,00
- 3) Reklasifikasi dari barang dan jasa sebesar Rp308.232.015,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Belanja Jasa Tenaga Ahli pada Dinas Kominfo sebesar Rp99.511.500,00
  - Belanja Jasa Tenaga Ahli pada Dinas PUPRPRKPP sebesar Rp198.813.765,00
  - Belanja Jasa Tenaga Ahli pada Dinas Pertanian sebesar Rp9.906.750,00
- 4) Utang retensi pembangunan talud dan pembangunan bronjong di Dinas PUPRPRKPP yang akan dibayarkan di Tahun 2023 sebesar Rp6.054.290,00

Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp14.943.086.462,00 akibat dari:

- 1) Reklasifikasi ke KDP pada Dinas PUPRPRKPP sebesar Rp14.852.903.407,00
- 2) Realisasi retensi atas pekerjaan jalan lingkaran SKPD dan jalan Desa Motongkad pada Dinas PUPRPRKPP sebesar Rp90.183.055,00

#### 6.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, jaringan dan irigasi yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp20.065.971.269,00 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya di Tahun 2021 sebesar Rp20.039.279.621,00, terjadi peningkatan sebesar 0,13% atau sebesar Rp26.691.648,00.

Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 45

Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 – 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
ASET TETAP LAINNYA	20.065.971.269,00	20.039.279.621,00

Rincian aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat pada Lampiran 18.

Tabel 6.3. 46  
Mutasi Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai
		Rp
<b>Saldo Awal Tahun 2022</b>		<b>20.039.279.621,00</b>
<b>Bertambah :</b>		<b>1.696.413.163,00</b>
-	Belanja Modal	655.884.965,00
-	Belanja BOS	424.192.173,00
-	Reklas dari Barjas	150.820.036,00
-	Reklas dari KIB Lain	465.515.989,00
<b>Berkurang :</b>		<b>(1.669.721.515,00)</b>
-	Reklas ke KIB Lain	(1.108.053.877,00)
-	Reklas Ke Barjas	(89.650.000,00)
-	Penghapusan	(34.955.000,00)
-	Ekstrakom	(433.322.638,00)
-	Kurang Catat	(3.740.000,00)
<b>Saldo Akhir Tahun 2022</b>		<b>20.065.971.269,00</b>

Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp1.696.413.163,00 berasal dari:

- 1) Realisasi belanja modal aset tetap lainnya dari mekanisme SP2D sebesar Rp655.884.965,00
- 2) Realisasi belanja modal aset tetap lainnya dari mekanisme SP2B dari belanja BOS sebesar Rp424.192.173,00. Nilai ini sudah termasuk dalam nilai realisasi belanja modal pada laporan realisasi anggaran (LRA)
- 3) Reklasifikasi dari barang dan jasa sebesar Rp150.820.036,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Belanja jasa perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp91.119.553,00
  - Belanja barang dan jasa BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp59.700.483,00
- 4) Reklasifikasi dari KIB lain sebesar Rp465.515.989,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Reklasifikasi dari KDP pada Bappelitbangda sebesar Rp459.750.000,00
- Reklasifikasi dari aset tetap peralatan mesin di DPMPTSP sebesar Rp5.765.989,00

Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp1.669.721.515,00 akibat dari:

- 1) Reklasifikasi ke KIB lain sebesar Rp1.108.053.877,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Reklasifikasi ke aset tetap gedung bangunan berupa aset renovasi pada Bagian Umum sebesar Rp898.850.000,00
  - Reklasifikasi ke aset tetap peralatan mesin berupa belanja BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp101.822.477,00
  - Reklasifikasi ke aset tetap peralatan mesin berupa belanja alat musik pada Dinas Pariwisata sebesar Rp107.381.400,00
- 2) Reklasifikasi ke barang jasa berupa PIN emas Garuda Bupati dan Wakil Bupati pada Bagian Umum sebesar Rp89.650.000,00
- 3) Penghapusan sebesar Rp34.955.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Tahun 2022. Rincian penghapusan aset dapat dilihat pada Lampiran 15.
- 4) Belanja aset tetap lainnya dengan nilai satuan dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp433.322.638,00
- 5) Terdapat selisih pencatatan sebesar Rp3.740.000,00 pada dinas Pendidikan dalam bentuk Buku geografi.

#### **6.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan adalah mencakup aset yang sedang dalam proses pengerjaan/pembangunan namun dalam tanggal pelaporan keuangan belum selesai secara keseluruhan.

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp23.114.812.773,27 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan di Tahun 2021 sebesar Rp6.247.814.038,00, terjadi peningkatan sebesar

269,97% atau sebesar Rp16.866.998.735,27. Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 47

Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 – 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	23.114.812.773,27	6.247.814.038,00

Rincian aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat pada Lampiran 19.

Tabel 6.3. 48

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Nilai
		Rp
	<b>Saldo Awal Tahun 2022</b>	<b>6.247.814.038,00</b>
	<b>Bertambah :</b>	<b>22.254.446.896,27</b>
	- Reklas dari KIB Lain	22.254.446.896,27
	<b>Berkurang :</b>	<b>(5.387.448.161,00)</b>
	- Reklas ke KIB Lain	(5.387.448.161,00)
	<b>Saldo Akhir Tahun 2022</b>	<b>23.114.812.773,27</b>

Penambahan aset tetap KDP sebesar Rp22.254.446.896,27 berasal dari:

- 1) KDP gedung dan bangunan sebesar Rp6.405.340.517,84, dimana didalamnya sudah termasuk koreksi pemeriksaan Tim BPK-RI sebesar Rp384.679.336,84 dan tercatat sebagai utang jangka pendek lain-lain.
- 2) KDP jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp15.849.106.378,43 dimana didalamnya sudah termasuk koreksi pemeriksaan Tim BPK-RI sebesar Rp996.202.971,43 dan tercatat sebagai utang jangka pendek lain-lain.

Pengurangan aset tetap KDP sebesar Rp5.387.448.161,00 akibat dari:

- 1) Reklasifikasi ke gedung bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.036.092.907,00
- 2) Reklasifikasi ke JIJ pada Dinas PUPRPRKPP sebesar Rp891.605.254,00

3) Reklasifikasi ke aset tetap lainnya pada Bappelitbangda sebesar Rp459.750.000,00

Tabel 6.3. 49

## Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>		<b>23.114.812.773,27</b>	<b>6.247.814.038,00</b>
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	7.032.293.357,84	5.122.795.747,00
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	16.082.519.415,43	1.125.018.291,00

## Penjelasan Tambahan Terkait Pengelolaan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Beberapa pekerjaan fisik yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2022 tercatat sebagai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan mendapat kesempatan perpanjangan kontrak dan menyelesaikan kontrak dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

- Uprating IPA Kapasitas 15 Liter/Detik SPAM Desa Nuangan (DAK) sebagaimana Berita Acara Serah Terima Nomor 96/D.11/DPU-PRASKIM/BAPP-PHO/CK/I/2023 Tanggal 28 Januari 2023
- Peningkatan Jalan Tutuyan-Inalom (DAK) sebagaimana Berita Acara Serah Terima 3/D.11/DISPU-PRASKIM/BMT/B.BM/BASTP/I/2023 Tanggal 20 Januari 2023
- Belanja Modal Pembangunan Rumah Dinas Bupati sebagaimana Berita Acara Serah Terima Nomor 192/D.11/DISPU-PRASKIM/CK/BAPPP/II/2023 Tanggal 20 Februari 2023
- Peningkatan Jalan Perkebunan Kopi Damatolan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Nomor 2/D.11/DISPU-PRASKIM/BMT/B.BM/BASTP/I/2023 Tanggal 17 Januari 2023
- Peningkatan Jalan Desa Tangaton sebagaimana Berita Acara Serah Terima 1/D.11/DISPU-PRASKIM/BMT/B.BM/BASTP/I/2023 Tanggal 10 Januari 2023

Adapun pekerjaan fisik Pembangunan Tugu Batas Wilayah Administrasi mendapat kesempatan perpanjangan kontrak namun tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dengan realisasi fisik pekerjaan sebesar 53,66% sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor 11/D.11/DISPU-PRASKIM/TR/BAPFP/II/2023 Tanggal 8 Februari 2023

**6.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan**

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan masa manfaat suatu aset tetap selain tanah. Sedangkan Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan atas aset-aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari tahun-tahun anggaran sebelumnya sampai dengan tanggal neraca. Penghitungan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) yang sudah tertanam (*by system*) pada aplikasi Simda-BMD. Nilai Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.127.600.632.946,70. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai di Tahun 2021 sebesar Rp1.019.695.558.902,70, terjadi peningkatan sebesar 10,58% atau sebesar Rp107.905.074.044,00. Rincian nilai Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 50  
Akumulasi Penyusutan 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(1.127.600.632.946,70)</b>	<b>(1.019.695.558.902,70)</b>

Rincian akumulasi penyusutan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat pada Lampiran 20.

Tabel 6.3. 51  
Mutasi Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Nilai
		Rp
	<b>Saldo Awal Tahun 2022</b>	<b>1.019.695.558.902,70</b>
	<b>Bertambah :</b>	<b>107.905.074.044,00</b>
-	Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	29.127.799.151,00
-	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.288.491.238,00
-	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.488.783.655,00
	<b>Berkurang :</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo Akhir Tahun 2022</b>	<b>1.127.600.632.946,70</b>

Rincian akumulasi penyusutan terdapat tabel dibawah ini;

Tabel 6.3. 52

## Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>(1.127.600.632.946,70)</b>	<b>(1.019.695.558.902,70)</b>
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(251.975.580.046,70)	(222.847.780.895,70)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(134.944.581.656,00)	(113.656.090.418,00)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(740.667.676.866,00)	(683.178.893.211,00)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(12.794.378,00)	(12.794.378,00)

**6.3.1.4. Aset Lainnya**

Aset lainnya merupakan aset-aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap dana cadangan. Aset Lainnya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp4.688.780.785,00. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Aset Lainnya di Tahun 2021 sebesar Rp1.931.997.481,00, terjadi peningkatan sebesar 142,69% atau sebesar Rp2.756.783.304,00. Nilai Aset Lainnya Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 53

## Aset Lainnya Tahun 2022 – 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
ASET LAINNYA	4.688.780.785,00	1.931.997.481,00

Dari tabel diatas Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dikelompokkan menjadi berapa bagian, berikut rinciannya:



Tabel 6.3. 55  
Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Aset Tidak Berwujud</b>		<b>3.973.515.000,00</b>	<b>3.954.665.000,00</b>
1	Goodwill	(247.539.600,00)	(247.539.600,00)
2	Software	664.320.000,00	645.470.000,00
3	Kajian	3.556.734.600,00	3.556.734.600,00

#### 6.3.1.4.3. Aset Lain-lain

Aset lainnya terdiri atas aset – aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka Panjang, aset tetap dana cadangan. aset lainnya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terbagi atas Nilai Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp 3.655.944.747,00

Tabel 6.3. 56  
Aset Lain – Lain Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Aset Lain - Lain</b>		<b>3.655.944.747,00</b>	<b>903.261.497,00</b>
1	Aset Rusak Berat/Usang	2.616.604.756,00	2.628.087.256,00
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	290.005.527,00	290.005.527,00
3	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(2.014.831.286,00)	(2.014.831.286,00)
4	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2.764.165.750,00	0,00

Di tahun 2022 terdapat dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil (DBH)/dan alokasi umum (DAU) hasil non tunai yang berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia No: 900.1.14/7481/Keuda, Jakarta 15 Maret 2023

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mencatat nilai Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)* sebesar Rp2.764.165.750,00.

#### 6.3.1.4.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud adalah penghitungan jumlah amortisasi yang telah dibebankan pada aset tidak berwujud selama masa pakainya. Nilai akumulasi penyusutan aset tidak berwujud Rp3.020.329.016,00

Tabel 6.3. 57

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>		<b>(3.020.329.016,00)</b>	<b>(3.020.329.016,00)</b>
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	(1.071.578.400,00)	(1.071.578.400,00)
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(90.176.000,00)	(90.176.000,00)
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(7.030.000,00)	(7.030.000,00)
4	Goodwill	(247.539.600,00)	(247.539.600,00)
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(1.604.005.016,00)	(1.604.005.016,00)

#### 6.3.2. Kewajiban

Kewajiban Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah baik kepada internal maupun eksternal sebagai akibat transaksi keuangan yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp8.016.036.283,38

Rincian nilai Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. 58  
Kewajiban Tahun 2022 – 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp	Rp
KEWAJIBAN	8.016.036.283,38	7.647.798.070,10

### 6.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp8.016.036.283,38

Tabel 6.3. 59  
Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>8.016.036.283,38</b>	<b>7.647.798.070,10</b>
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	252.068.325,00	376.790.168,40
2	Utang Belanja	5.800.402.975,00	6.805.530.153,00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.963.564.983,38	465.477.748,70

Dari tabel diatas kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dijabarkan sebagai berikut;

#### 6.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) merupakan utang Pemerintah Daerah kepada Pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Yang harus diserahkan kepada pihak lain. Berikut rincian utang perhitungan pihak ketiga (PFK)

Tabel 6.3. 60

## Rincian Utang Perhitungan Pihak ketiga (PFK) Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</b>		<b>252.068.325,00</b>	<b>376.790.168,40</b>
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	238.300.212,00	238.300.212,00
2	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	26.526,00	0,00
3	Utang Iuran Jaminan Kematian	79.590,00	0,00
4	Utang PPh 22	1.728.699,00	(793.998,00)
5	Utang PPh 23	(339.880,00)	(339.880,00)
6	Utang PPN Pusat	7.665.669,00	135.290.063,40
7	Utang Taperum	3.574.049,00	3.574.049,00
8	Utang Iuran Wajib Pegawai	1.033.460,00	759.722,00

Tabel 6.3. 61

Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)  
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		Bendahara Pengeluaran	Bendahara Umum Daerah (BUD)	Utang PFK Tahun 2022
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	238.300.212,00	238.300.212,00
2	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	26.526,00	26.526,00
3	Utang Iuran Jaminan Kematian	0,00	79.590,00	79.590,00
4	Utang PPh 22	76.143,00	1.652.556,00	1.728.699,00
5	Utang PPh 23	0,00	(339.880,00)	(339.880,00)
6	Utang PPN Pusat	558.388,00	7.107.281,00	7.665.669,00
7	Utang Taperum	0,00	3.574.049,00	3.574.049,00
8	Utang Iuran Wajib Pegawai	0,00	1.033.460,00	1.033.460,00
<b>Total Utang PFK</b>		<b>634.531,00</b>	<b>251.433.794,00</b>	<b>252.068.325,00</b>

Dari tabel diatas dapat dijabarkan utang perhitungan pihak ketiga (PFK) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dan bendahara umum daerah (BUD).

- a. Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran
  - Sekretariat Daerah Bagian Keuangan PPh 22 atas transaksi Ganti Uang (GU) yang belum disetorkan ke rekening umum kas daerah (RKUD) sebesar Rp24.961,00,00 atas kwitansi no :06.0/000031b/UP/4.01.0.00.0.00.01.00/P.01/4/2022 tanggal 18 maret 2022
  - Sekretariat Daerah Bagian Keuangan PPh 22 atas transaksi Ganti Uang (GU) yang belum disetorkan ke rekening umum kas daerah (RKUD) sebesar Rp51.182,00 atas kwitansi no: 06.0/000031a/UP/4.01.0.00.0.00.01.00/P.01/4/2022 tanggal 18 Maret 2022.
  - Sekretariat Dearah Bagian Keuangan PPN atas transaski Ganti Uang (GU) yang belum disetorkan ke rekening kas umum daerah (RKUD) sebesar Rp375.338,00 atas kwitansi no: 06.0/000031b/UP/4.01.0.00.0.00.01.00/P.01/4/2022 tanggal 18 Maret 2022.
  - Sekretariat Dearah Bagian Keuangan PPN atas transaski Ganti Uang (GU) yang belum disetorkan ke rekening kas umum daerah (RKUD) sebesar Rp183.050,00 atas kwitansi no: 06.0/000031a/UP/4.01.0.00.0.00.01.00/P.01/4/2022 tanggal 18 Maret 2022.
- b. Utang perhitungan pihak ketiga yang dikelola oleh bendahara umum daerah (BUD)
  - Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah selaku bendahara umum daerah (BUD) Utang Iuran Jaminan Kesehatan sebesar Rp238.300.212,00 nilai ini merupakan hutang kepada Badan Penyelenggaraan Jasminan Sosial (BPJS) kesehatan desa Tahun 2021 yang belum disetorkan ke BPJS.
  - Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah selaku bendahara umum daerah (BUD) utang iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp26.526,00 atas transaksi sp2d no: 04.0/000423/LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/P.09/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang belum disetorkan dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas umum negara (RKUN)

- Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah selaku bendahara umum daerah (BUD) Utang Iuran Jaminan Kematian sebesar Rp79.590,00 atas transaksi sp2d no: 04.0/000423/LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/P.09/12/2022 tanggal 28 Desember 2022, yang belum disetorkan dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas umum negara (RKUN)
- Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah selaku bendahara umum daerah (BUD) Utang PPh 22 sebesar Rp1.837.500,00 atas transaksi sp2d no: 04.0/000183/LS/1.02.0.00.0.00.01.000/P.08/11/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang belum disetorkan dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas umum negara (RKUN).
- Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah selaku bendahara umum daerah (BUD) Utang PPh 22 sebesar Rp 609.054,00 atas transaksi sp2d no: 04.0/000438/LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/P.09/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang belum disetorkan dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas umum negara (RKUN).
- Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah selaku bendahara umum daerah (BUD) Utang PPN Pusat sebesar Rp 13.475.000,00 atas transaksi sp2d no: 04.0/000062/LS/7.01.0.00.0.00.07.0000/P.08/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang belum disetorkan dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas umum negara (RKUN).
- Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah selaku bendahara umum daerah (BUD) Utang Iuran Wajib Pegawai Pusat sebesar Rp273.738,00 tanggal 20 Desember 2022.

Nilai utang perhitungan pihak ketiga (PFK) yang terdapat pada bendahara pengeluaran telah disetorkan ke rekening kas umum negara di Tahun 2023, sementara itu untuk utang penerimaan pihak ketiga (PFK) yang terdapat di bendahara umum daerah (BUD) pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Bank SulutGo agar dapat melakukan penyetoran di Tahun 2023 hal ini dikarenakan penyetoran

utang pihak ketiga (PFK) sudah melalui pembuatan kode ID Biling yang disetorkan langsung oleh pihak Bank SulutGo melalui rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas umum negara (RKUN).

Tabel 6.3. 62  
Mutasi Utang Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Utang PFK Tahun 2022
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	238.300.212,00	6.288.417.344,00	6.288.417.344,00	238.300.212,00
2	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	196.707.981,00	196.681.455,00	26.526,00
3	Utang Iuran Jaminan Kematian	0,00	581.441.341,00	581.361.751,00	79.590,00
4	Utang PPh 21	0,00	6.772.079.491,00	6.772.079.491,00	0,00
5	Utang PPh 22	(793.998,00)	290.716.517,00	288.193.820,00	1.728.699,00
6	Utang PPh 23	(339.880,00)	273.871.567,00	273.871.567,00	(339.880,00)
7	Utang PPh Ps 4 (2)	0,00	1.349.552.824,00	1.349.552.824,00	0,00
7	Utang PPN Pusat	135.290.063,40	9.902.848.714,00	10.030.473.108,40	7.665.669,00
8	Utang Taperum	3.574.049,00	0,00	0,00	3.574.049,00
9	Utang Iuran Wajib Pegawai	759.722,00	8.413.704.289,00	8.413.430.551,00	1.033.460,00
<b>Total Utang PFK</b>		<b>376.790.168,40</b>	<b>34.069.340.068,00</b>	<b>34.194.061.911,40</b>	<b>252.068.325,00</b>

#### 6.3.2.1.2. Utang Belanja

Utang belanja adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima atau dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen.

Tabel 6.3. 63  
Utang Belanja Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>Utang Belanja</b>		<b>5.800.402.975,00</b>	<b>6.805.530.153,00</b>
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	398.872.559,00	181.694.284,00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.064.176.311,00	4.444.122.908,00
3	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	363.146.125,00	222.311.290,00
4	Utang Belanja Jasa	974.207.980,00	1.957.401.671,00

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp894.050.783.818,51 nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai Ekuitas di Tahun 2021 sebesar Rp931.258.535.704,14, terjadi penurunan sebesar 4,00% atau sebesar Rp37.207.751.885,63.

Tabel 6.3. 66  
Ekuitas Tahun 2022 – 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
<b>EKUITAS</b>		<b>894.050.783.818,51</b>	<b>931.258.535.704,14</b>
1	ASET	902.066.820.101,89	938.906.333.774,24
2	KEWAJIBAN	8.016.036.283,38	7.647.798.070,10



## 6.4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang tercermin dalam Pendapatan – LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional

### 6.4.1. Kegiatan Operasional

Menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

#### 6.4.1.1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Tabel 6.4. 1

Pendapatan – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	(%)
PENDAPATAN - LO	477.611.811.647,26	493.098.775.773,99	(15.486.964.126,73)	(3,14)

Penjelasan dari rincian Pendapatan - LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 dan Tahun 2021 di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 6.4. 2

Rincian Pendapatan – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
PENDAPATAN - LO		477.611.811.647,26	493.098.775.773,99	(15.486.964.126,73)	(3,14)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	13.605.316.936,26	14.375.713.435,99	(770.396.499,73)	(5,36)
2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	448.722.292.358,00	467.847.381.106,00	(19.125.088.748,00)	(4,09)
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	15.284.202.353,00	10.875.681.232,00	4.408.521.121,00	40,54

#### 6.4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp13.605.316.936,26, Jika dibandingkan dengan saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO di Tahun 2021 sebesar Rp14.375.713.435,99 nilai tersebut mengalami penurunan

sebesar 5,36% atau sebesar Rp770.396.499,73. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO memiliki proporsi sebesar 2,85% dari total saldo Pendapatan - LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Rincian saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 3

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>		<b>13.605.316.936,26</b>	<b>14.375.713.435,99</b>	<b>(770.396.499,73)</b>	<b>(5,36)</b>
1	Pajak Daerah-LO	8.079.056.025,00	6.033.431.227,00	2.045.624.798,00	33,90
2	Retribusi Daerah-LO	397.832.320,00	280.887.019,00	116.945.301,00	41,63
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	1.409.788.093,00	2.046.482.433,00	(636.694.340,00)	(31,11)
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	3.718.640.498,26	6.014.912.756,99	(2.296.272.258,73)	(38,18)

Dari tabel di atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dijabarkan sebagai berikut :

**1. Pajak Daerah – LO**

Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Saldo Pajak Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp8.079.056.025,00, Jika dibandingkan dengan saldo Pajak Daerah-LO di Tahun 2021 sebesar Rp6.033.431.227,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 33,90% atau sebesar Rp2.045.624.798,00. Pajak Daerah-LO memiliki proporsi sebesar 59,38% dari total saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Tabel 6.4. 4  
Pajak Daerah-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Pajak Daerah-LO</b>		<b>8.079.056.025,00</b>	<b>6.033.431.227,00</b>	<b>2.045.624.798,00</b>	<b>33,90</b>
1	Pajak Hotel-LO	35.106.250,00	36.875.000,00	(1.768.750,00)	(4,80)
2	Pajak Restoran-LO	688.913.157,00	550.184.759,00	138.728.398,00	25,21
3	Pajak Hiburan-LO	22.950.000,00	20.300.000,00	2.650.000,00	13,05
4	Pajak Reklame-LO	211.332.875,00	224.603.125,00	(13.270.250,00)	(5,91)
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	2.320.189.041,00	1.789.743.798,00	530.445.243,00	29,64
6	Pajak Sarang Burung Walet-LO	10.600.000,00	11.400.000,00	(800.000,00)	(7,02)
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	320.172.910,00	112.808.649,00	207.364.261,00	183,82
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	2.434.642.844,00	2.400.106.218,00	34.536.626,00	1,44
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	2.035.148.948,00	887.409.678,00	1.147.739.270,00	129,34

Dari rincian tabel diatas memberikan informasi adanya kenaikan sebesar 33,90% di Tahun Anggaran 2022 jika dibanding dengan Tahun Anggaran 2021. Penjelasan masing - masing Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

a. Pajak Hotel-LO

Saldo Pajak Hotel-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp35.106.250,00, Jika dibandingkan dengan saldo Pajak Hotel-LO di Tahun 2021 sebesar Rp36.875.000,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 4,80% atau sebesar Rp1.768.750,00. Pajak Hotel-LO memiliki proporsi sebesar 0,43% dari total saldo Pajak Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Rincian saldo Pajak Hotel-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 5  
Pajak Hotel-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Pajak Hotel-LO</b>		<b>35.106.250,00</b>	<b>36.875.000,00</b>	<b>(1.768.750,00)</b>	<b>(4,80)</b>
1	Pajak Hotel-LO	35.106.250,00	36.875.000,00	(1.768.750,00)	(4,80)

Saldo Pajak Hotel – LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan total Pajak Hotel tahun 2022 yang di terima di Tahun 2022 berikut rinciannya;

Tabel 6.4. 6  
Mutasi Tambah (Kurang) Pajak Hotel Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022	Penambahan (Pengurangan)	Saldo 2022
		Rp	Rp	Rp
<b>Pajak Hotel</b>		<b>35.106.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.106.250,00</b>
1	Pajak Hotel	35.106.250,00	0,00	35.106.250,00

b. Pajak Restoran-LO

Saldo Pajak Restoran-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp688.913.157,00, Jika dibandingkan dengan saldo Pajak Restoran-LO di Tahun 2021 sebesar Rp550.184.759,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 25,21% atau sebesar Rp138.728.398,00. Pajak Restoran-LO memiliki proporsi sebesar 8,53% dari total saldo Pajak Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Rincian saldo Pajak Restoran-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 7  
Pajak Restoran-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Pajak Restoran-LO</b>		<b>688.913.157,00</b>	<b>550.184.759,00</b>	<b>138.728.398,00</b>	<b>25,21</b>
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	688.913.157,00	550.184.759,00	138.728.398,00	25,21

Saldo Pajak Restoran - LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan total Pajak Restoran Tahun 2022 yang di terima di Tahun 2022 berikut rinciannya;

Tabel 6.4. 8

Mutasi Tambah (Kurang) Pajak Restoran Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022	Penambahan (Pengurangan)	Saldo 2022
		Rp	Rp	Rp
<b>Pajak Restoran</b>		<b>688.913.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.913.157,00</b>
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	688.913.157,00	0,00	688.913.157,00

c. Pajak Hiburan-LO

Saldo Pajak Hiburan-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp22.950.000,00, Jika dibandingkan dengan saldo Pajak Hiburan-LO di Tahun 2021 sebesar Rp20.300.000,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 13,05% atau sebesar Rp2.650.000,00. Pajak Hiburan-LO memiliki proporsi sebesar 0,28% dari total saldo Pajak Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Tabel 6.4. 9

Pajak Hiburan-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Pajak Hiburan-LO</b>		<b>22.950.000,00</b>	<b>20.300.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>13,05</b>
1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO	22.950.000,00	20.300.000,00	2.650.000,00	13,05

Saldo Pajak Hiburan - LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan total Pajak Hiburan Tahun 2022 yang di terima di Tahun 2022 berikut rinciannya;

Tabel 6.4. 10

Mutasi Tambah (Kurang) Pajak Hiburan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022	Penambahan (Pengurangan)	Saldo 2022
		Rp	Rp	Rp
<b>Pajak Hiburan</b>		<b>22.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.950.000,00</b>
1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00

*Handwritten signature/initials*

## d. Pajak Reklame-LO

Saldo Pajak Reklame-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp211.332.875,00, Jika dibandingkan dengan saldo Pajak Reklame-LO di Tahun 2021 sebesar Rp224.603.125,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 5,91% atau sebesar Rp13.270.250,00. Pajak Reklame-LO memiliki proporsi sebesar 2,62% dari total saldo Pajak Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Tabel 6.4. 11  
Pajak Reklame-LO Tahun 2022 – Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Pajak Reklame-LO</b>		<b>211.332.875,00</b>	<b>224.603.125,00</b>	<b>(13.270.250,00)</b>	<b>(5,91)</b>
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	211.332.875,00	224.603.125,00	(13.270.250,00)	(5,91)

Saldo Pajak Reklame - LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan total Pajak Reklame Tahun 2022 yang di terima di Tahun 2022 berikut rinciannya;

Tabel 6.4. 12  
Mutasi Tambah (Kurang) Pajak Reklame Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022	Penambahan (Pengurangan)	Saldo 2022
		Rp	Rp	Rp
<b>Pajak Reklame</b>		<b>211.332.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.332.875,00</b>
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	211.332.875,00	0,00	211.332.875,00

## e. Pajak Penerangan Jalan-LO

Saldo Pajak Penerangan Jalan-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.320.189.041,00, Jika dibandingkan dengan saldo Pajak Penerangan Jalan-LO di Tahun 2021 sebesar Rp1.789.743.798,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 29,64% atau sebesar Rp530.445.243,00. Pajak Penerangan Jalan-LO memiliki proporsi sebesar 28,72% dari total saldo Pajak Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Tabel 6.4. 13

## Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
	<b>Pajak Penerangan Jalan-LO</b>	<b>2.320.189.041,00</b>	<b>1.789.743.798,00</b>	<b>530.445.243,00</b>	<b>29,64</b>
1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	2.320.189.041,00	1.789.743.798,00	530.445.243,00	29,64

Saldo Pajak Penerangan Jalan - LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan total Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022 yang di terima di Tahun 2022 berikut rinciannya;

Tabel 6.4. 14

## Mutasi Tambah (Kurang) Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022	Penambahan (Pengurangan)	Saldo 2022
		Rp	Rp	Rp
	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>2.078.981.260,00</b>	<b>241.207.781,00</b>	<b>2.320.189.041,00</b>
1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.078.981.260,00	241.207.781,00	2.320.189.041,00

Dari tabel di atas dapat di jabarkan penyebab penambahan atau pengurangan Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengakuan Piutang Tahun 2022 Pajak Penerangan Jalan Sebesar Rp411.026.360,00 dikurangi;
- 2) Penerimaan Piutang Pajak Penerangan Jalan Bulan Desember Tahun 2021 Sebesar Rp169.818.579,00.

## f. Pajak Sarang Burung Walet-LO

Saldo Pajak Sarang Burung Walet-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp10.600.000,00, Jika dibandingkan dengan saldo Pajak Sarang Burung Walet-LO di Tahun 2021 sebesar Rp11.400.000,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 7,02% atau sebesar Rp800.000,00. Pajak Sarang Burung Walet-LO memiliki proporsi sebesar 0,13% dari total saldo Pajak Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Rincian saldo Pajak Sarang Burung Walet-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 15

## Pajak Sarang Burung Walet-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Pajak Sarang Burung Walet-LO</b>		<b>10.600.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>(800.000,00)</b>	<b>(7,02)</b>
1	Pajak Sarang Burung Walet-LO	10.600.000,00	11.400.000,00	(800.000,00)	(7,02)

Saldo Pajak Sarang Burung Walet - LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan total Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2022 yang di terima di Tahun 2022 berikut rinciannya;

Tabel 6.4. 16

## Mutasi Tambah (Kurang) Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022	Penambahan (Pengurangan)	Saldo 2022
		Rp	Rp	Rp
<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>		<b>10.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600.000,00</b>
1	Pajak Sarang Burung Walet	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00

## g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO

Saldo Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp320.172.910,00, Jika dibandingkan dengan saldo Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO di Tahun 2021 sebesar Rp112.808.649,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 183,82% atau sebesar Rp207.364.261,00. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO memiliki proporsi sebesar 3,96% dari total saldo Pajak Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.



Tabel 6.4. 17

## Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO</b>	<b>320.172.910,00</b>	<b>112.808.649,00</b>	<b>207.364.261,00</b>	<b>183,82</b>
1	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	320.172.910,00	112.808.649,00	207.364.261,00	183,82

Saldo Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan total Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022 yang di terima di Tahun 2022 berikut rinciannya;

Tabel 6.4. 18

## Mutasi Tambah (Kurang) ajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022	Penambahan (Pengurangan)	Saldo 2022
		Rp	Rp	Rp
	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>320.172.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.172.910,00</b>
1	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	320.172.910,00	0,00	320.172.910,00

## h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO

Saldo Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.434.642.844,00, Jika dibandingkan dengan saldo Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO di Tahun 2021 sebesar Rp2.400.106.218,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,44% atau sebesar Rp34.536.626,00. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO memiliki proporsi sebesar 30,14% dari total saldo Pajak Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Tabel 6.4. 19  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO</b>	<b>2.434.642.844,00</b>	<b>2.400.106.218,00</b>	<b>34.536.626,00</b>	<b>1,44</b>
1	PBBP2-LO	2.434.642.844,00	2.400.106.218,00	34.536.626,00	1,44

Saldo Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan total Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2022 yang di terima di Tahun 2022 berikut rinciannya;

Tabel 6.4. 20  
Mutasi Tambah (Kurang) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  
dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022	Penambahan (Pengurangan)	Saldo 2022
		Rp	Rp	Rp
	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)</b>	<b>2.401.143.531,00</b>	<b>33.499.313,00</b>	<b>2.434.642.844,00</b>
1	PBBP2	2.401.143.531,00	33.499.313,00	2.434.642.844,00

Dari tabel di atas dapat di jabarkan penyebab penambahan atau pengurangan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) adalah sebagai berikut :

- 1) Pengakuan Piutang 2022 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Sebesar Rp36.414.013,00 dikurangi;
  - 2) Penerimaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2021 Sebesar Rp2.914.700,00.
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

Saldo Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.035.148.948,00, Jika dibandingkan dengan saldo Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO di Tahun 2021 sebesar Rp887.409.678,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 129,34%

atau sebesar Rp1.147.739.270,00. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO memiliki proporsi sebesar 25,19% dari total saldo Pajak Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Rincian saldo Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 21  
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO</b>		<b>2.035.148.948,00</b>	<b>887.409.678,00</b>	<b>1.147.739.270,00</b>	<b>129,34</b>
1	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	2.035.148.948,00	887.409.678,00	1.147.739.270,00	129,34

Saldo Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan total Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2022 yang di terima di Tahun 2022 berikut rinciannya;

Tabel 6.4. 22  
Mutasi Tambah (Kurang) Bea Perolehan Hak Atas Tanah  
dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022	Penambahan (Pengurangan)	Saldo 2022
		Rp	Rp	Rp
<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>		<b>2.035.148.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.148.948,00</b>
1	BPHTB-Pemindahan Hak	2.035.148.948,00	0,00	2.035.148.948,00

## 2. Retribusi Daerah – LO

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Saldo Retribusi Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp397.832.320,00, Jika dibandingkan dengan saldo Retribusi Daerah-LO di Tahun 2021

sebesar Rp280.887.019,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 41,63% atau sebesar Rp116.945.301,00. Retribusi Daerah-LO memiliki proporsi sebesar 2,92% dari total saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Rincian saldo Retribusi Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 23

## Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Retribusi Daerah-LO</b>		<b>397.832.320,00</b>	<b>280.887.019,00</b>	<b>116.945.301,00</b>	<b>41,63</b>
1	Retribusi Jasa Umum-LO	224.635.270,00	84.205.119,00	140.430.151,00	166,77
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	45.561.000,00	18.590.000,00	26.971.000,00	145,08
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	127.636.050,00	178.091.900,00	(50.455.850,00)	(28,33)

## a. Retribusi Jasa Umum-LO

Saldo Retribusi Jasa Umum-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp224.635.270,00, Jika dibandingkan dengan saldo Retribusi Jasa Umum-LO di Tahun 2021 sebesar Rp84.205.119,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 166,77% atau sebesar Rp140.430.151,00.

Rincian saldo Retribusi Jasa Umum-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 24

## Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Retribusi Jasa Umum-LO</b>		<b>224.635.270,00</b>	<b>84.205.119,00</b>	<b>140.430.151,00</b>	<b>166,77</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	157.704.770,00	47.577.619,00	110.127.151,00	231,47
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	15.761.000,00	4.901.000,00	10.860.000,00	221,59
3	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	51.169.500,00	31.726.500,00	19.443.000,00	61,28

Saldo Retribusi Jasa Umum - LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan total Retribusi Jasa Umum Tahun 2022 yang di terima di tahun 2022 berikut rinciannya;

Tabel 6.4. 25

## Mutasi Tambah (Kurang) Retribusi Jasa Umum Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022	Penambahan (Pengurangan)	Saldo 2022
		Rp	Rp	Rp
<b>Retribusi Jasa Umum</b>		<b>224.635.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.635.270,00</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	157.704.770,00	0,00	157.704.770,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.761.000,00	0,00	15.761.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	51.169.500,00	0,00	51.169.500,00

## b. Retribusi Jasa Usaha-LO

Saldo Retribusi Jasa Usaha-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp45.561.000,00, Jika dibandingkan dengan saldo Retribusi Jasa Usaha-LO di Tahun 2021 sebesar Rp18.590.000,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 145,08% atau sebesar Rp26.971.000,00.

Rincian saldo Retribusi Jasa Usaha-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 26

## Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Retribusi Jasa Usaha-LO</b>		<b>45.561.000,00</b>	<b>18.590.000,00</b>	<b>26.971.000,00</b>	<b>145,08</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	22.600.000,00	17.590.000,00	5.010.000,00	28,48
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	22.961.000,00	1.000.000,00	21.961.000,00	2.196,10

Saldo Retribusi Jasa Usaha - LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan total Retribusi Jasa Usaha Tahun 2022 yang di terima di Tahun 2022 berikut rinciannya;

Tabel 6.4. 27

## Mutasi Tambah (Kurang) Retribusi Jasa Usaha Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022	Penambahan (Pengurangan)	Saldo 2022
		Rp	Rp	Rp
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>		<b>45.561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.561.000,00</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	22.600.000,00	0,00	22.600.000,00
2	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	22.961.000,00	0,00	22.961.000,00

## c. Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Saldo Retribusi Perizinan Tertentu-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp127.636.050,00, Jika dibandingkan dengan saldo Retribusi Perizinan Tertentu-LO di Tahun 2021 sebesar Rp178.091.900,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 28,33% atau sebesar Rp50.455.850,00.

Rincian saldo Retribusi Perizinan Tertentu-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 28

## Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Retribusi Perizinan Tertentu-LO</b>		<b>127.636.050,00</b>	<b>178.091.900,00</b>	<b>(50.455.850,00)</b>	<b>(28,33)</b>
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	127.636.050,00	178.091.900,00	(50.455.850,00)	(28,33)

Saldo Retribusi Perizinan Tertentu - LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan total Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2022 yang di terima di Tahun 2022 berikut rinciannya;

Tabel 6.4. 29

## Mutasi Tambah (Kurang) Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022	Penambahan (Pengurangan)	Saldo 2022
		Rp	Rp	Rp
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>		<b>127.636.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.636.050,00</b>
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	127.636.050,00	0,00	127.636.050,00

### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dikelola secara terpisah dari kekayaan daerah lainnya. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan yang dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dan tidak termasuk dalam kekayaan daerah yang menjadi milik bersama dengan pemerintah pusat atau kekayaan daerah yang dimiliki oleh masyarakat.

Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.409.788.093,00, Jika dibandingkan dengan saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO di Tahun 2021 sebesar Rp2.046.482.433,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 31,11% atau sebesar Rp636.694.340,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO memiliki proporsi sebesar 10,36% dari total saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Tabel 6.4. 30

#### Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO</b>	<b>1.409.788.093,00</b>	<b>2.046.482.433,00</b>	<b>(636.694.340,00)</b>	<b>(31,11)</b>
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	1.409.788.093,00	2.046.482.433,00	(636.694.340,00)	(31,11)

Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 yang di terima di Tahun 2022 berikut rinciannya;

Tabel 6.4. 31

#### Mutasi Tambah (Kurang) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022	Penambahan (Pengurangan)	Saldo 2022
		Rp	Rp	Rp
	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>948.010.307,00</b>	<b>461.777.786,00</b>	<b>1.409.788.093,00</b>
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	948.010.307,00	461.777.786,00	1.409.788.093,00

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
7	Pendapatan dari Pengembalian-LO	50.209.136,00	100.373.333,00	(50.164.197,00)	(49,98)
8	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	0,00	3.126.671.400,00	(3.126.671.400,00)	(100,00)
9	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	713.128,00	0,00	713.128,00	0,00

a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Saldo Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp87.554.400,00, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO memiliki proporsi sebesar 2,35% dari total saldo Lain-lain PAD yang Sah-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Tabel 6.4. 33

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO</b>		<b>87.554.400,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>(37.445.600,00)</b>	<b>(29,96)</b>
1	Hasil Sewa BMD-LO	87.554.400,00	125.000.000,00	(37.445.600,00)	(29,96)

Saldo Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan total Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2022 yang di terima di Tahun 2022 berikut rinciannya;

Tabel 6.4. 34

Mutasi Tambah (Kurang) Hasil Pemanfaatan BMD  
yang Tidak Dipisahkan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022	Penambahan (Pengurangan)	Saldo 2022
		Rp	Rp	Rp
<b>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>		<b>87.554.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.554.400,00</b>
1	Hasil Sewa BMD	87.554.400,00	0,00	87.554.400,00



Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan berupa hasil sewa BMD yang berasal dari penyewaan Gedung Bangunan yang dijadikan kantor kas oleh PT Bank SulutGo dengan surat perjanjian sewa menyewa No: 10/PKS/HKM-BM/VI/2021 dan 003/PKS/TTY/VI/2021.

b. Jasa Giro-LO

Saldo Jasa Giro-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.274.340.366,00, Jika dibandingkan dengan saldo Jasa Giro-LO di Tahun 2021 sebesar Rp1.269.600.517,84 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,37% atau sebesar Rp4.739.848,16.

Rincian saldo Jasa Giro-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 35

Jasa Giro-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Jasa Giro-LO</b>		<b>1.274.340.366,00</b>	<b>1.269.600.517,84</b>	<b>4.739.848,16</b>	<b>0,37</b>
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.272.803.530,00	1.235.730.035,84	37.073.494,16	3,00
2	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO	0,00	31.077.212,00	(31.077.212,00)	(100,00)
3	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	1.536.836,00	2.793.270,00	(1.256.434,00)	(44,98)

Saldo Jasa Giro - LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan total Hasil Jasa Giro Tahun 2022 yang di terima di Tahun 2022 berikut rinciannya;

Tabel 6.4. 36

Mutasi Tambah (Kurang) Jasa Giro Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022	Penambahan (Pengurangan)	Saldo 2022
		Rp	Rp	Rp
<b>Jasa Giro</b>		<b>1.274.340.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.340.366,00</b>
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.272.803.530,00	0,00	1.272.803.530,00
2	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	1.536.836,00	0,00	1.536.836,00

c. Pendapatan Bunga-LO

Saldo Pendapatan Bunga-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp762.656.744,26, Jika dibandingkan dengan saldo Pendapatan Bunga-LO di Tahun 2021 sebesar Rp142.054.839,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 436,87% atau sebesar Rp620.601.905,26.

Rincian saldo Pendapatan Bunga-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 37

Pendapatan Bunga-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Pendapatan Bunga-LO</b>		<b>762.656.744,26</b>	<b>142.054.839,00</b>	<b>620.601.905,26</b>	<b>436,87</b>
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	762.656.744,26	142.054.839,00	620.601.905,26	436,87

Saldo Pendapatan Bunga - LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan total Hasil Pendapatan Bunga Tahun 2022 yang di terima di Tahun 2022 berikut rinciannya;

Tabel 6.4. 38

Mutasi Tambah (Kurang) Pendapatan Bunga Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022	Penambahan (Pengurangan)	Saldo 2022
		Rp	Rp	Rp
<b>Pendapatan Bunga</b>		<b>767.383.611,00</b>	<b>4.726.866,74</b>	<b>762.656.744,26</b>
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	767.383.611,00	4.726.866,74	762.656.744,26

Dari tabel di atas dapat di jabarkan penyebab penambahan atau pengurangan Pendapatan Bunga adalah sebagai berikut :

- 1) Kurang Setor Deposito Bank BRI ke RKUD BSG Tahun 2021 yang telah di setorkan di RKUD pada Tahun 2022 Sebesar Rp28.410.959,00. Dikurangi;
- 2) Penyesuaian Pengakuan Saldo Remunerasi Bulan Desember 2022 atas DBHNon Tunai yang telah disalurkan Pemerintah Pusat dari RKUN ke Rekening TreasuryDeposit Facility (TDF) sebesar Rp670.394,26. Dikurangi

Rincian saldo Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 47  
Pendapatan Transfer-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>PENDAPATAN TRANSFER-LO</b>		<b>448.722.292.358,00</b>	<b>467.847.381.106,00</b>	<b>(19.125.088.748,00)</b>	<b>(4,09)</b>
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	429.534.058.773,00	450.267.309.899,00	(20.733.251.126,00)	(4,60)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	19.188.233.585,00	17.580.071.207,00	1.608.162.378,00	9,15

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO

Transfer pemerintah pusat adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau lembaga lainnya dengan tujuan untuk membiayai program dan kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan daerah atau lembaga tersebut. Transfer ini dilakukan dalam rangka memperkuat otonomi daerah dan memberikan dukungan keuangan kepada daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahannya. Transfer pemerintah pusat dapat berupa dana bagi hasil, dana perimbangan, dana alokasi khusus, dan dana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah atau lembaga penerima.

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp429.534.058.773,00, Jika dibandingkan dengan saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO di Tahun 2021 sebesar Rp450.267.309.899,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 4,60% atau sebesar Rp20.733.251.126,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO memiliki proporsi sebesar 95,72% dari total saldo Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Rincian saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 48

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO</b>		<b>429.534.058.773,00</b>	<b>450.267.309.899,00</b>	<b>(20.733.251.126,00)</b>	<b>(4,60)</b>
1	Dana Perimbangan-LO	423.313.409.773,00	424.545.952.899,00	(1.232.543.126,00)	(0,29)
2	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	6.220.649.000,00	25.721.357.000,00	(19.500.708.000,00)	(75,82)

a. Dana Perimbangan-LO

Saldo Dana Perimbangan-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp423.313.409.773,00, Jika dibandingkan dengan saldo Dana Perimbangan-LO di Tahun 2021 sebesar Rp424.545.952.899,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 0,29% atau sebesar Rp1.232.543.126,00. Dana Perimbangan-LO memiliki proporsi sebesar 98,55% dari total saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Tabel 6.4. 49

Dana Perimbangan-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Dana Perimbangan-LO</b>		<b>423.313.409.773,00</b>	<b>424.545.952.899,00</b>	<b>(1.232.543.126,00)</b>	<b>(0,29)</b>
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	37.521.261.821,00	27.925.980.095,00	9.595.281.726,00	34,36
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	324.032.723.653,00	324.042.794.000,00	(10.070.347,00)	(0,00)
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	37.682.369.087,00	44.856.481.650,00	(7.174.112.563,00)	(15,99)
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	24.077.055.212,00	27.720.697.154,00	(3.643.641.942,00)	(13,14)

Saldo Dana Perimbangan - LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan total Dana Perimbangan Tahun 2022 yang di terima di Tahun 2022 berikut rinciannya;

Tabel 6.4. 50  
Mutasi Tambah (Kurang) Dana Perimbangan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022	Penambahan (Pengurangan)	Saldo 2022
		Rp	Rp	Rp
<b>Dana Perimbangan</b>		<b>420.549.244.023,00</b>	<b>2.764.165.750,00</b>	<b>423.313.409.773,00</b>
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	34.757.096.071,00	2.764.165.750,00	37.521.261.821,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	324.032.723.653,00	0,00	324.032.723.653,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	37.682.369.087,00	0,00	37.682.369.087,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	24.077.055.212,00	0,00	24.077.055.212,00

Dari tabel di atas dapat dijabarkan penyebab penambahan atau pengurangan Dana Perimbangan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyesuaian Pengakuan Saldo Pokok DBH Non Tunai yang telah disalurkan Pemerintah Pusat dari RKUN ke Rekening Treasury Deposit Facility (TDF) DBH PBB sebesar Rp616.317.026,00
- 2) Penyesuaian Pengakuan Saldo Pokok DBH Non Tunai yang telah disalurkan Pemerintah Pusat dari RKUN ke Rekening Treasury Deposit Facility (TDF) PPh Pasal 21 sebesar Rp310.086.873,00
- 3) Penyesuaian Pengakuan Saldo Pokok DBH Non Tunai yang telah disalurkan Pemerintah Pusat dari RKUN ke Rekening Treasury Deposit Facility (TDF) PPh Pasal 29 sebesar Rp20.843.436,00
- 4) Penyesuaian Pengakuan Saldo Pokok DBH Non Tunai yang telah disalurkan Pemerintah Pusat dari RKUN ke Rekening Treasury Deposit Facility (TDF) SDA Pungusaha Panas Bumi sebesar Rp149.898.544,00
- 5) Penyesuaian Pengakuan Saldo Pokok DBH Non Tunai yang telah disalurkan Pemerintah Pusat dari RKUN ke Rekening Treasury Deposit Facility (TDF) DBH SDA Mineral dan Batubara-Landren sebesar Rp186.792.467,00

- 6) Penyesuaian Pengakuan Saldo Pokok DBH Non Tunai yang telah disalurkan Pemerintah Pusat dari RKUN ke Rekening Treasury Deposit Facility (TDF) DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty sebesar Rp1.268.376.227,00
  - 7) Penyesuaian Pengakuan Saldo Pokok DBH Non Tunai yang telah disalurkan Pemerintah Pusat dari RKUN ke Rekening Treasury Deposit Facility (TDF) DBH SDA Kehutanan-PSDH sebesar Rp97.966,00
  - 8) Penyesuaian Pengakuan Saldo Pokok DBH Non Tunai yang telah disalurkan Pemerintah Pusat dari RKUN ke Rekening Treasury Deposit Facility (TDF) DBH SDA Perikanan) sebesar Rp211.753.211,00
- b. Dana Insentif Daerah (DID)-LO

Saldo Dana Insentif Daerah (DID)-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp6.220.649.000,00, Jika dibandingkan dengan saldo Dana Insentif Daerah (DID)-LO di Tahun 2021 sebesar Rp25.721.357.000,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 75,82% atau sebesar Rp19.500.708.000,00. Dana Insentif Daerah (DID)-LO memiliki proporsi sebesar 1,45% dari total saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Tabel 6.4. 51

## Dana Insentif Daerah (DID)-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	6.220.649.000,00	25.721.357.000,00	(19.500.708.000,00)	(75,82)
1	DID-LO	6.220.649.000,00	25.721.357.000,00	(19.500.708.000,00)	(75,82)

Saldo Dana Insentif Daerah (DID) - LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan total Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2022 yang di terima di Tahun 2022 berikut rinciannya;

Tabel 6.4. 52  
Mutasi Tambah (Kurang) Dana Perimbangan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022	Penambahan (Pengurangan)	Saldo 2022
		Rp	Rp	Rp
Dana Insentif Daerah (DID)		6.220.649.000,00	0,00	6.220.649.000,00
1	DID	6.220.649.000,00	0,00	6.220.649.000,00

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Bagi hasil pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten adalah pembagian sumber daya keuangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Pemerintah provinsi biasanya memperoleh sumber daya keuangan dari pajak dan retribusi yang dikumpulkan dari masyarakat di wilayah provinsi tersebut. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota memperoleh sumber daya keuangan dari pajak dan retribusi yang dikumpulkan dari masyarakat di wilayah kabupaten/kota tersebut.

Saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp19.188.233.585,00, Jika dibandingkan dengan saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO di Tahun 2021 sebesar Rp17.580.071.207,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 9,15% atau sebesar Rp1.608.162.378,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO memiliki proporsi sebesar 4,28% dari total saldo Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Tabel 6.4. 53  
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		19.188.233.585,00	17.580.071.207,00	1.608.162.378,00	9,15
1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	19.188.233.585,00	17.580.071.207,00	1.608.162.378,00	9,15

a. Pendapatan Bagi Hasil-LO

Saldo Pendapatan Bagi Hasil-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp19.188.233.585,00, Jika dibandingkan dengan saldo

Pendapatan Bagi Hasil-LO di Tahun 2021 sebesar Rp17.580.071.207,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 9,15% atau sebesar Rp1.608.162.378,00.

Tabel 6.4. 54

Pendapatan Bagi Hasil-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Pendapatan Bagi Hasil-LO</b>		<b>19.188.233.585,00</b>	<b>17.580.071.207,00</b>	<b>1.608.162.378,00</b>	<b>9,15</b>
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	19.188.233.585,00	17.580.071.207,00	1.608.162.378,00	9,15

Saldo Pendapatan Bagi Hasil - LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan total Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2022 yang di terima di Tahun 2022 berikut rinciannya;

Tabel 6.4. 55

Mutasi Tambah (Kurang) Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022	Penambahan (Pengurangan)	Saldo 2022
		Rp	Rp	Rp
<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>		<b>21.123.341.764,00</b>	<b>(1.935.108.179,00)</b>	<b>19.188.233.585,00</b>
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.757.158.681,00	(174.752.315,00)	3.582.406.366,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.145.133.795,00	(535.077.649,00)	2.610.056.146,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.198.997.828,00	(587.737.249,00)	8.611.260.579,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	115.861.309,00	(5.431.282,00)	110.430.027,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.906.190.151,00	(632.109.684,00)	4.274.080.467,00

Dari tabel di atas dapat di jabarkan penyebab penambahan atau pengurangan Pendapatan Bagi Hasil adalah sebagai berikut :

- 1) Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Setoran Piutang Tahun 2021 sebesar Rp2.641.755.966,00 dikurangi Pengakuan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp2.467.003.651,00 sehingga di dapat nilai pengurang sebesar Rp174.752.315,00.



- 2) Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Setoran Piutang Tahun 2021 sebesar Rp2.238.336.808,00 dikurangi Pengakuan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp1.703.259.159,00 sehingga di dapat nilai pengurang sebesar Rp535.077.649,00.
- 3) Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Setoran Piutang Tahun 2021 sebesar Rp6.333.336.780,00 dikurangi Pengakuan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp5.745.599.531,00 sehingga di dapat nilai pengurang sebesar Rp587.737.249,00.
- 4) Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Setoran Piutang Tahun 2021 sebesar Rp81.972.502,00 dikurangi Pengakuan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp76.541.220,00 sehingga di dapat nilai pengurang sebesar Rp5.431.282,00.
- 5) Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Setoran Piutang Tahun 2021 sebesar Rp632.109.684,00 sehingga di dapat nilai pengurang sebesar Rp632.109.684,00.

#### **6.4.1.1.3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO**

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah penghasilan yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan yang telah ditetapkan secara khusus oleh peraturan perundang – undangan.

Saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp15.284.202.353,00, Jika dibandingkan dengan saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO di Tahun 2021 sebesar Rp10.875.681.232,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 40,54% atau sebesar Rp4.408.521.121,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO memiliki proporsi sebesar 3,20% dari total saldo Pendapatan - LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Tabel 6.4. 56

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO</b>		<b>15.284.202.353,00</b>	<b>10.875.681.232,00</b>	<b>4.408.521.121,00</b>	<b>40,54</b>
1	Pendapatan Hibah-LO	2.377.270.106,00	1.169.963.232,00	1.207.306.874,00	103,19
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	12.906.932.247,00	9.705.718.000,00	3.201.214.247,00	32,98

1. Pendapatan Hibah

Saldo Pendapatan Hibah-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.377.270.106,00, Jika dibandingkan dengan saldo Pendapatan Hibah-LO di Tahun 2021 sebesar Rp1.169.963.232,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 103,19% atau sebesar Rp1.207.306.874,00.

Rincian saldo Pendapatan Hibah-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 57

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Pendapatan Hibah-LO</b>		<b>2.377.270.106,00</b>	<b>1.169.963.232,00</b>	<b>1.207.306.874,00</b>	<b>103,19</b>
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	2.024.040.300,00	916.163.232,00	1.107.877.068,00	120,93
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	353.229.806,00	0,00	353.229.806,00	0,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	0,00	253.800.000,00	(253.800.000,00)	(100,00)

Dari tabel diatas Pendapatan Hibah – LO dapat jabarkan transaksi pembentuk Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut

a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO

- 1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam rangka implementasi OSS berbasis risiko di daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp12.045.000,00

- 2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam rangka implementasi OSS berbasis risiko di daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp2.600.400,00
- 3) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam rangka implementasi OSS berbasis risiko di daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp724.900,00
- 4) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO atas penerimaan tanah berdasarkan izin pelepasan hak dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 10 Maret 2021 No: HR.01.03/308/III/2021 pada Bagian Umum sebesar Rp1.739.900.000,00
- 5) Penerimaan Hibah Pusat - LO dan Aset Tetap atas Penerimaan Bantuan Peralatan TIK SD 2022 (BA - BUN) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No: 31/Prov.Sulawesi Utara - 5322/BAST/SMF/2022 pada SD Negeri 1 Jiko Belanga sebesar Rp5.120.000,00
- 6) Penerimaan Hibah Pusat - LO dan Aset Tetap atas Penerimaan Bantuan Peralatan TIK SD 2022 (BA - BUN) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No: 31/Prov.Sulawesi Utara - 5322/BAST/SMF/2022 pada SD Negeri 1 Jiko Belanga sebesar Rp170.000,00
- 7) Penerimaan Hibah Pusat - LO dan Aset Tetap atas Penerimaan Bantuan Peralatan TIK SD 2022 (BA - BUN) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No: 31/Prov.Sulawesi Utara - 5322/BAST/SMF/2022 pada SD Negeri 1 Jiko Belanga sebesar Rp82.500.000,00
- 8) Penerimaan Hibah Pusat - LO dan Aset Tetap atas Penerimaan Bantuan Peralatan TIK SD 2022 (BA - BUN) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No: 31/Prov.Sulawesi Utara - 5322/BAST/SMF/2022 pada SD Negeri 1 Jiko Belanga sebesar Rp1.800.000,00
- 9) Penerimaan Hibah Pusat - LO dan Aset Tetap atas Penerimaan Bantuan Peralatan TIK SD 2022 (BA - BUN) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No:

- 31/Prov.Sulawesi Utara - 5318/BAST/SMF/2022 pada SD Negeri 2 Kotabunan sebesar Rp5.120.000,00
- 10) Penerimaan Hibah Pusat - LO dan Aset Tetap atas Penerimaan Bantuan Peralatan TIK SD 2022 (BA - BUN) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No: 31/Prov.Sulawesi Utara - 5318/BAST/SMF/2022 pada SD Negeri 2 Kotabunan sebesar Rp170.000,00
- 11) Penerimaan Hibah Pusat - LO dan Aset Tetap atas Penerimaan Bantuan Peralatan TIK SD 2022 (BA - BUN) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No: 31/Prov.Sulawesi Utara - 5318/BAST/SMF/2022 pada SD Negeri 2 Kotabunan sebesar Rp82.500.000,00
- 12) Penerimaan Hibah Pusat - LO dan Aset Tetap atas Penerimaan Bantuan Peralatan TIK SD 2022 (BA - BUN) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No: 31/Prov.Sulawesi Utara - 5318/BAST/SMF/2022 pada SD Negeri 2 Kotabunan sebesar Rp1.800.000,00
- 13) Penerimaan Hibah Pusat - LO dan Aset Tetap atas Penerimaan Bantuan Peralatan TIK SD 2022 (BA - BUN) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No: 31/Prov.Sulawesi Utara - 5319/BAST/SMF/2022 pada SD Negeri 1 Liberia sebesar Rp5.120.000,00
- 14) Penerimaan Hibah Pusat - LO dan Aset Tetap atas Penerimaan Bantuan Peralatan TIK SD 2022 (BA - BUN) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No: 31/Prov.Sulawesi Utara - 5319/BAST/SMF/2022 pada SD Negeri 1 Liberia sebesar Rp170.000,00
- 15) Penerimaan Hibah Pusat - LO dan Aset Tetap atas Penerimaan Bantuan Peralatan TIK SD 2022 (BA - BUN) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No: 31/Prov.Sulawesi Utara - 5319/BAST/SMF/2022 pada SD Negeri 1 Liberia sebesar Rp82.500.000,00
- 16) Penerimaan Hibah Pusat - LO dan Aset Tetap atas Penerimaan Bantuan Peralatan TIK SD 2022 (BA - BUN) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No:

31/Prov.Sulawesi Utara - 5319/BAST/SMF/2022 pada SD Negeri 1 Liberia sebesar Rp1.800.000,00

b) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO

1) Penerimaan Hibah dari Pemerintah Daerah - LO dan Beban Obat-Obatan - Obat pada Dinas Kesehatan atas Penerimaan Hibah Obat dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp170.729.806,00

2) Penerimaan Hibah dari Pemerintah Daerah - LO dan Beban Obat-Obatan Lainnya pada Dinas Kesehatan atas Penerimaan Hibah Barang Medis Habis Pakai (Logistik Covid-19) Bantuan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp182.500.000,00

2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp12.906.932.247,00, Jika dibandingkan dengan saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO di Tahun 2021 sebesar Rp9.705.718.000,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 32,98% atau sebesar Rp3.201.214.247,00. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO memiliki proporsi sebesar 84,45% dari total saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Tabel 6.4. 58

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO</b>		<b>12.906.932.247,00</b>	<b>9.705.718.000,00</b>	<b>3.201.214.247,00</b>	<b>32,98</b>
1	Lain-lain Pendapatan-LO	9.492.117.624,00	9.705.718.000,00	(213.600.376,00)	(2,20)
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	3.414.814.623,00	0,00	3.414.814.623,00	0,00

Dari tabel diatas Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO dapat dijabarkan transaksi pembentuk Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Pendapatan Hibah Dana BOS – LO
  - 1) Penyesuaian Mutasi Pendapatan Hibah Dana BOS-LO sebesar Rp9.492.117.624,00
- b) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP – LO
  - 1) Penyesuaian Mutasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO sebesar Rp302.840.234,00 pada UPTD Puskesmas Modayag Barat
  - 2) Penyesuaian Mutasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO sebesar Rp51.950.900,00 pada UPTD Puskesmas Mooat
  - 3) Penyesuaian Mutasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO sebesar Rp513.858.273,00 pada UPTD Puskesmas Kotabunan
  - 4) Penyesuaian Mutasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO sebesar Rp1.010.266.793,00 pada UPTD Puskesmas Modayag
  - 5) Penyesuaian Mutasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO sebesar Rp733.249.334,00 pada UPTD Puskesmas Nuangan
  - 6) Penyesuaian Mutasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO sebesar Rp188.305.939,00 pada UPTD Puskesmas Buyat
  - 7) Penyesuaian Mutasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO sebesar Rp614.343.150,00 pada UPTD Puskesmas Tutuyan

#### 6.4.1.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Saldo Beban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp515.344.043.129,41, Jika dibandingkan dengan saldo Beban di Tahun 2021 sebesar Rp527.630.305.926,60 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 2,33% atau sebesar Rp12.286.262.797,19.

Tabel 6.4. 59

## Beban Tahun 2022 dan Tahun 2021

BEBAN	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	(%)
Beban	515.344.043.129,41	527.630.305.926,60	(12.286.262.797,19)	(2,33)

Rincian saldo Beban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 60

## Rincian Beban Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban</b>		<b>515.344.043.129,41</b>	<b>527.630.305.926,60</b>	<b>(12.286.262.797,19)</b>	<b>(2,33)</b>
1	Beban Pegawai	213.743.799.668,00	205.528.620.362,00	8.215.179.306,00	4,00
2	Beban Persediaan	21.706.676.511,19	39.805.628.665,40	(18.098.952.154,21)	(45,47)
3	Beban Jasa	65.322.385.424,81	50.404.713.074,12	14.917.672.350,69	29,60
4	Beban Pemeliharaan	10.199.357.327,84	9.982.598.328,00	216.758.999,84	2,17
5	Beban Perjalanan Dinas	46.900.437.697,00	44.833.089.839,00	2.067.347.858,00	4,61
6	Beban Hibah	3.096.894.020,00	6.847.112.321,00	(3.750.218.301,00)	(54,77)
7	Beban Bantuan Sosial	9.037.958.318,89	2.189.694.700,00	6.848.263.618,89	312,75
8	Beban Penyisihan Piutang	52.199.219,68	69.408.512,08	(17.209.292,40)	(24,79)
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	109.599.842.712,00	131.389.572.951,00	(21.789.730.239,00)	(16,58)
10	Beban Transfer	34.957.947.584,00	35.401.307.731,00	(443.360.147,00)	(1,25)
11	Beban Lain - Lain	726.544.646,00	1.178.559.443,00	(452.014.797,00)	(38,35)

**6.4.1.2.1. Beban Pegawai**

Beban Pegawai adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membayar gaji, tunjangan, serta biaya lainnya terkait dengan pegawai yang bekerja di lingkup pemerintah daerah.

Saldo Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp213.743.799.668,00, Jika dibandingkan dengan saldo Beban Pegawai di Tahun 2021 sebesar

Rp205.528.620.362,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,00% atau sebesar Rp8.215.179.306,00. Beban Pegawai memiliki proporsi sebesar 41,48% dari total saldo Beban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Rincian saldo Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 61  
Beban Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Pegawai</b>		<b>213.743.799.668,00</b>	<b>205.528.620.362,00</b>	<b>8.215.179.306,00</b>	<b>4,00</b>
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	127.314.752.161,00	122.639.500.973,00	4.675.251.188,00	3,81
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	60.813.379.151,00	55.820.602.391,00	4.992.776.760,00	8,94
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	17.228.291.721,00	18.836.460.130,00	(1.608.168.409,00)	(8,54)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.915.632.006,00	7.755.179.992,00	160.452.014,00	2,07
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	167.344.629,00	172.475.832,00	(5.131.203,00)	(2,98)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	304.400.000,00	304.401.044,00	(1.044,00)	(0,00)

1. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Saldo Beban Gaji dan Tunjangan ASN Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp127.314.752.161,00, Jika dibandingkan dengan saldo Beban Gaji dan Tunjangan ASN di Tahun 2021 sebesar Rp122.639.500.973,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,81% atau sebesar Rp4.675.251.188,00. Beban Gaji dan Tunjangan ASN memiliki proporsi sebesar 59,56% dari total saldo Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.



Tabel 6.4. 62

## Beban Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Gaji dan Tunjangan ASN</b>		<b>127.314.752.161,00</b>	<b>122.639.500.973,00</b>	<b>4.675.251.188,00</b>	<b>3,81</b>
1	Beban Gaji Pokok ASN	93.429.260.238,00	90.192.555.060,88	3.236.705.177,12	3,59
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	8.671.997.281,00	8.461.099.261,00	210.898.020,00	2,49
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.039.254.810,00	4.895.518.850,00	143.735.960,00	2,94
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	5.184.989.000,00	5.453.808.986,00	(268.819.986,00)	(4,93)
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.556.086.000,00	1.098.621.675,00	457.464.325,00	41,64
6	Beban Tunjangan Beras ASN	5.860.720.633,00	5.647.984.819,00	212.735.814,00	3,77
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	284.827.781,00	113.465.144,12	171.362.636,88	151,03
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	1.447.094,00	1.420.137,00	26.957,00	1,90
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	6.492.704.070,00	6.022.254.842,00	470.449.228,00	7,81
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	216.623.474,00	192.733.330,00	23.890.144,00	12,40
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	576.841.780,00	560.038.868,00	16.802.912,00	3,00

2. **Beban Tambahan Penghasilan ASN**

Saldo Beban Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp60.813.379.151,00, Jika dibandingkan dengan saldo Beban Tambahan Penghasilan ASN di Tahun 2021 sebesar Rp55.820.602.391,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,94% atau sebesar Rp4.992.776.760,00. Beban Tambahan Penghasilan ASN memiliki proporsi sebesar 28,45% dari total saldo Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Tabel 6.4. 63

## Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Tambahan Penghasilan ASN</b>		<b>60.813.379.151,00</b>	<b>55.820.602.391,00</b>	<b>4.992.776.760,00</b>	<b>8,94</b>
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	60.813.379.151,00	55.820.602.391,00	4.992.776.760,00	8,94

3. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp17.228.291.721,00, Jika dibandingkan dengan saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN di Tahun 2021 sebesar Rp18.836.460.130,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 8,54% atau sebesar Rp1.608.168.409,00. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN memiliki proporsi sebesar 8,06% dari total saldo Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Tabel 6.4. 64

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>		<b>17.228.291.721,00</b>	<b>18.836.460.130,00</b>	<b>(1.608.168.409,00)</b>	<b>(8,54)</b>
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	363.007.641,00	222.311.290,00	140.696.351,00	63,29
2	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	15.215.826.080,00	16.314.644.460,00	(1.098.818.380,00)	(6,74)
3	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	529.750.000,00	242.500.000,00	287.250.000,00	118,45
4	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	750.000.000,00	1.521.214.380,00	(771.214.380,00)	(50,70)
5	Beban Honorarium	369.708.000,00	364.430.000,00	5.278.000,00	1,45
6	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	171.360.000,00	(171.360.000,00)	(100,00)

4. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Saldo Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp7.915.632.006,00, Jika dibandingkan dengan saldo Beban Gaji dan Tunjangan DPRD di Tahun 2021 sebesar Rp7.755.179.992,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,07% atau sebesar Rp160.452.014,00. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD memiliki proporsi sebesar 3,70% dari total saldo Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Tabel 6.4. 65

## Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Gaji dan Tunjangan DPRD</b>		<b>7.915.632.006,00</b>	<b>7.755.179.992,00</b>	<b>160.452.014,00</b>	<b>2,07</b>
1	Beban Uang Representasi DPRD	451.290.000,00	449.688.225,00	1.601.775,00	0,36
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	49.110.600,00	53.930.100,00	(4.819.500,00)	(8,94)
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	51.563.040,00	50.621.580,00	941.460,00	1,86
4	Beban Uang Paket DPRD	38.682.000,00	38.367.000,00	315.000,00	0,82
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	647.519.250,00	6.851.250,00	1,06
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	69.974.100,00	62.437.725,00	7.536.375,00	12,07
7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	36.540.000,00	25.033.575,00	11.506.425,00	45,96
8	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000,00	1.499.400.000,00	12.600.000,00	0,84
9	Beban Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00	371.700.000,00	6.300.000,00	1,69
10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	136.817.742,00	58.811.761,00	78.005.981,00	132,64
11	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.497.284.024,00	2.477.670.776,00	19.613.248,00	0,79
12	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.040.000.000,00	2.020.000.000,00	20.000.000,00	0,99

5. **Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

Saldo Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp167.344.629,00, Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH memiliki proporsi sebesar 0,08% dari total saldo Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Tabel 6.4. 66

## Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>		<b>167.344.629,00</b>	<b>172.475.832,00</b>	<b>(5.131.203,00)</b>	<b>(2,98)</b>
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.528.000,00	4.410.000,00	(882.000,00)	(20,00)

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.476.160,00	4.860.720,00	(1.384.560,00)	(28,48)
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.647.429,00	4.477.892,00	(2.830.463,00)	(63,21)
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.200,00	100,00	1.100,00	1.100,00
7	Beban luran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.362.560,00	5.397.840,00	(35.280,00)	(0,65)
8	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00	0,00
9	Beban luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00	0,00

6. **Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**

Saldo Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp304.400.000,00, Jika dibandingkan dengan saldo Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH di Tahun 2021 sebesar Rp304.401.044,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 0,00% atau sebesar Rp1.044,00. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH memiliki proporsi sebesar 0,14% dari total saldo Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Tabel 6.4. 67

**Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH  
Tahun 2022 dan Tahun 2021**

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</b>		<b>304.400.000,00</b>	<b>304.401.044,00</b>	<b>(1.044,00)</b>	<b>(0,00)</b>
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	0,00
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	200.000.000,00	200.001.044,00	(1.044,00)	(0,00)

**6.4.1.2.2. Beban Persediaan**

Beban Persediaan adalah jumlah persediaan barang atau bahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada suatu waktu tertentu.

Saldo Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp21.706.676.511,19, Jika dibandingkan dengan saldo Beban Persediaan di Tahun 2021

sebesar Rp39.805.628.665,40 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 45,47% atau sebesar Rp18.098.952.154,21. Beban Persediaan memiliki proporsi sebesar 4,21% dari total saldo Beban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Rincian saldo Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 68

Beban Persediaan Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Persediaan</b>		<b>21.706.676.511,19</b>	<b>39.805.628.665,40</b>	<b>(18.098.952.154,21)</b>	<b>(45,47)</b>
1	Beban Barang Pakai Habis	21.706.676.511,19	39.805.628.665,40	(18.098.952.154,21)	(45,47)

**6.4.1.2.3. Beban Jasa**

Beban Jasa adalah biaya yang timbul dari penyediaan layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Beban jasa meliputi semua biaya yang terkait dengan produksi, penyediaan, dan pengiriman layanan seperti biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya bahan-bahan, biaya sewa, dan biaya administrasi.

Saldo Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp65.322.385.424,81 Jika dibandingkan dengan saldo Beban Jasa di Tahun 2021 sebesar Rp50.404.713.074,12 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 29,60% atau sebesar Rp14.917.672.350,69. Beban Jasa memiliki proporsi sebesar 12,68% dari total saldo Beban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Rincian saldo Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 69

Beban Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Jasa</b>		<b>65.322.385.424,81</b>	<b>50.404.713.074,12</b>	<b>14.917.672.350,69</b>	<b>29,60</b>
1	Beban Jasa Kantor	50.502.264.524,08	36.338.010.877,00	14.164.253.647,08	38,98

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
2	Beban luran Jaminan/Asuransi	3.987.571.067,00	9.566.278.400,00	(5.578.707.333,00)	(58,32)
3	Beban Sewa Tanah	30.000.000,00	72.213.000,00	(42.213.000,00)	(58,46)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	935.371.766,00	1.180.930.780,00	(245.559.014,00)	(20,79)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.147.018.751,73	1.147.216.085,11	(197.333,38)	(0,02)
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)	(100,00)
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	200.000.000,00	1.271.882.180,00	(1.071.882.180,00)	(84,28)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	149.665.450,00	(149.665.450,00)	(100,00)
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	757.362.570,00	624.566.302,00	132.796.268,00	21,26
11	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	358.200.000,00	47.450.000,00	310.750.000,00	654,90
12	Beban Barang dan Jasa BOS	7.404.596.746,00	0,00	7.404.596.746,00	0,00

#### 6.4.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga aset tetap dalam kondisi yang baik dan memastikan bahwa aset tetap tersebut dapat berfungsi dengan baik selama umur ekonominya. Beban pemeliharaan dapat meliputi biaya untuk perawatan rutin, perbaikan, penggantian bagian yang rusak, dan biaya lain yang terkait dengan mempertahankan aset agar tetap dalam kondisi yang baik. Beban pemeliharaan dapat dikeluarkan untuk berbagai jenis aset tetap, termasuk bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan.

Saldo Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp10.199.357.327,84 Jika dibandingkan dengan saldo Beban Pemeliharaan di Tahun 2021 sebesar Rp9.982.598.328,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,17% atau sebesar Rp216.758.999,84. Beban Pemeliharaan memiliki proporsi sebesar 1,98% dari total saldo Beban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Tabel 6.4. 70

## Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Pemeliharaan</b>		<b>10.199.357.327,84</b>	<b>9.982.598.328,00</b>	<b>216.758.999,84</b>	<b>2,17</b>
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	11.555.720,00	(11.555.720,00)	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.808.916.757,84	5.807.309.700,00	(998.392.942,16)	(17,19)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.062.816.219,00	1.441.862.932,00	(379.046.713,00)	(26,29)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.327.624.351,00	2.718.833.976,00	1.608.790.375,00	59,17
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	3.036.000,00	(3.036.000,00)	(100,00)

**6.4.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas adalah biaya yang dikeluarkan oleh Pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam menjalankan tugas dinas di luar kota atau negara tempat dia bekerja atau bertugas. Beban perjalanan dinas ini mencakup biaya transportasi, akomodasi, makan dan minum, serta biaya-biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut.

Saldo Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp46.900.437.697,00, Jika dibandingkan dengan saldo Beban Perjalanan Dinas di Tahun 2021 sebesar Rp44.833.089.839,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,61% atau sebesar Rp2.067.347.858,00. Beban Perjalanan Dinas memiliki proporsi sebesar 9,10% dari total saldo Beban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Tabel 6.4. 71

## Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>		<b>46.900.437.697,00</b>	<b>44.833.089.839,00</b>	<b>2.067.347.858,00</b>	<b>4,61</b>
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.900.437.697,00	44.833.089.839,00	2.067.347.858,00	4,61

**6.4.1.2.6. Beban Hibah**

Beban hibah adalah biaya yang timbul dari pemberian hibah atau sumbangan dari suatu organisasi atau entitas kepada penerima yang dipilih. Hibah dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti uang tunai, barang atau jasa, atau kombinasi dari semuanya

Saldo Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.096.894.020,00, Jika dibandingkan dengan saldo Beban Hibah di Tahun 2021 sebesar Rp6.847.112.321,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 54,77% atau sebesar Rp3.750.218.301,00. Beban Hibah memiliki proporsi sebesar 0,60% dari total saldo Beban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Tabel 6.4. 72

Beban Hibah Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Hibah</b>		<b>3.096.894.020,00</b>	<b>6.847.112.321,00</b>	<b>(3.750.218.301,00)</b>	<b>(54,77)</b>
1	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	2.629.618.000,00	6.379.836.301,00	(3.750.218.301,00)	(58,78)
2	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	467.276.020,00	467.276.020,00	0,00	0,00

1. **Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia**

Merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi masyarakat, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.629.618.000,00, Jika dibandingkan Saldo Tahun 2021 sebesar Rp6.379.836.301,00, terjadi penurunan sebesar 58,78% atau sebesar Rp3.750.218.301,00. berikut rincian jenis Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari:



Tabel 6.4. 73

Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>		<b>2.629.618.000,00</b>	<b>6.379.836.301,00</b>	<b>(3.750.218.301,00)</b>	<b>(58,78)</b>
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.629.618.000,00	4.983.429.661,00	(3.353.811.661,00)	(67,30)
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	300.000.000,00	375.000.000,00	(75.000.000,00)	(20,00)
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	700.000.000,00	1.021.406.640,00	(321.406.640,00)	(31,47)

a) Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp1.629.618.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Hibah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 175 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp300.000.000,00.
- Hibah Kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 176 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp550.000.000,00.
- Hibah Kepada Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp579.618.000,00. Nilai Hibah Tersebut merupakan hibah

*Handwritten signature*

- kepada PAUD Negeri yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Hibah Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 50 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp50.000.000,00.
  - Hibah Kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 188 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp150.000.000,00.
- b) Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp300.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Hibah Kepada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 190 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp25.000.000,00.
  - Hibah Kepada Badan Kontak Majelis TA'LIM Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 189 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Badan Kontak Majelis TA'LIM Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp25.000.000,00.
  - Hibah Kepada Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 189 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp250.000.000,00.

- c) Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp700.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut;
- Hibah Kepada Kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 196 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia Tahun Anggaran 2022 Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp300.000.000,00.
  - Hibah Kepada Gereja Advent Hari Ketujuh Bongkudai Utara, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 246 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp30.000.000,00.
  - Hibah Kepada Masjid Nurjannah Tutuyan, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 246 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp50.000.000,00.
  - Hibah Kepada Gereja GMIBM Solagratia Modayag III, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 246 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp30.000.000,00.
  - Hibah Kepada Gereja Pantekosta Jemaat Elohim Kokapoi, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 246 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp30.000.000,00.
  - Hibah Kepada Masjid Miftahul Jannah Buyat, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 246 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp50.000.000,00.
  - Hibah Kepada Masjid Baitul Makmur Matabulu, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 246 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp50.000.000,00.

- Hibah Kepada Masjid Al Muhajirin Bai Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 246 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp50.000.000,00.
- Hibah Kepada Gereja Bukit Sion Dodap, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 246 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp30.000.000,00.
- Hibah Kepada Masjid Al Muhajirin Bulawan II, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 246 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp50.000.000,00.
- Hibah Kepada Masjid Al Hirjarah Atoga Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 246 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp15.000.000,00.
- Hibah Kepada Masjid Al Fallah Paret Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 246 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, Dengan Besaran Hibah Sebesar Rp15.000.000,00.

## 2. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Pengakuan Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp467.276.020,00, Jika dibandingkan Saldo Tahun 2021 sebesar Rp467.276.020,00, maka tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan. berikut rincian jenis Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik terdiri dari:

Tabel 6.4. 74

### Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
	<b>Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik</b>	<b>467.276.020,00</b>	<b>467.276.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	467.276.020,00	467.276.020,00	0,00	0,00

Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diatas dapat dirinci Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur No:233 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.4. 75  
Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tahun 2022

No	Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara Sah	Harga Per Suara	Jumlah Alokasi Bantuan
1	Partai Amanat Nasional	4	11.070,00	10.354,00	114.618.780,00
2	Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan	3	6.781,00	10.354,00	70.210.474,00
3	Partai Nasional Demokrat	3	6.779,00	10.354,00	70.189.766,00
4	Partai Golongan Karya	3	6.097,00	10.354,00	63.128.338,00
5	Partai Demokrat	2	5.375,00	10.354,00	55.652.750,00
6	Partai Persatuan Indonesia	1	2.275,00	10.354,00	23.555.350,00
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	2.124,00	10.354,00	21.991.896,00
8	Partai Keadilan Sejahtera	1	1.939,00	10.354,00	20.076.406,00
9	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1.686,00	10.354,00	17.456.844,00
10	Partai Bulan Bintang	1	1.004,00	10.354,00	10.395.416,00
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>45.130,00</b>		<b>467.276.020,00</b>

#### 6.4.1.2.7. Beban Bantuan Sosial

Merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Saldo Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp9.037.958.318,89, Jika dibandingkan dengan saldo Beban Bantuan Sosial di Tahun 2021 sebesar Rp2.189.694.700,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 312,75% atau sebesar Rp6.848.263.618,89. Beban Bantuan Sosial memiliki proporsi sebesar 1,75% dari total saldo Beban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Tabel 6.4. 76

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Bantuan Sosial</b>		<b>9.037.958.318,89</b>	<b>2.189.694.700,00</b>	<b>6.848.263.618,89</b>	<b>312,75</b>
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.238.800.000,00	1.686.800.000,00	(448.000.000,00)	(26,56)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	772.000.000,00	0,00	772.000.000,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	7.027.158.318,89	502.894.700,00	6.524.263.618,89	1.297,34

1. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu

Pengakuan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.238.800.000,00, berikut rincian jenis Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu terdiri dari:

Tabel 6.4. 77

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu</b>		<b>1.238.800.000,00</b>	<b>1.686.800.000,00</b>	<b>(448.000.000,00)</b>	<b>(26,56)</b>
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.238.800.000,00	1.686.800.000,00	(448.000.000,00)	(26,56)

2. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga

Pengakuan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp772.000.000,00, berikut rincian jenis Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga terdiri dari:

Tabel 6.4. 78

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga</b>		<b>772.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	772.000.000,00	0,00	772.000.000,00	0,00

Tabel 6.4. 80

## Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Penyisihan Piutang</b>		<b>52.199.219,68</b>	<b>69.408.512,08</b>	<b>(17.209.292,40)</b>	<b>(24,79)</b>
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.237.201,87	12.931.501,80	(10.694.299,93)	(82,70)
2	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	49.962.017,81	56.477.010,29	(6.514.992,47)	(11,54)

## 1. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.237.201,87, Jika dibandingkan Saldo Tahun 2021 sebesar Rp12.931.501,80, terjadi penurunan sebesar 82,70% atau sebesar Rp10.694.299,93. berikut rincian jenis Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah terdiri dari:

Tabel 6.4. 81

## Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah</b>		<b>2.237.201,87</b>	<b>12.931.501,80</b>	<b>(10.694.299,93)</b>	<b>(82,70)</b>
1	Beban Penyisihan Pajak Reklame	0,00	9.244.625,00	(9.244.625,00)	(100,00)
2	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	2.055.131,80	849.092,90	1.206.038,91	142,04
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	182.070,07	2.837.783,90	(2.655.713,83)	(93,58)

## 2. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp49.962.017,81, berikut rincian jenis Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah terdiri dari:

Tabel 6.4. 82

## Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah</b>		<b>49.962.017,81</b>	<b>56.477.010,28</b>	<b>(6.514.992,47)</b>	<b>(11,54)</b>
1	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil	49.962.017,81	56.477.010,28	(6.514.992,47)	(11,54)

#### 6.4.1.2.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah biaya yang terkait dengan pengurangan nilai aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sedangkan amortisasi adalah biaya yang terkait dengan pengurangan nilai aset tidak berwujud seperti hak paten atau merek dagang.

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp109.599.842.712,00, Jika dibandingkan dengan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi di Tahun 2021 sebesar Rp131.389.572.951,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 16,58% atau sebesar Rp21.789.730.239,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi memiliki proporsi sebesar 21,27% dari total saldo Beban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022. Rincian beban penyusutan dan amortisasi per SKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 28.

Rincian saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 83

#### Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>109.599.842.712,00</b>	<b>131.389.572.951,00</b>	<b>(21.789.730.239,00)</b>	<b>(16,58)</b>
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	30.759.816.319,00	32.199.977.133,00	(1.440.160.814,00)	(4,47)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.351.242.738,00	20.069.092.557,00	1.282.150.181,00	6,39
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	57.488.783.655,00	79.030.327.261,00	(21.541.543.606,00)	(27,26)
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	90.176.000,00	(90.176.000,00)	(100,00)

#### 1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp30.759.816.319,00, Jika dibandingkan dengan saldo Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin di Tahun 2021 sebesar Rp32.199.977.133,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 4,47% atau sebesar Rp1.440.160.814,00. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin



memiliki proporsi sebesar 28,07% dari total saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Tabel 6.4. 84

## Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>		<b>30.759.816.319,00</b>	<b>32.199.977.133,00</b>	<b>(1.440.160.814,00)</b>	<b>(4,47)</b>
1	Beban Penyusutan Alat Besar	225.287.298,00	597.469.264,00	(372.181.966,00)	(62,29)
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	3.652.462.517,00	3.765.085.098,00	(112.622.581,00)	(2,99)
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	323.048.903,00	428.809.282,00	(105.760.379,00)	(24,66)
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	210.540.988,00	727.632.036,00	(517.091.048,00)	(71,06)
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.059.147.344,00	6.395.718.987,00	(336.571.643,00)	(5,26)
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	837.362.465,00	920.132.859,00	(82.770.394,00)	(9,00)
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.664.650.360,00	10.116.109.037,00	(451.458.677,00)	(4,46)
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	2.732.004.309,00	3.081.209.203,00	(349.204.894,00)	(11,33)
9	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Beban Penyusutan Komputer	6.661.993.932,00	5.609.716.302,00	1.052.277.630,00	18,76
11	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	34.900.229,00	32.181.358,00	2.718.871,00	8,45
12	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	262.706.703,00	456.515.909,00	(193.809.206,00)	(42,45)
13	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	95.711.271,00	69.397.798,00	26.313.473,00	37,92

## 2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp21.351.242.738,00, Jika dibandingkan dengan saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan di Tahun 2021 sebesar Rp20.069.092.557,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,39% atau sebesar Rp1.282.150.181,00. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan memiliki proporsi sebesar 19,48% dari total saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Rincian saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 85

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>		<b>21.351.242.738,00</b>	<b>20.069.092.557,00</b>	<b>1.282.150.181,00</b>	<b>6,39</b>
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	20.926.901.095,00	19.635.182.749,00	1.291.718.346,00	6,58
2	Beban Penyusutan Monumen	423.931.808,00	433.909.808,00	(9.978.000,00)	(2,30)
3	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	409.835,00	0,00	409.835,00	0,00

3. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp57.488.783.655,00, Jika dibandingkan dengan saldo Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi di Tahun 2021 sebesar Rp79.030.327.261,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 27,26% atau sebesar Rp21.541.543.606,00. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi memiliki proporsi sebesar 52,45% dari total saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Rincian saldo Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 86

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>		<b>57.488.783.655,00</b>	<b>79.030.327.261,00</b>	<b>(21.541.543.606,00)</b>	<b>(27,26)</b>
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	42.097.239.352,00	59.088.449.538,00	(16.991.210.186,00)	(28,76)
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	10.016.258.977,00	12.002.171.847,00	(1.985.912.870,00)	(16,55)
3	Beban Penyusutan Instalasi	2.756.018.353,00	6.062.605.721,00	(3.306.587.368,00)	(54,54)
4	Beban Penyusutan Jaringan	2.619.266.973,00	1.877.100.155,00	742.166.818,00	39,54

#### 6.4.1.2.10. Beban Transfer

Beban Transfer adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan sebagian dari anggaran dan sumber daya kepada desa-desa yang ada di wilayahnya. Beban transfer tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat otonomi desa dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal.

Saldo Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp34.957.947.584,00, Jika dibandingkan dengan saldo Beban Transfer di Tahun 2021 sebesar Rp35.401.307.731,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 1,25% atau sebesar Rp443.360.147,00. Beban Transfer memiliki proporsi sebesar 6,78% dari total saldo Beban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022.

Rincian saldo Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 87

Beban Transfer Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>Beban Transfer</b>		<b>34.957.947.584,00</b>	<b>35.401.307.731,00</b>	<b>(443.360.147,00)</b>	<b>(1,25)</b>
1	Beban Bagi Hasil	753.406.250,00	472.166.033,00	281.240.217,00	59,56
2	Beban Bantuan Keuangan	34.204.541.334,00	34.929.141.698,00	(724.600.364,00)	(2,07)

#### 6.4.1.2.11. Beban Lain - Lain

Saldo Beban Lain - Lain Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp726.544.646,00, Jika dibandingkan dengan saldo Beban Lain - Lain di Tahun 2021 sebesar Rp1.178.559.443,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 38,35% atau sebesar Rp452.014.797,00.

Rincian saldo Beban Lain - Lain Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. 88

Beban Lain - Lain Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
Beban Lain - Lain		726.544.646,00	1.178.559.443,00	(452.014.797,00)	(38,35)
1	Beban Barang Ekstra Komptable	726.544.646,00	1.178.559.443,00	(452.014.797,00)	(38,35)

**6.4.2. Surplus/Defisit dari Operasi**

Pengakuan Surplus/Defisit Dari Operasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp37.732.231.482,15, Jika dibandingkan Saldo Tahun 2021 sebesar Rp34.531.530.152,61, terjadi peningkatan sebesar 9,27% atau sebesar Rp3.200.701.329,54.

Tabel 6.4. 89

Surplus/Defisit Dari Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(37.732.231.482,15)	(34.531.530.152,61)	(3.200.701.329,54)	9,27
1	PENDAPATAN - LO	477.611.811.647,26	493.098.775.773,99	(15.486.964.126,73)	(3,14)
2	BEBAN	515.344.043.129,41	527.630.305.926,60	(12.286.262.797,19)	(2,33)

**6.4.3. Kegiatan Non Operasional**

Kegiatan Non operasional sifatnya tidak rutin. Pada Tahun 2022 terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar merupakan aktifitas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait pengelolaan Aset Non Lancar di tahun 2022 aktifitas ini sendiri berkaitan dengan Pelapasan Aset Non Lancar.
  - a. Penyesuaian Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Rp849.092,90
  - b. Penyesuaian Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp14.573,50
  - c. Penyesuaian Penyisihan Piutang Bagi hasil Rp56.477.010,28

2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan operasional utama.

a. Penyesuaian Penghapusan Aset Tetap Rp159.273.333,00

Adalah Akumulasi Nilai Buku dari penghapusan Aset Tetap Peralatan Mesin berupa Kendaraan Dinas sebesar Rp42.734.833,00 akibat Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas untuk mantan Pejabat Negara dan Gedung Bangunan berupa Bangunan Klinik/Puskesmas sebesar Rp116.538.500,00 akibat pemusnahan Bangunan Klinik/Puskesmas yang terletak di area Puskesmas Kotabunan karena sudah tidak sesuai spesifikasi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Tahun 2022.

b. Penyesuaian Penghapusan Aset Tetap Lainnya Rp34.955.000,00

Adalah Akumulasi Nilai Buku dari penghapusan Aset Tetap Lainnya berupa Buku dan Barang Kerajinan Lain-lain yang sudah tidak layak pakai sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Tahun 2022.

c. Penyesuaian Penghapusan Aset Lainnya Rp11.482.500,00

Adalah Akumulasi Nilai Buku dari penghapusan Aset Tetap Peralatan Mesin dengan kondisi Rusak Berat sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Tahun 2022.

#### 6.4.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pengakuan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp148.370.156,32, Jika dibandingkan Saldo Tahun 2021 sebesar Rp302.508.832,88, terjadi penurunan sebesar 50,95% atau sebesar Rp154.138.676,55.

Tabel 6.4. 90

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(148.370.156,32)</b>	<b>(302.508.832,88)</b>	<b>154.138.676,55</b>	<b>(50,95)</b>
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	57.340.676,68	44.006.456,12	<b>13.334.220,55</b>	30,30
2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	205.710.833,00	346.515.289,00	<b>140.804.456,00</b>	(40,63)

**6.4.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa**

Pengakuan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp37.880.601.638,47, Jika dibandingkan Saldo Tahun 2021 sebesar Rp34.834.038.985,48, terjadi peningkatan sebesar 8,75% atau sebesar Rp3.046.562.652,99.

Tabel 6.4. 91

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(37.880.601.638,47)</b>	<b>(34.834.038.985,48)</b>	<b>(3.046.562.652,99)</b>	<b>8,75</b>
1	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(37.732.231.482,15)	(34.531.530.152,61)	(3.200.701.329,54)	9,27
2	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(148.370.156,32)	(302.508.832,88)	154.138.676,55	(50,95)

**6.4.6. Surplus/Defisit – LO**

Saldo Surplus/Defisit - LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tahun 2022 adalah sebesar Rp37.880.601.638,47, Jika dibandingkan dengan saldo Surplus/Defisit - LO di Tahun 2021 sebesar Rp35.067.283.547,48 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 8,02% atau sebesar Rp2.813.318.090,99.

Tabel 6.4. 92  
Surplus/Defisit - LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
<b>A</b>	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
1	PENDAPATAN	477.611.811.647,26	493.098.775.773,99	(15.486.964.126,73)	(3,14)
2	BEBAN	515.344.043.129,41	527.630.305.926,60	(12.286.262.797,19)	(2,33)
<b>B</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(37.732.231.482,15)</b>	<b>(34.531.530.152,61)</b>	<b>(3.200.701.329,54)</b>	<b>9,27</b>
<b>C</b>	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	57.340.676,68	44.006.456,13	13.334.220,55	30,30
2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	205.710.833,00	346.515.289,00	(140.804.456,00)	(40,63)
<b>D</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(148.370.156,32)</b>	<b>(302.508.832,88)</b>	<b>154.138.676,55</b>	<b>(50,95)</b>
<b>E</b>	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(37.880.601.638,47)</b>	<b>(34.834.038.985,48)</b>	<b>(3.046.562.652,99)</b>	<b>8,75</b>
<b>F</b>	<b>POS LUAR BIASA</b>				
1	Beban Tak Terduga	0,00	233.244.562,00	(233.244.562,00)	(100,00)
<b>G</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>(233.244.562,00)</b>	<b>233.244.562,00</b>	<b>(100,00)</b>
<b>H</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(37.880.601.638,47)</b>	<b>(35.067.283.547,48)</b>	<b>(2.813.318.090,99)</b>	<b>8,02</b>

## 6.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021, dan saldo Kas dan Setara Kas sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022 dan 2021 terdiri atas Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Transitoris, dengan rincian sebagai berikut:

### 6.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

#### 6.5.1.1. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi merupakan kas yang diterima dari kegiatan operasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama satu periode akuntansi.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp531.651.652.684,00 dari angka tersebut jika dibandingkan dengan Tahun 2021 adalah sebesar Rp556.390.481.151,99 mengalami penurunan sebesar Rp24.738.828.467,99 Berikut disajikan Arus Kas Masuk Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.5. 1  
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk	531.651.652.684,00	556.390.481.151,99

Nilai Arus Kas Masuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp531.651.652.684,00 dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 6.5. 2  
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Arus Kas Masuk</b>		<b>531.651.652.684,00</b>	<b>556.390.481.151,99</b>
1	Pajak Daerah	7.804.348.931,00	5.999.345.024,00
2	Retribusi Daerah	397.832.320,00	280.887.019,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	948.010.307,00	1.098.472.126,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	3.739.905.092,00	5.986.501.797,99
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	484.731.282.023,00	519.209.667.899,00
6	Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.123.341.764,00	14.109.889.286,00
7	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.906.932.247,00	9.705.718.000,00

#### 6.5.1.2. Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari Aktivitas Operasi merupakan kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama satu periode akuntansi dan tidak menambah Ekuitas.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp459.763.602.773,92 dari angka tersebut jika dibandingkan dengan Tahun 2021 adalah sebesar Rp462.687.790.310,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.924.187.536,08 Berikut disajikan Arus Kas Keluar Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.5. 3  
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>459.763.602.773,92</b>	<b>462.687.790.310,00</b>

Nilai Arus Kas Keluar Tahun 2022 adalah sebesar Rp459.763.602.773,92 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.5. 4  
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Arus Kas Keluar</b>		<b>459.763.602.773,92</b>	<b>462.687.790.310,00</b>
1	Belanja Pegawai	213.765.733.155,00	204.936.447.375,00
2	Belanja Barang dan Jasa	140.769.569.584,92	144.611.926.961,00
3	Belanja Hibah	3.096.894.020,00	6.775.705.681,00
4	Belanja Bantuan Sosial	9.212.069.430,00	1.786.800.000,00
5	Belanja Tidak Terduga	0,00	233.244.562,00
6	Belanja Bagi Hasil	753.406.250,00	472.166.033,00
7	Belanja Bantuan Keuangan	92.165.930.334,00	103.871.499.698,00

#### 6.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Adalah merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan Arus kas Bersih dari Aktivitas Operasi:

Tabel 6.5. 5  
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>71.888.049.910,08</b>	<b>93.702.690.841,99</b>
1	Arus Kas Masuk	531.651.652.684,00	556.390.481.151,99
2	Arus Kas Keluar	459.763.602.773,92	462.687.790.310,00

### 6.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Kas dari Aktivitas Investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Arus Kas dari Aktivitas Investasi terbagi atas:

#### 6.5.3.1. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp70.184.207.079,00 dari angka tersebut jika dibandingkan dengan Tahun 2021 adalah sebesar Rp64.769.501.202,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.414.705.877,00 Berikut disajikan Arus Kas Keluar Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.5. 6  
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>70.184.207.079,00</b>	<b>64.769.501.202,00</b>

Nilai Arus Kas Keluar Tahun 2022 adalah sebesar Rp70.184.207.079,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.5. 7  
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Arus Kas Keluar</b>		<b>70.184.207.079,00</b>	<b>64.769.501.202,00</b>
1	Belanja Modal Tanah	78.875.000,00	39.175.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.743.662.655,00	22.681.592.476,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.259.270.341,00	21.959.213.802,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.003.471.945,00	19.319.812.253,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.098.927.138,00	769.707.671,00

#### 6.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 6.5. 8  
Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(70.184.207.079,00)</b>	<b>(64.769.501.202,00)</b>
1	Arus Kas Masuk	0,00	0,00
2	Arus Kas Keluar	70.184.207.079,00	64.769.501.202,00

#### 6.5.5. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak pemerintah daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga. Arus kas dari Aktivitas Transitoris terdiri atas:

##### 6.5.5.1. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp34.069.340.068,00 dari angka tersebut jika dibandingkan dengan Tahun 2021 adalah sebesar Rp26.182.988.683,40 mengalami kenaikan sebesar Rp7.886.351.384,60 Berikut disajikan Arus Kas Masuk Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.5. 9  
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>34.069.340.068,00</b>	<b>26.182.988.683,40</b>

Nilai Arus Kas Masuk dari aktivitas transitoris Tahun 2022 adalah sebesar Rp34.069.340.068,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.5. 10  
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Arus Kas Masuk</b>		<b>34.069.340.068,00</b>	<b>26.182.988.683,40</b>
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	34.069.340.068,00	26.182.988.683,40

Tabel 6.5. 11  
Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</b>			
1	Iuran Jaminan Kesehatan	6.288.417.344,00	790.246.525,00
2	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	196.707.981,00	0,00
3	Iuran Jaminan Kematian	581.441.341,00	0,00
4	PPh 21	6.772.079.491,00	6.372.105.754,00
5	PPh 22	290.716.517,00	641.722.739,00
6	PPh 23	273.871.567,00	236.259.745,00
7	PPh Ps 4 (2)	1.349.552.824,00	1.062.218.069,00
8	PPN Pusat	9.902.848.714,00	9.134.037.382,40
9	Taperum	0,00	0,00
10	Iuran Wajib Pegawai	8.413.704.289,00	7.677.821.318,00
11	Lainnya	0,00	268.577.151,00
		<b>34.069.340.068,00</b>	<b>26.182.988.683,40</b>

#### 6.5.5.2. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp34.168.949.896,56 dari angka tersebut jika dibandingkan dengan Tahun 2021 adalah sebesar Rp25.821.464.450,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.347.485.446,56 Berikut disajikan Arus Kas Keluar Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.5. 12  
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>34.168.949.896,56</b>	<b>25.821.464.450,00</b>

Nilai Arus Kas Keluar Tahun 2022 adalah sebesar Rp34.168.949.896,56 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.5. 13  
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Arus Kas Keluar</b>		<b>34.168.949.896,56</b>	<b>25.821.464.450,00</b>
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	34.194.061.911,40	25.807.891.844,00
2	Koreksi SiLPA	(25.112.014,84)	13.572.606,00

Tabel 6.5. 14  
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</b>			
1	Iuran Jaminan Kesehatan	6.288.417.344,00	551.946.313,00
2	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	196.681.455,00	0,00
3	Iuran Jaminan Kematian	581.361.751,00	0,00
4	PPh 21	6.772.079.491,00	6.372.105.754,00
5	PPh 22	288.193.820,00	642.356.803,00
6	PPh 23	273.871.567,00	236.259.745,00
7	PPh Ps 4 (2)	1.349.552.824,00	1.062.218.069,00
8	PPN Pusat	10.030.473.108,40	8.996.606.691,00
9	Taperum	0,00	0,00
10	Iuran Wajib Pegawai	8.413.430.551,00	7.677.821.318,00
11	Lainnya	0,00	268.577.151,00
		<b>34.194.061.911,40</b>	<b>25.807.891.844,00</b>

## 6.5.7. Kenaikan/ (Penurunan) Kas

Rincian Kenaikan / (Penurunan) Kas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur per 31 Desember 2022 dapat digambarkan pada rincian tabel berikut;

Tabel 6.5. 17

## Kenaikan / (Penurunan) Kas Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Kenaikan / (Penurunan) Kas</b>		<b>1.604.233.002,52</b>	<b>29.294.713.873,39</b>
1	Saldo Awal Kas	42.178.348.676,51	12.883.634.803,12
2	Saldo Akhir Kas	43.782.581.679,03	42.178.348.676,51

## 6.5.8. Saldo Akhir Kas

Rincian Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Per 31 Desember 2022 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 6.5. 18

## Saldo Akhir Kas Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>43.782.581.679,03</b>	<b>42.178.348.676,51</b>
1	Kas di Kas Daerah	43.442.169.605,11	41.944.359.871,11
2	Kas di Bendahara Penerimaan	38.019.915,00	15.330.119,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.342.806,00	0,00
4	Kas Dana BOS	10.360.201,00	187.221.725,40
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	35.620.826,92	31.436.961,00
6	Kas Lainnya Terkait Utang PFK	252.068.325,00	0,00

## 6.5.8.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Per 31 Desember 2022 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 6.5. 19

## Kas di Kas Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Kas di Kas Daerah</b>		<b>43.442.169.605,11</b>	<b>41.944.359.871,11</b>
1	Kas di Kas Daerah	43.442.159.537,27	41.944.351.803,27
2	Deposito BRI - 003601001791302	10.067,84	8.067,84

## 6.5.8.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur per 31 Desember 2022 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 6.5. 20

## Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>		<b>38.019.915,00</b>	<b>15.330.119,00</b>
1	Kas di Bendahara Penerimaan	38.019.915,00	15.330.119,00

Nilai ini merupakan Dana Non Kapitasi sebesar Rp38.019.915,00 yang per 31 Desember 2022 belum disetorkan ke RKUD.

## 6.5.8.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Per 31 Desember 2022 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 6.5. 21

Kas di Bendahara Pengeluaran  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		<b>4.342.806,00</b>	<b>0,00</b>
1	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	4.342.806,00	0,00



## 1. Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai

- a. Kurang Setor Sisa TU Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sebesar Rp1.865.000,00
- b. Kurang Setor Sisa TU Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.477.806,00

## 6.5.8.4. Kas Dana BOS

Kas Dana BOS Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Per 31 Desember 2022 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 6.5. 22  
Kas Dana BOS Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Kas Dana BOS</b>		<b>10.360.201,00</b>	<b>187.221.725,40</b>
1	SD Negeri 1 Moyongkota	0,00	5.969.841,00
2	SD Negeri 1 Moyongkota Baru	0,00	303.261,00
3	SD Negeri 2 Moyongkota Baru	156.492,00	204.178,00
4	SD Negeri 1 Bangunan Wuwuk	0,00	5.554.134,80
5	SD Negeri 1 Bongkudai Barat	0,00	4.812.617,00
6	SD Negeri 2 Bongkudai	0,00	4.062.440,00
7	SD Negeri 1 Modayag	177.397,00	3.256.172,00
8	SD Negeri 1 Modayag Barat	451,00	1.785.064,00
9	SD Negeri 1 Modayag Timur	0,00	1.454.952,10
10	SD Negeri 1 Purworejo	0,00	395.190,00
11	SD Negeri 1 Purworejo Timur	4.312,00	478.004,00
12	SD Negeri 1 Liberia	0,00	5.047.872,00
13	SD Negeri 1 Liberia Timur	0,00	473.692,00
14	SD Negeri 1 Tobongon	0,00	3.158.230,00
15	SD Negeri 1 Mooat	0,00	1.116.460,00
16	SD Negeri 1 Bongkudai Baru Utara	0,00	1.676.390,00
17	SD Negeri 1 Bongkudai Baru Barat	0,00	1.781.599,00
18	SD Negeri 1 Guaan	0,00	2.750.000,00

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
19	SD Negeri 1 Badaro	0,00	1.609.200,00
20	SD Negeri 1 Lanud	0,00	2.864.003,60
21	SD Negeri 1 Kokapoy	0,00	913.053,00
22	SD Negeri 1 Buyandi	0,00	6.556.735,00
23	SD Negeri 1 Buyat	0,00	0,00
24	SD Negeri 1 Buyat 2	112.154,00	500.254,00
25	SD Negeri 2 Buyat 2	0,00	773.205,00
26	SD Negeri 1 Kotabunan	0,00	0,00
27	SD Negeri 2 Kotabunan	0,00	2.923.624,00
28	SD Negeri 1 Bulawan	0,00	8.584.772,00
29	SD Negeri 1 Bukaka	0,00	786.390,00
30	SD Negeri 1 Paret	0,00	30.000,00
31	SD Negeri 1 Kayumoyondi	0,00	2.333.475,10
32	SD Negeri 1 Tombolikat	0,00	993.046,00
33	SD Negeri 1 Tombolikat Selatan	0,00	152.721,00
34	SD Negeri 1 Tutuyan 3	0,00	3.719.008,00
35	SD Negeri 1 Tutuyan 2	0,00	220.034,00
36	SD Negeri 1 Togid	0,00	50.581,00
37	SD Negeri 2 Togid	0,00	145.600,00
38	SD Negeri 1 Dodap	0,00	0,00
39	SD Negeri 1 Dodap Pantai	4.800.000,00	3.409.215,00
40	SD Negeri 1 Motongkad	0,00	2.105.100,00
41	SD Negeri 1 Atoga	0,00	1.948.909,00
42	SD Negeri 1 Molobog	0,00	3.381.972,00
43	SD Negeri 1 Jiko	0,00	1.491.177,00
44	SD Negeri 1 Nuangan 1	0,00	699.774,00
45	SD Negeri 1 Bai	0,00	0,00
46	SD Negeri 1 Nuangan	0,00	1.153.009,00
47	SD Negeri 1 Loyow	60.744,00	1.125.911,00
48	SD Negeri 1 Idumun	50,00	1.369.524,00

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
49	SD Negeri 1 Matabulu	0,00	15.887.128,00
50	SD Negeri 1 Jikobelanga	0,00	1.713.391,00
51	SD Negeri 1 Iyok	0,00	1.119.448,00
52	SD Negeri 2 Motongkat	0,00	3.001.657,00
53	SMP Negeri 1 Modayag	0,00	12.348.493,00
54	SMP Negeri 2 Modayag	0,00	13.070.978,00
55	SMP Negeri 1 Kotabunan	0,00	0,00
56	SMP Negeri 1 Tutuyan	1.940.175,00	77,00
57	SMP Negeri 2 Tutuyan	2.277.445,00	155.235,00
58	SMP Negeri 1 Nuangan	0,00	8.342.444,00
59	SMP Negeri 2 Nuangan	0,00	3.906.170,00
60	SMP Negeri Satap Lanud	0,00	1.529.061,00
61	SMP Negeri Satap Jiko Belanga	0,00	2.246.770,00
62	SMP Negeri Satap Matabulu	65.477,00	3.832.693,00
63	SMP Negeri Satap Atoga	44.205,00	41.605,00
64	SMP Satap Jiko	0,00	315,00
65	SMP Negeri Satap Buyandi	0,00	0,00
66	SMP Satap Bai	48.909,00	48.909,00
67	SMP Satap Bukaka	0,00	8.814.030,80
68	SMP Satap Kokapoy	0,00	604.852,00
69	SMP Negeri 1 Modayag Barat	0,00	3.220.111,00
70	SMP Satap Tobongan	0,00	759.044,00
71	SMP Satap Badaro	149,00	832.414,00
72	SMP Satap Molobog	0,00	606.527,00
73	SMPN 3 Tutuyan	0,00	2.506.103,00
74	SMP Daerah Kotabunan	0,00	171.940,00
75	SDN 1 Pinonobatan	0,00	564.510,00
76	SDN 1 Dodap Mikasa	0,00	1.096.110,00
77	SDN 1 Bulawan 2	672.241,00	6.681.320,00

## 6.5.8.5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Per 31 Desember 2022 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 6.5. 23

## Kas Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Kas Dana Kapitasi pada FKTP</b>		<b>35.620.826,92</b>	<b>31.436.961,00</b>
1	UPTD Puskesmas Kotabunan (JKN)	333.678,37	2.166.036,00
2	UPTD Puskesmas Tutuyan (JKN)	574.348,00	400.134,00
3	UPTD Puskesmas Nuangan (JKN)	1.546.671,84	4.861.230,00
4	UPTD Puskesmas Modayag (JKN)	212.092,03	23.656.953,00
5	UPTD Puskesmas Modayag Barat (JKN)	7.233.085,00	320.275,00
6	UPTD Puskesmas Buyat Kecamatan Kotabunan (JKN)	92.580,68	32.333,00
7	UPTD Puskesmas Kecamatan Mooat (JKN)	25.628.371,00	0,00

## 6.5.8.6. Kas Lainnya Terkait Utang PFK

Kas Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Per 31 Desember 2022 yang merupakan komponen Silpa dapat digambarkan pada tabel berikut

Tabel 6.5. 24

## Kas Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Kas Lainnya Terkait Utang PFK</b>		<b>252.068.325,00</b>	<b>0,00</b>
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BUD	251.433.794,00	0,00
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Bendahara Pengeluaran	634.531,00	0,00

## 6.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

### 6.6.1. Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp931.258.535.704,14 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun Anggaran 2021 Berikut disajikan Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.6. 1  
Ekuitas Awal Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>EKUITAS AWAL</b>		<b>931.258.535.704,14</b>	<b>965.829.618.440,73</b>
1	Aset	938.906.333.774,24	973.951.972.779,02
2	Kewajiban	7.647.798.070,10	8.122.354.338,29

### 6.6.2. Surplus/Defisit – LO

Saldo Surplus/Defisit - LO Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp37.880.601.638,47 adalah merupakan surplus kegiatan operasional Tahun Anggaran 2021 yang menambah nilai ekuitas pada neraca Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022. Berikut disajikan Surplus / Defisit - Lo Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

Tabel 6.6. 2  
Surplus/Defisit – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(37.880.601.638,47)</b>	<b>(35.067.283.547,48)</b>
1	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(37.880.601.638,47)	(34.834.038.985,48)
2	Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	0,00	(233.244.562,00)

## 6.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus Kegiatan atas Operasional Tahun 2022, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya:

Tabel 6.6. 3  
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar  
Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b>			
1	Koreksi Ekuitas	672.849.752,84	496.200.810,89

## 1. Koreksi Penambahan Ekuitas

- a. Penyesuaian Reklas Kas Lainnya pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP UPTD Puskesmas Mooat Tahun 2022 Sebesar Rp247.200,00
- b. Penyesuaian Penerimaan Kas Daerah atas Jasa Giro Tahun 2021 yang baru disetorkan oleh pihak Bank ke RKUD di Tahun 2022 Sebesar Rp1.423.911,00
- c. Penyesuaian Saldo Kas Dana BOS atas Pengembalian Temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada SD Negeri 1 Purworejo Sebesar Rp2.000.000,00
- d. Penyesuaian Saldo Kas Dana BOS atas Pengembalian Temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada SMP Negeri 2 Modayag Sebesar Rp13.364.868,00
- e. Penyesuaian Saldo Kas Dana BOS atas Pengembalian Temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada SD Negeri 1 Mooat Sebesar Rp3.000.000,00
- f. Penyesuaian Saldo Kas Dana BOS atas Pengembalian Temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada SD Negeri 1 Purworejo Timur Sebesar Rp6.500.000,00
- g. Penyesuaian Kas Bendahara Penerimaan Non Kapitasi atas saldo per 31 Desember 2021 pada rekening BRI nomor rekening 003601001818308 sebesar Rp15.330.119,00 yang telah disetorkan ke RKUD Sebesar Rp15.330.119,00

- v. Penyesuaian Pagar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sebesar Rp14.960.000,00
  - w. Penyesuaian Mutasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO Sebesar Rp614.343.150,00
  - x. Penyesuaian Koreksi Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (SKPKD) Sebesar Rp632.109.684,00
  - y. Penyesuaian Koreksi Saldo Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Sebesar Rp43.409.943,50
  - z. Koreksi Pembatalan Penghapusan nilai piutang PBB-P2 Tahun 2018 yang diusul hapus oleh Bidang Pendapatan tapi belum memenuhi kriteria umur piutang untuk dihapus Sebesar Rp86.879.887,00
  - aa. Penyesuaian Mutasi Pendapatan Hibah Dana BOS-LO Sebesar Rp9.492.117.624,00
  - bb. Penyesuaian Mutasi DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO Sebesar Rp579.618.000,00
  - cc. Penyesuaian Alat Pendingin pada SDN 1 Jiko Sebesar Rp750.000,00
2. Koreksi Pengurangan Ekuitas
- a. Penyesuaian Kas FKTP UPTD Puskesmas Kotabunan atas Jasa Giro Tahun 2021 yang baru disetorkan oleh pihak Bank ke RKUD di Tahun 2022 Sebesar Rp289.659,00
  - b. Penyesuaian Kas FKTP UPTD Puskesmas Tutuyan atas Jasa Giro Tahun 2021 yang baru disetorkan oleh pihak Bank ke RKUD di Tahun 2022 Sebesar Rp400.134,00
  - c. Penyesuaian Kas FKTP UPTD Puskesmas Modayag atas Jasa Giro Tahun 2021 yang baru disetorkan oleh pihak Bank ke RKUD di Tahun 2022 Sebesar Rp706.246,00
  - d. Penyesuaian Kas FKTP UPTD Puskesmas Buyat atas Jasa Giro Tahun 2021 yang baru disetorkan oleh pihak Bank ke RKUD di Tahun 2022 Sebesar Rp27.872,00
  - e. Penyesuaian Kas Bendahara Penerimaan Non Kapitasi atas saldo per 31 Desember 2021 pada rekening BRI nomor rekening 003601001818308 sebesar Rp15.330.119,00 yang telah disetorkan ke RKUD Sebesar Rp15.330.119,00

**BAB VII****Informasi Tambahan Atas Laporan Keuangan****Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022**

## 7.1. Penjelasan Atas Dana – Dana Non APBD

Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerima beberapa Dana berupa Dana Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi, Dana Bantuan Sosial PKH, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Paud (BOP), Bantuan Kementerian Kesehatan Kepada KKM dan Dividen Penyertaan Modal. Untuk uraian dana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 7.1.1. Dana Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur teralokasi pada Dinas Pertanian, berikut rinciannya:

Tabel 7. 1  
Dana Tugas Pembantuan Tahun 2022

SKPD		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DINAS PERTANIAN	205.515.000,00	205.465.000,00	99,98
<b>JUMLAH</b>		<b>205.515.000,00</b>	<b>205.465.000,00</b>	<b>99,98</b>

Dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian terbagi pada 2 bidang yaitu bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan Bidang Tanaman Pangan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pasca Panen, Pengolahan dan Hasil Pertanian, adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 7. 2  
Rincian Dana Tugas Pembantuan Tahun 2022

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Tugas Peerbantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian</b>				
DIPA: SP-DIPA-018.08.4.1976 001/2022 tanggal 07 Juni 2021				
1	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Pertanian	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
2	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (Base Line)	85.395.000,00	85.395.000,00	100,00
3	Pelayanan Publik Lainnya (Base Line)	69.920.000,00	69.920.000,00	100,00
<b>Total</b>		<b>165.315.000,00</b>	<b>165.315.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Tanaman Pangan</b>				
DIPA 018.03.4.179103/2022 Tanggal 13 Desember 2021				
1	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	11.400.000,00	11.350.000,00	99,56
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00
<b>Total</b>		<b>40.200.000,00</b>	<b>40.150.000,00</b>	<b>99,88</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>205.515.000,00</b>	<b>205.465.000,00</b>	<b>99,98</b>

#### 7.1.2. Dana Dekonsentrasi

Dana Dekonsentrasi APBN Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur teralokasi pada Dinas Pertanian dengan total Anggaran sebesar Rp196.800.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp196.800.000,00 atau sebesar 100%. Adapun rinciannya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 7. 3  
Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022

SKPD		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DINAS PERTANIAN	196.800.000,00	196.800.000,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>196.800.000,00</b>	<b>196.800.000,00</b>	<b>100,00</b>

Tabel 7. 4  
Rincian Dekonsentrasi Tahun 2022 pada Dinas Pertanian  
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Dekonsentrasi Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2022</b>				
Tugas Perbantuan Bidang Penyuluhan				
Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara				
1	Biaya Operasional Penyuluhan	196.800.000,00	196.800.000,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>196.800.000,00</b>	<b>196.800.000,00</b>	<b>100,00</b>

#### 7.1.3. Dana Bantuan Sosial PKH

Tahun 2022 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memperoleh Dana Bantuan Sosial yang berupa Bantuan Sosial PKH dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 7. 5  
Bantuan Sosial PKH

Rincian		Realisasi (Rp)
1	PKH	6.895.075.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>6.895.075.000,00</b>

Tabel 7. 6  
Rincian Bantuan Sosial PKH

Periode		Jumlah KPM	Jumlah Transaksi (Rp)
1	Tahap 1	2588	1.679.650.000,00
2	Tahap 2	2486	1.665.650.000,00
3	Tahap 3	2840	1.712.125.000,00
4	Tahap 4	2554	1.837.650.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>6.895.075.000,00</b>

#### 7.1.4. Bantuan Operasional Sekolah

Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memperoleh Droning Dana BOS Reguler sebesar Rp 9.538.847.624,00 yang ditransfer langsung ke 82

Rekening Sekolah, selain Dana BOS Reguler Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur juga memperoleh Dropping Dana BOS Kinerja sebesar Rp 555.000.000,00 yang ditransfer langsung ke 8 Rekening Sekolah. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 7

## Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah

Uraian/Sekolah		Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Alokasi (Rp)
<b>BOS REGULER</b>		<b>82</b>	<b>9348</b>	<b>9.538.847.624,00</b>
<b>Sekolah Negeri</b>		<b>77</b>	<b>8749</b>	<b>8.937.117.624,00</b>
1	SD/SDLB Negeri	55	6362	6.028.448.720,00
2	SMP/SMPLB Negeri	22	2387	2.908.668.904,00
<b>Sekolah Swasta</b>		<b>5</b>	<b>599</b>	<b>601.730.000,00</b>
1	SD/SDLB Swasta	4	483	473.340.000,00
2	SMP/SMPLB Swasta	1	116	128.390.000,00
<b>BOS AFIRMASI DAN KINERJA</b>		<b>8</b>	<b>828</b>	<b>555.000.000,00</b>
<b>Sekolah Negeri</b>		<b>8</b>	<b>828</b>	<b>555.000.000,00</b>
1	SD/SDLB Negeri	5	549	295.000.000,00
2	SMP/SMPLB Negeri	3	279	260.000.000,00

## 7.1.5. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)

Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerima hibah Dana BOP yang terbagi atas BOP Reguler sebesar Rp 1.427.242.000,00 yang ditransfer langsung ke 97 Rekening PAUD dan BOP Kinerja sebesar Rp 150.000.000,00 yang ditransfer langsung ke 4 Rekening PAUD. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 8

## Bantuan Operasional Penyelenggaraan BOP Paud

Uraian/Paud		Jumlah PAUD	Jumlah Siswa	Alokasi (Rp)
<b>BOP REGULER</b>		<b>97</b>	<b>2204</b>	<b>1.427.242.000,00</b>
1	PAUD Negeri	28	732	459.618.000,00
2	PAUD Swasta	69	1472	967.624.000,00
<b>BOP AFIRMASI DAN KINERJA</b>		<b>4</b>	<b>117</b>	<b>150.000.000,00</b>
1	PAUD Negeri	3	83	120.000.000,00
2	PAUD Swasta	1	34	30.000.000,00

## 7.1.6. Dana Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Kementerian Kesehatan memberikan bantuan yang ditransfer langsung kepada salah satu KKM yang berada di desa Matabulu Timur kecamatan Nuangan sejumlah Rp100.000.000,00 guna keperluan sanitasi tahun 2022, bantuan ini ditransfer berdasarkan dua tahap dengan pembagian termin 1 sejumlah Rp 70.000.000,00 dan termin 2 sejumlah Rp 30.000.000,00. Rincian dari Bantuan Kementrian Kesehatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 9  
Dana Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Uraian/Periode		Tanggal SPM	Nomor SPM	Jumlah Transaksi (Rp)
<b>Bantuan Kementerian Kesehatan</b> KN.01.03/6.1/0533/134/2022 KKM_378 MATABULU TIMUR Sanitasi				
1	Termin 1	09/11/2022	00819A	70.000.000,00
2	Termin 2	14/12/2022	01014A	30.000.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>100.000.000,00</b>

## 7.1.7. Penyertaan Modal Pada PT. Bank SulutGo

Sesuai dengan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 9 Februari 2023 yang tertuang dalam Akta Risalah RUPS Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (PT. Bank SulutGo) No. 10 Tanggal 9 Februari 2023 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Menerima Dividen atas Laba Bersih Tahun buku 2022 sebesar Rp1.409.788.093,00 yang telah dipindahbukukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (PT. Bank SulutGo) ke Rekening Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 22 Februari 2023.

Jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mogondow Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (PT. Bank SulutGo) berdasarkan hasil Keputusan RUPS tanggal 9 Februari 2023 yang tertuang dalam Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (PT. Bank SulutGo) No. 11 tanggal 9 Februari 2023 adalah sebanyak 80.014 lembar dengan nominal Rp8.001.400.000,00 dan komposisi kepemilikan sebesar 0,64%.

## BAB VIII

### Penutup

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ini disusun dengan harapan mampu menjelaskan komponen-komponen apa saja secara rinci baik pengakuan, pengukuran dan penilaian, penyajian dan pengungkapan serta bagaimana perlakuan transaksi atau peristiwa sehingga dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami oleh pengguna (*konsumen*) yang membutuhkan akan informasi kondisi keuangan maupun asset secara akuntabilitas dan transparansi agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan cara mengungkapkan dengan detail factor-faktor penyebab adanya perbedaan realisasi anggaran periode sekarang dengan sebelumnya.

Selanjutnya bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan program/kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus dalam kondisi yang mana dalam tahap penganggaran pemerintah daerah harus memperhatikan dampak tersebut. Dengan demikian anggaran dilingkungan pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pada tahun kelima penerapan basis akrual ini, terdapat banyak sekali tantangan seiring dengan berkembangnya perubahan regulasi pengelolaan keuangan dan kompleksitas transaksi keuangan daerah yang semakin beragam. Namun dengan berbekal semangat dan komitmen dari seluruh tingkatan manajemen pemerintahan, sehingga laporan keuangan ini dapat diselesaikan secara paripurna dengan tetap memperhatikan kualitas penyajiannya.

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas serta Laporan Perubahan Ekuitas diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman

pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022.

 **BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR** 

**SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si.**

Lampiran 1 Program Prioritas Nasional

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (SKPD)	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN				JUMLAH		REALISASI	
			BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	Rp.	%	Rp.	%
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		36.758.019.132,00	8.600.287.613,00	0,00	0,00	45.358.306.745,00	7,96	37.439.152.194,00	82,54
	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	21.621.297.277,00	8.390.916.828,00	0,00	0,00	30.012.214.105,00	5,26	22.823.585.038,00	76,05
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	2.887.856.876,00	0,00	0,00	0,00	2.887.856.876,00	0,51	2.818.782.423,00	97,61
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	12.999.974,00	0,00	0,00	0,00	12.999.974,00	0,00	12.949.974,00	99,62
	DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	3.208.068.872,00	0,00	0,00	0,00	3.208.068.872,00	0,56	3.117.304.059,00	97,17
	DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	0,01	53.919.600,00	99,85
	DINAS PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	447.767.280,00	0,00	0,00	0,00	447.767.280,00	0,08	438.069.913,00	97,83
	DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	7.578.074.983,00	0,00	0,00	0,00	7.578.074.983,00	1,33	7.051.382.238,00	93,05
	DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	132.776.435,00	12.370.785,00	0,00	0,00	145.147.220,00	0,03	139.896.485,00	96,38
	DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	704.821.741,00	197.000.000,00	0,00	0,00	901.821.741,00	0,16	881.977.248,00	97,80
	DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	110.355.694,00	0,00	0,00	0,00	110.355.694,00	0,02	101.285.216,00	91,78
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		194.000.117.305,00	15.364.771.751,00	0,00	0,00	209.364.889.056,00	36,73	195.376.523.523,00	93,32
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	76.610.406.470,00	518.527.457,00	0,00	0,00	77.128.933.927,00	13,53	72.942.846.387,00	94,57
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	15.824.375.006,00	12.765.396.385,00	0,00	0,00	28.589.771.391,00	5,02	21.605.142.730,00	75,57
	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	32.566.694.018,00	359.174.264,00	0,00	0,00	32.925.868.282,00	5,78	32.490.546.723,00	98,68
	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	3.276.232.597,00	9.115.774,00	0,00	0,00	3.285.348.371,00	0,58	3.171.272.080,00	96,53
	DINAS SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	30.867.413,00	0,00	0,00	0,00	30.867.413,00	0,01	30.867.000,00	100,00
	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	411.120.020,00	0,00	0,00	0,00	411.120.020,00	0,07	410.825.000,00	99,93
	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	79.807.180,00	0,00	0,00	0,00	79.807.180,00	0,01	79.522.100,00	99,64
	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	422.274.436,00	0,00	0,00	0,00	422.274.436,00	0,07	259.855.470,00	61,54
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	2.855.142.938,00	7.966.803,00	0,00	0,00	2.863.109.741,00	0,50	2.702.055.623,00	94,37
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	715.828.594,00	0,00	0,00	0,00	715.828.594,00	0,13	708.261.756,00	98,94
	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	3.013.174.485,00	0,00	0,00	0,00	3.013.174.485,00	0,53	2.909.238.479,00	96,55
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	2.627.145.695,00	0,00	0,00	0,00	2.627.145.695,00	0,46	2.559.879.428,00	97,44
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.134.258.906,00	0,00	0,00	0,00	1.134.258.906,00	0,20	1.121.569.166,00	98,88
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	911.732.061,00	0,00	0,00	0,00	911.732.061,00	0,16	906.606.843,00	99,44
	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	2.076.321.523,00	12.515.602,00	0,00	0,00	2.088.837.125,00	0,37	1.910.300.476,00	91,45
	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	28.642.930,00	205.068.000,00	0,00	0,00	233.710.930,00	0,04	229.589.065,00	98,24
	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	5.659.200,00	0,00	0,00	0,00	5.659.200,00	0,00	5.550.000,00	98,07
	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	2.960.257.061,00	0,00	0,00	0,00	2.960.257.061,00	0,52	2.849.704.132,00	96,27
	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	36.001.759.786,00	1.107.281.401,00	0,00	0,00	37.109.041.187,00	6,51	36.290.174.231,00	97,79
	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.580.832.489,00	55.712.520,00	0,00	0,00	3.636.545.009,00	0,64	3.587.781.678,00	98,66
	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.053.557.373,00	195.145.530,00	0,00	0,00	1.248.702.903,00	0,22	1.200.964.380,00	96,18
	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	4.244.132.966,00	112.516.773,00	0,00	0,00	4.356.649.739,00	0,76	4.186.962.965,00	96,11
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	3.569.894.158,00	16.351.242,00	0,00	0,00	3.586.245.400,00	0,63	3.216.836.811,00	89,70
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		34.215.653.649,00	56.789.812.901,00	0,00	0,00	91.005.466.550,00	15,96	81.257.571.750,00	89,29

*Handwritten signature/initials*

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (SKPD)	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN				JUMLAH		REALISASI	
			BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	Rp	%	Rp	%
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	8.187.987.772,00	6.150.529.572,00	0,00	0,00	14.338.517.344,00	2,52	13.028.729.237,00	90,87
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	800.936.857,00	2.732.958.816,00	0,00	0,00	3.533.895.673,00	0,62	3.176.784.851,00	89,89
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.702.277.498,00	9.220.593.444,00	0,00	0,00	10.922.870.942,00	1,92	10.240.439.644,00	93,75
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.515.094.000,00	13.892.318,00	0,00	0,00	5.528.986.318,00	0,97	5.527.167.300,00	99,97
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	856.236.979,00	0,00	0,00	0,00	856.236.979,00	0,15	855.333.630,00	99,89
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.120.011.000,00	1.828.477.000,00	0,00	0,00	2.040.488.000,00	0,36	862.757.841,00	42,28
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	3.663.879.526,00	34.697.941.382,00	0,00	0,00	38.361.820.908,00	6,73	34.561.977.433,00	90,09
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.223.425.727,00	21.193.444,00	0,00	0,00	1.244.619.171,00	0,22	1.057.033.083,00	84,93
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	29.999.256,00	0,00	0,00	0,00	29.999.256,00	0,01	26.950.000,00	89,84
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.465.803.914,00	0,00	0,00	0,00	1.465.803.914,00	0,26	1.318.828.595,00	89,97
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	451.759.690,00	42.388.888,00	0,00	0,00	494.148.578,00	0,09	493.936.400,00	99,96
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	3.253.430.043,00	75.415.600,00	0,00	0,00	3.328.845.643,00	0,58	3.175.296.859,00	95,39
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.022.309.152,00	198.698.783,00	0,00	0,00	5.221.007.935,00	0,92	5.165.435.595,00	98,94
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.428.786.781,00	1.764.752.210,00	0,00	0,00	3.193.538.991,00	0,56	1.474.131.517,00	46,19
	DINAS PERDAGANGAN, INDUSTRI, KOPERASI DAN USAHA KELOMPOK MENENGAH	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	8.183.600,00	0,00	0,00	0,00	8.183.600,00	0,00	7.900.000,00	96,53
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	154.141.597,00	0,00	0,00	0,00	154.141.597,00	0,03	53.451.267,00	34,68
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAWASAN INFORMASI	62.121.332,00	42.973.444,00	0,00	0,00	105.094.776,00	0,02	98.411.307,00	93,64
	DINAS PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	179.268.925,00	0,00	0,00	0,00	179.268.925,00	0,03	133.047.191,00	74,22
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		6.046.021.757,00	25.710.780,00	0,00	0,00	6.071.732.537,00	1,07	5.815.165.887,00	95,77
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	2.378.357.494,00	0,00	0,00	0,00	2.378.357.494,00	0,42	2.311.719.833,00	97,20
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	667.650.533,00	0,00	0,00	0,00	667.650.533,00	0,12	564.007.468,00	84,48
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	2.496.923.396,00	25.710.780,00	0,00	0,00	2.522.634.176,00	0,44	2.448.729.095,00	97,07
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	488.164.331,00	0,00	0,00	0,00	488.164.331,00	0,09	475.842.491,00	97,48
	KECAMATAN NUANGAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.926.000,00	0,00	0,00	0,00	14.926.000,00	0,00	14.867.000,00	99,60
7	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		28.576.352.584,00	465.181.531,00	1.258.086.930,00	92.998.070.735,00	123.297.691.780,00	21,63	120.281.138.542,00	97,55
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	2.402.637.275,00	39.554.628,00	0,00	0,00	2.442.191.903,00	0,43	2.367.528.392,00	96,94
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	2.484.301.290,00	0,00	0,00	0,00	2.484.301.290,00	0,44	2.410.808.720,00	97,04
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK	104.784.400,00	0,00	0,00	0,00	104.784.400,00	0,02	104.784.400,00	100,00
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	45.665.600,00	0,00	0,00	0,00	45.665.600,00	0,01	45.080.000,00	98,72
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.299.043.074,00	0,00	0,00	0,00	1.299.043.074,00	0,23	1.162.169.088,00	89,46
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	15.188.297.319,00	378.843.824,00	0,00	0,00	15.567.141.143,00	2,73	14.332.342.148,00	92,07
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.665.657.447,00	0,00	1.258.086.930,00	92.998.070.735,00	95.921.815.112,00	16,83	94.535.587.193,00	98,55
	KECAMATAN NUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	1.962.250.358,00	20.904.384,00	0,00	0,00	1.983.154.742,00	0,35	1.928.868.268,00	97,26
	BADAN KE SATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	2.506.782.157,00	0,00	0,00	0,00	2.506.782.157,00	0,44	2.469.564.818,00	98,52
	BADAN KE SATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5.635.800,00	0,00	0,00	0,00	5.635.800,00	0,00	5.635.800,00	100,00
	BADAN KE SATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	472.278.020,00	0,00	0,00	0,00	472.278.020,00	0,08	472.278.020,00	100,00
	BADAN KE SATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	74.942.000,00	27.878.695,00	0,00	0,00	102.820.695,00	0,02	102.795.695,00	99,98
	BADAN KE SATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	363.079.844,00	0,00	0,00	0,00	363.079.844,00	0,06	343.700.000,00	94,66

*Handwritten signature or initials*



Lampiran 2 Data Stunting

URAIAN	PUSKESMAS								TOTAL	KETERANGAN	
	NUANGAN	MOTONGKAD	TUTUYAN	KOTABUNAN	BUYAT	MODAYAG	MOOAT	MODAYAG BARAT			
<b>Balita</b>											
Laki-Laki	272	323	642	344	231	582	286	573	<b>3253</b>		
Perempuan	270	283	468	297	209	526	225	461	<b>2739</b>		
Total	542	606	1110	641	440	1108	511	1034	<b>5992</b>		
<b>Balita Diukur</b>	508	511	1058	548	400	1077	498	911	<b>5511</b>		
<b>BB/U</b>											
Sangat Kurang	1	8	11	5	16	6	2	5	<b>54</b>		
Kurang	44	37	106	46	65	30	14	18	<b>360</b>		
BB Normal	447	460	895	472	297	1007	450	855	<b>4883</b>		
Risiko Lebih	16	6	46	25	22	34	32	33	<b>214</b>		
<b>TB/U</b>											
Sangat Pendek	5	11	13	8	12	12	5	6	<b>72</b>		
Pendek	21	41	55	50	33	48	34	31	<b>313</b>		
Normal	480	458	989	490	355	1017	459	873	<b>5121</b>		
Tinggi	2	1	1	0	0	0	0	1	<b>5</b>		
<b>BB/TB</b>											
Gizi Buruk	1	0	5	2	0	3	0	0	<b>11</b>		
Gizi Kurang	39	15	60	25	50	18	5	16	<b>228</b>		
Normal	435	470	914	482	309	964	376	824	<b>4774</b>		
Risiko Gizi Lebih	23	14	58	30	30	63	84	53	<b>355</b>		
Gizi Lebih	7	8	19	6	9	23	27	16	<b>115</b>		
Obesitas	3	4	2	3	2	6	6	2	<b>28</b>		
<b>Stunting</b>											
Jumlah	26	52	68	58	45	60	39	37	<b>385</b>	Persentase dari total 5.511 balita yang diukur	
%	5,12	10,18	6,43	10,58	11,25	5,57	7,83	4,06	<b>6,99</b>		
<b>Wasting</b>											
Jumlah	40	15	65	27	50	21	5	16	<b>239</b>		
%	7,87	2,94	6,14	4,93	12,50	1,95	1,00	1,76	<b>4,34</b>		
<b>Underweight</b>											
Jumlah	45	45	117	51	81	36	16	23	<b>414</b>		
%	8,86	8,81	11,06	9,31	20,25	3,34	3,21	2,52	<b>7,51</b>		

Lampiran 3 Belanja Modal Per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

NO	OPD	BELANJA MODAL				
		TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		3.202.045.376,00	8.222.338.632,00		769.257.873,00
2	DINAS KESEHATAN		3.743.731.192,00	1.558.543.662,00		
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	78.875.000,00	312.424.400,00	6.020.661.181,00	41.821.752.674,00	
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN		62.337.378,00			
6	DINAS SOSIAL		9.115.774,00			
7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		14.957.472,00			
8	DINAS KETAHANAN PANGAN		40.464.535,00			
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		110.161.064,00			
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		112.342.180,00			18.850.000,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		72.527.431,00			
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		396.546.000,00	394.149.358,00		
13	DINAS PERHUBUNGAN					
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		630.138.650,00			
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		86.234.736,00			
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH		12.515.602,00			203.437.865,00
17	DINAS PERIKANAN					
18	DINAS PARIWISATA					107.381.400,00
19	DINAS PERTANIAN		12.370.785,00	14.983.102,00	181.719.271,00	
20	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH					
21	SEKRETARIAT DAERAH		1.228.410.914,00			
22	SEKRETARIAT DPRD			32.158.170,00		
23	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		93.866.105,00			
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		324.295.710,00	16.436.236,00		
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		16.351.242,00			
26	INSPEKTORAT DAERAH		79.506.692,00			
27	KECAMATAN KOTABUNAN		70.233.606,00			
28	KECAMATAN TUTUYAN					
29	KECAMATAN NUANGAN		20.900.000,00			
30	KECAMATAN MOTONGKAD		46.498.000,00			

NO	OPD	BELANJA MODAL				
		TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA
31	KECAMATAN MOOAT		13.767.162,00			
32	KECAMATAN MODAYAG					
33	KECAMATAN MODAYAG BARAT		4.041.954,00			
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		27.878.695,00			
<b>J U M L A H</b>		<b>78.875.000,00</b>	<b>10.743.662.655,00</b>	<b>16.259.270.341,00</b>	<b>42.003.471.945,00</b>	<b>1.098.927.138,00</b>

Lampiran 4 Rincian Bagi Hasil

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
1	Tutuyan	Kayumoyondi	9.410.107	9.410.107	0
2	Tutuyan	Tombolikot	9.468.076	9.468.076	0
3	Tutuyan	Tutuyan	10.720.182	10.720.182	0
4	Tutuyan	Togid	12.487.081	12.487.081	(0)
5	Tutuyan	Dodap	8.845.187	8.845.187	0
6	Tutuyan	Dodap Pantai	8.221.739	-	(8.221.739)
7	Tutuyan	Tutuyan II	11.107.565	11.107.565	(0)
8	Tutuyan	Tutuyan III	11.950.743	11.950.743	0
9	Tutuyan	Tombolikot Selatan	9.723.688	9.723.688	(0)
10	Tutuyan	Dodop Mikasa	8.840.847	8.840.847	(0)
11	Kotabunan	Kotabunan	20.031.794	20.031.794	(0)
12	Kotabunan	Buyat	8.377.734	8.377.734	(0)
13	Kotabunan	Bulawan	14.608.520	14.608.520	(0)
14	Kotabunan	Paret	8.984.615	8.984.615	(0)
15	Kotabunan	Bukaka	9.004.974	9.004.974	0
16	Kotabunan	Buyat I	9.084.541	9.084.541	(0)
17	Kotabunan	Buyat II	8.340.724	8.340.724	0
18	Kotabunan	Buyat Selatan	8.935.447	8.935.447	(0)
19	Kotabunan	Buyat Tengah	8.455.931	8.445.931	(10.000)
20	Kotabunan	Buyat Barat	8.807.836	8.807.836	(0)
21	Kotabunan	Bulawan Satu	38.931.333	38.931.333	(0)
22	Kotabunan	Bulawan Dua	19.922.535	19.922.535	0
23	Kotabunan	Kotabunan Selatan	9.039.771	9.039.771	(0)
24	Kotabunan	Kotabunan Barat	21.548.470	21.548.470	0
25	Kotabunan	Paret Timur	13.044.572	13.044.572	0
26	Nuangan	Idumun	8.421.928	8.421.928	0
27	Nuangan	Matabulu	9.103.304	9.103.304	(0)
28	Nuangan	Nuangan	8.393.875	8.393.875	(0)
29	Nuangan	Bai	9.265.445	9.265.445	(0)
30	Nuangan	Jiko Belanga	8.413.637	8.413.637	(0)
31	Nuangan	Nuangan I	8.628.193	8.628.193	(0)
32	Nuangan	lyok	8.964.664	8.964.664	(0)
33	Nuangan	Loyow	8.559.499	8.559.499	0
34	Nuangan	Matabulu Timur	8.724.882	8.724.882	(0)

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
35	Nuangan	Nuangan Barat	8.608.047	8.608.047	0
36	Nuangan	Nuangan Selatan	8.443.713	8.443.713	0
37	Modayag	Modayag	8.904.517	8.904.517	0
38	Modayag	Liberia	8.492.626	6.000.000	(2.492.626)
39	Modayag	Purworejo	9.035.743	9.035.743	0
40	Modayag	Buyandi	9.409.128	9.409.128	(0)
41	Modayag	Tobongon	9.490.029	9.490.029	0
42	Modayag	Lanut	9.743.324	9.743.324	(0)
43	Modayag	Badaro	8.164.873	8.164.873	(0)
44	Modayag	Modayag Barat	8.238.335	8.238.335	0
45	Modayag	Modayag Timur	8.983.852	8.983.852	0
46	Modayag	Purworejo Timur	8.684.965	8.684.965	(0)
47	Modayag	Liberia Timur	8.744.619	8.744.619	(0)
48	Modayag	Purworejo Tengah	8.028.653	8.028.653	0
49	Modayag	Candi Rejo	8.365.126	8.365.126	(0)
50	Modayag	Sumber Rejo	8.670.455	8.670.455	0
51	Modayag Barat	Moyongkota	8.282.239	8.282.239	(0)
52	Modayag Barat	Bangunan Wuwuk	8.397.213	8.397.213	0
53	Modayag Barat	Bangkudai Barat	8.696.704	8.696.704	0
54	Modayag Barat	Bongkudai	8.711.360	8.711.360	0
55	Modayag Barat	Moyongkota Baru	8.875.677	8.875.677	(0)
56	Modayag Barat	Moonow	8.254.074	8.254.074	0
57	Modayag Barat	Inaton	8.410.482	8.410.482	0
58	Modayag Barat	Bangunan Wuwuk Timur	8.332.545	-	(8.332.545)
59	Modayag Barat	Pinonobatuan	8.568.761	8.568.761	0
60	Modayag Barat	Tangaton	7.970.160	7.970.160	0
61	Motongkad	Motongkad Utara	10.115.758	10.115.758	0
62	Motongkad	Motongkad	8.608.524	8.608.524	0
63	Motongkad	Motongkad Selatan	8.229.503	8.229.503	(0)
64	Motongkad	Atoga	8.912.308	8.912.308	0
65	Motongkad	Atoga Timur	8.363.185	8.363.185	0
66	Motongkad	Motongkad Tengah	7.976.307	7.976.307	(0)
67	Motongkad	Molobog	8.534.906	8.534.906	(0)
68	Motongkad	Molobog Barat	8.744.437	8.744.437	(0)
69	Motongkad	Jiko	8.459.933	8.459.933	0

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
70	Motongkad	Jiko Utara	8.968.274	8.968.274	(0)
71	Motongkad	Molobog Timur	7.925.437	7.925.437	(0)
72	Mooat	Moat	10.767.925	10.767.925	0
73	Mooat	Bongkudai Selatan	8.009.270	8.009.270	0
74	Mooat	Bongkudai Baru	7.987.427	7.987.427	(0)
75	Mooat	Bongkudai Utara	8.052.669	8.052.669	(0)
76	Mooat	Bongkudai Timur	8.288.926	8.288.926	0
77	Mooat	Guaan	8.247.382	7.740.268	(507.114)
78	Mooat	Mototompian	7.890.860	-	(7.890.860)
79	Mooat	Mokitompia	7.851.820	-	(7.851.820)
80	Mooat	Kokapoi	8.061.698	8.061.698	0
81	Mooat	Kokapoi Timur	7.839.746	7.839.746	(0)
<b>Total</b>			<b>788.712.958</b>	<b>753.406.250</b>	<b>(35.306.708)</b>

*Handwritten signature/initials*

Lampiran 5 Rincian Alokasi Dana Desa (ADD)

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
1	Tutuyan	Kayumoyondi	437.697.091	437.697.090	(1)
2	Tutuyan	Tombolikat	464.697.091	464.697.091	-
3	Tutuyan	Tutuyan	503.097.091	503.097.091	-
4	Tutuyan	Togit	539.097.055	539.097.055	-
5	Tutuyan	Dodap	508.497.091	508.497.090	(1)
6	Tutuyan	Dodap Pantai	392.097.091	392.097.090	(1)
7	Tutuyan	Tutuyan II	461.097.091	461.097.091	-
8	Tutuyan	Tutuyan III	476.697.091	476.697.090	(1)
9	Tutuyan	Tombolikat Selatan	459.297.091	459.297.090	(1)
10	Tutuyan	Dodap Mikasa	376.497.091	376.497.090	(1)
11	Kotabunan	Kotabunan	444.297.091	444.297.090	(1)
12	Kotabunan	Buyat	416.097.091	416.097.090	(1)
13	Kotabunan	Bulawan	417.297.091	417.297.090	(1)
14	Kotabunan	Paret	413.697.091	413.697.090	(1)
15	Kotabunan	Bukaka	354.297.091	356.997.090	2.699.999
16	Kotabunan	Buyat I	369.297.091	369.297.090	(1)
17	Kotabunan	Buyat II	372.297.091	372.297.090	(1)
18	Kotabunan	Buyat Selatan	404.097.091	404.097.091	-
19	Kotabunan	Buyat Tengah	371.697.091	371.697.090	(1)
20	Kotabunan	Buyat Barat	410.097.091	410.097.090	(1)
21	Kotabunan	Bulawan I	413.697.091	413.697.090	(1)
22	Kotabunan	Bulawan II	420.897.091	420.897.090	(1)
23	Kotabunan	Kotabunan Selatan	398.697.091	398.697.090	(1)
24	Kotabunan	Kotabunan Barat	384.297.091	384.297.090	(1)
25	Kotabunan	Paret Timur	390.297.091	390.297.091	-
26	Nuangan	Idumun	368.697.091	368.697.090	(1)
27	Nuangan	Matabulu	388.497.091	388.497.090	(1)
28	Nuangan	Nuangan	390.297.091	390.297.090	(1)
29	Nuangan	Bai	399.897.091	399.897.090	(1)
30	Nuangan	Jiko Belanga	416.097.091	416.097.090	(1)
31	Nuangan	Nuangan I	396.297.091	396.297.090	(1)
32	Nuangan	lyok	341.697.091	341.697.090	(1)
33	Nuangan	Loyow	380.697.091	380.697.090	(1)
34	Nuangan	Matabulu Timur	389.097.091	389.097.091	-

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
35	Nuangan	Nuangan Barat	383.097.091	383.142.091	45.000
36	Nuangan	Nuangan Selatan	383.097.091	383.097.091	-
37	Modayag	Modayag	580.497.091	580.497.090	(1)
38	Modayag	Liberia	469.497.091	469.497.090	(1)
39	Modayag	Purworejo	510.297.091	510.297.090	(1)
40	Modayag	Buyandi	464.097.091	464.097.090	(1)
41	Modayag	Tobongon	510.897.091	510.897.090	(1)
42	Modayag	Lanut	503.697.091	503.697.090	(1)
43	Modayag	Badaro	374.697.091	374.697.090	(1)
44	Modayag	Modayag Barat/II	496.497.091	496.497.090	(1)
45	Modayag	Modayag Timur/III	584.697.091	584.697.090	(1)
46	Modayag	Purworejo Timur	432.297.091	432.297.090	(1)
47	Modayag	Liberia Timur	474.297.091	474.297.090	(1)
48	Modayag	Purworejo Tengah	495.297.091	495.297.090	(1)
49	Modayag	Candi Rejo	362.697.091	362.697.090	(1)
50	Modayag	Sumber Rejo	360.897.154	360.897.155	1
51	Modayag Barat	Moyongkota	453.897.091	453.897.091	-
52	Modayag Barat	Bangunan Wuwuk	463.497.091	463.497.090	(1)
53	Modayag Barat	Bongkudai Barat	487.497.091	487.497.090	(1)
54	Modayag Barat	Bongkudai	492.297.091	492.297.090	(1)
55	Modayag Barat	Moyongkota Baru	557.697.091	557.697.090	(1)
56	Modayag Barat	Moonow	358.497.091	358.497.090	(1)
57	Modayag Barat	Inaton	379.497.091	379.479.090	(18.001)
58	Modayag Barat	Bangunan Wuwuk Timur	355.497.091	355.497.090	(1)
59	Modayag Barat	Pinonobatan	479.697.091	479.697.091	-
60	Modayag Barat	Tangaton	353.697.091	353.697.090	(1)
61	Motongkad	Motongkad Utara	412.497.091	412.447.091	(50.000)
62	Motongkad	Motongkad	426.297.091	426.297.090	(1)
63	Motongkad	Motongkad Selatan	354.897.091	354.897.090	(1)
64	Motongkad	Atoga	380.097.091	380.097.090	(1)
65	Motongkad	Atoga Timur	401.697.091	401.697.090	(1)
66	Motongkad	Motongkad Tengah	364.497.091	364.497.091	-
67	Motongkad	Molobog	386.697.091	386.697.090	(1)
68	Motongkad	Molobog Barat	362.697.091	362.697.090	(1)



NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
69	Motongkad	Jiko	363.897.091	363.897.091	-
70	Motongkad	Jiko Utara	353.097.091	353.097.090	(1)
71	Motongkad	Molobog Timur	340.497.091	340.497.091	-
72	Mooat	Mooat	485.097.091	485.097.090	(1)
73	Mooat	Bongkudai Selatan	447.297.091	447.297.090	(1)
74	Mooat	Bongkudai Baru	408.297.091	408.297.090	(1)
75	Mooat	Bongkudai Utara	486.297.091	486.297.090	(1)
76	Mooat	Bongkudai Timur	374.697.091	374.697.090	(1)
77	Mooat	Guaan	435.297.091	435.297.090	(1)
78	Mooat	Mototompian	394.497.091	394.497.090	(1)
79	Mooat	Mokitompia	412.497.091	412.497.090	(1)
80	Mooat	Kokapoi	432.297.091	432.297.090	(1)
81	Mooat	Kokapoi Timur	339.297.091	339.297.090	(1)
<b>Total</b>			<b>34.201.864.398</b>	<b>34.204.541.334</b>	<b>2.676.936</b>

*Handwritten signature/initials*

Lampiran 6 Rincian Dana Desa (DD)

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
1	Tutuyan	Kayumoyondi	644.443.000	644.443.000	-
2	Tutuyan	Tombolikat	626.049.000	626.049.000	-
3	Tutuyan	Tutuyan	705.247.000	705.247.000	-
4	Tutuyan	Togid	712.678.000	712.678.000	-
5	Tutuyan	Dodap	957.762.000	957.762.000	-
6	Tutuyan	Dodap Pantai	904.976.000	904.976.000	-
7	Tutuyan	Tutuyan II	720.029.000	720.029.000	-
8	Tutuyan	Tutuyan III	722.874.000	722.874.000	-
9	Tutuyan	Tombolikat Selatan	885.288.000	885.288.000	-
10	Tutuyan	Dodop Mikasa	680.271.000	680.271.000	-
11	Kotabunan	Kotabunan	790.215.000	790.215.000	-
12	Kotabunan	Buyat	679.638.000	679.638.000	-
13	Kotabunan	Bulawan	738.350.000	738.350.000	-
14	Kotabunan	Paret	892.967.000	892.967.000	-
15	Kotabunan	Bukaka	643.660.000	643.660.000	-
16	Kotabunan	Buyat I	659.708.000	659.708.000	-
17	Kotabunan	Buyat II	672.849.000	672.849.000	-
18	Kotabunan	Buyat Selatan	639.827.000	639.827.000	-
19	Kotabunan	Buyat Tengah	680.441.000	680.441.000	-
20	Kotabunan	Buyat Barat	688.999.000	688.999.000	-
21	Kotabunan	Bulawan Satu	658.003.000	658.003.000	-
22	Kotabunan	Bulawan Dua	675.130.000	675.130.000	-
23	Kotabunan	Kotabunan Selatan	652.596.000	652.596.000	-
24	Kotabunan	Kotabunan Barat	663.708.000	663.708.000	-
25	Kotabunan	Paret Timur	670.896.000	670.896.000	-
26	Nuangan	Idmun	706.062.000	706.062.000	-
27	Nuangan	Matabulu	913.834.000	913.834.000	-
28	Nuangan	Nuangan	677.080.000	677.080.000	-
29	Nuangan	Bai	706.792.000	706.792.000	-
30	Nuangan	Jiko Belanga	722.261.000	722.261.000	-
31	Nuangan	Nuangan I	650.160.000	650.160.000	-
32	Nuangan	Iyok	674.758.000	674.758.000	-
33	Nuangan	Loyow	678.938.000	678.938.000	-
34	Nuangan	Matabulu Timur	777.636.000	777.636.000	-

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
35	Nuangan	Nuangan Barat	686.927.000	686.927.000	-
36	Nuangan	Nuangan Selatan	664.539.000	664.539.000	-
37	Modayag	Modayag	809.386.000	809.386.000	-
38	Modayag	Liberia	644.428.000	644.428.000	-
39	Modayag	Purworejo	642.723.000	642.723.000	-
40	Modayag	Buyandi	631.254.000	631.254.000	-
41	Modayag	Tobongon	695.240.000	695.240.000	-
42	Modayag	Lanut	760.783.000	760.783.000	-
43	Modayag	Badaro	607.246.000	607.246.000	-
44	Modayag	Modayag Barat	1.013.254.000	1.013.254.000	-
45	Modayag	Modayag Timur	760.681.000	760.681.000	-
46	Modayag	Purworejo Timur	875.990.000	875.990.000	-
47	Modayag	Liberia Timur	662.602.000	662.602.000	-
48	Modayag	Purworejo Tengah	639.174.000	639.174.000	-
49	Modayag	Candi Rejo	648.269.000	648.269.000	-
50	Modayag	Sumber Rejo	583.186.000	583.186.000	-
51	Modayag Barat	Moyongkota	688.127.000	688.127.000	-
52	Modayag Barat	Bangunan Wuwuk	620.062.000	620.062.000	-
53	Modayag Barat	Bangkudai Barat	652.039.000	652.039.000	-
54	Modayag Barat	Bongkudai	696.983.000	696.983.000	-
55	Modayag Barat	Moyongkota Baru	732.174.000	732.174.000	-
56	Modayag Barat	Moonow	665.145.000	665.145.000	-
57	Modayag Barat	Inaton	635.224.000	635.224.000	-
58	Modayag Barat	Bangunan Wuwuk Timur	898.674.000	898.674.000	-
59	Modayag Barat	Pinonobatuan	893.771.000	893.771.000	-
60	Modayag Barat	Tangaton	650.680.000	650.680.000	-
61	Motongkad	Motongkad Utara	724.086.000	724.086.000	-
62	Motongkad	Motongkad	680.412.000	680.412.000	-
63	Motongkad	Motongkad Selatan	878.460.000	878.460.000	-
64	Motongkad	Atoga	936.422.000	936.422.000	-
65	Motongkad	Atoga Timur	616.595.000	616.595.000	-
66	Motongkad	Motongkad Tengah	626.581.000	626.581.000	-
67	Motongkad	Molobog	966.902.000	966.902.000	-
68	Motongkad	Molobog Barat	685.077.000	685.077.000	-
69	Motongkad	Jiko	676.773.000	676.773.000	-
70	Motongkad	Jiko Utara	677.785.000	677.785.000	-

*Handwritten signature/initials*

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
71	Motongkad	Molobog Timur	640.414.000	640.414.000	-
72	Mooat	Moat	645.552.000	645.552.000	-
73	Mooat	Bongkudai Selatan	618.071.000	618.071.000	-
74	Mooat	Bongkudai Baru	656.571.000	656.571.000	-
75	Mooat	Bongkudai Utara	673.857.000	673.857.000	-
76	Mooat	Bongkudai Timur	590.688.000	590.688.000	-
77	Mooat	Guan	914.628.000	914.628.000	-
78	Mooat	Mototompian	682.584.000	682.584.000	-
79	Mooat	Mokitompia	694.252.000	694.252.000	-
80	Mooat	Kokapoi	766.109.000	766.109.000	-
81	Mooat	Kokapoi Timur	676.884.000	676.884.000	-
<b>Total</b>			<b>57.961.389.000</b>	<b>57.961.389.000</b>	<b>-</b>

Lampiran 7 Piutang Pajak Daerah – Pajak Reklame

NO	NAMA WAJIB PAJAK	NILAI PIUTANG	TAHUN PIUTANG
<b>PIUTANG PAJAK REKLAME</b>		<b>18.489.250,00</b>	
1	WARUNG CICIN	94.500,00	2016
2	RM. YUDISTIRA	143.750,00	2016
3	WARUNG HERRY	143.750,00	2016
4	WARUNG NALIA	94.500,00	2016
5	GILINGAN PADI	143.750,00	2016
6	WARUNG ALYA	143.750,00	2016
7	WARUNG FARADILA	49.250,00	2016
8	WARUNG BILI	143.750,00	2016
9	KOP. KARYA MARGA	143.750,00	2016
10	BUTUK JB SHOP	143.750,00	2016
11	TOKO ALFIN	143.750,00	2016
12	WARUNG IVAN	94.500,00	2016
13	WARUNG FIKRI	143.750,00	2016
14	WARUNG FALTRI	143.750,00	2016
15	WARUNG BAYU	143.750,00	2016
16	WARUNG GAUL	94.500,00	2016
17	PANGKALAN MINYAK TANAH	143.750,00	2016
18	WARUNG SITI	143.750,00	2016
19	WARUNG ZAKI	143.750,00	2016
20	WARUNG NINGSI	143.750,00	2016
21	WARUNG INTAN	143.750,00	2016
22	KOPERASI KARYA USAHA	143.750,00	2016
23	WARUNG IJA	143.750,00	2016
24	WARUNG TANI	143.750,00	2016
25	WARUNG ASIS	143.750,00	2016
26	WARUNG ARIEL	143.750,00	2016
27	KOPERASI KARYA MARGA	143.750,00	2016
28	WARUNG SANDA	143.750,00	2016
29	TOKO RIZKY MOTOR	143.750,00	2016
30	TOKO AGIS	143.750,00	2016
31	WARUNG SALSA	143.750,00	2016
32	WARUNG SALSABILA	143.750,00	2016
33	ZULKIFLI KONIO	143.750,00	2016
34	TOKO BOBAKAN	143.750,00	2016
35	DEPOT FRES LOTUNG	143.750,00	2016
36	WARUNG MEYSKE	143.750,00	2016
37	WARUNG ASKA	143.750,00	2016
38	WARUNG VAYZAH	143.750,00	2016
39	WARUNG KISYA	143.750,00	2016
40	WARUNG NASRI	143.750,00	2016
41	WARUNG PUTRA	17.850,00	2016
42	WARUNG JALA	143.750,00	2016
43	WARUNG FAUZAN	143.750,00	2016
44	WARUNG GANESA	143.750,00	2016
45	CV. MEGATECH ESTETIKA	405.000,00	2016
46	CV. LARAS ABADI	261.250,00	2016
47	RUMAH MAKAN LESTARI	143.750,00	2016
48	PLATINUM CELL	143.750,00	2016
49	RM. PELANGI	143.750,00	2016
50	WARUNG KRISTI	143.750,00	2016
51	WARUNG BERLIAN	143.750,00	2016
52	RUMAH MAKAN VERO	143.750,00	2016
53	WARUNG VALENT	143.750,00	2016
54	DEPOT EKA	94.500,00	2016
55	WARUNG WINDA	143.750,00	2016
56	WARUNG NUR	94.500,00	2016
57	WARUNG ANUGERAH	94.500,00	2016
58	AZAM ASARI	94.500,00	2016
59	UD. MAESAAN WAYA	143.750,00	2016
60	WARUNG NUR	94.500,00	2016

NO	NAMA WAJIB PAJAK	NILAI PIUTANG	TAHUN PIUTANG
61	WARUNG ANUGERAH	94.500,00	2016
62	AZAM ASARI	94.500,00	2016
63	UD. SINAR LANUT	143.750,00	2016
64	KSP. KARYA USAHA	143.750,00	2016
65	WARUNG WULANDARAI	94.500,00	2016
66	WARUNG REGINA	143.750,00	2016
67	KIOS GALAXI	94.500,00	2016
68	KIOS RINGGO	143.750,00	2016
69	KIOS RIAN	143.750,00	2016
70	DEPOT AIR MINUM CHIKA	143.750,00	2016
71	WARUNG BARBIE	143.750,00	2016
72	CLAUDIA CELL	143.750,00	2016
73	CHARIS CELL	94.500,00	2016
74	WARUNG MONDE	143.750,00	2016
75	WARUNG INTI ESTER	143.750,00	2016
76	CLAY CELL	143.750,00	2016
77	WARUNG REZA	143.750,00	2016
78	VARNEO	143.750,00	2016
79	WARUNG SINTA	143.750,00	2016
80	WARUNG ANTO	143.750,00	2016
81	WARUNG FERNANDO	143.750,00	2016
82	PANGKALAN MINYAK TANAH	143.750,00	2016
83	WARUNG JUAN	143.750,00	2016
84	WARUNG FANA	143.750,00	2016
85	YANCELL	143.750,00	2016
86	WARUNG FARADILA	143.750,00	2016
87	TOKO LEONY	143.750,00	2016
88	GAVINE CELL	143.750,00	2016
89	WARUNG GABBY CELL	143.750,00	2016
90	WARUNG FAWWAS	143.750,00	2016
91	WARUNG HARIAN	143.750,00	2016
92	WARUNG RESTI	143.750,00	2016
93	COLOMBUS CAB. MODAYAG	143.750,00	2016
94	KIOS DAMATOLEN	143.750,00	2016
95	WARUNG OPTIK	143.750,00	2016
96	KIOS NADA	143.750,00	2016
97	TOKO DRAGON CELL COMP	143.750,00	2016
98	TOKO BRILIYAN	143.750,00	2016
99	WARUNG PANJI	143.750,00	2016
100	WARUNG SIDENDENG INDAH	143.750,00	2016
101	WARUNG DONLY	143.750,00	2016
102	WARUNG BINTANG	143.750,00	2016
103	GILINGAN PADI	143.750,00	2016
104	KIOS WARDIA	94.500,00	2016
105	WARUNG KRISNA	94.500,00	2016
106	GILINGAN KOPI RIKA	94.500,00	2016
107	BENGKEL NADIA	143.750,00	2016
108	SALON OASIS	94.500,00	2016
109	SUMBER REJEKI	94.500,00	2016
110	WARUNG ADITYA	94.500,00	2016
111	WARUNG JEMMY	143.750,00	2016
112	WARUNG KIRAN	126.650,00	2016
113	ESA KIOS	94.500,00	2016
114	KIOS DELI	94.500,00	2016
115	WARUNG IWAN	94.500,00	2016
116	WARUNG FAJAR	143.750,00	2016
117	STUDIO FOTO ZAHIRA	94.500,00	2016
118	KIOS MUTIARA	94.500,00	2016
119	GILINGAN PADI	143.750,00	2016
120	GILINGAN USAHA TANI	143.750,00	2016
121	WARUNG AGUNG	94.500,00	2016
122	GILINGAN AGUNG	143.750,00	2016
123	WARUNG MICHEL	94.500,00	2016

NO	NAMA WAJIB PAJAK	NILAI PIUTANG	TAHUN PIUTANG
124	WARUNG RIZKY CELL	94.500,00	2016
125	WARUNG JEMY	94.500,00	2016
126	WRUNG AIKO	94.500,00	2016
127	WARUNG DANIA	143.750,00	2016
128	BENGKEL JERICO	94.500,00	2016
129	WARUNG ALFRIS	94.500,00	2016
130	WARUNG ALFA	94.500,00	2016
131	GILINGAN PODOMORO	143.750,00	2016
132	WARUNG MK	94.500,00	2016
133	UD. USAHA BERSAMA	143.750,00	2016
134	GILINGAN HAJAR	143.750,00	2016
135	WARUNG SALSA	94.500,00	2016
136	WARUNG AYU	94.500,00	2016
137	WARUNG AGUNG	94.500,00	2016
138	GILINGAN PADI	143.750,00	2016
139	WARUNG VIVI	94.500,00	2016
140	WARUNG AKSO	94.500,00	2016
141	WARUNG ILHAM	143.750,00	2016

*Handwritten signature*

*Lampiran 8 Piutang Pajak Daerah – Pajak Penerangan Jalan Umum*

NO	NAMA WAJIB PAJAK	NILAI PIUTANG	TAHUN PIUTANG
PIUTANG PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM (PPJU)		411.026.360,00	
1	PT PLN (Persero)	411.026.360,00	2022



Lampiran 9 Piutang Pajak Daerah – Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

NO	NAMA WAJIB PAJAK	NILAI PIUTANG	TAHUN PIUTANG
<b>PIUTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b>		<b>30.259.500,00</b>	
1	CV AGAPE	9.835.000,00	2014
2	CV TALENTA	26.000,00	2014
3	CV PUTRA KARYA BOLTIM	215.000,00	2014
4	CV HARAPAN NIAGA KENCANA	784.000,00	2014
5	PT CAHAYA CHRISTAL TOTABUAN	16.240.000,00	2015
6	CV CITRA MANDIRI	3.159.500,00	2018

Lampiran 10 Piutang Pajak Daerah – Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

NO	NAMA WAJIB PAJAK	NILAI PIUTANG	TAHUN PIUTANG
<b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN</b>		<b>151.861.178,00</b>	
1	PIUTANG PBB-P2	3.994.138,00	2014
2	JEMMI MUJAYA	132.500,00	2017
3	NELTJE MOWOKOL	132.500,00	2017
4	VINSEN TIELUNG	265.000,00	2017
5	VINSEN TIELUNG	265.000,00	2017
6	JEMI REPI	369.200,00	2017
7	MOH. HUSAIN EMBO	42.620,00	2017
8	HIS D LASABUDA	1.500.000,00	2018
9	HJI SERLI MODEONG	1.543.000,00	2018
10	HI. RAMADHAN KADI	1.000.000,00	2018
11	SUDIBIO LANGKE	1.040.000,00	2018
12	TABIUN MODEONG	1.040.000,00	2018
13	ABUDI SAMLAN	1.040.000,00	2018
14	SULAEMAN D. LASABUDA	1.040.000,00	2018
15	JAMIA PAPUTUNGAN	1.105.000,00	2018
16	KALSUM ALHABSY	1.040.000,00	2018
17	BENNY S. SAHE	1.010.000,00	2018
18	LUCIA B. MBAYANG	3.576.000,00	2018
19	ANTONIUS MBAYANG	1.962.000,00	2018
20	ELEN PATRAS	1.514.192,00	2018
21	ARNI KUMOLONTANG	1.040.000,00	2018
22	H.G WAWORUNTU	1.200.000,00	2018
23	ABDUL MALIK HASAN	1.170.000,00	2018
24	PT. KHARISMA MITRA SEJAJAR	3.333.148,00	2018
25	BENNY S. SAHE	1.005.330,00	2018
26	ARIE LALUYAN	4.040.000,00	2018
27	ARIE LALUYAN	2.290.000,00	2018
28	ROYKE LONTOH	1.717.500,00	2018
29	ROYKE LONTOH	2.290.000,00	2018
30	ROYKE LONTOH	2.290.000,00	2018
31	MIMI DEYSI RENGGUAN	1.135.680,00	2018
32	ABDURAHMAN AMBARAK	2.000.000,00	2018
33	SUHENDRO BOROMA	1.325.000,00	2018
34	CHONSTAN TIEN M.	1.000.000,00	2018
35	HENGKY MANGARONDA	1.000.000,00	2018
36	MARTIN SABANARI	1.000.000,00	2018
37	FUAD LANDJAR	1.300.000,00	2018
38	TEDDY KOROMPIS	2.600.000,00	2018
39	TEDDY KOROMPIS	1.000.000,00	2018
40	SAKINA DJINDAN	1.040.000,00	2018
41	AGUSALIM R. ABRAHAM	2.800.000,00	2018
42	AGUSALIM R. ABRAHAM	2.400.000,00	2018
43	AGUSALIM R. ABRAHAM	1.400.000,00	2018
44	PT. HGU LONSIOW	6.756.000,00	2018
45	VALENTINO A. BASTIAAN	1.768.172,00	2018
46	HENDRA	1.040.000,00	2018
47	DJASIA MAMONTO	1.820.000,00	2018
48	MAIKEL MOH. MAMONTO	1.602.500,00	2018
49	DJEN MOKOAGOW	5.804.700,00	2018
50	YACOBUS KAMASAIH	1.110.000,00	2018
51	TOKOLANG MAMONTO	1.090.250,00	2018
52	IRSAM PANGALIMA	1.061.210,00	2018
53	ITA MAMONTO	1.166.250,00	2018
54	IB PAKAYA	1.105.000,00	2018
55	SUMARDIA MODEONG	1.011.705,00	2018
56	JANTER J MALINGKAS	2.757.250,00	2018
57	OLGA LUMINTANG	137.540,00	2020
58	DARWA GANI,SE	56.131,00	2020
59	YUNUS POTABUGA	82.239,00	2020
60	IDA LAILI MANOPPO	57.839,00	2020

NO	NAMA WAJIB PAJAK	NILAI PIUTANG	TAHUN PIUTANG
61	ACHMAD SULEMAN	161.165,00	2020
62	IR. MOHAMMAD ASSEGAF	30.000,00	2020
63	JANCE TAWAS	30.000,00	2020
64	ARIE LALUJAN	33.109,00	2020
65	ARIE LALUJAN	33.109,00	2020
66	BENI S. SAHE	87.900,00	2020
67	RAYMOND HALIM	30.000,00	2020
68	RAYMOND HALIM	82.350,00	2020
69	HEYTI LIGAWA	30.000,00	2020
70	SAPTAYANI PELEALU	30.000,00	2020
71	HI. MOH ASSEGAF	159.750,00	2020
72	BENI S. SAHE	81.330,00	2020
73	BENI S. SAHE	87.900,00	2020
74	ALEX TANDAYU	55.700,00	2020
75	DESY RENGGUAN	115.800,00	2020
76	NIKO BANGKIL	87.800,00	2020
77	ROYKE E. LUMINTANG	50.150,00	2020
78	ARIE LALUJAN	30.000,00	2020
79	ARIE LALUJAN	30.000,00	2020
80	ARIE LALUJAN	591.784,00	2020
81	YANCE TAWAS	30.000,00	2020
82	RENLY BREHO	30.000,00	2020
83	BENI S. SAHE	60.000,00	2020
84	NIDIA OKTAVIA	30.000,00	2020
85	DESY RENGGUAN	124.800,00	2020
86	IDUL DAMOPOLII	30.000,00	2020
87	BENI S. SAHE	60.000,00	2020
88	DR. FOSMAN SAMOSIR	30.000,00	2020
89	SUTRI ABDURAHMAN	50.000,00	2020
90	SUTRI ABDURAHMAN	50.000,00	2020
91	IRA SULEMAN	140.000,00	2020
92	SARMAN MONDE	100.000,00	2020
93	LENTIAS WELLO	50.000,00	2020
94	HARIS MOKODOMPIT	140.000,00	2020
95	JAMALUDIN SULEMAN	60.000,00	2020
96	MUHIDIN MAMONTO	50.000,00	2020
97	MUHIDIN MAMONTO	40.000,00	2020
98	YUNUS POTABUGA	60.000,00	2020
99	DONAL MOKOAGOW	30.000,00	2020
100	FAHMI MOKOGINTA	100.000,00	2020
101	JAMALIA MOPIO	30.000,00	2020
102	ISHAK SAMBALI	50.000,00	2020
103	MURSIDI KUMAAT	30.000,00	2020
104	SAIPUL MOPIO	100.000,00	2020
105	ABDUL FATAH MAKALALAG	100.000,00	2020
106	DJIBRAN KADENGGANG	50.000,00	2020
107	TUMUNDO MAMONTO	140.000,00	2020
108	ELIAS DAME	100.000,00	2020
109	HIBOR SAMBUNGAN	40.000,00	2020
110	ABETOKE LEMSEHE	30.000,00	2020
111	MUSTARIO SIHUR	300.000,00	2020
112	ALFIANI WAHONGAN	30.000,00	2020
113	LENTIAS WELLO	100.000,00	2020
114	SELMUS	50.000,00	2020
115	KONSTAN LAHEA	40.000,00	2020
116	TIMOTIUS SUMENDAP	800.000,00	2020
117	F.A. BAZMUL	30.000,00	2020
118	HJ. IKA BAWIYAS	42.030,00	2020
119	HJ. IKA BAWIYAS	53.450,00	2020
120	HJ. IKA BAWIYAS	50.000,00	2020
121	HJ. IKA BAWIYAS	90.000,00	2020
122	RISMAN ANTARIA	80.580,00	2020
123	H.M HARUNA	140.000,00	2020

*Handwritten signature/initials*

NO	NAMA WAJIB PAJAK	NILAI PIUTANG	TAHUN PIUTANG
124	HJ. LOMAT MANOPPO	100.000,00	2020
125	MALUN LOGOR	740.000,00	2020
126	JAMIL PAPUTUNGAN	40.000,00	2020
127	ANUAR MAMONTO	40.000,00	2020
128	ANUAR PODUNGGE	50.000,00	2020
129	AMRI KEMBI	30.000,00	2020
130	DJIBRAN KADENGGANG	30.000,00	2020
131	FARUK MANOPPO	100.000,00	2020
132	HIPDAR MAMONTO	40.000,00	2020
133	MUSTARIO SIHUR	270.950,00	2020
134	REKI LAHOPE	87.631,00	2020
135	BENI S. SAHE	30.000,00	2020
136	WARDANI PAPUTUNGAN	40.000,00	2020
137	GEORGE Y. LUKAS	165.000,00	2020
138	WANTI ILLY	30.000,00	2020
139	ESTER ILLY	30.000,00	2020
140	BURHAN PANGALIMA	50.000,00	2020
141	HENGKY TOMBOKAN/STEVEN TURANGAN	51.730,00	2020
142	RATNAWATI	30.000,00	2020
143	NURSIWIN DUNGGIO	100.000,00	2020
144	BENI S. SAHE	50.000,00	2020
145	HENGKY TOMBOKAN/STEVEN TURANGAN	30.000,00	2020
146	BENI S. SAHE	30.000,00	2020
147	BENI S. SAHE	30.000,00	2020
148	SELMUS	50.000,00	2020
149	HERI MAKALALAG	100.000,00	2020
150	HERI LIGAWA	100.000,00	2020
151	UMPO MANOPPO	30.000,00	2020
152	FAHMI BACHWAN	30.000,00	2020
153	ELIAS DAME	100.000,00	2020
154	RUSLI PELA	100.000,00	2020
155	HIBOR SAMBUNGAN	100.000,00	2020
156	HIBOR SAMBUNGAN	100.000,00	2020
157	PETRUS TALU	100.000,00	2020
158	PETRUS TALU	100.000,00	2020
159	PETRUS TALU	100.000,00	2020
160	PETRUS TALU	200.000,00	2020
161	MUSTARIO SIHUR	50.000,00	2020
162	RONI KARUNDENG	140.000,00	2020
163	JHONI LANGUJU	40.000,00	2020
164	LENTIAS WELLO	90.000,00	2020
165	ELIAS DAME	90.000,00	2020
166	SOPYAN LAHENGKO	40.000,00	2020
167	BAHTIAR PAPUTUNGAN	40.000,00	2020
168	DJIBRAN KADENGGANG	50.000,00	2020
169	DAVID MANANSANG	47.520,00	2020
170	EGRI LAHENGKO	30.000,00	2020
171	EDISON LAHEBA	40.000,00	2020
172	FAHMI MOKOGINTA	100.000,00	2020
173	FERDINAN BAWOLE	100.000,00	2020
174	FERDINAN BAWOLE	100.000,00	2020
175	FERDINAN BAWOLE	100.000,00	2020
176	HERDI DAMOPOLII	50.000,00	2020
177	JOHAN ARONDA	40.000,00	2020
178	JHONI APAI	40.000,00	2020
179	NOVAL MOPIO	140.000,00	2020
180	NURSIWIN DUNGGIO	100.000,00	2020
181	SELMUS	40.000,00	2020
182	TEDI MOKOGINTA	40.000,00	2020
183	MARSAN AWALA	70.000,00	2020
184	YOS PANEMBUNAN	140.000,00	2020
185	YOS PANEMBUNAN	75.000,00	2020
186	YOS PANEMBUNAN	100.000,00	2020
187	GERSON MARAMIS	100.000,00	2020

*Handwritten signature*

NO	NAMA WAJIB PAJAK	NILAI PIUTANG	TAHUN PIUTANG
188	YANCE TAWAS	490.000,00	2020
189	HUT MANANGGEL	100.000,00	2020
190	SUMARJOLA KARTOREJE	40.000,00	2020
191	ANDRIAS SIHURE	140.000,00	2020
192	NURSIWIN DUNGGIO	300.000,00	2020
193	RATNA WATI	224.257,00	2020
194	NURJANA MOKOAGOW	30.000,00	2020
195	ABEKA SIMBALA	100.280,00	2020
196	SUNARYO SIHUR	40.000,00	2020
197	SALDAN MAKALUNSENGE	100.000,00	2020
198	RUSMIN POTABUGA	100.000,00	2020
199	MANGALO TINE	190.000,00	2020
200	SAP PAPARANG	30.000,00	2020
201	ANUAR PODUNGGE	100.000,00	2020
202	FRANGKI MANOI	60.000,00	2020
203	FRANGKI MANOI	70.000,00	2020
204	RAHFAN MOKOGINTA	50.000,00	2020
205	MARSAN	50.000,00	2020
206	JULIANA RIMPER	95.690,00	2020
207	HENLI MARFEL IBRANI MOKALU	128.190,00	2020
208	SONNY HEPLIN MOKALU	127.810,00	2020
209	NIA CYNITA PUTRY MOKALU	123.820,00	2020
210	A. YANI LAUMA	2.165.700,00	2020
211	HERDIANTO RADJAK	30.000,00	2020
212	TUTI MANOPPO	2.894.000,00	2020
213	DJIBRAN KADENGGANG	100.000,00	2020
214	JEFRI TOLI	39.030,00	2020
215	OSKAR KUBALANG	100.000,00	2020
216	RATU	40.000,00	2020
217	JEMS TINE	100.000,00	2020
218	JEMS TINE	40.000,00	2020
219	IVAN ARSYAD	30.000,00	2020
220	RAHMAN MOPIO	30.000,00	2020
221	MARIANA MAMONTO	30.000,00	2020
222	IRWAN LAHiking	30.000,00	2020
223	SARMAN MONDE	40.000,00	2020
224	TAHIA POTABUGA	40.000,00	2020
225	RUSLI PELO	100.000,00	2020
226	HENDRIK KELOAY	30.000,00	2020
227	ABEKA SIMBALA	90.000,00	2020
228	RUSTAM LABABU	40.000,00	2020
229	ABEKA SIMBALA	100.000,00	2020
230	ROMI DUNGGIO	40.000,00	2020
231	RUSDIANTO MOKOGINTA	100.000,00	2020
232	FRANGKI MODEONG	40.000,00	2020
233	AHIAR PANGALIMA	40.000,00	2020
234	FAHMI MOKOGINTA	40.000,00	2020
235	ABEKA SIMBALA	100.000,00	2020
236	SUPARDI BOROMA	40.000,00	2020
237	HARDI MOKOGINTA	100.000,00	2020
238	JEMI KAEN	30.000,00	2020
239	HARDI MOKOGINTA	100.000,00	2020
240	CENDRI MOKOGINTA	40.000,00	2020
241	HERDI DAMOPOLII	100.000,00	2020
242	SUMARLIN MAMONTO	40.000,00	2020
243	CINDHI LIMO	40.000,00	2020
244	MARSAN	40.000,00	2020
245	NURSIWIN DUNGGIO	100.000,00	2020
246	ASRIN MAKALALAG	40.000,00	2020
247	JADIN ALBUGIS	40.000,00	2020
248	JAMAL ODOG	40.000,00	2020
249	RAMLAN LAKODI	100.000,00	2020
250	BUYUNG KADENGGANG	30.000,00	2020
251	YANTO PANTOW	30.000,00	2020

NO	NAMA WAJIB PAJAK	NILAI PIUTANG	TAHUN PIUTANG
252	MARYAM MOKOAGOW	30.000,00	2020
253	SELVIA MENTANG	30.000,00	2020
254	ABD. RAHMAN LIGAWA	30.000,00	2020
255	RUSTAM LABABU	53.016,00	2020
256	ZAENAB MAMONTO	30.000,00	2020
257	PT.SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk.	471.405,00	2020
258	PT.DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	722.925,00	2020
259	MARYAM MANOPPO	140.000,00	2020
260	RIPNA DAMOPOLII	222.600,00	2020
261	TAMAR MARDANI	52.600,00	2020
262	YOHANA BAWOLE	51.420,00	2020
263	YONGKI BUDIMAN	34.890,00	2020
264	YONGKI BUDIMAN	98.400,00	2020
265	IKETUT SUWENA	30.000,00	2020
266	JETLI KOLOPITA	30.000,00	2020
267	PT.DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	267.525,00	2022
268	PT.DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	745.635,00	2022
269	PT.DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	557.460,00	2022
270	TELKOMSEL	674.475,00	2022
271	PT.DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	726.150,00	2022
272	PT.DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	770.070,00	2022
273	PT.DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	269.613,00	2022
274	PT.DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	722.925,00	2022
275	PT.DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	711.525,00	2022
276	Ir. RITA MAYA TAMUNTOAN	11.880.000,00	2022
277	HENDRA TAMBAJONG	2.880.000,00	2022
278	KELVIN GRAY LIONGAN	40.000,00	2022
279	SHINTA SETIAWATI	310.000,00	2022
280	HERLY NGELO	140.000,00	2022
281	STEVEN OCTAVIANUS ESTEFANUS KANDOUW	10.880.000,00	2022
282	DECKY LONDA	500.000,00	2022
283	ROUBERT LANGKUN	940.000,00	2022
284	NOVAL INDRA LUMENTUT	2.680.000,00	2022
285	PT.TOWER BERSAMA GRUP	718.635,00	2022

*Handwritten signature/initials*

Lampiran 11 Rincian Persediaan

NO.	PERSEDIAAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			MASUK	KELUAR	
<b>1</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>				
	- Alat Tulis Kantor	0,00	21.224.231,00	21.224.231,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	47.080.986,00	47.080.986,00	0,00
	- Bahan Cetak	0,00	43.962.000,00	43.962.000,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	20.009.596,00	20.009.596,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	32.420.000,00	32.420.000,00	0,00
	- Perabot Kantor	0,00	20.841.063,00	20.841.063,00	0,00
	- Alat Listrik	0,00	10.371.100,00	10.371.100,00	0,00
<b>2</b>	<b>UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Tutuyan</b>				
	- Alat Tulis Kantor	0,00	8.847.522,00	8.847.522,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	4.785.851,00	4.785.851,00	0,00
	- Bahan Cetak	0,00	8.260.500,00	8.260.500,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	1.951.051,00	1.951.051,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	23.178.800,00	23.178.800,00	0,00
	- Perabot Kantor	0,00	1.481.000,00	1.481.000,00	0,00
	- Alat Listrik	0,00	2.103.300,00	2.103.300,00	0,00
<b>3</b>	<b>UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Modayag</b>				
	- Alat Tulis Kantor	0,00	6.221.014,00	6.221.014,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	2.820.653,00	2.820.653,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	1.496.880,00	1.496.880,00	0,00
<b>4</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>				
	- Bahan Kimia	28.043.250,00	0,00	3.180.850,00	24.862.400,00
	- Alat Tulis Kantor	4.724.600,00	26.034.386,00	30.758.986,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	40.991.822,00	40.991.822,00	0,00
	- Benda Pos	3.300.000,00	11.347.100,00	14.647.100,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	14.674.920,00	14.674.920,00	0,00
	- Perabot Kantor	384.800,00	38.593.300,00	38.978.100,00	0,00
	- Obat	3.904.959.946,87	2.494.002.741,44	3.796.984.965,28	2.601.977.723,03
	- Obat-Obatan Lainnya	1.277.059.041,46	2.077.489.405,55	1.402.134.153,59	1.952.414.293,42
	- Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	603.751.506,00	74.747.400,00	561.898.266,00	116.600.640,00
<b>5</b>	<b>UPTD Puskesmas Kotabunan</b>				
	- Bahan Bangunan Dan Konstruksi	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	- Isi Tabung Gas	44.000,00	25.410.000,00	25.454.000,00	0,00
	- Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	16.965.000,00	16.965.000,00	0,00
	- Alat Tulis Kantor	0,00	21.428.234,00	21.428.234,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	13.485.032,00	13.485.032,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	7.479.750,00	7.479.750,00	0,00
	- Perabot Kantor	0,00	2.645.720,00	2.645.720,00	0,00
	- Alat Listrik	0,00	3.751.500,00	3.751.500,00	0,00
	- Obat	52.231.764,37	404.300.366,32	395.752.369,79	60.779.760,89
	- Obat-Obatan Lainnya	30.758.008,47	127.307.611,74	125.507.350,09	32.558.270,12
<b>6</b>	<b>UPTD Puskesmas Tutuyan</b>				
	- Bahan Bangunan Dan Konstruksi	0,00	3.374.000,00	3.374.000,00	0,00
	- Bahan Bakar Dan Pelumas	0,00	64.761.700,00	64.761.700,00	0,00
	- Isi Tabung Gas	0,00	9.935.500,00	9.935.500,00	0,00
	- Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	16.242.630,00	16.242.630,00	0,00
	- Alat Tulis Kantor	10.670,00	15.762.853,17	15.773.523,17	0,00
	- Kertas Dan Cover	314.820,00	21.037.709,00	21.352.529,00	0,00
	- Benda Pos	84.000,00	6.911.676,00	6.995.676,00	0,00
	- Bahan Komputer	180.730,00	11.464.811,00	11.645.541,00	0,00
	- Perabot Kantor	139.480,00	26.296.454,00	26.435.934,00	0,00
	- Alat Listrik	266.200,00	6.899.982,00	7.166.182,00	0,00
	- Obat	75.653.796,72	385.747.947,18	283.533.571,25	177.868.172,65
	- Obat-Obatan Lainnya	38.033.333,14	105.711.880,32	105.984.657,63	37.760.555,83
<b>7</b>	<b>UPTD Puskesmas Nuangan</b>				
	- Bahan Bakar Dan Pelumas	0,00	8.326.000,00	8.326.000,00	0,00
	- Isi Tabung Gas	0,00	25.080.000,00	25.080.000,00	0,00
	- Alat Tulis Kantor	0,00	17.390.747,00	17.390.747,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	9.446.800,00	9.446.800,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	1.534.302,00	1.534.302,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	7.966.125,00	7.966.125,00	0,00
	- Perabot Kantor	0,00	5.902.600,00	5.902.600,00	0,00
	- Alat Listrik	0,00	2.435.400,00	2.435.400,00	0,00
	- Obat	58.983.569,62	349.649.756,15	338.558.073,36	70.075.252,41
	- Obat-Obatan Lainnya	37.198.196,46	121.237.976,33	111.211.886,38	47.224.286,41

NO.	PERSEDIAAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			MASUK	KELUAR	
<b>8</b>	<b>UPTD Puskesmas Modayag</b>				
	- Bahan Bakar Dan Pelumas	0,00	69.639.100,00	69.639.100,00	0,00
	- Isi Tabung Gas	0,00	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00
	- Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	20.155.000,00	20.155.000,00	0,00
	- Alat Tulis Kantor	0,00	6.248.696,00	6.248.696,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	20.082.509,00	20.082.509,00	0,00
	- Bahan Cetak	0,00	9.555.360,00	9.555.360,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	13.846.140,00	13.846.140,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	19.935.220,00	19.935.220,00	0,00
	- Perabot Kantor	0,00	7.693.335,00	7.693.335,00	0,00
	- Alat Listrik	0,00	14.502.344,00	14.502.344,00	0,00
	- Obat	92.207.087,02	415.914.097,07	436.144.721,50	71.976.462,59
	- Obat-Obatan Lainnya	85.362.414,18	98.532.056,88	116.899.937,75	66.994.533,32
<b>9</b>	<b>UPTD Puskesmas Modayag Barat</b>				
	- Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	18.649.700,00	18.649.700,00	0,00
	- Alat Tulis Kantor	0,00	22.791.710,00	22.791.710,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	12.973.800,00	12.973.800,00	0,00
	- Bahan Cetak	0,00	8.054.700,00	8.054.700,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	6.916.350,00	6.916.350,00	0,00
	- Perabot Kantor	0,00	14.416.400,00	14.416.400,00	0,00
	- Obat	48.935.262,31	92.561.785,68	107.369.555,74	34.127.492,25
	- Obat-Obatan Lainnya	12.659.790,02	23.675.443,05	20.948.322,19	15.386.910,88
<b>10</b>	<b>UPTD Puskesmas Moaat</b>				
	- Alat Tulis Kantor	0,00	10.262.076,00	10.262.076,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	6.334.976,00	6.334.976,00	0,00
	- Bahan Cetak	0,00	4.047.200,00	4.047.200,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	1.871.100,00	1.871.100,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	7.654.620,00	7.654.620,00	0,00
	- Perabot Kantor	0,00	11.282.800,00	11.282.800,00	0,00
	- Obat	35.918.247,95	113.280.120,57	105.177.796,76	44.020.571,77
	- Obat-Obatan Lainnya	19.893.338,03	33.623.754,69	29.157.923,49	24.359.169,23
<b>11</b>	<b>UPTD Puskesmas Buyat</b>				
	- Alat Tulis Kantor	7.799.220,00	20.212.652,75	19.157.744,96	8.854.127,79
	- Kertas Dan Cover	0,00	15.034.822,40	13.985.119,40	1.049.703,00
	- Benda Pos	0,00	2.992.440,00	2.992.440,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	9.277.399,50	8.761.279,50	516.120,00
	- Perabot Kantor	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	- Obat	50.801.257,04	136.641.970,83	120.163.726,70	67.279.501,17
	- Obat-Obatan Lainnya	8.476.054,90	14.601.200,96	8.780.807,64	14.296.448,22
<b>12</b>	<b>UPTD Puskesmas Motongkad</b>				
	- Alat Tulis Kantor	0,00	18.306.564,00	18.306.564,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	3.118.500,00	3.118.500,00	0,00
	- Perabot Kantor	0,00	3.636.200,00	3.636.200,00	0,00
	- Alat Listrik	0,00	1.736.400,00	1.736.400,00	0,00
	- Obat	46.415.629,78	246.667.604,87	229.824.300,80	63.258.933,85
	- Obat-Obatan Lainnya	2.446.544,61	37.410.333,61	27.552.105,30	12.304.772,92
<b>13</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan</b>				
	- Alat Tulis Kantor	0,00	12.176.600,00	11.182.700,00	993.900,00
	- Kertas Dan Cover	2.276.000,00	27.605.600,00	27.919.100,00	1.962.500,00
	- Benda Pos	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	15.845.400,00	14.885.300,00	960.100,00
	- Perabot Kantor	0,00	5.293.500,00	5.293.500,00	0,00
	- Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	920.000.000,00	0,00	920.000.000,00	0,00
<b>14</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>				
	- Alat Tulis Kantor	0,00	1.417.100,00	1.417.100,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	5.304.985,00	5.304.985,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	1.271.975,00	1.271.975,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	1.169.996,00	1.169.996,00	0,00
<b>15</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran</b>				
	- Bahan Bakar Dan Pelumas	0,00	79.904.300,00	79.904.300,00	0,00
	- Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	24.985.000,00	24.985.000,00	0,00
	- Alat Tulis Kantor	0,00	6.986.081,00	6.986.081,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	75.130,00	11.623.187,00	11.698.317,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	3.118.500,00	3.118.500,00	0,00
<b>16</b>	<b>Dinas Sosial</b>				
	- Alat Tulis Kantor	0,00	5.521.539,00	5.521.539,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	11.260.452,00	11.260.452,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	2.432.430,00	2.432.430,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	3.336.820,00	3.336.820,00	0,00



NO.	PERSEDIAAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			MASUK	KELUAR	
<b>17</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
	- Alat Tulis Kantor	0,00	19.710.426,00	18.863.911,00	846.515,00
	- Benda Pos	0,00	4.980.000,00	4.884.000,00	96.000,00
<b>18</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>				
	- Alat Tulis Kantor	168.700,00	5.020.714,00	5.041.414,00	148.000,00
	- Kertas Dan Cover	403.500,00	15.544.628,00	15.398.128,00	550.000,00
	- Benda Pos	168.000,00	4.241.160,00	4.234.524,00	174.636,00
	- Bahan Komputer	0,00	4.878.850,00	4.585.850,00	293.000,00
<b>19</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>				
	- Bahan Kimia	27.095.309,50	21.939.110,00	14.168.000,00	34.866.419,50
	- Bahan Bakar Dan Pelumas	0,00	33.341.356,00	33.341.356,00	0,00
	- Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00
	- Alat Tulis Kantor	0,00	14.787.722,00	14.787.722,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	14.483.200,00	11.681.200,00	2.802.000,00
	- Bahan Cetak	0,00	7.236.260,00	7.236.260,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	3.695.250,00	3.491.250,00	204.000,00
	- Bahan Komputer	0,00	13.023.881,00	13.023.881,00	0,00
	- Perabot Kantor	0,00	28.494.500,00	20.697.000,00	7.797.500,00
	- Alat Listrik	0,00	6.857.600,00	6.857.600,00	0,00
<b>20</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
	- Alat Tulis Kantor	17.673.600,00	8.595.500,00	26.269.100,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	3.567.500,00	16.357.800,00	17.984.300,00	1.941.000,00
	- Bahan Cetak	79.190.000,00	0,00	79.190.000,00	0,00
	- Benda Pos	216.000,00	2.424.000,00	2.640.000,00	0,00
	- Bahan Komputer	114.726.000,00	102.482.000,00	153.640.450,00	63.567.550,00
	- Obat-Obatan Lainnya	10.679.000,00	0,00	10.679.000,00	0,00
	- Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	9.186.199,00	42.284.000,00	51.470.199,00	0,00
<b>21</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
	- Bahan Bakar Dan Pelumas	0,00	12.307.500,00	12.307.500,00	0,00
	- Alat Tulis Kantor	766.600,00	7.202.571,00	7.380.819,00	588.352,00
	- Kertas Dan Cover	624.800,00	25.766.307,00	25.423.107,00	968.000,00
	- Benda Pos	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00
<b>22</b>	<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>				
	- Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	11.303.750,00	11.303.750,00	0,00
	- Alat Tulis Kantor	0,00	8.560.944,00	8.560.944,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	13.133.770,00	13.133.770,00	0,00
	- Bahan Cetak	0,00	33.965.000,00	33.965.000,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	1.496.880,00	1.496.880,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	4.552.250,00	4.552.250,00	0,00
	- Obat	43.659.674,00	184.218.658,00	188.514.080,00	39.364.252,00
<b>23</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>				
	- Bahan Bakar Dan Pelumas	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00
	- Alat Tulis Kantor	0,00	11.583.080,00	11.583.080,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	9.538.600,00	9.538.600,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	12.041.300,00	12.041.300,00	0,00
<b>24</b>	<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik</b>				
	- Bahan Bakar Dan Pelumas	0,00	32.990.945,00	32.990.945,00	0,00
	- Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	29.305.000,00	29.305.000,00	0,00
	- Alat Tulis Kantor	0,00	24.786.715,00	24.786.715,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	12.619.902,00	12.619.902,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	2.484.000,00	2.484.000,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	7.318.781,00	7.318.781,00	0,00
	- Alat Listrik	0,00	2.042.400,00	2.042.400,00	0,00
	- Natura	0,00	4.799.800,00	4.799.800,00	0,00
<b>25</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>				
	- Alat Tulis Kantor	0,00	12.639.350,00	12.639.350,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	13.418.176,00	13.418.176,00	0,00
	- Bahan Cetak	0,00	17.967.880,00	17.967.880,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	11.106.350,00	11.106.350,00	0,00
	- Perabot Kantor	0,00	9.460.000,00	9.460.000,00	0,00
	- Alat Listrik	0,00	2.496.400,00	2.496.400,00	0,00
	- Perlengkapan Dinas	0,00	8.355.014,00	8.355.014,00	0,00
<b>26</b>	<b>Dinas Kepemudaan dan Olahraga</b>				
	- Alat Tulis Kantor	0,00	14.494.391,00	14.494.391,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	10.145.687,00	10.145.687,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	2.736.000,00	2.736.000,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	6.315.832,00	6.315.832,00	0,00
	- Alat Listrik	0,00	2.154.077,00	2.154.077,00	0,00

NO.	PERSEDIAAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			MASUK	KELUAR	
<b>27</b>	<b>Dinas Perpustakaan Daerah</b>				
	- Alat Tulis Kantor	0,00	8.644.681,00	8.644.681,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	4.505.199,00	4.505.199,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	1.377.025,00	1.377.025,00	0,00
<b>28</b>	<b>Dinas Perikanan</b>				
	- Alat Tulis Kantor	0,00	1.624.840,00	1.624.840,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	12.342.000,00	12.342.000,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
<b>29</b>	<b>Dinas Pariwisata</b>				
	- Alat Tulis Kantor	62.000,00	12.731.069,00	7.727.912,00	5.065.157,00
	- Kertas Dan Cover	150.000,00	11.280.509,00	7.545.238,00	3.885.271,00
	- Benda Pos	0,00	9.392.810,00	5.712.980,00	3.679.830,00
	- Bahan Komputer	72.600,00	2.944.553,00	1.442.824,00	1.574.329,00
	- Perabot Kantor	0,00	6.287.650,00	3.768.560,00	2.519.090,00
<b>30</b>	<b>Dinas Pertanian</b>				
	- Bahan Bakar Dan Pelumas	0,00	19.622.750,00	19.622.750,00	0,00
	- Bahan/Bibit Tanaman	24.200.000,00	22.979.600,00	24.200.000,00	22.979.600,00
	- Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	8.841.700,00	8.841.700,00	0,00
	- Alat Tulis Kantor	0,00	6.751.130,00	6.751.130,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	19.092.330,00	19.092.330,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	3.243.240,00	3.243.240,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	4.239.240,00	4.239.240,00	0,00
	- Obat-Obatan Lainnya	5.444.300,00	7.470.800,00	4.991.750,00	7.923.350,00
<b>31</b>	<b>Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>				
	- Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	32.581.000,00	32.581.000,00	0,00
	- Alat Tulis Kantor	120.000,00	7.613.000,00	7.405.000,00	328.000,00
	- Kertas Dan Cover	141.200,00	4.066.000,00	4.207.200,00	0,00
	- Bahan Komputer	117.300,00	3.654.000,00	3.537.300,00	234.000,00
	- Perabot Kantor	139.900,00	0,00	139.900,00	0,00
	- Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00
<b>32</b>	<b>Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral</b>				
	- Alat Tulis Kantor	0,00	3.952.025,00	3.952.025,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	375.000,00	8.352.000,00	8.651.000,00	76.000,00
	- Benda Pos	0,00	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00
	- Bahan Komputer	187.000,00	3.657.000,00	3.844.000,00	0,00
<b>33</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>				
	- Alat Tulis Kantor	0,00	138.224.539,00	138.224.539,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	143.942.751,00	143.942.751,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	52.722.852,00	52.722.852,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	71.492.946,00	71.492.946,00	0,00
	- Perabot Kantor	0,00	442.548.427,00	442.548.427,00	0,00
	- Alat Listrik	0,00	183.408.625,00	183.408.625,00	0,00
<b>34</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>				
	- Alat Tulis Kantor	0,00	24.509.694,00	24.509.694,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	193.280,00	14.835.900,00	14.774.180,00	255.000,00
	- Benda Pos	0,00	14.760.000,00	14.760.000,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	9.219.870,00	9.219.870,00	0,00
	- Perabot Kantor	0,00	12.649.560,00	12.649.560,00	0,00
	- Alat Listrik	0,00	4.541.200,00	4.541.200,00	0,00
	- Natura	0,00	64.733.900,00	64.733.900,00	0,00
<b>35</b>	<b>Kecamatan Tutuyan</b>				
	- Bahan Bakar Dan Pelumas	0,00	2.786.750,00	2.786.750,00	0,00
<b>36</b>	<b>Kecamatan Kotabunan</b>				
	- Alat Tulis Kantor	0,00	2.810.395,00	2.810.395,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	7.599.663,00	7.599.663,00	0,00
	- Bahan Cetak	0,00	2.144.000,00	2.144.000,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	3.006.234,00	3.006.234,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	3.834.600,00	3.834.600,00	0,00
	- Alat Listrik	0,00	2.721.400,00	2.721.400,00	0,00
<b>37</b>	<b>Kecamatan Nuangan</b>				
	- Alat Tulis Kantor	0,00	3.559.500,00	3.559.500,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	744.000,00	744.000,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	3.275.000,00	3.275.000,00	0,00

NO.	PERSEDIAAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			MASUK	KELUAR	
<b>38</b>	<b>Kecamatan Modayag</b>				
	- Bahan Bangunan Dan Konstruksi	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
	- Bahan Bakar Dan Pelumas	0,00	19.983.000,00	19.983.000,00	0,00
	- Alat Tulis Kantor	0,00	6.305.889,00	6.305.889,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	8.063.344,00	8.063.344,00	0,00
	- Bahan Cetak	0,00	1.393.040,00	1.393.040,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	754.677,00	754.677,00	0,00
	- Perabot Kantor	0,00	3.894.880,00	3.894.880,00	0,00
	- Alat Listrik	0,00	647.980,00	647.980,00	0,00
<b>39</b>	<b>Kecamatan Modayag Barat</b>				
	- Bahan Bakar Dan Pelumas	0,00	12.590.000,00	12.590.000,00	0,00
	- Alat Tulis Kantor	0,00	9.036.000,00	9.036.000,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	16.266.900,00	16.266.900,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	14.544.000,00	14.544.000,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	67.185.360,00	67.185.360,00	0,00
<b>40</b>	<b>Kecamatan Motongkad</b>				
	- Bahan Bakar Dan Pelumas	0,00	28.808.550,00	28.808.550,00	0,00
	- Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	22.438.060,00	22.438.060,00	0,00
	- Alat Tulis Kantor	0,00	1.355.272,00	1.355.272,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	7.271.130,00	7.271.130,00	0,00
	- Bahan Cetak	0,00	2.463.400,00	2.463.400,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	3.463.317,00	3.463.317,00	0,00
	- Alat Listrik	0,00	1.778.530,00	1.778.530,00	0,00
<b>41</b>	<b>Kecamatan Mooat</b>				
	- Bahan Bakar Dan Pelumas	0,00	18.230.950,00	18.230.950,00	0,00
	- Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	30.210.000,00	30.210.000,00	0,00
	- Alat Tulis Kantor	0,00	963.400,00	963.400,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	2.595.400,00	2.595.400,00	0,00
	- Bahan Cetak	0,00	812.400,00	812.400,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	2.064.000,00	2.064.000,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	3.941.000,00	3.941.000,00	0,00
	- Perabot Kantor	0,00	595.550,00	595.550,00	0,00
<b>42</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>				
	- Alat Tulis Kantor	0,00	1.372.000,00	1.372.000,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	32.746.400,00	32.746.400,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	7.716.000,00	7.716.000,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	8.711.750,00	8.711.750,00	0,00
	- Perabot Kantor	0,00	3.993.000,00	3.993.000,00	0,00
<b>43</b>	<b>Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>				
	- Alat Tulis Kantor	0,00	8.529.272,00	7.730.170,00	799.102,00
	- Kertas Dan Cover	1.742.400,00	19.025.971,00	20.259.366,00	509.005,00
	- Bahan Cetak	0,00	35.991.368,00	35.991.368,00	0,00
	- Benda Pos	84.000,00	2.769.228,00	2.815.806,00	37.422,00
	- Bahan Komputer	805.860,00	12.346.779,00	11.757.101,00	1.395.538,00
	- Perabot Kantor	0,00	10.703.482,00	10.703.482,00	0,00
	- Alat Listrik	0,00	11.786.400,00	11.786.400,00	0,00
	- Obat-Obatan Lainnya	0,00	14.651.000,00	14.651.000,00	0,00
	- Natura	0,00	19.889.287,00	19.889.287,00	0,00
<b>44</b>	<b>Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah</b>				
	- Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	125.300.000,00	125.300.000,00	0,00
	- Alat Tulis Kantor	1.097.030,00	54.972.191,00	46.659.646,00	9.409.575,00
	- Kertas Dan Cover	884.620,00	80.656.443,00	80.507.797,00	1.033.266,00
	- Bahan Cetak	10.361.200,00	90.293.087,00	89.706.297,00	10.947.990,00
	- Benda Pos	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
	- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	3.031.182,00	3.031.182,00	0,00
	- Bahan Komputer	10.712.900,00	79.811.636,00	75.181.064,00	15.343.472,00
	- Perabot Kantor	297.600,00	7.314.500,00	7.612.100,00	0,00
	- Alat Listrik	2.283.000,00	20.862.700,00	23.145.700,00	0,00
	- Natura	0,00	4.767.080,00	4.767.080,00	0,00
<b>45</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>				
	- Alat Tulis Kantor	387.200,00	24.872.464,00	25.259.664,00	0,00
	- Kertas Dan Cover	0,00	23.408.233,00	23.408.233,00	0,00
	- Benda Pos	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
	- Bahan Komputer	0,00	13.561.113,00	13.561.113,00	0,00
	- Perabot Kantor	0,00	7.720.617,00	7.720.617,00	0,00
	<b>J U M L A H</b>	<b>7.818.770.961,44</b>	<b>12.334.350.069,05</b>	<b>14.360.456.207,26</b>	<b>5.792.664.823,25</b>

Lampiran 12 Aset Tetap

NO	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KDP
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					
	-	8.785.977.985,00	14.346.861.593,00	32.158.170,00	35.950.000,00	-
2	Sekretariat Daerah					
	2.921.113.300,00	28.972.294.817,00	33.722.158.036,00	612.495.000,00	73.200.000,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan					
	200.648.952.450,00	21.760.965.127,00	28.464.750.328,00	896.356.908.516,00	4.324.728.800,00	22.354.496.896,27
4	Dinas Perhubungan					
	117.000.000,00	5.302.599.997,00	1.427.371.698,00	-	79.860.000,00	-
5	Dinas Kesehatan					
	2.665.896.820,00	116.535.403.076,00	90.080.026.620,90	5.878.421.276,00	-	100.078.000,00
6	Kantor UPTD Puskesmas Kotabunan					
	-	743.054.712,00	2.500.000,00	-	-	-
7	Kantor UPTD Puskesmas Tutuyan					
	-	728.991.930,00	-	-	-	-
8	Kantor UPTD Puskesmas Nuangan					
	-	889.280.828,00	274.429.000,00	-	-	-
9	Kantor UPTD Puskesmas Modayag					
	-	928.988.770,00	40.000.000,00	-	-	-
10	Kantor UPTD Puskesmas Modayag Barat					
	-	845.515.000,00	-	-	-	-
11	Kantor UPTD Puskesmas Mooat Kecamatan Modayag					
	-	581.935.968,00	-	9.750.000,00	-	-
12	Kantor UPTD Puskesmas Buyat Kecamatan Kotabunan					
	-	779.447.859,00	-	-	-	-
13	Kantor UPTD Puskesmas Motongkad					
	-	428.415.620,00	-	-	-	-
14	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Tutuyan					
	-	1.072.582.345,00	1.985.712.000,00	-	-	-
15	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Modayag					
	-	564.234.104,00	-	-	-	-
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
	5.734.710.410,00	55.438.386.451,70	165.042.332.757,00	98.534.000,00	12.993.967.860,00	-
17	Dinas Pemuda dan Olahraga					
	-	736.984.500,00	1.107.505.172,00	-	-	-
18	Dinas Sosial					
	-	1.101.156.370,00	4.313.123.729,00	16.230.000,00	-	-
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
	-	5.369.930.790,00	653.404.000,00	7.887.249.500,00	-	-
20	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil					
	-	2.279.311.938,00	2.095.076.452,00	-	10.000.000,00	-
21	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja					
	-	1.323.297.275,00	-	-	21.600.000,00	-
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa					
	-	1.137.587.753,00	3.944.590.300,00	416.727.800,00	5.684.264,00	-
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
	-	218.087.955,00	-	-	-	-
24	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak					
	-	31.827.072,00	-	-	-	-

NO	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KDP
25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	-	4.187.000.539,00	4.904.473.161,00	-	-	-
26	Dinas Pertanian					
	518.717.733,00	4.040.744.590,00	7.270.641.700,00	17.797.308.260,00	809.075.900,00	133.363.037,00
27	Dinas Perikanan					
	1.242.500.000,00	2.397.392.280,00	7.467.535.970,00	2.032.256.799,00	314.089.800,00	-
28	Dinas Ketahanan Pangan					
	-	631.918.085,00	107.177.250,00	-	3.000.000,00	-
29	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah					
	3.999.575.000,00	3.465.144.189,00	30.356.940.560,00	783.271.100,00	-	-
30	Badan Pengelolah Keuangan Dan Pendapatan Daerah (SKPD)					
	-	9.527.642.218,00	7.365.013.875,00	185.675.690,00	10.460.000,00	-
31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
	-	1.646.652.183,00	4.111.342.802,99	-	6.957.489,00	-
32	Inspektorat Daerah					
	-	1.429.333.242,00	-	-	4.590.000,00	-
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan					
	-	2.879.520.193,00	4.952.087.000,00	-	628.500.000,00	-
34	Dinas Lingkungan Hidup					
	186.000.000,00	5.995.921.624,00	5.652.960.161,00	343.772.997,00	99.605.000,00	426.975.040,00
35	Dinas Pariwisata					
	1.452.276.050,00	4.920.555.850,00	7.553.592.361,00	963.327.200,00	244.832.500,00	99.899.800,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
	-	885.166.924,00	-	-	-	-
37	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran					
	-	1.664.162.710,00	-	-	-	-
38	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
	-	2.226.006.092,00	4.086.908.000,00	-	-	-
39	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
	-	1.627.730.713,00	8.020.550.000,00	149.481.500,00	146.264.250,00	-
40	Dinas Perpustakaan					
	-	546.475.002,00	-	-	257.345.406,00	-
41	Kecamatan Tutuyan					
	20.000.000,00	623.865.404,00	1.270.872.000,00	-	-	-
42	Kecamatan Kotabunan					
	46.200.000,00	696.331.586,00	288.665.958,00	-	-	-
43	Kecamatan Nuangan					
	45.486.000,00	936.872.760,00	1.992.138.000,00	-	-	-
44	Kecamatan Modayag					
	645.584.000,00	677.869.566,00	296.310.000,00	-	-	-
45	Kecamatan Modayag Barat					
	36.750.000,00	558.728.564,00	1.199.730.000,00	-	-	-
46	Kecamatan Motongkad					
	243.294.375,00	514.000.465,00	1.947.054.000,00	-	-	-
47	Kecamatan Mooat					
	75.000.000,00	621.485.862,00	1.972.520.000,00	-	-	-
<b>JLH.</b>	<b>220.599.056.138,00</b>	<b>309.256.778.883,70</b>	<b>448.316.354.484,89</b>	<b>933.563.567.808,00</b>	<b>20.069.711.269,00</b>	<b>23.114.812.773,27</b>

Lampiran 13 Aset Tetap Tanah Tahun 2022

NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1	Bagian Umum, Sekretariat Daerah	Tanah Kaveling (dst)	120.600.000,00
2	Bagian Umum, Sekretariat Daerah	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.466.738.300,00
3	Bagian Umum, Sekretariat Daerah	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	25.000.000,00
4	Bagian Umum, Sekretariat Daerah	Tanah Kampung	308.775.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Tanah Kaveling (dst)	742.448.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.027.893.575,00
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Tanah Untuk Jalan Nasional	183.560.646.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Tanah Untuk Jalan Propinsi	97.500.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	6.264.598.375,00
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Tanah Untuk Jalan Desa	6.492.525.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Tanah untuk Jalan lainnya	1.437.441.500,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Tanah Untuk Tugu Batas Wilayah	25.900.000,00
13	Dinas Perhubungan	Tanah Bangunan Terminal Darat	117.000.000,00
14	Dinas Kesehatan	Tanah Bangunan Rumah Sakit	1.614.560.000,00
15	Dinas Kesehatan	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1.051.336.820,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	200.000.000,00
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah Bangunan Gudang	353.187.500,00
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	5.019.142.910,00
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	158.880.000,00
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2.750.000,00
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	750.000,00
22	Dinas Pertanian	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	45.587.733,00
23	Dinas Pertanian	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	264.130.000,00
24	Dinas Pertanian	Tanah Bangunan Bangunan Pembibitan	200.000.000,00
25	Dinas Pertanian	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	9.000.000,00
26	Dinas Perikanan	Tanah Untuk Bangunan Pabrik Es	30.000.000,00

NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
27	Dinas Perikanan	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	90.000.000,00
28	Dinas Perikanan	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	1.122.500.000,00
29	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tanah Bangunan Pasar	2.500.000.000,00
30	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.459.575.000,00
31	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	40.000.000,00
32	Dinas Lingkungan Hidup	Tanah Bangunan Laboratorium	84.000.000,00
33	Dinas Lingkungan Hidup	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	102.000.000,00
34	Dinas Pariwisata	Tanah Bangunan Gudang	432.055.350,00
35	Dinas Pariwisata	Tanah Bangunan Perdagangan lainnya (dst)	349.866.300,00
36	Dinas Pariwisata	Tanah Lapangan Apel/Upacara	116.232.900,00
37	Dinas Pariwisata	Tanah Untuk Jalan Nasional	385.621.500,00
38	Dinas Pariwisata	Tanah Lapangan Taman lainnya	168.500.000,00
39	Kecamatan Tutuyan	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	20.000.000,00
40	Kecamatan Kotabunan	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	22.350.000,00
41	Kecamatan Kotabunan	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	23.850.000,00
42	Kecamatan Nuangan	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	45.486.000,00
43	Kecamatan Modayag	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	195.584.000,00
44	Kecamatan Modayag	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	450.000.000,00
45	Kecamatan Modayag Barat	Tanah Bangunan Gudang	36.750.000,00
46	Kecamatan Motongkad	Tanah Untuk Jalan Desa	243.294.375,00
47	Kecamatan Mooat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	75.000.000,00
<b>Total</b>			<b>220.599.056.138,00</b>

Lampiran 14 Aset Tetap Peralatan Mesin Tahun 2022

NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Komputer	502.604.700,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Alat Angkutan	4.528.405.000,00
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Alat Pertanian	6.204.000,00
4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	3.443.419.285,00
5	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	192.060.000,00
6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Alat Laboratorium	113.285.000,00
7	Sekretariat Daerah	Komputer	2.314.275.525,00
8	Sekretariat Daerah	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	11.572.279.975,00
9	Sekretariat Daerah	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.480.645.566,00
10	Sekretariat Daerah	Alat Besar	380.627.500,00
11	Sekretariat Daerah	Rambu - Rambu	199.295.900,00
12	Sekretariat Daerah	Peralatan Olah Raga	191.610.500,00
13	Sekretariat Daerah	Alat Angkutan	10.812.609.779,00
14	Sekretariat Daerah	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	22.043.400,00
15	Sekretariat Daerah	Alat Pertanian	88.307.000,00
16	Sekretariat Daerah	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	491.627.500,00
17	Sekretariat Daerah	Alat Laboratorium	1.387.471.472,00
18	Sekretariat Daerah	Alat Persenjataan	31.500.700,00
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Alat Besar	2.927.914.201,00
20	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Komputer	1.335.960.500,00
21	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Alat Angkutan	2.333.732.000,00
22	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	991.603.204,00
23	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	11.435.564.675,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	221.200.000,00
25	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Alat Laboratorium	2.514.990.547,00
26	Dinas Perhubungan	Komputer	245.668.500,00

*Handwritten signature/initials*



NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
27	Dinas Perhubungan	Rambu - Rambu	3.936.265.497,00
28	Dinas Perhubungan	Alat Angkutan	805.688.500,00
29	Dinas Perhubungan	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	11.605.000,00
30	Dinas Perhubungan	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	180.582.500,00
31	Dinas Perhubungan	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	101.115.000,00
32	Dinas Perhubungan	Alat Laboratorium	21.675.000,00
33	Dinas Kesehatan	Alat Besar	3.433.908.250,00
34	Dinas Kesehatan	Komputer	2.434.710.542,00
35	Dinas Kesehatan	Alat Keselamatan Kerja	505.041.000,00
36	Dinas Kesehatan	Alat Angkutan	9.870.806.564,00
37	Dinas Kesehatan	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1.052.932.040,00
38	Dinas Kesehatan	Alat Pertanian	227.240.000,00
39	Dinas Kesehatan	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	9.272.218.364,00
40	Dinas Kesehatan	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	751.597.300,00
41	Dinas Kesehatan	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	73.205.546.428,00
42	Dinas Kesehatan	Alat Laboratorium	15.740.458.088,00
43	Dinas Kesehatan	Alat Persenjataan	40.944.500,00
44	Kantor UPTD Puskesmas Kotabunan	Komputer	334.919.712,00
45	Kantor UPTD Puskesmas Kotabunan	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	337.860.000,00
46	Kantor UPTD Puskesmas Kotabunan	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	30.400.000,00
47	Kantor UPTD Puskesmas Kotabunan	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	20.000.000,00
48	Kantor UPTD Puskesmas Kotabunan	Alat Laboratorium	19.875.000,00
49	Kantor UPTD Puskesmas Tutuyan	Komputer	231.274.345,00
50	Kantor UPTD Puskesmas Tutuyan	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	411.377.601,00
51	Kantor UPTD Puskesmas Tutuyan	Alat Laboratorium	69.739.984,00
52	Kantor UPTD Puskesmas Tutuyan	Alat Pertanian	4.200.000,00
53	Kantor UPTD Puskesmas Tutuyan	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	12.400.000,00

	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
54	Kantor UPTD Puskesmas Nuangan	Komputer	236.766.436,00
55	Kantor UPTD Puskesmas Nuangan	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	3.960.000,00
56	Kantor UPTD Puskesmas Nuangan	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	548.591.672,00
57	Kantor UPTD Puskesmas Nuangan	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	68.834.640,00
58	Kantor UPTD Puskesmas Nuangan	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	21.378.080,00
59	Kantor UPTD Puskesmas Nuangan	Alat Laboratorium	9.750.000,00
60	Kantor UPTD Puskesmas Modayag	Komputer	428.123.760,00
61	Kantor UPTD Puskesmas Modayag	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	341.000.010,00
62	Kantor UPTD Puskesmas Modayag	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	63.800.000,00
63	Kantor UPTD Puskesmas Modayag	Alat Pertanian	40.000.000,00
64	Kantor UPTD Puskesmas Modayag	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	23.190.000,00
65	Kantor UPTD Puskesmas Modayag	Alat Laboratorium	32.875.000,00
66	Kantor UPTD Puskesmas Modayag Barat	Komputer	330.950.000,00
67	Kantor UPTD Puskesmas Modayag Barat	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	412.815.000,00
68	Kantor UPTD Puskesmas Modayag Barat	Alat Keselamatan Kerja	4.650.000,00
69	Kantor UPTD Puskesmas Modayag Barat	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	30.000.000,00
70	Kantor UPTD Puskesmas Modayag Barat	Alat Laboratorium	67.100.000,00
71	Kantor UPTD Puskesmas Mooat Kecamatan Modayag	Alat Besar	19.200.000,00
72	Kantor UPTD Puskesmas Mooat Kecamatan Modayag	Komputer	125.408.190,00
73	Kantor UPTD Puskesmas Mooat Kecamatan Modayag	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	412.327.778,00
74	Kantor UPTD Puskesmas Mooat Kecamatan Modayag	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	20.000.000,00
75	Kantor UPTD Puskesmas Mooat Kecamatan Modayag	Alat Laboratorium	5.000.000,00
76	Kantor UPTD Puskesmas Buyat Kecamatan Kotabunan	Komputer	271.750.924,00
77	Kantor UPTD Puskesmas Buyat Kecamatan Kotabunan	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	439.159.115,00
78	Kantor UPTD Puskesmas Buyat Kecamatan Kotabunan	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	10.500.000,00
79	Kantor UPTD Puskesmas Buyat Kecamatan Kotabunan	Alat Laboratorium	31.537.820,00
80	Kantor UPTD Puskesmas Buyat Kecamatan Kotabunan	Alat Besar	1.000.000,00
81	Kantor UPTD Puskesmas Buyat Kecamatan Kotabunan	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	500.000,00

	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
82	Kantor UPTD Puskesmas Buyat Kecamatan Kotabunan	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	25.000.000,00
83	Kantor UPTD Puskesmas Motongkad	Komputer	101.888.400,00
84	Kantor UPTD Puskesmas Motongkad	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	305.527.220,00
85	Kantor UPTD Puskesmas Motongkad	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	15.000.000,00
86	Kantor UPTD Puskesmas Motongkad	Alat Laboratorium	6.000.000,00
87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Komputer	21.762.827.230,00
88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Alat Pertanian	1.113.465.393,00
89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	11.688.920.716,92
90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Alat Laboratorium	16.802.833.094,78
91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Alat Keselamatan Kerja	248.328.900,00
92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	2.250.207.627,00
93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	253.733.620,00
94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Alat Angkutan	1.075.270.000,00
95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Alat Besar	25.740.260,00
96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peralatan Olah Raga	51.387.180,00
97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	155.632.430,00
98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Alat Persenjataan	10.040.000,00
99	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Tutuyan	Alat Besar	1.955.000,00
100	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Tutuyan	Komputer	682.694.100,00
101	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Tutuyan	Alat Pertanian	2.600.000,00
102	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Tutuyan	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	316.603.245,00
103	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Tutuyan	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	68.730.000,00
104	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Modayag	Komputer	383.045.300,00
105	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Modayag	Alat Angkutan	71.890.000,00
106	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Modayag	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	72.309.840,00
107	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Modayag	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	23.488.964,00
108	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Modayag	Alat Laboratorium	13.500.000,00
109	Dinas Pemuda dan Olahraga	Komputer	149.126.500,00
110	Dinas Pemuda dan Olahraga	Peralatan Olah Raga	149.960.000,00

	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
111	Dinas Pemuda dan Olahraga	Alat Angkutan	251.150.000,00
112	Dinas Pemuda dan Olahraga	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	2.478.000,00
113	Dinas Pemuda dan Olahraga	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	132.570.000,00
114	Dinas Pemuda dan Olahraga	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	8.500.000,00
115	Dinas Pemuda dan Olahraga	Alat Laboratorium	43.200.000,00
116	Dinas Sosial	Alat Besar	153.000.000,00
117	Dinas Sosial	Komputer	422.924.504,00
118	Dinas Sosial	Alat Angkutan	140.400.000,00
119	Dinas Sosial	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	320.856.770,00
120	Dinas Sosial	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	52.815.096,00
121	Dinas Sosial	Alat Laboratorium	11.160.000,00
122	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Alat Besar	15.500.000,00
123	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Komputer	338.729.390,00
124	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Alat Keselamatan Kerja	293.084.000,00
125	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Alat Angkutan	4.039.020.300,00
126	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	83.523.900,00
127	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Alat Pertanian	40.000.000,00
128	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	313.881.300,00
129	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	149.114.200,00
130	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	4.867.500,00
131	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Alat Laboratorium	91.210.200,00
132	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Alat Persenjataan	1.000.000,00
133	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Komputer	1.159.057.780,00
134	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Alat Keselamatan Kerja	4.080.000,00
135	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Alat Angkutan	480.873.750,00
136	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	7.670.108,00
137	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	384.597.775,00

NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
138	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	105.000.000,00
139	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1.000.000,00
140	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Alat Laboratorium	137.032.525,00
141	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Komputer	374.498.050,00
142	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Alat Angkutan	294.220.000,00
143	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	190.890.000,00
144	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Alat Pertanian	15.590.398,00
145	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	220.262.491,00
146	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	140.041.750,00
147	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Alat Laboratorium	87.794.586,00
148	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Komputer	330.176.453,00
149	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Alat Keselamatan Kerja	14.374.500,00
150	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Alat Angkutan	523.944.000,00
151	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Alat Pertanian	8.000.000,00
152	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	192.587.800,00
153	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	43.405.000,00
154	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Alat Laboratorium	25.100.000,00
155	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	Komputer	52.132.955,00
156	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	Peralatan Olah Raga	16.475.000,00
157	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	Alat Angkutan	17.620.000,00
158	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	105.960.000,00
159	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	18.000.000,00
160	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1.900.000,00
161	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	Alat Laboratorium	6.000.000,00
162	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Komputer	14.912.000,00
163	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Alat Keselamatan Kerja	6.023.637,00
164	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	10.891.435,00
165	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Komputer	675.776.750,00

NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
166	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Alat Angkutan	2.517.323.390,00
167	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1.280.000,00
168	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Alat Pertanian	25.810.000,00
169	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	441.841.399,00
170	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	179.215.600,00
171	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	310.613.400,00
172	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Alat Laboratorium	35.140.000,00
173	Dinas Pertanian	Alat Besar	296.350.000,00
174	Dinas Pertanian	Komputer	803.463.935,00
175	Dinas Pertanian	Alat Angkutan	1.565.183.000,00
176	Dinas Pertanian	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	76.652.500,00
177	Dinas Pertanian	Alat Pertanian	151.945.000,00
178	Dinas Pertanian	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	784.575.656,00
179	Dinas Pertanian	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	236.473.720,00
180	Dinas Pertanian	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	25.136.600,00
181	Dinas Pertanian	Alat Laboratorium	94.297.179,00
182	Dinas Pertanian	Alat Peralatan	6.667.000,00
183	Dinas Perikanan	Komputer	401.701.000,00
184	Dinas Perikanan	Alat Keselamatan Kerja	808.500,00
185	Dinas Perikanan	Alat Angkutan	894.688.500,00
186	Dinas Perikanan	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	151.640.000,00
187	Dinas Perikanan	Alat Pertanian	84.802.300,00
188	Dinas Perikanan	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	259.447.780,00
189	Dinas Perikanan	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	165.400.000,00
190	Dinas Perikanan	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	6.000.000,00
191	Dinas Perikanan	Alat Laboratorium	432.904.200,00
192	Dinas Ketahanan Pangan	Komputer	149.064.535,00

NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
193	Dinas Ketahanan Pangan	Alat Angkutan	296.400.000,00
194	Dinas Ketahanan Pangan	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	166.608.550,00
195	Dinas Ketahanan Pangan	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	16.450.000,00
196	Dinas Ketahanan Pangan	Alat Laboratorium	3.395.000,00
197	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Komputer	538.884.550,00
198	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peralatan Proses/Produksi	19.800.000,00
199	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Alat Angkutan	809.491.000,00
200	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	629.174.605,00
201	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	883.327.034,00
202	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	493.550.000,00
203	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Alat Laboratorium	90.917.000,00
204	Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah	Komputer	4.049.570.276,00
205	Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah	Alat Keselamatan Kerja	23.414.340,00
206	Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah	Alat Angkutan	1.640.088.600,00
207	Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	32.010.000,00
208	Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	2.181.653.535,00
209	Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	466.448.770,00
210	Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah	Alat Laboratorium	1.134.456.697,00
211	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Komputer	532.289.466,00
212	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Alat Angkutan	493.780.000,00
213	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	19.000.000,00
214	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	458.299.717,00
215	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	100.338.000,00
216	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1.600.000,00
217	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Alat Laboratorium	41.345.000,00
218	Inspektorat Daerah	Komputer	588.483.942,00
219	Inspektorat Daerah	Alat Angkutan	316.980.000,00

NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
220	Inspektorat Daerah	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	27.654.000,00
221	Inspektorat Daerah	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	380.434.300,00
222	Inspektorat Daerah	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	68.900.000,00
223	Inspektorat Daerah	Alat Laboratorium	46.881.000,00
224	Badan PPELITBANGDA	Komputer	1.105.562.490,00
225	Badan PPELITBANGDA	Peralatan Olah Raga	7.500.000,00
226	Badan PPELITBANGDA	Alat Angkutan	230.280.000,00
227	Badan PPELITBANGDA	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	22.756.000,00
228	Badan PPELITBANGDA	Alat Pertanian	3.300.000,00
229	Badan PPELITBANGDA	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.051.255.603,00
230	Badan PPELITBANGDA	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	215.515.500,00
231	Badan PPELITBANGDA	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	5.000.000,00
232	Badan PPELITBANGDA	Alat Laboratorium	238.350.600,00
233	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Besar	675.459.400,00
234	Dinas Lingkungan Hidup	Komputer	372.671.983,00
235	Dinas Lingkungan Hidup	Rambu - Rambu	199.228.000,00
236	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Angkutan	785.330.000,00
237	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	16.500.000,00
238	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Pertanian	2.312.782.000,00
239	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	442.325.291,00
240	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	56.193.250,00
241	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	6.000.000,00
242	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Laboratorium	1.089.491.700,00
243	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Persenjataan	39.940.000,00
244	Dinas Pariwisata	Komputer	549.920.653,00
245	Dinas Pariwisata	Alat Keselamatan Kerja	5.310.000,00
246	Dinas Pariwisata	Rambu - Rambu	149.860.000,00

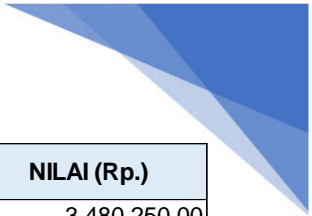


NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
247	Dinas Pariwisata	Peralatan Olah Raga	74.965.000,00
248	Dinas Pariwisata	Alat Angkutan	169.689.663,00
249	Dinas Pariwisata	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	197.890.000,00
250	Dinas Pariwisata	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	2.549.244.074,00
251	Dinas Pariwisata	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	269.872.400,00
252	Dinas Pariwisata	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	160.539.060,00
253	Dinas Pariwisata	Alat Laboratorium	793.265.000,00
254	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Komputer	288.037.098,00
255	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Alat Angkutan	346.670.000,00
256	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	2.250.000,00
257	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	143.626.826,00
258	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	83.550.000,00
259	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	5.000.000,00
260	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Alat Laboratorium	16.033.000,00
261	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Alat Besar	15.540.000,00
262	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Komputer	238.444.090,00
263	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Alat Keselamatan Kerja	99.385.000,00
264	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Alat Angkutan	812.130.000,00
265	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	207.716.450,00
266	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	84.345.420,00
267	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	3.357.750,00
268	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Alat Laboratorium	6.500.000,00
269	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Alat Peralengkapan	196.744.000,00
270	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Komputer	1.025.403.342,00
271	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Alat Angkutan	136.445.000,00
272	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	2.500.000,00
273	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Alat Pertanian	10.400.000,00

*Handwritten signature*

NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
274	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	758.507.750,00
275	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	61.400.000,00
276	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Alat Laboratorium	231.350.000,00
277	Dinas Komunikasi dan Informasi	Komputer	780.080.550,00
278	Dinas Komunikasi dan Informasi	Alat Angkutan	18.900.000,00
279	Dinas Komunikasi dan Informasi	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	9.996.800,00
280	Dinas Komunikasi dan Informasi	Alat Pertanian	4.500.000,00
281	Dinas Komunikasi dan Informasi	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	350.482.013,00
282	Dinas Komunikasi dan Informasi	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	339.992.650,00
283	Dinas Komunikasi dan Informasi	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	9.100.000,00
284	Dinas Komunikasi dan Informasi	Alat Laboratorium	35.697.700,00
285	Dinas Komunikasi dan Informasi	Alat Persenjataan	78.981.000,00
286	Dinas Perpustakaan Daerah	Komputer	93.035.602,00
287	Dinas Perpustakaan Daerah	Alat Angkutan	308.100.000,00
288	Dinas Perpustakaan Daerah	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	145.339.400,00
289	Kecamatan Tutuyan	Komputer	109.417.000,00
290	Kecamatan Tutuyan	Alat Angkutan	344.926.000,00
291	Kecamatan Tutuyan	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	129.658.164,00
292	Kecamatan Tutuyan	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	17.800.000,00
293	Kecamatan Tutuyan	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	5.000.000,00
294	Kecamatan Tutuyan	Alat Laboratorium	17.064.240,00
295	Kecamatan Kotabunan	Komputer	144.800.408,00
296	Kecamatan Kotabunan	Alat Angkutan	330.036.000,00
297	Kecamatan Kotabunan	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	177.916.228,00
298	Kecamatan Kotabunan	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	23.750.000,00
299	Kecamatan Kotabunan	Alat Laboratorium	19.828.950,00
300	Kecamatan Nuangan	Alat Besar	3.524.000,00

NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
301	Kecamatan Nuangan	Komputer	233.013.000,00
302	Kecamatan Nuangan	Alat Angkutan	382.241.000,00
303	Kecamatan Nuangan	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1.700.000,00
304	Kecamatan Nuangan	Alat Pertanian	600.000,00
305	Kecamatan Nuangan	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	254.017.330,00
306	Kecamatan Nuangan	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	22.652.530,00
307	Kecamatan Nuangan	Alat Laboratorium	39.124.900,00
308	Kecamatan Modayag	Komputer	205.823.460,00
309	Kecamatan Modayag	Alat Angkutan	335.196.000,00
310	Kecamatan Modayag	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	97.950.106,00
311	Kecamatan Modayag	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	17.000.000,00
312	Kecamatan Modayag	Alat Laboratorium	21.900.000,00
313	Kecamatan Modayag Barat	Alat Besar	2.000.000,00
314	Kecamatan Modayag Barat	Komputer	73.425.000,00
315	Kecamatan Modayag Barat	Alat Angkutan	321.861.000,00
316	Kecamatan Modayag Barat	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	143.202.564,00
317	Kecamatan Modayag Barat	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	11.040.000,00
318	Kecamatan Modayag Barat	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	5.000.000,00
319	Kecamatan Modayag Barat	Alat Laboratorium	2.200.000,00
320	Kecamatan Motongkad	Komputer	98.985.000,00
321	Kecamatan Motongkad	Alat Angkutan	322.810.000,00
322	Kecamatan Motongkad	Alat Pertanian	3.000.000,00
323	Kecamatan Motongkad	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	79.510.320,00
324	Kecamatan Motongkad	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1.695.145,00
325	Kecamatan Motongkad	Alat Laboratorium	8.000.000,00
326	Kecamatan Mooat	Komputer	95.195.562,00
327	Kecamatan Mooat	Alat Angkutan	353.971.500,00



<b>NO</b>	<b>OPD</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>NILAI (Rp.)</b>
328	Kecamatan Mooat	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	3.480.250,00
329	Kecamatan Mooat	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	155.338.550,00
330	Kecamatan Mooat	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	9.000.000,00
331	Kecamatan Mooat	Alat Laboratorium	4.500.000,00
<b>Total</b>			<b>309.256.778.883,70</b>

*Handwritten signature*

## Lampiran 15 Rincian Penghapusan Aset Tetap

No.	SKPD	Kode Barang	Kode Register	Nama / Jenis Barang	Merk / Type	Spesifikasi	Tahun Perolehan	Jumlah		Alasan Penghapusan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	Nilai Buku per 31 Desember 2021	Ket
								Barang	Harga				
1	Dinas Kesehatan	1.3.3.01.001.006.010	000157	Bangunan Klinik/Puskesmas			2015	1	179.290.000	Spek Gedung tidak sesuai Spesifikasi Puskesmas PONED	54.534.042	124.755.958	Dibongkar
Jumlah Dinas Kesehatan									179.290.000		54.534.042	124.755.958	
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan	1.3.2.05.002.001.003	000029	Kursi Besi/Metal	Vio / Kursi Biro	-	2009	1	2.500.000	Rusak Berat	2.500.000	-	Dibakar
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan	1.3.2.05.002.001.003	000030 s/d 000035	Kursi Besi/Metal	Chitosse / -	-	2009	6	1.750.002	Rusak Berat	1.750.002	-	Dibakar
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan	1.3.2.05.002.001.003	000025 s/d 000027	Kursi Besi/Metal	Olympic / Metal	-	2010	3	1.050.000	Rusak Berat	1.050.000	-	Dibakar
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan	1.3.2.05.002.004.003	000001	A.C. Window	LG / S05LFG	-	2012	1	4.400.000	Rusak Berat	4.400.000	-	Dibakar
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan	1.3.2.05.002.001.032	000001	Kursi Putar	Donat Lixor / 2 AL HDT	-	2014	1	2.500.000	Rusak Berat	2.500.000	-	Dibakar
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan	1.3.2.05.002.001.032	000008	Kursi Putar	Brother / BR 513 AH	-	2014	1	850.000	Rusak Berat	850.000	-	Dibakar
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan	1.3.2.07.001.004.190	000001	alat kedokteran bedah lainnya (dst)	TP-LINK / TL-SC3430	-	2015	1	2.500.000	Rusak Berat	2.500.000	-	Dibakar
9	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan	1.3.2.05.002.002.003	000006	Jam Elektronik	Quartz / jam dinding	-	2017	1	650.000	Rusak Berat	650.000	-	Dibakar
Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan									16.200.002		16.200.002	-	
10	Dinas Sosial	1.3.2.10.002.003.003	000011	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon / MP 287	-	2012	1	1.000.000	Rusak Berat	1.000.000	-	Dibakar
11	Dinas Sosial	1.3.2.05.002.001.032	000009	Kursi Putar	Brtoher / -	-	2014	1	1.040.585	Rusak Berat	1.040.585	-	Dibakar
12	Dinas Sosial	1.3.2.05.002.004.004	000001	A.C. Split	LG / -	-	2014	1	4.200.000	Rusak Berat	4.200.000	-	Dibakar
13	Dinas Sosial	1.3.2.10.002.003.003	000014	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / PIXMA IP2770	-	2016	1	1.199.000	Rusak Berat	1.199.000	-	Dibakar
14	Dinas Sosial	1.3.2.05.002.005.002	000001	Kompor Gas (Alat Dapur)	RINNAI	-	2017	1	750.000	Rusak Berat	750.000	-	Dibakar
Jumlah Dinas Sosial									8.189.585		8.189.585	-	
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.3.2.06.001.002.003	000001	Camera Electronic	Olympus / Camera Digital		2009	1	5.000.000	Rusak Berat	5.000.000	-	Dibakar
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.3.2.05.002.001.039	000001	Meja Komputer	Aktiv / -		2010	1	350.000	Rusak Berat	350.000	-	Dibakar
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.3.2.05.002.004.006	000002	Kipas Angin	Cosmos / -		2010	1	500.000	Rusak Berat	500.000	-	Dibakar
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.3.2.05.002.006.048	000001	Handy Cam	Sony / -		2011	1	8.500.000	Rusak Berat	8.500.000	-	Dibakar
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.3.2.10.002.003.003	000001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma / 2500		2014	1	1.000.000	Rusak Berat	1.000.000	-	Dibakar
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.3.2.05.002.001.032	000005 s/d 000006	Kursi Putar	Brother / BR106/Kursi Kerja Pimpinan		2015	2	3.200.000	Rusak Berat	3.200.000	-	Dibakar
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.3.2.10.002.003.003	000002 s/d 000003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / IP2700		2015	2	3.000.000	Rusak Berat	3.000.000	-	Dibakar
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.3.2.10.002.003.003	000009 s/d 000010	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Pixma Mp 287		2016	2	3.000.000	Rusak Berat	3.000.000	-	Dibakar
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.3.2.10.002.003.003	000011	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L.220		2016	1	3.194.000	Rusak Berat	3.194.000	-	Dibakar
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.3.2.10.002.003.003	000015 s/d 000016	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L seiries L455		2017	2	9.955.000	Rusak Berat	9.955.000	-	Dibakar
Jumlah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa									37.699.000		37.699.000	-	
25	Kantor UPTD Puskesmas Tutuyan	1.3.2.05.001.005.012	000001	Mesin Absensi	Solution / X100-C	-	2016	1	5.000.000	Rusak Berat	5.000.000	-	Dibakar
Jumlah Kantor UPTD Puskesmas Tutuyan									5.000.000		5.000.000	-	
26	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Modayag	1.3.2.05.002.001.032	000001	Kursi Putar	Frontline / Hidrolik/Hitam	-	2015	1	1.040.585	Rusak Berat	1.040.585	-	Dibakar
27	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Modayag	1.3.2.05.002.006.008	000001	Sound System	BSW / KU 9900/Wireless	-	2015	1	2.500.000	Rusak Berat	2.500.000	-	Dibakar
28	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Modayag	1.3.2.10.002.003.003	000001 s/d 000002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / iP2770	-	2015	2	1.300.000	Rusak Berat	1.300.000	-	Dibakar
29	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Modayag	1.3.2.05.001.005.012	000001	Mesin Absensi	SOLUTION / X 105	-	2016	1	5.000.000	Rusak Berat	5.000.000	-	Dibakar
30	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Modayag	1.3.2.10.002.003.003	000003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / PIXMA E410 3 IN 1	-	2018	1	1.500.000	Rusak Berat	1.500.000	-	Dibakar
31	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Modayag	1.3.2.10.002.003.003	000004 s/d 000005	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / PIXMA IP8270S	-	2018	2	1.600.000	Rusak Berat	1.566.666	33.334	Dibakar
Jumlah Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Modayag									12.940.585		12.907.251	33.334	

No.	SKPD	Kode Barang	Kode Register	Nama / Jenis Barang	Merk / Type	Spesifikasi	Tahun Perolehan	Jumlah		Alasan Penghapusan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	Nilai Buku per 31 Desember 2021	Ket
								Barang	Harga				
32	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.05.001.004.001	000003	Lemari Besi/Metal	Vip / V.202	-	2012	1	3.540.000	Rusak Berat	3.540.000	-	Dibakar
33	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.05.002.001.024	000041	Meja 1/2 Biro	Solid	-	2012	1	770.000	Rusak Berat	770.000	-	Dibakar
34	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.05.002.001.024	000042 s/d 000043	Meja 1/2 Biro	Solid	-	2012	2	1.540.000	Rusak Berat	1.540.000	-	Dibakar
35	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.05.002.001.024	000045	Meja 1/2 Biro	Sodik	-	2012	1	770.000	Rusak Berat	770.000	-	Dibakar
36	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.05.002.001.024	000085	Meja 1/2 Biro	Sodik	-	2012	1	770.000	Rusak Berat	770.000	-	Dibakar
37	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.05.002.001.024	000086	Meja 1/2 Biro	General / General	-	2012	1	500.000	Rusak Berat	500.000	-	Dibakar
38	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.05.002.001.024	000087	Meja 1/2 Biro	General / General	-	2012	1	500.000	Rusak Berat	500.000	-	Dibakar
39	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.05.002.004.003	000001	A.C. Window	LG 2010	-	2012	1	6.500.000	Rusak Berat	6.500.000	-	Dibakar
40	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.10.001.002.002	000003	Lap Top	Toshiba / i5/Satelit L840	XB2255464W	2012	1	14.000.000	Rusak Berat	14.000.000	-	Dibakar
41	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.10.001.002.003	000004	Note Book	TOSHIBA / SATTELITTE L640	7C063758W	2012	1	14.000.000	Rusak Berat	14.000.000	-	Dibakar
42	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.10.001.002.003	000005	Note Book	TOSHIBA / SATTELITTE L640	9C032831C	2012	1	14.000.000	Rusak Berat	14.000.000	-	Dibakar
43	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.10.001.002.003	000021	Note Book	Toshiba / Satellite C640	-	2012	1	8.482.500	Rusak Berat	8.482.500	-	Dibakar
44	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.10.002.003.003	000030	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / MX 366	-	2012	1	2.057.500	Rusak Berat	2.057.500	-	Dibakar
45	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.5.01.001.001.012	000001	Buku Umum Lain-lain	-	-	2012	1	1.050.000	Lewat masa manfaat/Rusak Berat	-	1.050.000	Dibakar
46	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.5.01.001.001.012	000002	Buku Umum Lain-lain	-	-	2012	1	1.125.000	Lewat masa manfaat/Rusak Berat	-	1.125.000	Dibakar
47	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.5.01.001.007.005	000003 s/d 000004	Management dan Perkantoran	-	-	2012	2	2.250.000	Lewat masa manfaat/Rusak Berat	-	2.250.000	Dibakar
48	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.5.01.001.007.005	000005	Management dan Perkantoran	-	-	2012	1	1.350.000	Lewat masa manfaat/Rusak Berat	-	1.350.000	Dibakar
49	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.5.01.001.007.005	000006	Management dan Perkantoran	-	-	2012	1	1.190.000	Lewat masa manfaat/Rusak Berat	-	1.190.000	Dibakar
50	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.5.01.001.007.005	000007	Management dan Perkantoran	-	-	2012	1	1.400.000	Lewat masa manfaat/Rusak Berat	-	1.400.000	Dibakar
51	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.5.01.001.007.005	000008	Management dan Perkantoran	-	-	2012	1	3.150.000	Lewat masa manfaat/Rusak Berat	-	3.150.000	Dibakar
52	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.5.01.001.007.005	000009	Management dan Perkantoran	-	-	2012	1	1.750.000	Lewat masa manfaat/Rusak Berat	-	1.750.000	Dibakar
53	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.5.01.001.007.005	000010	Management dan Perkantoran	-	-	2012	1	3.500.000	Lewat masa manfaat/Rusak Berat	-	3.500.000	Dibakar
54	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.5.01.001.007.005	000011	Management dan Perkantoran	-	-	2012	1	5.250.000	Lewat masa manfaat/Rusak Berat	-	5.250.000	Dibakar
55	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.5.01.001.007.005	000012	Management dan Perkantoran	-	-	2012	1	1.750.000	Lewat masa manfaat/Rusak Berat	-	1.750.000	Dibakar
56	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.5.01.001.007.005	000013	Management dan Perkantoran	-	-	2012	1	1.190.000	Lewat masa manfaat/Rusak Berat	-	1.190.000	Dibakar
57	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.05.002.004.001	000005	Lemari Es	SHARP / 1 Pintu	-	2013	1	2.500.000	Rusak Berat	2.500.000	-	Dibakar
58	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.06.001.002.069	000003	Camera View Finder	SONNY / W710	-	2013	1	2.500.000	Rusak Berat	2.500.000	-	Dibakar
59	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.10.001.002.002	000008	Lap Top	ACER Aspire E1-471-32342G50Mnks / ZOT	-	2013	1	7.000.000	Rusak Berat	7.000.000	-	Dibakar
60	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.10.002.003.003	000001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASERJET / Pro M 1212 Nfmfp	CNG9C3101L	2013	1	50.000.000	Rusak Berat	50.000.000	-	Dibakar
61	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.05.002.001.035	000001	Bangku Tunggu	Azero / Kursi Sambung	-	2014	1	2.225.000	Rusak Berat	2.225.000	-	Dibakar
62	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.05.002.005.026	000001	Alat Dapur lainnya	Vicenza / CR472/Cangkir Tamu	-	2015	1	856.000	Rusak Berat	856.000	-	Dibakar
63	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.05.002.006.038	000006	Dispenser	Miyako / Standing/Hot&Cool	-	2016	1	3.335.000	Rusak Berat	3.335.000	-	Dibakar
Jumlah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									160.801.000		135.846.000	24.955.000	

No.	SKPD	Kode Barang	Kode Register	Nama / Jenis Barang	Merk / Type	Spesifikasi	Tahun Perolehan	Jumlah		Alasan Penghapusan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	Nilai Buku per 31 Desember 2021	Ket
								Barang	Harga				
64	Bagian Umum	1.3.2.05.002.004.006	000001 s/d 000002	Kipas Angin	-	-	2009	2	6.250.000	Rusak Berat	6.250.000	-	Dibakar
65	Bagian Umum	1.3.2.05.001.001.003	000001	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	-	-	2010	1	3.500.000	Rusak Berat	3.500.000	-	Dibakar
66	Bagian Umum	1.3.2.05.001.001.003	000002	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	-	-	2010	1	2.000.000	Rusak Berat	2.000.000	-	Dibakar
67	Bagian Umum	1.3.2.05.001.004.028	000001	Lemari Makan	-	-	2010	1	3.901.800	Rusak Berat	3.901.800	-	Dibakar
68	Bagian Umum	1.3.2.06.001.001.048	000014	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	-	2011	1	11.500.000	Rusak Berat	11.500.000	-	Dibakar
69	Bagian Umum	1.3.2.10.002.001.018	000001	peralatan main/frame lainnya (dst)	Hard Drive	-	2011	1	11.000.000	Rusak Berat	11.000.000	-	Dibakar
70	Bagian Umum	1.3.2.05.001.003.007	000001	Mesin Fotocopy Folio	KYOCERA / FS-1135MFP	-	2012	1	39.325.000	Rusak Berat	39.325.000	-	Dibakar
71	Bagian Umum	1.3.2.05.001.004.001	000014	Lemari Besi/Metal	VIP / 2 Pintu	-	2012	1	2.304.000	Rusak Berat	2.304.000	-	Dibakar
72	Bagian Umum	1.3.2.10.001.002.001	000043	P.C Unit	-	-	2012	1	4.994.000	Rusak Berat	4.994.000	-	Dibakar
73	Bagian Umum	1.3.2.10.001.002.001	000053	P.C Unit	Samsung / Intel Monitor Samsung	Monitor CN : LS 19PUYKFXD	2012	1	9.312.500	Rusak Berat	9.312.500	-	Dibakar
74	Bagian Umum	1.3.2.10.001.002.001	000054	P.C Unit	- / Intel Core 1.5.3 Ghz	-	2012	1	8.500.000	Rusak Berat	8.500.000	-	Dibakar
75	Bagian Umum	1.3.2.10.001.002.001	000056	P.C Unit	Intel Core / Processor Intel Core i5 230 CPU @3.00 GHz (RAM) 2.	-	2012	1	8.000.000	Rusak Berat	8.000.000	-	Dibakar
76	Bagian Umum	1.3.2.10.002.003.003	000016	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon / Foto Copy	-	2012	1	849.989	Rusak Berat	849.989	-	Dibakar
77	Bagian Umum	1.3.2.10.002.003.003	000017	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon / MX 360	-	2012	1	1.700.000	Rusak Berat	1.700.000	-	Dibakar
78	Bagian Umum	1.3.2.10.002.003.003	000045 s/d 000046	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon / Pixma iP 2770	-	2012	2	1.700.000	Rusak Berat	1.700.000	-	Dibakar
79	Bagian Umum	1.3.2.05.001.004.005	000009	Filing Cabinet Besi	VIP / -	-	2013	1	1.599.840	Rusak Berat	1.599.840	-	Dibakar
80	Bagian Umum	1.3.2.05.001.004.005	000010 s/d 000013	Filing Cabinet Besi	VIP / -	-	2013	4	7.359.440	Rusak Berat	7.359.440	-	Dibakar
81	Bagian Umum	1.3.2.05.001.004.005	000014	Filing Cabinet Besi	VIP / -	-	2013	1	2.145.990	Rusak Berat	2.145.990	-	Dibakar
82	Bagian Umum	1.3.2.05.001.004.005	000015 s/d 000017	Filing Cabinet Besi	VIP / -	-	2013	2	3.679.720	Rusak Berat	3.679.720	-	Dibakar
83	Bagian Umum	1.3.2.05.001.004.005	000018 s/d 000023	Filing Cabinet Besi	VIP / -	-	2013	5	6.420.700	Rusak Berat	6.420.700	-	Dibakar
84	Bagian Umum	1.3.2.05.001.004.005	000039	Filing Cabinet Besi	VIP / -	-	2013	1	2.145.010	Rusak Berat	2.145.010	-	Dibakar
85	Bagian Umum	1.3.2.05.001.005.003	000001 s/d 000003	Papan Visual/Papan Nama	- / Papan visual elektrik	-	2013	3	32.175.000	Rusak Berat	32.175.000	-	Dibakar
86	Bagian Umum	1.3.2.05.002.004.004	000011 s/d 000012	A.C. Split	LG / S12	-	2013	2	12.210.000	Rusak Berat	12.210.000	-	Dibakar
87	Bagian Umum	1.3.2.05.002.004.004	000023	A.C. Split	LG / S09LTG	-	2013	1	5.500.000	Rusak Berat	5.500.000	-	Dibakar
88	Bagian Umum	1.3.2.05.003.003.004	000001	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Frontline / kursi manager	-	2013	1	819.720	Rusak Berat	819.720	-	Dibakar
89	Bagian Umum	1.3.2.05.003.003.009	000013 s/d 0000147	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Frontline / kursi staff	-	2013	2	874.280	Rusak Berat	874.280	-	Dibakar
90	Bagian Umum	1.3.2.05.003.003.009	000018	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Frontline / Kursi staff	-	2013	1	437.140	Rusak Berat	437.140	-	Dibakar
91	Bagian Umum	1.3.2.05.003.003.009	000028 s/d 000030	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Frontline / kursi staff	-	2013	3	1.311.420	Rusak Berat	1.311.420	-	Dibakar
92	Bagian Umum	1.3.2.05.003.003.009	000053 s/d 000054	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Frontline / kursi staff	-	2013	2	874.280	Rusak Berat	874.280	-	Dibakar
93	Bagian Umum	1.3.2.05.003.003.009	000058 s/d 000062	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Frontline / kursi staff	-	2013	5	2.185.700	Rusak Berat	2.185.700	-	Dibakar
94	Bagian Umum	1.3.2.06.003.009.004	000004	peralatan antena uhf lainnya (dst)	MATRIX / Antena Parabola	-	2013	1	10.000.000	Rusak Berat	10.000.000	-	Dibakar
95	Bagian Umum	1.3.2.05.002.005.009	000007 s/d 000013	Tabung Gas	Krakatau Protec / Tabung Pemadam Kebakaran	-	2014	7	10.850.000	Rusak Berat	10.850.000	-	Dibakar
96	Bagian Umum	1.3.2.07.001.004.190	000001	alat kedokteran bedah lainnya (dst)	SONNY / Kamera CCTV	-	2014	1	94.600.000	Rusak Berat	94.600.000	-	Dibakar
97	Bagian Umum	1.3.2.10.001.002.001	000051	P.C Unit	slm-x	-	2014	1	15.000.000	Rusak Berat	15.000.000	-	Dibakar

No.	SKPD	Kode Barang	Kode Register	Nama / Jenis Barang	Merk / Type	Spesifikasi	Tahun Perolehan	Jumlah		Alasan Penghapusan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	Nilai Buku per 31 Desember 2021	Ket
								Barang	Harga				
98	Bagian Umum	1.3.2.10.002.003.003	000002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / Pixma ip 2770	-	2014	1	847.500	Rusak Berat	847.500	-	Dibakar
99	Bagian Umum	1.3.2.10.002.003.003	000003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / MG 2470	-	2014	1	1.495.000	Rusak Berat	1.495.000	-	Dibakar
100	Bagian Umum	1.3.2.05.001.001.004	000001	Mesin Ketik Listrik	Brother / GX-6750	-	2015	1	3.000.000	Rusak Berat	3.000.000	-	Dibakar
101	Bagian Umum	1.3.2.05.002.001.032	000021	Kursi Putar	Hidrolik / PA-86 HD warna hitam	-	2015	1	1.100.000	Rusak Berat	1.100.000	-	Dibakar
102	Bagian Umum	1.3.2.05.002.004.004	000026 s/d 000027	A.C. Split	Samsung / 1/2 PK	-	2015	2	9.310.000	Rusak Berat	9.310.000	-	Dibakar
103	Bagian Umum	1.3.2.05.002.006.002	000027	Televisi	Samsung / TV LED	-	2015	1	5.690.000	Rusak Berat	5.690.000	-	Dibakar
104	Bagian Umum	1.3.2.05.002.006.007	000001 s/d 000002	Loudspeaker	Huper / Speaker Subwofer	-	2015	2	26.400.000	Rusak Berat	26.400.000	-	Dibakar
105	Bagian Umum	1.3.2.05.003.002.002	000002	Meja Rapat Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	Lokal / Persegi Panjang/Kayu kelas II	-	2015	1	49.148.000	Rusak Berat	49.148.000	-	Dibakar
106	Bagian Umum	1.3.2.06.001.001.036	000001	Microphone/Wireless MIC	Shure	-	2015	1	2.915.000	Rusak Berat	2.915.000	-	Dibakar
107	Bagian Umum	1.3.2.06.001.001.096	000003 s/d 000004	peralatan studio audio lainnya (dst)	Kabel Speaker	-	2015	2	4.400.000	Rusak Berat	4.400.000	-	Dibakar
108	Bagian Umum	1.3.2.06.001.002.069	000002	Camera View Finder	DSLR	-	2015	1	24.000.000	Rusak Berat	24.000.000	-	Dibakar
109	Bagian Umum	1.3.2.10.001.002.001	000002	P.C Unit	Core i3	-	2015	1	6.790.000	Rusak Berat	6.790.000	-	Dibakar
110	Bagian Umum	1.3.2.10.002.001.012	000021	Hard Disk	Toshiba / External	-	2015	1	1.000.000	Rusak Berat	1.000.000	-	Dibakar
111	Bagian Umum	1.3.2.10.002.003.003	000052 s/d 000061	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / iP 2770	-	2015	10	10.000.000	Rusak Berat	10.000.000	-	Dibakar
112	Bagian Umum	1.3.2.10.002.004.001	000001	Server	Server CPU HP / Proliant Gen9	-	2015	1	80.000.000	Rusak Berat	80.000.000	-	Dibakar
113	Bagian Umum	1.3.2.10.002.004.002	000004 s/d 000005	Router	Wireless Access Point	-	2015	2	2.000.000	Rusak Berat	2.000.000	-	Dibakar
114	Bagian Umum	1.3.2.10.002.004.002	000007	Router	Wireless Access Point	-	2015	1	1.000.000	Rusak Berat	1.000.000	-	Dibakar
115	Bagian Umum	1.3.2.05.001.003.007	000004	Mesin Fotocopy Folio	Kyocera / FS-1120MFP	-	2016	1	16.665.000	Rusak Berat	16.665.000	-	Dibakar
116	Bagian Umum	1.3.2.05.002.001.030	000699 s/d 000700	Kursi Rapat	FRONTLINE / KURSI PUTAR EC 069	-	2016	2	12.000.000	Rusak Berat	12.000.000	-	Dibakar
117	Bagian Umum	1.3.2.05.002.004.004	000045 s/d 000048	A.C. Split	LG / S18NLA N51	-	2016	4	37.884.000	Rusak Berat	37.884.000	-	Dibakar
118	Bagian Umum	1.3.2.05.002.004.004	000051 s/d 000052	A.C. Split	LG / T09NLA	-	2016	2	13.970.000	Rusak Berat	13.970.000	-	Dibakar
119	Bagian Umum	1.3.2.05.002.006.008	000006 s/d 000007	Sound System	TOA / Pengeras suara	-	2016	2	1.430.000	Rusak Berat	1.430.000	-	Dibakar
120	Bagian Umum	1.3.2.05.002.006.016	000001 s/d 000010	Microphone Table Stand	SURE / Hitam	-	2016	11	9.982.500	Rusak Berat	9.982.500	-	Dibakar
121	Bagian Umum	1.3.2.06.001.002.105	000009	Layar Film/Projector	Sony / VPL-EX255	-	2016	1	15.994.000	Rusak Berat	15.994.000	-	Dibakar
122	Bagian Umum	1.3.2.10.001.002.001	000061 s/d 000063	P.C Unit	Komputer PC	-	2016	3	59.878.500	Rusak Berat	59.878.500	-	Dibakar
123	Bagian Umum	1.3.2.10.002.003.003	000018 s/d 000019	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Pixma iP2770	-	2016	2	1.980.000	Rusak Berat	1.980.000	-	Dibakar
124	Bagian Umum	1.3.2.10.002.003.003	000020 s/d 000021	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Pixma iP2770	-	2016	2	1.980.000	Rusak Berat	1.980.000	-	Dibakar
125	Bagian Umum	1.3.2.10.002.003.003	000062 s/d 000063	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L220	-	2016	2	7.500.000	Rusak Berat	7.500.000	-	Dibakar
126	Bagian Umum	1.3.2.05.002.004.004	000056	A.C. Split	LG / Dual inverter	-	2017	1	9.875.000	Rusak Berat	9.875.000	-	Dibakar
127	Bagian Umum	1.3.2.05.002.004.004	000057	A.C. Split	LG / Dual inverter	-	2017	1	5.400.000	Rusak Berat	5.400.000	-	Dibakar
128	Bagian Umum	1.3.2.05.002.006.038	000024	Dispenser	Miyako / WD-290 Ho/Hot&Cool	-	2017	1	3.007.125	Rusak Berat	3.007.125	-	Dibakar
129	Bagian Umum	1.3.2.05.002.006.069	000006 s/d 000009	Lampu	LED / lampu taman/light	-	2017	4	2.970.000	Rusak Berat	2.970.000	-	Dibakar
130	Bagian Umum	1.3.2.06.001.001.036	000009	Microphone/Wireless MIC	Krezt	-	2017	1	9.288.675	Rusak Berat	9.288.675	-	Dibakar
131	Bagian Umum	1.3.2.06.001.001.048	000023 s/d 000027	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink	-	2017	5	7.425.000	Rusak Berat	7.425.000	-	Dibakar



No.	SKPD	Kode Barang	Kode Register	Nama / Jenis Barang	Merk / Type	Spesifikasi	Tahun Perolehan	Jumlah		Alasan Penghapusan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	Nilai Buku per 31 Desember 2021	Ket
								Barang	Harga				
132	Bagian Umum	1.3.2.06.001.001.048	000032 s/d 000033	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink	-	2017	2	1.540.000	Rusak Berat	1.540.000	-	Dibakar
133	Bagian Umum	1.3.2.06.001.002.105	000012	Layar Film/Projector	BenQ	-	2017	1	11.770.000	Rusak Berat	11.770.000	-	Dibakar
134	Bagian Umum	1.3.2.06.001.002.105	000013	Layar Film/Projector	BenQ	-	2017	1	9.955.000	Rusak Berat	9.955.000	-	Dibakar
135	Bagian Umum	1.3.2.07.001.004.190	000004	alat kedokteran bedah lainnya (dst)	Cctv / 4 Chanel	-	2017	1	6.050.000	Rusak Berat	6.050.000	-	Dibakar
136	Bagian Umum	1.3.2.07.001.004.190	000005	alat kedokteran bedah lainnya (dst)	Cctv / 16 Chanel	-	2017	1	2.750.000	Rusak Berat	2.750.000	-	Dibakar
137	Bagian Umum	1.3.2.10.001.002.001	000069 s/d 000070	P.C Unit	Hp / Intel core i3	-	2017	2	22.528.000	Rusak Berat	22.528.000	-	Dibakar
138	Bagian Umum	1.3.2.10.002.003.003	000026 s/d 000027	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Pixma IP2770	-	2017	2	2.937.000	Rusak Berat	2.937.000	-	Dibakar
139	Bagian Umum	1.3.2.10.002.003.003	000031 s/d 000032	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Pixma MP 287	-	2017	2	4.840.000	Rusak Berat	4.840.000	-	Dibakar
140	Bagian Umum	1.3.2.10.002.003.003	000034 s/d 000036	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Pixma MP 287	-	2017	3	4.405.500	Rusak Berat	4.405.500	-	Dibakar
141	Bagian Umum	1.3.2.10.002.004.001	000001	Server	-	-	2017	1	79.860.000	Rusak Berat	79.860.000	-	Dibakar
142	Bagian Umum	1.3.5.02.002.003.008	000026	Barang Kerajinan Lain-lain	-	-	2017	1	10.000.000	Rusak Berat		10.000.000	Dibakar
<b>Jumlah Bagian Umum</b>									<b>927.986.329</b>		<b>917.986.329</b>	<b>10.000.000</b>	
143	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.3.2.06.002.001.006	000016	Handy Talky (HT)	Weierwei / UV-3R	-	2013	1	3.443.000	Rusak Berat	3.443.000	-	Dibakar
144	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.3.2.06.002.002.001	000003 s/d 000004	Unit Tranceiver Ssb Portable	Motorola / CP1660	-	2016	2	6.200.000	Rusak Berat	6.200.000	-	Dibakar
145	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.3.2.10.002.003.003	000002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L365	-	2016	1	3.500.000	Rusak Berat	3.500.000	-	Dibakar
146	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.3.2.05.002.001.032	000003 s/d 000004	Kursi Putar	Brother / Kursi Kerja	-	2017	2	3.000.000	Rusak Berat	3.000.000	-	Dibakar
147	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.3.2.06.002.001.006	000039 s/d 000043	Handy Talky (HT)	Dolton / DN-702 Professional	-	2017	5	12.500.000	Rusak Berat	12.500.000	-	Dibakar
148	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.3.2.10.002.001.012	000001 s/d 000002	Hard Disk	Toshiba	-	2017	2	3.960.000	Rusak Berat	3.960.000	-	Dibakar
149	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.3.2.10.002.003.003	000008 s/d 000009	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	-	2017	2	6.952.000	Rusak Berat	6.952.000	-	Dibakar
<b>Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran</b>									<b>39.555.000</b>		<b>39.555.000</b>	<b>-</b>	
150	Badan Pengelolah Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1.3.2.02.001.001.003	000004	Station Wagon	Toyota / Fortuner 2.7.6 Lux A/T/TRD/2015	MHFZX69G9F707 8335 - 2TR8811873 - I-05601258 - DB 1124 N	2015	1	512.818.000	Dijual ke mantan Pejabat Wakil Bupati	411.322.771	101.495.229	Dijual
<b>Jumlah Badan Pengelolah Keuangan Dan Pendapatan Daerah</b>									<b>512.818.000</b>		<b>411.322.771</b>	<b>101.495.229</b>	
<b>Total</b>									<b>1.900.479.501</b>		<b>1.639.239.980</b>	<b>261.239.521</b>	

Lampiran 16 Aset Tetap Gedung Bangunan Tahun 2022


NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12.545.637.073,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	970.145.950,00
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	212.400.000,00
4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	618.678.570,00
5	Bagian Umum, Sekretariat Daerah	Bangunan Gedung Kantor Permanen	32.932.256.558,00
6	Bagian Umum, Sekretariat Daerah	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	789.901.478,00
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Gedung Kantor Permanen	13.481.163.619,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	341.612.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	130.000.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	586.113.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2.638.732.999,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1.138.555.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	257.369.850,00
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	717.332.000,00
15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	5.811.171.900,00
16	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Gedung Pabrik Darurat	249.200.000,00
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	49.793.832,00
18	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	248.318.100,00
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	610.435.000,00
20	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Istana Peninggalan	2.106.592.598,00
21	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten	98.360.430,00
22	Dinas Perhubungan	Gedung Pos Jaga Permanen	197.265.000,00
23	Dinas Perhubungan	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	46.500.000,00
24	Dinas Perhubungan	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	484.706.698,00
25	Dinas Perhubungan	Bangunan Pengujian Kelaikan Lain-lain (dst)	698.900.000,00
26	Dinas Kesehatan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.569.722.446,00

NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
27	Dinas Kesehatan	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1.481.188.000,00
28	Dinas Kesehatan	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1.086.840.000,00
29	Dinas Kesehatan	Bangunan Rumah Sakit Umum	31.403.926.122,00
30	Dinas Kesehatan	Bangunan Rumah Sakit Khusus	3.839.676.796,00
31	Dinas Kesehatan	Bangunan Klinik/Puskesmas	39.095.498.595,90
32	Dinas Kesehatan	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	4.298.254.000,00
33	Dinas Kesehatan	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1.795.383.633,00
34	Dinas Kesehatan	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1.469.612.039,00
35	Dinas Kesehatan	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	190.364.000,00
36	Dinas Kesehatan	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	904.332.989,00
37	Dinas Kesehatan	Istana Peninggalan	1.945.228.000,00
38	UPTD Puskesmas Kotabunan	Bangunan Gedung Kantor Darurat	2.500.000,00
39	UPTD Puskesmas Nuangan	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	274.429.000,00
40	UPTD Puskesmas Modayag	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	40.000.000,00
41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9.033.989.679,00
42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	171.356.951,00
43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	76.000.000,00
44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	9.755.706.866,00
45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	504.882.000,00
46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	25.000.000,00
47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	92.757.500,00
48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	100.945.515.930,00
49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	412.051.538,00
50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	5.955.168.560,00
51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Darurat	2.500.000,00
52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	12.474.647.058,00
53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1.783.589.577,00

	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	79.853.000,00
55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	4.661.152.100,00
56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Taman Permanen	349.009.263,00
57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rumah Negara Golongan I Tipe D Semi Permanen	15.000.000,00
58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	12.788.594.167,00
59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	31.987.200,00
60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asrama Permanen	2.041.856.000,00
61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asrama Semi Permanen	57.156.450,00
62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Istana Peninggalan	3.784.558.918,00
63	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Tutuyan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.128.794.000,00
64	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Tutuyan	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	239.550.000,00
65	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Tutuyan	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	239.523.000,00
66	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Tutuyan	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	377.845.000,00
67	Dinas Pemuda dan Olahraga	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	254.321.000,00
68	Dinas Pemuda dan Olahraga	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	853.184.172,00
69	Dinas Sosial	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4.158.123.729,00
70	Dinas Sosial	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	155.000.000,00
71	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bangunan Gedung Kantor Permanen	483.494.000,00
72	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	169.910.000,00
73	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.895.211.452,00
74	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	199.865.000,00
75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.944.590.300,00
76	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.184.171.973,00
77	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	434.644.068,00
78	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	423.450.720,00
79	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2.862.206.400,00
80	Dinas Pertanian	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.853.275.850,00

	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
81	Dinas Pertanian	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	123.016.150,00
82	Dinas Pertanian	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	376.600.000,00
83	Dinas Pertanian	Bangunan Rumah Sakit Hewan	875.990.000,00
84	Dinas Pertanian	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	174.684.700,00
85	Dinas Pertanian	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	54.615.000,00
86	Dinas Pertanian	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1.174.655.000,00
87	Dinas Pertanian	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	520.027.000,00
88	Dinas Pertanian	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	47.000.000,00
89	Dinas Pertanian	Istana Peninggalan	70.778.000,00
90	Dinas Perikanan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	166.255.000,00
91	Dinas Perikanan	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	56.968.078,00
92	Dinas Perikanan	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	5.646.731.042,00
93	Dinas Perikanan	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	808.550.850,00
94	Dinas Perikanan	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	738.481.000,00
95	Dinas Perikanan	Tugu Peringatan Lainnya	50.550.000,00
96	Dinas Ketahanan Pangan	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	107.177.250,00
97	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1.173.691.662,00
98	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	27.800.953.501,00
99	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	905.312.000,00
100	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pagar Permanen	476.983.397,00
101	Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7.365.013.875,00
102	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4.111.342.802,99
103	Badan PPELITBANGDA	Bangunan Gedung Kantor Permanen	99.700.000,00
104	Badan PPELITBANGDA	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	4.517.727.000,00
105	Badan PPELITBANGDA	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	199.900.000,00
106	Badan PPELITBANGDA	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	84.900.000,00
107	Badan PPELITBANGDA	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	49.860.000,00

NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
108	Dinas Lingkungan Hidup	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4.397.049.900,00
109	Dinas Lingkungan Hidup	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	5.000.000,00
110	Dinas Lingkungan Hidup	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	499.454.450,00
111	Dinas Lingkungan Hidup	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	99.851.811,00
112	Dinas Lingkungan Hidup	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	81.305.000,00
113	Dinas Lingkungan Hidup	Istana Peninggalan	570.299.000,00
114	Dinas Pariwisata	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.192.558.761,00
115	Dinas Pariwisata	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1.628.707.600,00
116	Dinas Pariwisata	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	963.290.000,00
117	Dinas Pariwisata	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	100.000.000,00
118	Dinas Pariwisata	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	300.000.000,00
119	Dinas Pariwisata	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	179.930.000,00
120	Dinas Pariwisata	Gedung Menara Peninjau Permanen	250.000.000,00
121	Dinas Pariwisata	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	608.473.000,00
122	Dinas Pariwisata	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	100.000.000,00
123	Dinas Pariwisata	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	773.470.000,00
124	Dinas Pariwisata	Bangunan Parkir lainnya (dst)	549.022.000,00
125	Dinas Pariwisata	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen	674.531.000,00
126	Dinas Pariwisata	Motel Semi Permanen	233.610.000,00
127	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.940.608.000,00
128	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Gedung Garasi/Pool Permanen	50.000.000,00
129	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	96.300.000,00
130	Dinas Komunikasi dan Informasi	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7.780.708.000,00
131	Dinas Komunikasi dan Informasi	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	239.842.000,00
132	Kecamatan Tutuyan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.071.110.000,00
133	Kecamatan Tutuyan	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	199.762.000,00
134	Kecamatan Kotabunan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	40.000.000,00



NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
135	Kecamatan Kotabunan	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	248.665.958,00
136	Kecamatan Nuangan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.992.138.000,00
137	Kecamatan Modayag	Bangunan Gedung Kantor Permanen	134.321.250,00
138	Kecamatan Modayag	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	83.448.750,00
139	Kecamatan Modayag	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	78.540.000,00
140	Kecamatan Modayag Barat	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.000.000.000,00
141	Kecamatan Modayag Barat	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	199.730.000,00
142	Kecamatan Motongkad	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.947.054.000,00
143	Kecamatan Mooat	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.972.520.000,00
<b>Total</b>			<b>448.316.354.484,89</b>

Lampiran 17 Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun 2022

NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jalan lainnya	32.158.170,00
2	Bagian Umum, Sekretariat Daerah	Instalasi PLTSM Kapasitas Besar	372.790.000,00
3	Bagian Umum, Sekretariat Daerah	Instalasi gardu listrik lainnya	199.705.000,00
4	Bagian Umum, Sekretariat Daerah	Jaringan Distribusi Lain-lain	40.000.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jalan Nasional Arteri	484.142.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jalan Kabupaten Arteri	1.178.596.800,00
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jalan Kabupaten Lokal	15.623.868.200,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jalan Kabupaten Bernilai Strategis Kabupaten	58.437.466.677,00
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jalan Kabupaten Lain-lain	37.971.557.741,00
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jalan Desa	450.001.876.143,00
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jalan Desa Lain-lain	3.543.466.744,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jalan Khusus Kompleks	31.921.533.301,00
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jalan Khusus Lainnya	67.344.227.255,00
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jalan Khusus Lain-lain	18.745.650,00
15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	14.336.407.000,00
16	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jembatan Pada Jalan Desa	2.560.627.000,00
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jembatan Desa Lain-lain	1.889.052.000,00
18	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jembatan Khusus Lain-lain	770.536.533,00
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jembatan Penyeberangan Orang	149.689.000,00
20	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jembatan Penyeberangan Kendaraan	44.095.470,00
21	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jembatan Penyeberangan Lain-lain	9.762.712.575,00
22	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Waduk a Lain-lain	311.597.600,00
23	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bendung	914.680.000,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	29.590.000,00
25	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	184.852.150,00
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Saluran Induk (Bangunan Pembawa Irigasi)	100.000.000,00



NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
27	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	46.443.312.244,00
28	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi)	6.096.954.550,00
29	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain	63.282.500,00
30	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa)	1.437.296.000,00
31	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lain-lain (dst)	432.775.789,00
32	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai Lain-lain (dst)	121.085.795,00
33	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Saluran Drainage	27.148.815.299,00
34	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai)	1.172.424.084,00
35	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	13.831.873.210,00
36	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Pelimpah Banjir	9.930.221.500,00
37	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Pemecah Gelombang	4.735.357.217,00
38	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Warning System	1.035.500.000,00
39	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	132.141.360,00
40	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Pengambilan Dari Sumber Air	2.085.356.466,00
41	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	16.154.687.015,00
42	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	390.876.500,00
43	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	4.494.797.080,00
44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Saluran Pengumpul Air Buangan Industri	1.384.500.000,00
45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Sumur Resapan	36.905.334.103,00
46	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Instalasi Air Kotor Lain-lain	3.603.570.000,00
47	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Instalasi air kotor lainnya	4.737.980.075,00
48	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	40.518.000,00
49	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Lain-lain	321.503.000,00
50	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Lain-lain	93.508.500,00
51	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-lain	194.058.000,00
52	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	399.000.000,00
53	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jaringan Pembawa Lain-lain	4.469.443.730,00
54	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	270.788.500,00

NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
55	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	17.208.700,00
56	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jaringan Cabang Distribusi lain-lain	30.941.550,00
57	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	8.801.940.910,00
58	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jaringan Distribusi Lain-lain	1.800.537.000,00
59	Dinas Kesehatan	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	63.000.000,00
60	Dinas Kesehatan	Sumur Resapan	1.229.442.000,00
61	Dinas Kesehatan	Instalasi Air Kotor Lain-lain	2.821.349.276,00
62	Dinas Kesehatan	Instalasi air kotor lainnya	1.762.630.000,00
63	Dinas Kesehatan	Jaringan Cabang Distribusi lain-lain	2.000.000,00
64	Kantor UPTD Puskesmas Mooat Kecamatan Modayag	Sumur Resapan	9.750.000,00
65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	67.559.000,00
66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	12.000.000,00
67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jaringan Distribusi Lain-lain	15.000.000,00
68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	3.000.000,00
69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penampungan Air Hujan (PAH)	975.000,00
70	Dinas Sosial	Sumur Resapan	11.230.000,00
71	Dinas Sosial	Instalasi gardu listrik lainnya	5.000.000,00
72	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalan Khusus Lainnya	179.700.000,00
73	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bangunan Pemecah Gelombang	7.707.549.500,00
74	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	416.727.800,00
75	Dinas Pertanian	Jalan Desa	399.676.400,00
76	Dinas Pertanian	Jalan Khusus Lainnya	8.068.811.521,00
77	Dinas Pertanian	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	3.190.306.839,00
78	Dinas Pertanian	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	3.907.175.000,00
79	Dinas Pertanian	Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain	157.251.000,00
80	Dinas Pertanian	Krib Pengaman Sungai/Pantai	1.656.729.000,00
81	Dinas Pertanian	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	57.520.000,00

NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
82	Dinas Pertanian	Instalasi PLTD Kapasitas Kecil	4.517.500,00
83	Dinas Pertanian	Jaringan Pembawa Lain-lain	355.321.000,00
84	Dinas Perikanan	Jalan Khusus Lain-lain	333.851.399,00
85	Dinas Perikanan	Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain	1.329.586.000,00
86	Dinas Perikanan	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	147.839.000,00
87	Dinas Perikanan	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	158.000.000,00
88	Dinas Perikanan	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	3.578.000,00
89	Dinas Perikanan	Jaringan Distribusi Lain-lain	59.402.400,00
90	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Krib Pengaman Sungai/Pantai	194.944.000,00
91	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	80.000.000,00
92	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	49.433.100,00
93	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	180.894.000,00
94	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	278.000.000,00
95	Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah	Jalan Khusus Kompleks	149.482.190,00
96	Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sumur Resapan	36.193.500,00
97	Dinas Lingkungan Hidup	Saluran Pembuang Air Buangan Air Pertanian	145.974.998,00
98	Dinas Lingkungan Hidup	Instalasi Air Kotor Lain-lain	197.797.999,00
99	Dinas Pariwisata	Jalan Khusus Lainnya	7.650.000,00
100	Dinas Pariwisata	Jalan Khusus Lain-lain	225.000.000,00
101	Dinas Pariwisata	Bangunan Dermaga	526.253.000,00
102	Dinas Pariwisata	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang	150.000.000,00
103	Dinas Pariwisata	Instalasi gardu listrik lainnya	54.424.200,00
104	Dinas Komunikasi dan Informasi	Instalasi gardu listrik lainnya	49.970.000,00
105	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jaringan telepon lainnya	99.511.500,00
<b>Total</b>			<b>933.563.567.808,00</b>

Lampiran 18 Aset Tetap Lainnya Tahun 2022

NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ilmu Pengetahuan Umum	10.000.000,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Karya Seni Lain-lain	6.000.000,00
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tanaman Keras	19.950.000,00
4	Bagian Umum, Sekretariat Daerah	Buku Umum Lain-lain	23.600.000,00
5	Bagian Umum, Sekretariat Daerah	Karya Seni Asli, Lukisan Asli (Art Original)	22.000.000,00
6	Bagian Umum, Sekretariat Daerah	Barang Kerajinan Lain-lain	27.600.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Buku Umum Lain-lain	190.660.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	948.995.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	buku laporan lainnya (dst)	608.650.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Blue Print	203.397.100,00
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	2.373.026.700,00
12	Dinas Perhubungan	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	79.860.000,00
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ilmu Pengetahuan Umum	834.043.560,00
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Permainan dan Olah Raga	6.908.760,00
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Musik lainnya	5.318.830,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Agama Islam	3.409.000,00
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Matematika	206.684.197,00
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Agama Kristen	13.657.300,00
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-lain	49.696.100,00
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Buku Umum Lain-lain	8.974.504.264,00
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	buku agama lainnya (dst)	15.217.800,00
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Musik Lain-lain	1.111.990,00
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Alat Musik Modern/Band	595.169.996,00
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bahan perpustakaan tercetak lainnya	8.105.000,00
25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CD/VCD/DVD/LD	900.000,00
26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ilmu Perpustakaan	12.600,00

NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengetahuan Bahasa Inggris	17.433.050,00
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Alat Musik Tradisional/Daerah	19.559.540,00
29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Buku Ilmu Sosial Lain-lain	222.762.500,00
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengetahuan Bahasa Indonesia	182.135.450,00
31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	buku matematika dan pengetahuan alam lainnya (dst)	191.773.100,00
32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ensylopedia, Kamus, Buku Referensi	957.120.020,00
33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	8.604.000,00
34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan	1.450.000,00
35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	91.119.553,00
36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	buku laporan lainnya (dst)	259.650.000,00
37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Alat Kesenian Lain-lain	1.350.000,00
38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Lukisan lain-lain	251.450.000,00
39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Barang Kerajinan Lain-lain	74.821.250,00
40	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Buku Umum Lain-lain	10.000.000,00
41	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Atlas	21.600.000,00
42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Buku Umum Lain-lain	5.684.264,00
43	Dinas Pertanian	Tanaman Keras	809.075.900,00
44	Dinas Perikanan	Ikan Air Payau Budidaya	314.089.800,00
45	Dinas Ketahanan Pangan	Buku Umum Lain-lain	3.000.000,00
46	Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah	Buku Umum Lain-lain	10.460.000,00
47	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hukum	1.191.500,00
48	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Permainan dan Olah Raga	5.765.989,00
49	Inspektorat Daerah	Buku Umum Lain-lain	1.275.000,00
50	Inspektorat Daerah	Hukum	3.315.000,00
51	Badan PPELITBANGDA	Buku Umum Lain-lain	466.500.000,00
52	Badan PPELITBANGDA	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	162.000.000,00
53	Dinas Lingkungan Hidup	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-lain	99.605.000,00
54	Dinas Pariwisata	Buku Umum Lain-lain	1.644.250,00

NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
55	Dinas Pariwisata	Ekonomi	308.250,00
56	Dinas Pariwisata	Buku Laporan Penelitian	100.000.000,00
57	Dinas Pariwisata	Alat Musik Modern/Band	99.880.000,00
58	Dinas Pariwisata	Alat Kesenian Lain-lain	8.000.000,00
59	Dinas Pariwisata	Barang Kerajinan Lain-lain	35.000.000,00
60	Dinas Komunikasi dan Informasi	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	142.744.250,00
61	Dinas Komunikasi dan Informasi	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-lain	3.520.000,00
62	Dinas Perpustakaan Daerah	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	70.400.000,00
63	Dinas Perpustakaan Daerah	Buku Umum Lain-lain	145.632.410,00
64	Dinas Perpustakaan Daerah	Agama Islam	3.966.688,00
65	Dinas Perpustakaan Daerah	Hukum	2.250.000,00
66	Dinas Perpustakaan Daerah	buku matematika dan pengetahuan alam lainnya (dst)	12.189.504,00
67	Dinas Perpustakaan Daerah	buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	20.566.804,00
68	Dinas Perpustakaan Daerah	Atlas	2.340.000,00
<b>Total</b>			<b>20.069.711.269,00</b>

Lampiran 19 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022

NO	OPD	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	5.676.788.629,53
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten	728.551.888,31
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jalan Kabupaten Lain-lain	7.477.967.040,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jalan Desa	1.029.052.203,07
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Jalan Khusus Lain-lain	1.237.953.135,38
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	6.204.183.999,98
7	Dinas Kesehatan	Bangunan Klinik/Puskesmas	100.078.000,00
8	Dinas Pertanian	Jalan Khusus Lain-lain	133.363.037,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	426.975.040,00
10	Dinas Pariwisata	Motel Lainnya (dst)	99.899.800,00
<b>Total</b>			<b>23.114.812.773,27</b>

Lampiran 20 Akumulasi Penyusutan Tahun 2022

NO	OPD	NILAI (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	92.425.018.280,70
2	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Tutuyan	1.246.380.924,00
3	Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Modayag	301.260.591,00
4	Dinas Kesehatan	121.387.918.886,00
5	Kantor UPTD Puskesmas Kotabunan	585.957.729,00
6	Kantor UPTD Puskesmas Tutuyan	537.930.869,00
7	Kantor UPTD Puskesmas Nuangan	709.012.838,00
8	Kantor UPTD Puskesmas Modayag	725.861.215,00
9	Kantor UPTD Puskesmas Modayag Barat	693.146.669,00
10	Kantor UPTD Puskesmas Mooat Kecamatan Modayag	540.561.311,00
11	Kantor UPTD Puskesmas Buyat Kecamatan Kotabunan	631.394.273,00
12	Kantor UPTD Puskesmas Motongkad	296.372.411,00
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PR, KPP	741.911.008.712,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.645.846.886,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.005.947.479,00
16	Dinas Sosial	2.054.329.721,00
17	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.298.583.734,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	206.316.233,00
19	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	7.752.692,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	625.701.879,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	6.595.013.251,00
22	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.081.692.512,00
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.251.667.252,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.542.292.218,00
25	Dinas Perhubungan	5.606.992.038,00
26	Dinas Komunikasi dan Informasi	2.034.491.070,00



NO	OPD	NILAI (Rp.)
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.731.385.620,00
28	Dinas Pemuda dan Olahraga	853.673.753,00
29	Dinas Perpustakaan Daerah	405.242.144,00
30	Dinas Perikanan	6.932.431.607,00
31	Dinas Pariwisata	7.186.234.800,00
32	Dinas Pertanian	23.622.007.740,00
33	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.929.687.580,00
34	Sekretariat Daerah	36.077.091.375,00
35	Sekretariat DPRD	12.269.698.022,00
36	Badan PPELITBANGDA	4.119.206.256,00
37	Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah	12.427.871.877,00
38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3.695.627.429,00
39	Inspektorat Daerah	1.275.197.037,00
40	Kecamatan Kotabunan	705.186.774,00
41	Kecamatan Tutuyan	1.104.180.574,00
42	Kecamatan Nuangan	1.023.825.811,00
43	Kecamatan Motongkad	774.933.666,00
44	Kecamatan Mooat	885.453.801,00
45	Kecamatan Modayag	750.225.629,00
46	Kecamatan Modayag Barat	1.045.777.149,00
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	837.242.629,00
<b>Total</b>		<b>1.127.600.632.946,70</b>

Lampiran 21 Utang Belanja Pegawai - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja/TPP

NO	OPD	UTANG BELANJA TAHUN 2021	TERBAYARKAN DI TAHUN 2022		PENGAKUAN UTANG 2022	UTANG BELANJA TAHUN 2022
			SP2D	NILAI SP2D		
<b>UTANG BELANJA PEGAWAI - TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA / TPP</b>						
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	377.861.775,00	17.14/04.0/000011/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/M2/2022	377.861.775,00	369.586.100,00	369.586.100,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.160.000,00	17.14/04.0/000009/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/M2/2022	4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-		-	243.457.161,00	243.457.161,00
4	UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Tutuyan	19.461.000,00	17.14/04.0/000011/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/M2/2022	19.461.000,00	-	-
5	UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Modayag	24.218.090,00	17.14/04.0/000011/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/M2/2022	24.218.090,00	-	-
6	Dinas Kesehatan	129.504.700,00	17.14/04.0/000003/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M2/2022	129.504.700,00	802.803.040,00	802.803.040,00
7	Dinas Kesehatan	-		-	9.100.000,00	9.100.000,00
8	UPTD Puskesmas Kotabunan	97.708.000,00	17.14/04.0/000003/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M2/2022	97.708.000,00	-	-
9	UPTD Puskesmas Tutuyan	75.435.100,00	17.14/04.0/000003/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M2/2022	75.435.100,00	-	-
10	UPTD Puskesmas Nuangan	71.292.000,00	17.14/04.0/000003/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M2/2022	71.292.000,00	-	-
11	UPTD Puskesmas Modayag	174.893.264,00	17.14/04.0/000003/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M2/2022	174.893.264,00	-	-
12	UPTD Puskesmas Modayag Barat	101.976.940,00	17.14/04.0/000003/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M2/2022	101.976.940,00	-	-
13	UPTD Puskesmas Mootat	68.758.664,00	17.14/04.0/000003/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M2/2022	68.758.664,00	-	-
14	UPTD Puskesmas Buyat	49.843.300,00	17.14/04.0/000003/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M2/2022	49.843.300,00	-	-
15	UPTD Puskesmas Motongkad	39.187.200,00	17.14/04.0/000003/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M2/2022	39.187.200,00	-	-
16	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	143.932.620,00	17.14/04.0/000005/LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/M1/2022	143.932.620,00	-	-
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	59.930.000,00	17.14/04.0/000003/LS/1.05.0.00.0.00.01.00/M1/2022	59.930.000,00	67.921.984,00	67.921.984,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	74.224.800,00	17.14/04.0/000003/LS/1.05.0.00.0.00.02.0000/M1/2022	74.224.800,00	-	-
19	Dinas Sosial	95.761.120,00	17.14/04.0/000003/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M1/2022	95.761.120,00	94.247.712,00	94.247.712,00
20	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	85.213.240,00	17.14/04.0/000003/LS/3.32.2.07.3.29.01.0000/M1/2022	85.213.240,00	93.476.656,00	93.476.656,00
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	55.842.904,00	17.14/04.0/000004/LS/2.08.0.00.0.00.01.0000/M1/2022	55.842.904,00	75.757.968,00	75.757.968,00
22	Dinas Ketahanan Pangan	62.874.240,00	17.14/04.0/000004/LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/M1/2022	62.874.240,00	78.240.656,00	78.240.656,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	68.260.920,00	17.14/04.0/000003/LS/2.11.0.00.0.00.01.00/M1/2022	68.260.920,00	75.566.400,00	75.566.400,00
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	71.851.392,00	17.14/04.0/000004/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/M1/2022	71.851.392,00	71.851.624,00	71.851.624,00
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	69.076.904,00	17.14/04.0/000005/LS/2.13.0.00.0.00.01.0000/M2/2022	69.076.904,00	-	-
26	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	72.966.712,00	17.14/04.0/000003/LS/2.14.0.00.0.00.01.0000/M1/2022	72.966.712,00	90.667.366,00	90.667.366,00
27	Dinas Perhubungan	47.025.160,00	17.14/04.0/000002/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/M1/2022	47.025.160,00	77.715.040,00	77.715.040,00
28	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	70.507.320,00	17.14/04.0/000003/LS/2.16.2.21.2.20.01.00/M1/2022	70.507.320,00	77.854.400,00	77.854.400,00
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69.879.264,00	17.14/04.0/000004/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/M1/2022	69.879.264,00	81.468.858,00	81.468.858,00
30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	69.736.680,00	17.14/04.0/000002/LS/2.19.0.00.0.00.01.0000/M1/2022	69.736.680,00	77.246.624,00	77.246.624,00
31	Dinas Perpustakaan Daerah	48.668.152,00	17.14/04.0/000003/LS/2.23.2.24.0.00.01.00/M1/2022	48.668.152,00	56.491.802,00	56.491.802,00
32	Dinas Perikanan	83.452.720,00	17.14/04.0/000004/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/M1/2022	83.452.720,00	-	-
33	Dinas Pariwisata	80.552.680,00	17.14/04.0/000005/LS/3.26.0.00.0.00.01.0000/M1/2022	80.552.680,00	71.301.880,00	71.301.880,00
34	Dinas Pertanian	3.006.640,00	17.14/04.0/000006/LS/3.27.0.00.0.00.01.0000/M1/2022	3.006.640,00	1.820.000,00	1.820.000,00
35	Dinas Pertanian	153.848.448,00	17.14/04.0/000005/LS/3.27.0.00.0.00.01.0000/M1/2022	153.848.448,00	174.291.312,00	174.291.312,00
36	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	57.807.880,00	17.14/04.0/000003/LS/3.30.3.31.2.17.01.0000/M1/2022	57.807.880,00	65.915.200,00	65.915.200,00
37	Sekretariat Daerah	558.546.706,00	17.14/04.0/000005/LS/4.01.0.00.0.00.01.00/M1/2022	558.546.706,00	540.692.732,00	540.692.732,00

*Handwritten signature/initials*

NO	OPD	UTANG BELANJA TAHUN 2021	TERBAYARKAN DI TAHUN 2022		PENGAKUAN UTANG 2022	UTANG BELANJA TAHUN 2022
			SP2D	NILAI SP2D		
<b>UTANG BELANJA PEGAWAI - TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA / TPP</b>						
38	Sekretariat Daerah	-	-	-	12.451.920,00	12.451.920,00
39	Sekretariat DPRD	57.441.886,00	17.14/04.0/000008/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	57.441.886,00	68.419.000,00	68.419.000,00
40	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	117.397.696,00	17.14/04.0/000002/LS/5.01.5.05.0.00.01.0000/M/1/2022	117.397.696,00	136.617.936,00	136.617.936,00
41	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	229.733.660,00	17.14/04.0/000003/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	229.733.660,00	-	-
42	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (ASN Angkatan Tahun 2019 Dinas Pendidikan)	136.952.400,00	17.14/04.0/000011/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2022	136.952.400,00	-	-
43	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (ASN Angkatan Tahun 2019 Dinas Pertanian dan SKB Tutuyan)	11.320.400,00	17.14/04.0/000010/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2022	11.320.400,00	-	-
44	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (ASN Angkatan Tahun 2019 BKPSDM dan BAPPELITBANGDA)	27.753.700,00	17.14/04.0/000008/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2022	27.753.700,00	-	-
45	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (ASN Angkatan Tahun 2019 BKPSDM)	1.887.600,00	17.14/04.0/000029/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2022	1.887.600,00	-	-
46	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	111.272.200,00	17.14/04.0/000004/LS/5.03.5.04.0.00.01.00/M/1/2022	111.272.200,00	94.307.360,00	94.307.360,00
47	Inspektorat Daerah	175.891.300,00	17.14/04.0/000002/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	175.891.300,00	213.437.328,00	213.437.328,00
48	Kecamatan Kotabunan	60.063.640,00	17.14/04.0/000003/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	60.063.640,00	53.788.800,00	53.788.800,00
49	Kecamatan Tutuyan	43.942.080,00	17.14/04.0/000003/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/M/1/2022	43.942.080,00	49.013.745,00	49.013.745,00
50	Kecamatan Tutuyan	-	-	-	949.519,00	949.519,00
51	Kecamatan Nuangan	42.697.512,00	17.14/04.0/000003/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/M/1/2022	42.697.512,00	51.751.024,00	51.751.024,00
52	Kecamatan Motongkad	42.964.376,00	17.14/04.0/000003/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2022	42.964.376,00	45.826.851,00	45.826.851,00
53	Kecamatan Motongkad	-	-	-	600.000,00	600.000,00
54	Kecamatan Mootat	41.647.320,00	17.14/04.0/000003/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/1/2022	41.647.320,00	49.400.000,00	49.400.000,00
55	Kecamatan Modayag	57.986.240,00	17.14/04.0/000005/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/M/1/2022	57.986.240,00	64.906.056,00	64.906.056,00
56	Kecamatan Modayag Barat	57.460.520,00	17.14/04.0/000003/LS/7.01.0.00.0.00.07.0000/M/1/2022	57.460.520,00	-	-
57	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	64.523.160,00	17.14/04.0/000005/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	64.523.160,00	59.058.938,00	59.058.938,00
58	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	19.443.424,00	19.443.424,00

Lampiran 22 Utang Belanja Pegawai – Selisih Gaji

NO	OPD	UTANG BELANJA TAHUN 2021	TERBAYARKAN DI TAHUN 2022		PENGAKUAN UTANG 2022	UTANG BELANJA TAHUN 2022
			SP2D	NILAI SP2D		
<b>UTANG BELANJA PEGAWAI - SELISIH GAJI</b>						
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.809.908,00	17.14/04.0/000015/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/M/2/2022	3.809.908,00	31.813.880,00	31.813.880,00
2	Dinas Kesehatan	-		-	1.910.978,00	1.910.978,00
3	Dinas Kesehatan	-		-	471.105,00	471.105,00
4	Dinas Kesehatan	-		-	8.945.762,00	8.945.762,00
5	Dinas Kesehatan	-		-	1.148.120,00	1.148.120,00
6	Dinas Kesehatan	-		-	10.154.585,00	10.154.585,00
7	Dinas Kesehatan	-		-	1.867.722,00	1.867.722,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	-		-	1.263.755,00	1.263.755,00
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	-		-	1.375.044,00	1.375.044,00
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	-		-	14.977.588,00	14.977.588,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-		-	626.868,00	626.868,00
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-		-	4.660.425,00	4.660.425,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	-		-	1.786.833,00	1.786.833,00
14	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	-		-	1.545.480,00	1.545.480,00
15	Dinas Sosial	-		-	7.396.352,00	7.396.352,00
16	Dinas Sosial	-		-	2.514.712,00	2.514.712,00
17	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	-		-	8.086.211,00	8.086.211,00
18	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	-		-	1.013.058,00	1.013.058,00
19	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	-		-	2.702.724,00	2.702.724,00
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-		-	1.573.517,00	1.573.517,00
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-		-	2.328.740,00	2.328.740,00
22	Dinas Ketahanan Pangan	-		-	8.209.967,00	8.209.967,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	-		-	2.795.497,00	2.795.497,00
24	Dinas Lingkungan Hidup	-		-	1.619.502,00	1.619.502,00
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-		-	1.256.208,00	1.256.208,00
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-		-	2.690.532,00	2.690.532,00
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-		-	1.263.755,00	1.263.755,00
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-		-	1.215.556,00	1.215.556,00
29	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-		-	559.289,00	559.289,00
30	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-		-	1.806.634,00	1.806.634,00
31	Dinas Perhubungan	-		-	6.033.341,00	6.033.341,00
32	Dinas Perhubungan	-		-	2.831.435,00	2.831.435,00
33	Dinas Perhubungan	-		-	3.917.543,00	3.917.543,00
34	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	-		-	1.195.359,00	1.195.359,00
35	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	-		-	496.317,00	496.317,00
36	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-		-	1.942.667,00	1.942.667,00
37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-		-	5.304.903,00	5.304.903,00
38	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-		-	2.289.674,00	2.289.674,00

NO	OPD	UTANG BELANJA TAHUN 2021	TERBAYARKAN DI TAHUN 2022		PENGAKUAN UTANG 2022	UTANG BELANJA TAHUN 2022
			SP2D	NILAI SP2D		
<b>UTANG BELANJA PEGAWAI - SELISIH GAJI</b>						
39	Dinas Pariwisata	-		-	2.064.359,00	2.064.359,00
40	Dinas Pariwisata	-		-	4.853.968,00	4.853.968,00
41	Dinas Pariwisata	-		-	3.393.774,00	3.393.774,00
42	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-		-	1.328.153,00	1.328.153,00
43	Sekretariat Daerah	-		-	5.946.712,00	5.946.712,00
44	Sekretariat Daerah	-		-	10.190.713,00	10.190.713,00
45	Sekretariat Daerah	-		-	2.658.839,00	2.658.839,00
46	Sekretariat Daerah	-		-	418.014,00	418.014,00
47	Sekretariat Daerah	-		-	5.623.851,00	5.623.851,00
48	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-		-	639.456,00	639.456,00
49	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-		-	1.427.472,00	1.427.472,00
50	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	-		-	20.836.641,00	20.836.641,00
51	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	-		-	2.152.589,00	2.152.589,00
52	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-		-	3.480.413,00	3.480.413,00
53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-		-	396.480,00	396.480,00
54	Inspektorat Daerah	-		-	6.821.261,00	6.821.261,00
55	Inspektorat Daerah	-		-	626.868,00	626.868,00
56	Kecamatan Tutuyan	-		-	213.152,00	213.152,00
57	Kecamatan Tutuyan	-		-	654.975,00	654.975,00
58	Kecamatan Motongkad	3.805.059,00	17.14/04.0/000005/LS/7/01.0.00.0.00.04.00/M2/2022	3.805.059,00	3.771.937,00	3.771.937,00
59	Kecamatan Motongkad	-		-	2.326.156,00	2.326.156,00
60	Kecamatan Motongkad	-		-	1.407.636,00	1.407.636,00
61	Kecamatan Mooat	-		-	713.736,00	713.736,00
62	Kecamatan Mooat	-		-	487.737,00	487.737,00
63	Kecamatan Modayag	-		-	4.990.830,00	4.990.830,00
64	Kecamatan Modayag	-		-	425.094,00	425.094,00

*Lampiran 23 Utang Belanja Barang Dan Jasa - Insentif/Upah Pungut Pajak Daerah*

NO	OPD	UTANG BELANJA TAHUN 2021	TERBAYARKAN DI TAHUN 2022		PENGAKUAN UTANG 2022	UTANG BELANJA TAHUN 2022
			SP2D	NILAI SP2D		
UTANG BELANJA BARANG DAN JASA - INSENTIF/UPAH PUNGUT PAJAK DAERAH						
1	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	222.311.290,00	17.14/04.0/000025/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2022	222.311.290,00	363.146.125,00	363.146.125,00

*Handwritten signature*

Lampiran 24 Utang Belanja Barang Dan Jasa - Tenaga Harian Lepas / Honorer

NO	OPD	UTANG BELANJA TAHUN 2021	TERBAYARKAN DI TAHUN 2022		PENGAKUAN UTANG 2022	UTANG BELANJA TAHUN 2022
			SP2D	NILAI SP2D		
<b>UTANG BELANJA BARANG DAN JASA - TENAGA HARIAN LEPAS / HONORER</b>						
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.500.000,00	17.14/04.0/000006/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/M/1/2022	6.500.000,00	576.500.000,00	576.500.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.500.000,00	17.14/04.0/000005/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/M/1/2022	26.500.000,00	-	-
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	674.140.000,00	17.14/04.0/000010/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/M/2/2022	674.140.000,00	-	-
4	UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Tutuyan	5.000.000,00	17.14/04.0/000012/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/M/2/2022	5.000.000,00	-	-
5	UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Modyayag	4.500.000,00	17.14/04.0/000008/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/M/1/2022	4.500.000,00	-	-
6	Dinas Kesehatan	57.000.000,00	17.14/04.0/000001/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	57.000.000,00	166.470.000,00	166.470.000,00
7	Dinas Kesehatan	-		-	3.920.000,00	3.920.000,00
8	UPTD Puskesmas Nuangan	1.500.000,00	17.14/04.0/000001/LS/1.02.0.00.0.00.01.0004/M/1/2022	1.500.000,00	-	-
9	UPTD Puskesmas Modyayag	1.000.000,00	17.14/04.0/000001/LS/1.02.0.00.0.00.01.0005/M/1/2022	1.000.000,00	-	-
10	UPTD Puskesmas Buyat	1.500.000,00	17.14/04.0/000001/LS/1.02.0.00.0.00.01.0008/M/1/2022	1.500.000,00	-	-
11	UPTD Puskesmas Motongkad	1.500.000,00	17.14/04.0/000002/LS/1.02.0.00.0.00.01.0009/M/2/2022	1.500.000,00	-	-
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	67.605.000,00	17.14/04.0/000004/LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/M/1/2022	67.605.000,00	-	-
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.500.000,00	17.14/04.0/000005/LS/1.05.0.00.0.00.01.00/M/1/2022	7.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.985.000,00	17.14/04.0/000004/LS/1.05.0.00.0.00.01.00/M/1/2022	5.985.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-		-	4.000.000,00	4.000.000,00
16	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	187.500.000,00	17.14/04.0/000002/LS/1.05.0.00.0.00.02.0000/M/1/2022	187.500.000,00	-	-
17	Dinas Sosial	7.025.000,00	17.14/04.0/000002/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	7.025.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
18	Dinas Sosial	-		-	3.900.000,00	3.900.000,00
19	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	4.500.000,00	17.14/04.0/000002/LS/3.32.2.07.3.29.01.0000/M/1/2022	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.500.000,00	17.14/04.0/000003/LS/2.08.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	5.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
21	UPTD Perempuan dan Anak	-		-	3.500.000,00	3.500.000,00
22	Dinas Ketahanan Pangan	1.455.000,00	17.14/04.0/000002/LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	1.455.000,00	-	-
23	Dinas Ketahanan Pangan	1.500.000,00	17.14/04.0/000003/LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	1.500.000,00	-	-
24	Dinas Lingkungan Hidup	8.500.000,00	17.14/04.0/000005/LS/2.11.0.00.0.00.01.00/M/1/2022	8.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
25	Dinas Lingkungan Hidup	18.720.000,00	17.14/04.0/000004/LS/2.11.0.00.0.00.01.00/M/1/2022	18.720.000,00	-	-
26	Dinas Lingkungan Hidup	10.140.000,00	17.14/04.0/000002/LS/2.11.0.00.0.00.01.00/M/1/2022	10.140.000,00	-	-
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.305.000,00	17.14/04.0/000003/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	11.305.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-		-	1.000.000,00	1.000.000,00
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.840.000,00	17.14/04.0/000003/LS/2.13.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	14.840.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
30	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.500.000,00	17.14/04.0/000002/LS/2.14.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	2.500.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
31	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.000.000,00	17.14/04.0/000004/LS/2.14.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	18.000.000,00	-	-
32	Dinas Perhubungan	43.000.000,00	17.14/04.0/000003/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	43.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
33	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1.000.000,00	17.14/04.0/000004/LS/2.16.2.21.2.20.01.00/M/2/2022	1.000.000,00	-	-
34	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2.960.000,00	17.14/04.0/000005/LS/2.16.2.21.2.20.01.00/M/2/2022	2.960.000,00	-	-
35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.095.000,00	17.14/04.0/000003/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	9.095.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
36	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.500.000,00	17.14/04.0/000003/LS/2.19.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

*Handwritten signature/initials*

NO	OPD	UTANG BELANJA TAHUN 2021	TERBAYARKAN DI TAHUN 2022		PENGAKUAN UTANG 2022	UTANG BELANJA TAHUN 2022
			SP2D	NILAI SP2D		
<b>UTANG BELANJA BARANG DAN JASA - TENAGA HARIAN LEPAS / HONORER</b>						
37	Dinas Perpustakaan Daerah	3.000.000,00	17.14/04.0/000002/LS/2.23.2.24.0.00.01.00/M/1/2022	3.000.000,00	-	-
38	Dinas Perikanan	9.520.000,00	17.14/04.0/000003/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	9.520.000,00	-	-
39	Dinas Pariwisata	3.000.000,00	17.14/04.0/000003/LS/3.26.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
40	Dinas Pariwisata	13.000.000,00	17.14/04.0/000002/LS/3.26.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	13.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
41	Dinas Pariwisata	1.000.000,00	17.14/04.0/000004/LS/3.26.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42	Dinas Pertanian	6.320.000,00	17.14/04.0/000004/LS/3.27.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	6.320.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
43	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	9.185.000,00	17.14/04.0/000002/LS/3.30.3.31.2.17.01.0000/M/1/2022	9.185.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
44	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-		-	930.000,00	930.000,00
45	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-		-	1.000.000,00	1.000.000,00
46	Bagian Pemerintahan	2.000.000,00	17.14/04.0/000008/LS/4.01.0.00.0.00.01.00/M/1/2022	2.000.000,00	-	-
47	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.500.000,00	17.14/04.0/000014/LS/4.01.0.00.0.00.01.00/M/1/2022	5.500.000,00	-	-
48	Bagian Hukum	1.500.000,00	17.14/04.0/000012/LS/4.01.0.00.0.00.01.00/M/1/2022	1.500.000,00	-	-
49	Bagian Hukum	1.500.000,00	17.14/04.0/000013/LS/4.01.0.00.0.00.01.00/M/1/2022	1.500.000,00	-	-
50	Bagian Administrasi Pembangunan	1.500.000,00	17.14/04.0/000016/LS/4.01.0.00.0.00.01.00/M/1/2022	1.500.000,00	-	-
51	Bagian Administrasi Pembangunan	1.500.000,00	17.14/04.0/000017/LS/4.01.0.00.0.00.01.00/M/1/2022	1.500.000,00	-	-
52	Bagian Organisasi	1.000.000,00	17.14/04.0/000007/LS/4.01.0.00.0.00.01.00/M/1/2022	1.000.000,00	-	-
53	Bagian Umum	297.500.000,00	17.14/04.0/000006/LS/4.01.0.00.0.00.01.00/M/1/2022	297.500.000,00	-	-
54	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12.500.000,00	17.14/04.0/000015/LS/4.01.0.00.0.00.01.00/M/1/2022	12.500.000,00	-	-
55	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	4.410.000,00	17.14/04.0/000009/LS/4.01.0.00.0.00.01.00/M/1/2022	4.410.000,00	-	-
56	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2.000.000,00	17.14/04.0/000010/LS/4.01.0.00.0.00.01.00/M/1/2022	2.000.000,00	-	-
57	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1.500.000,00	17.14/04.0/000011/LS/4.01.0.00.0.00.01.00/M/1/2022	1.500.000,00	-	-
58	Sekretariat Daerah	-		-	1.500.000,00	1.500.000,00
59	Sekretariat Daerah	-		-	1.500.000,00	1.500.000,00
60	Sekretariat DPRD	50.947.500,00	17.14/04.0/000013/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	50.947.500,00	43.750.000,00	43.750.000,00
61	Sekretariat DPRD	4.500.000,00	17.14/04.0/000012/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	4.500.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
62	Sekretariat DPRD	16.000.000,00	17.14/04.0/000011/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	16.000.000,00	-	-
63	Sekretariat DPRD	14.000.000,00	17.14/04.0/000010/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	14.000.000,00	-	-
64	Sekretariat DPRD	1.975.000,00	17.14/04.0/000009/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	1.975.000,00	-	-
65	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.915.000,00	17.14/04.0/000003/LS/5.01.5.05.0.00.01.0000/M/1/2022	4.915.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
66	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	14.800.000,00	17.14/04.0/000004/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	14.800.000,00	-	-
67	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	37.050.000,00	17.14/04.0/000005/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	37.050.000,00	-	-
68	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	10.175.000,00	17.14/04.0/000006/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	10.175.000,00	-	-
69	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	19.295.000,00	17.14/04.0/000007/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	19.295.000,00	-	-
70	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17.282.500,00	17.14/04.0/000003/LS/5.03.5.04.0.00.01.00/M/1/2022	17.282.500,00	4.940.000,00	4.940.000,00
71	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-		-	2.000.000,00	2.000.000,00
72	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-		-	7.680.000,00	7.680.000,00
73	Inspektorat Daerah	4.325.000,00	17.14/04.0/000004/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2022	4.325.000,00	-	-
74	Inspektorat Daerah	1.500.000,00	17.14/04.0/000003/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2022	1.500.000,00	-	-
75	Kecamatan Kotabunan	4.000.000,00	17.14/04.0/000002/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	4.000.000,00	-	-



NO	OPD	UTANG BELANJA TAHUN 2021	TERBAYARKAN DI TAHUN 2022		PENGAKUAN UTANG 2022	UTANG BELANJA TAHUN 2022
			SP2D	NILAI SP2D		
<b>UTANG BELANJA BARANG DAN JASA - TENAGA HARIAN LEPAS / HONORER</b>						
76	Kecamatan Tutuyan	5.250.000,00	17.14/04.0/000002/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/M/1/2022	5.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
77	Kecamatan Nuangan	2.085.000,00	17.14/04.0/000004/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/M/1/2022	2.085.000,00	6.547.500,00	6.547.500,00
78	Kecamatan Motongkad	1.750.000,00	17.14/04.0/000002/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2022	1.750.000,00	750.000,00	750.000,00
79	Kecamatan Mooat	1.500.000,00	17.14/04.0/000002/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/1/2022	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
80	Kecamatan Modayag	3.000.000,00	17.14/04.0/000004/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/M/1/2022	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
81	Kecamatan Modayag Barat	3.000.000,00	17.14/04.0/000002/LS/7.01.0.00.0.00.07.0000/M/1/2022	3.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
82	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.500.000,00	17.14/04.0/000004/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	1.500.000,00	-	-
83	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23.000.000,00	17.14/04.0/000003/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	23.000.000,00	-	-
84	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.425.000,00	17.14/04.0/000002/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	4.425.000,00	-	-

*Handwritten signature/initials*

*Lampiran 25 Utang Belanja Barang Dan Jasa - Tagihan Belanja*

NO	OPD	UTANG BELANJA TAHUN 2021	TERBAYARKAN DITAHUN 2022		PENGAKUAN UTANG 2022	UTANG BELANJA TAHUN 2022
			SP2D	NILAI SP2D		
<b>UTANG BELANJA BARANG DAN JASA - TAGIHAN BELANJA</b>						
1	Sekretariat Daerah	124.421.671,00	17.14/04.0/000242/LS/4.01.0.00.0.00.01.00/P.02/4/2022	124.421.671,00	-	-
2	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	-		-	16.170.480,00	16.170.480,00

*Handwritten signature*

Lampiran 26 Utang Jangka Pendek Lainnya

NO	PERUSAHAAN	PEKERJAAN	NOMOR KONTRAK	FISIK (%)	UJPL 2013-2021	TERBAYARKAN DI TAHUN 2022		PENGAKUAN UJPL 2022	UJPL 2013 - 2022
						NOMOR SP2D	NILAI SP2D		
<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>									
1	CV. ALDY RIZY	Pembangunan Gedung Sekolah Lanjutan SMK Motongkad (DAU)	D.01/DIK/BMT/SPK/059/VI/2013	100	4.916.250,00				4.916.250,00
2	CV. TERATAI MAS	Rehabilitasi Berat RDG SDN I Purworejo Timur (DID)	D.01/DIK-BMT/SPK/PL/116/VII/2015	100	2.497.870,00				2.497.870,00
3	CV. IBANTONG PUTRA PRATAMA	Pengadaan MCK SDN I Tutuyan 2 (DID)	D.01/DIK-BMT/SPK/PL/136/VII/2015	100	2.497.950,00				2.497.950,00
4	CV. TETAP DAMAI	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Pagar Sekolah SMPN 2 Nuangan (DID)	D.01/DIK-BMT/SPK/PL/120/VIII/2016	100	18.151.200,00				18.151.200,00
5	CV. CAHAYA LANGIT	Rehabilitasi Berat Rumah Dinas Guru (RDG) SDN 1 Jiko (DID)	D.01/DIK-BMT/SPK/PL/0123/VII/2017	100	9.996.350,00				9.996.350,00
6	CV. BERKAT USAHA	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 2 Motongkad (DID)	D.01/DIKBUD/SPK/PL/0054/VII/1/2018	100	9.998.150,00				9.998.150,00
7	CV. ARTHA PRIMA	Penataan Halaman SDN 1 Kokapoi Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri 1 Pinobatuan (DAU)	D.01/DIKBUD-BMT/SPK/PL/048/IX/DAU/2022	100				15.056.901,00	15.056.901,00
8	CV. KARYA KIRANA	Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SD Negeri 1 Atoga (DAK)	D.01/DIKBUD-BMT/SPK/PL/017/VII/DAK/2022	100				30.503.354,00	30.503.354,00
<b>DINAS KESEHATAN</b>									
1	CV. FITRA POBIAGAN MANDIRI	Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Kotabunan (DAU)	51/D.02/DINKES-BMT/SPK/FISIK/IV/2015	100	8.964.500,00				8.964.500,00
2	CV. BINTANG TIMUR	Rehabilitasi Poskesdes Tutuyan II (DAU)	56/D.02/DINKES-BMT/SPK-FISIK/IV/2015	100	1.000.000,00				1.000.000,00
3	CV. CAHYANI	Pembuatan Pagar Lantai II Puskesmas Nuangan (DAU)	41/D.02/DINKES-BMT/SPK-FISIK/IV/2015	100	2.500.000,00				2.500.000,00
4	CV. BERDIKARI	Pembuatan Rumah Gardu Kotabunan (DAU)	45/D.02/DINKES-BMT/SPK-FISIK/IV/2015	100	2.000.000,00				2.000.000,00
5	CV. JOANI	Pembangunan Ruang Perawatan Anan Puskesmas Nuangan (DAK)	35/D.02/DINKES-BMT/SPK/IX/2016	100	9.973.500,00				9.973.500,00
6	PT. PANA INDO ALKESTAMA	Pengadaan Alkes Set Ruang Rawat Paska Persalinan (DAK)	24/D.04/DINKES-BMT/KON-BARANG/VI/2018	100	2.400.000,00				2.400.000,00
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>									
1	CV. KARYA SEJAHTERA	Pembangunan Jalan Desa Bukaka (DAK)	88/D.03-DPU/BMT/BBM/KONT/VIII/2015	100	119.220.500,00				119.220.500,00
2	CV. BINTANG TIMUR	Pekerjaan Optimalisasi Air Bersih Desa Lanut (DAU)	33/D.03-DPU/BMT/BCK/SPK/IX/2016	100	9.965.000,00				9.965.000,00
3	CV. SINARINDO UTAMA	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SUTR, SUTM dan Travo Desa Tojid (DAU)	68/D.03-DPU/BMT/BCK/SPK/XI/2016	100	9.965.000,00				9.965.000,00
4	CV. MITRAH SEJATI	Peningkatan Jalan Lingkar SKPD (Lorong PU) (DAU)	30/D.11/DISPU-PRASKIM/BM/SP/VI/2021	100	48.746.982,00	17.14/04.0/000279/LS/1.03.1.0 4.0.00.01.0000/P.08/11/2022	48.746.982,00		-
5	CV. MITRAH SEJATI	Pembangunan Jalan Desa Motongkad (DAU)	31/D.11/DISPU-PRASKIM/BM/SP/VI/2021	100	41.436.073,00	17.14/04.0/000279/LS/1.03.1.0 4.0.00.01.0000/P.08/11/2022	41.436.073,00		-
6	CV. VALENSIA	Pembangunan Bronjong Sungai Lonslow Desa Motongkad Utara (DAU)	161/D.11/DISPU-PRASKIM/SDA/SPMK/XI/2022	100				3.737.287,00	3.737.287,00
7	CV. VALENSIA	Pembangunan Talud Sungai Buyat (DAU)	158/D.11/DISPU-PRASKIM/SDA/SPMK/XI/2022	100				2.317.003,00	2.317.003,00
8	CV. BINTANG STAR	Peningkatan Jalan Tutuyan-Inalom (DAK) (DAK)	52/D.11/DISPU-PRASKIM/BM/SP/VI/2022	79,22				486.149.040,00	486.149.040,00
9	CV. BINTANG STAR	Peningkatan Jalan Perkebunan Kopi Damatolan (DAU)	55/D.11/DISPU-PRASKIM/BM/SPK/VI/2022	57,17				111.950.633,38	111.950.633,38
10	CV. BINTANG STAR	Peningkatan Jalan Desa Tangaton (DAU)	54/D.11/DISPU-PRASKIM/BM/SP/VI/2022	84,22				63.781.198,07	63.781.198,07
11	CV. GARUDA SAKTI	Pembangunan Rumah Dinas Bupati (DAU)	179/D.11/DISPU-PRASKIM/CK/KONT/VI/2022	95,10				304.433.459,53	304.433.459,53
12	CV. BERDIKARI	Upgrading IPA Kapasitas 15 Liter/Detik SPAM Desa Nuangan (DAK) (DAK)	94/D.11/DISPU-PRASKIM/CK/KONT/VI/2022	95,20				334.322.099,98	334.322.099,98
13	CV. MITRA MARGA	Pembangunan Tugu Batas Wilayah Administrasi (DAU)	26/D.11/DISPU-PRASKIM/TR/KONT/IX/2022	50,57				80.245.877,31	80.245.877,31
<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>									
1	CV. TONAWAT	Rehabilitasi Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan Kotabunan (DAK)	D.16/05/SPK-PL/DPKKB/2022	100				4.986.581,00	4.986.581,00
<b>DINAS PERIKANAN</b>									
1	CV. ALFA	Pengadaan Gudang Sederhana Untuk Produksi Pakan Ikan (DAK)	08/SPK-PL/D.13-BMT/IX/2020	100	2.848.404,00				2.848.404,00
<b>DINAS PARIWISATA</b>									
1	CV. CITRA MANDIRI	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor (DAU)	03.B/D.14/DISBUDPAR-BMT/SPK/VI/2015	100	2.000.000,00				2.000.000,00
2	CV. MITRA PERMATA LESTARI	Pembangunan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Pantai Molobog (DAU)	D.03/DISPAR/SPK/PL/023/VII/2018	100	9.994.000,00				9.994.000,00
3	CV. JAYA LESTARI	Pembangunan Gapura Identitas Obyek Wisata Danau Mooat (DAK)	D.03/DISPAR/SPK/PL/016/V/2018	100	7.493.500,00				7.493.500,00
4	CV. ATALLAH JAYA	Pembangunan Ruang Ganti/Toilet Objek Wisata Tanjung Silar (DAK)	D.03/DISPAR/SPK/PL/024/VII/2018	100	8.746.500,00				8.746.500,00

W 102

NO	PERUSAHAAN	PEKERJAAN	NOMOR KONTRAK	FISIK (%)	UJPL 2013-2021	TERBAYARKAN DI TAHUN 2022		PENGAKUAN UJPL 2022	UJPL 2013 - 2022
						NOMOR SP2D	NILAI SP2D		
<b>DINAS PERTANIAN</b>									
1	CV. TIMUR RAYA	Pengadaan Pompa Air Tenaga Surya Bongkudal Selatan (DAK)	0052/D.07/DISTANAK/SPK/BM T/PL-FISIK/VIII/2015	100	6.240.000,00				6.240.000,00
<b>KECAMATAN MOTONGKAD</b>									
1	CV. SARANA CITRA MANDIRI	Pengadaan mebel Kantor (DAU)	002/SPK/401161/XI/2021	100	10.200.000,00	17.14/04.0/000051/LS/7.01.0.0 0.0.00.04.0000/P.08/12/2022	10.200.000,00		-
2	CV. SARANA CITRA MANDIRI	Pengadaan peralatan Kantor (DAU)	001/SPK/401161/XI/2021	100	36.298.000,00	17.14/04.0/000050/LS/7.01.0.0 0.0.00.04.0000/P.08/12/2022	36.298.000,00		-
<b>DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>									
1	CV. PSB	Pengadaan Jaringan Air Bersih Pasar Lanut (DAU)	006/Pej-PBJ/KJMKM-PSR/SPK/2016	100	4.000.000,00				4.000.000,00
2	CV. INDIRA	Pembangunan/Penataan Sarana dan Prasarana Halaman Pasar Iyok (DAU)	009/D.07/KONT.TENDER/DISD AGKOP-UKM/IX/2019	100	13.944.083,00				13.944.083,00
3	CV REAMAR PERKASA MANDIRI	Pembangunan/Revitalisasi Pasar (DID) (DID)	003/D.07/KONT.TENDER/DISD AGKOP-UKM/IX/2021	100	57.956.945,00	17.14/04.0/000299/LS/3.30.3.3 1.2.17.01.0000/P.08/12/2022	57.956.946,00		(1,00)
<b>J U M L A H</b>					<b>463.950.763,00</b>		<b>194.638.009,00</b>	<b>1.437.483.443,27</b>	<b>1.706.796.190,27</b>

Lampiran 27 Utang Jangka Pendek Lainnya Atas Saldo Kas Lainnya

No.	OPD	KAS LAINNYA TAHUN 2021		BERTAMBAH		BERKURANG		KAS LAINNYA 2022	
		URAIAN JURNAL	NILAI JURNAL	URAIAN JURNAL	NILAI JURNAL	URAIAN JURNAL	NILAI JURNAL		
1	UPTD Puskesmas Nuangan	Jurnal koreksi BPK RI atas sisa kas di Bendahara FKTP Motongkad (FKTD Motongkad melekat pada induk/PKM Nuangan) yang merupakan honor jasa pelayanan Analisis kesehatan bulan Oktober sd Desember 2021 belum dibayarkan ke penerima sampai dengan 31 Desember 2021 tercantum dalam BKU Puskesmas Motongkad per 31 Desember 2021. Saldo tunai PKM motongkad tsb, sebesar Rp1.179.792,70. Atas hal tersebut sudah dibayarkan ke penerima 19 Feb 2022	1.179.792,70			-	Jurnal Penyesuaian Kas Lainnya pada UPTD Puskesmas Nuangan atas sisa kas di Bendahara FKTP Motongkad (FKTP Motongkad melekat pada induk/PKM Nuangan) yang merupakan honor jasa pelayanan Analisis Kesehatan bulan Oktober sd Desember 2021 sudah terbayarkan pada Tanggal 19 Februari 2022	1.179.792,70	-
2	UPTD Puskesmas Motongkad	Jurnal koreksi BPK RI atas sisa kas di bendahara FKTP Motongkad per 31 Desember 2021 pada BRI Nomor Rek 36-01-001784-30-5, Saldo tersebut merupakan saldo pembukaan rekening menggunakan dana pribadi kepala Puskesmas Motongkad Tahun 2021 a.n Helmy Lasama sebesar Rp100.000,00	100.000,00			-	Jurnal Penyesuaian Kas Lainnya pada UPTD Puskesmas Nuangan atas sisa kas di Bendahara FKTP Motongkad (FKTP Motongkad melekat pada induk/Nuangan) Saldo tersebut merupakan saldo pembukaan rekening menggunakan dana pribadi kepala Puskesmas Motongkad Thn 2021 a.n Helmy Lasama	198,89	99.801,11
3	UPTD Puskesmas Moot	Jurnal koreksi BPK RI atas sisa kas di bendahara FKTP Moot per 31 Desember 2021 pada BRI Nomor Rek 36-01-001789-30-5 sebesar Rp247.200,00. Saldo tersebut merupakan dana dari BPJS sebagai berikut : 1) Tanggal 15/11/2021 Dana masuk dari BPJS Kesehatan-Aset DIS KC Tondano-BAN Rp68.600,00 Untuk Dana Kapitasi Puskesmas Moot Bulan November 2021. (RC BRI Bln November 2021 2) Tanggal 15/12/2021 Dana masuk dari BPJS Kesehatan-Aset DIS KC Tondano-BAN Rp178.600,00 Untuk Dana Kapitasi Puskesmas Moot Bulan Desember 2021. (RC BRI Bln Desember 2021).	247.200,00			-	Jurnal Penyesuaian Reklas Kas Lainnya pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP UPTD Puskesmas Moot Tahun 2022	247.200,00	-
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Jurnal Koreksi BPK RI - Kas Lainnya - mencatat saldo Kas (Rekening Pribadi Bendahara Pengeluaran) per 31 Desember 2022 yang merupakan Utang Pengganti Pulsa dan/atau Operasional Lainnya Pendamping Keluarga yang baru disalurkan di Tahun 2023	234.400.000,00			-	234.400.000,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Jurnal Koreksi BPK RI - Kas Lainnya - mencatat saldo Kas Tunai Dana BOS SMP N 1 Modayag per 31 Desember 2022 yang merupakan dana dari BOS Kinerja untuk kegiatan MGMP yang baru dilaksanakan di Tahun 2023	10.905.084,00			-	10.905.084,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Jurnal Koreksi BPK RI - Kas Lainnya - mencatat saldo Kas (Bukan Dana BOS) SDN 1 Buyat per 31 Desember 2022 pada Rekening BRI dengan Nomor Rekening 513901001368536	3.670.722,00			-	3.670.722,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Jurnal Koreksi BPK RI - Kas Lainnya - mencatat saldo Kas (Bukan Dana BOS) SMP Negeri 1 Kotabunan per 31 Desember 2022 pada Rekening BRI dengan Nomor Rekening 513901004125539	5.463.115,00			-	5.463.115,00
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Jurnal Koreksi BPK RI - Kas Lainnya - mencatat saldo Kas (Bukan Dana BOS) SMP Negeri Satap Matabulu per 31 Desember 2022 pada Rekening BRI dengan Nomor Rekening 513901004132536	2.230.071,00			-	2.230.071,00
<b>J U M L A H</b>			<b>1.526.992,70</b>		<b>256.668.992,00</b>		<b>1.427.191,59</b>		<b>256.768.793,11</b>

*Handwritten signature/initials*

Lampiran 28 Beban Penyusutan Dan Amortisasi Per SKPD

NO	OPD	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI			
		Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6.822.005.945,00	7.719.551.062,00	645.000,00	
2	DINAS KESEHATAN	14.382.634.118,00	4.191.688.074,00	655.475.455,00	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.267.660.670,00	1.423.204.039,00	53.770.135.859,00	
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	429.381.772,00	32.826.300,00	1.574.454.900,00	
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	123.851.758,00			
6	DINAS SOSIAL	55.701.473,00	216.912.552,00	270.500,00	
7	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	40.257.188,00			
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.279.269,00			
9	DINAS KETAHANAN PANGAN	26.024.887,00	5.358.862,00		
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	306.313.243,00	284.691.044,00		
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	172.896.876,00	104.753.822,00		
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.604.882,00	199.969.458,00	83.345.560,00	
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	348.158.286,00	246.561.634,00		
14	DINAS PERHUBUNGAN	212.845.280,00	71.368.585,00		
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	153.462.866,00	408.857.755,00		
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	132.766.033,00	212.347.004,00		
17	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	38.075.333,00	55.375.258,00		
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	48.088.218,00			
19	DINAS PERIKANAN	106.710.031,00	562.277.984,00	247.376.573,00	
20	DINAS PARIWISATA	908.054.856,00	354.480.724,00	336.345.040,00	
21	DINAS PERTANIAN	228.611.838,00	336.903.619,00	733.772.010,00	
22	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	483.330.969,00	1.663.519.768,00	9.886.620,00	
23	SEKRETARIAT DAERAH	2.399.187.651,00	1.082.170.674,00	39.941.000,00	
24	SEKRETARIAT DPRD	721.101.108,00	723.856.777,00		
25	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	192.348.160,00	427.766.746,00		
26	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	536.056.119,00	368.250.694,00	37.135.138,00	
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	88.218.951,00	204.345.400,00		

NO	OPD	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI			
		Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
28	INSPEKTORAT DAERAH	79.362.727,00			
29	KECAMATAN KOTABUNAN	45.201.123,00	19.717.821,00		
30	KECAMATAN TUTUYAN	46.588.043,00	63.543.600,00		
31	KECAMATAN NUANGAN	92.805.963,00	100.162.782,00		
32	KECAMATAN MOTONGKAD	63.895.018,00	97.352.700,00		
33	KECAMATAN MOOAT	88.892.634,00	98.626.000,00		
34	KECAMATAN MODAYAG	53.828.725,00	14.815.500,00		
35	KECAMATAN MODAYAG BARAT	34.675.366,00	59.986.500,00		
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.938.940,00			